



HENRY BERNSTEIN

DINAMIKA KELAS DALAM PERUBAHAN AGRARIA

EDISI REVISI

Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria



HENRY BERNSTEIN

Profesor kajian pembangunan di School of Oriental and African Studies, University of London, Inggris, dan *adjunct professor* di College of Humanities and Development Studies, China Agricultural University, Beijing, Tiongkok.

DINAMIKA KELAS DALAM PERUBAHAN AGRARIA

DINAMIKA KELAS DALAM PERUBAHAN AGRARIA

EDISI REVISI

HENRY BERNSTEIN

PENERJEMAH

Dian Yanuardy

Muntaza

Stephanus Aswar Herwinarko

PENYUNTING AHLI

Ben White

Gunawan Wiradi

Laksmi A. Savitri

Diterbitkan oleh:

insist
PRESS

Bekerjasama dengan:





INSISTPress adalah anggota Indonesian Society for Social Transformation (INSIST)

Buku Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria dalam edisi Indonesia ini diterbitkan oleh INSISTPress atas kerjasama dengan Inter-Church Organization for Development Cooperation (ICCO), International Institute of Social Studies (ISS), Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS), dan Sajogyo Institute.



Buku ini diterjemahkan dari edisi Inggris berjudul *Class Dynamics of Agrarian Change* (Fernwood Publishing dan Kumarian Press, 2010).

Koordinator Penerbitan: Laksmi A. Savitri

Penerjemah: Dian Yanuardy, Muntaza, Stephanus Aswar Herwinarko

Penyunting Ahli: Ben White, Gunawan Wiradi, Laksmi A. Savitri

Penyunting: Achmad Choirudin

Perwajahan Isi: Damar N. Sosodoro

Perancang Sampul: *Mirzmade Design Manufacture*

Ilustrasi Sampul: Andi Bhatara dan Giovanni Dessy Austriningrum

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria/Bernstein, Henry/Ed. Rev./

Yogyakarta: INSISTPress, Mei 2019

xxviii + 198 halaman/14 x 20 cm

ISBN 978-602-0857-83-1

Cetakan kedua, Desember 2020

Edisi revisi, cetakan pertama, Mei 2019

Cetakan pertama, Juni 2015

INSISTPress

Jalan Raya Kaliurang Kilometer 18

Padukuhan Sempu-Sambirejo, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem,

Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55582

Telepon/Faksimile: 085102594244

Surat elektronik: redaksi@insistpress.com

Tapakmaya: www.insistpress.com

DAFTAR ISI

PRAKATA EDISI REVISI — ix

TENTANG SERI KAJIAN PETANI DAN PERUBAHAN AGRARIA — xi

TERIMA KASIH — xv

PRAKATA ICCO — xvii

PRAKATA PENYUNTING ICAS — xxi

PRAKATA PENERJEMAH — xxv

PENDAHULUAN Ekonomi Politik Perubahan Agraria — 1

BAB 1 Produksi dan Produktivitas — 17

BAB 2 Asal Mula Kapitalisme dan
Perkembangan Awalnya — 35

BAB 3 Kolonialisme dan Kapitalisme — 53

BAB 4 Usaha Tani dan Budidaya Pertanian,
Lokal dan Global — 83

BAB 5 Globalisasi Neoliberal dan
Pertanian Dunia — 109

BAB 6 Pertanian Kapitalis dan Petani
Nonkapitalis? — 123

BAB 7 Pembentukan Kelas di Pedesaan — 141

BAB 8 Kompleksitas Kelas — 159

GLOSARIUM — 173

DAFTAR PUSTAKA — 183

INDEKS — 195

PRAKATA EDISI REVISI

EDISI awal buku terjemahan ini terbit pada 2015. Saat itu INSISTPress tidak mencetaknya sebanyak kebutuhan distribusi melalui toko buku reguler. Selain memang ceruk pasar buku ini terbatas, saat itu kebutuhan cetak diutamakan untuk keperluan peluncuran buku di Yogyakarta atas kerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Pertimbangan lainnya: proses penyuntingan akhir buku ini saat itu kami nilai belum paripurna. Cetakan terbatas itu kami harap bakal mengalirkan tanggapan dari para pembaca.

Kami kemudian menerima masukan atas ketaktepatan penerjemahan untuk keperluan penyempurnaan penyuntingan cetakan berikutnya. Redaksi INSISTPress menyadari betul bahwa penerjemahan buku kecil teoretis kelas dunia ini, sebagaimana diungkapkan oleh para penerjemah dalam pengantarnya, memang tidak gampang.

Pertama-tama, kami harus menghaturkan terima kasih atas kebaikan Profesor Ben White yang segera menyampaikan catatan-catatannya atas akurasi terjemahan buku ini. Ben White menemukan beberapa konsep penting yang perlu diubah, dan juga memberikan banyak sekali koreksi lain, baik penggunaan istilah maupun logika kalimat.

Selain memasukkan koreksi dari Ben White, dengan arahan dari Koordinator Penerbitan Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria edisi Indonesia, Laksmi A. Savitri, penyuntingan akhir edisi revisi ini juga mengubah beberapa istilah tertentu. Dengan pertimbangan signifikansi perubahan inilah edisi ini disebut sebagai “edisi revisi”, bukan sekadar “cetakan kedua”.

Penerbitan edisi revisi ini, sebagai bagian kerja dari penerjemahan buku-buku serial Kajian Petani dan Perubahan Agraria yang bergagasan besar, adalah upaya kecil kami untuk tetap turut berkontribusi pada kajian kritis seputar dunia agrikultura pedesaan. Terlebih ketika sektor pertanian di bangsa agraris ini semakin terpinggirkan padahal masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja mayoritas masyarakat pedesaan.

Selamat membaca.

Redaksi INSISTPress

TENTANG SERI KAJIAN PETANI DAN PERUBAHAN AGRARIA

BUKU Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria yang dikerjakan oleh Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS) adalah “buku kecil debat teoretis tentang isu besar”. Setiap buku dalam seri ini berisi penjelasan mengenai isu pembangunan tertentu yang didasarkan pada beberapa pertanyaan kunci. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud meliputi: Apa saja isu dan perdebatan terkini dalam suatu topik? Siapa saja sarjana/pemikir kunci dan praktisi kebijakan dalam topik itu? Bagaimana posisi tersebut muncul dan berkembang dari waktu ke waktu? Bagaimana alur masa depan yang mungkin terjadi? Apa saja materi yang menjadi rujukan kunci? Mengapa penting bagi para pekerja organisasi nonpemerintah, aktivis gerakan sosial, lembaga bantuan pembangunan pemerintah dan badan donor nonpemerintah, pelajar, akademisi, peneliti, dan ahli kebijakan untuk melibatkan diri secara kritis dengan poin-poin kunci yang dijelaskan dalam buku-buku seri ini? Setiap buku menggabungkan pembahasan teoretis dan berorientasi kebijakan dengan contoh-contoh empiris dari latar lokal dan nasional yang berbeda.

Dengan menggunakan tema besar “perubahan agraria”, inisiatif ini berusaha menghubungkan para sarjana, aktivis, dan praktisi pembangunan dari berbagai disiplin dan dari semua bagian dunia. “Perubahan agraria” di sini merujuk pada pengertian terluas, mengacu pada dunia pertanian-pedesaan-agraria yang tidak terputus dari, dan mempertimbangkan konteks, sektor-sektor dan perwujudan geografis lain semisal sektor industri dan perkotaan. Fokusnya adalah memberi kontribusi terhadap pemahaman kita mengenai berbagai dinamika “perubahan”. Artinya, kita

memainkan peran tidak hanya dalam menafsir (ulang) dunia agraria dengan berbagai cara, tetapi juga ikut mengubahnya—dengan bias yang jelas bagi kelas pekerja, bagi kelompok miskin. Dunia agraria yang telah diubah secara mendalam oleh globalisasi neoliberal masa kini menuntut cara-cara baru untuk memahami kondisi kelembagaan dan struktural, serta visi baru mengenai bagaimana mengubahnya.

ICAS adalah *komunitas* global para sarjana, praktisi pembangunan, dan aktivis yang berpemahaman sama dan bekerja pada isu-isu agraria. ICAS adalah *ranah pijak bersama*, ruang bersama bagi para sarjana, praktisi pembangunan, dan aktivis gerakan yang kritis. ICAS adalah inisiatif pluralis yang memungkinkan pertukaran pandangan dari perspektif-perspektif ideologi progresif yang berbeda. ICAS merespons kebutuhan akan inisiatif yang membangun dan berfokus pada *jaringan*—di kalangan akademisi, praktisi kebijakan pembangunan, dan aktivis gerakan sosial; antara Utara dan Selatan, serta Selatan dan Selatan; antara sektor pertanian pedesaan dan sektor industri perkotaan; juga antara ahli dan bukan ahli. ICAS mendorong untuk *saling memperkuat* produksi pengetahuan secara bersama dan berbagi pengetahuan dengan *saling menguntungkan*. ICAS mendorong *pemikiran kritis*, yang berarti asumsi-asumsi konvensional dipertanyakan, proposisi-proposisi populer ditelaah secara kritis, dan cara-cara baru untuk mempertanyakan masalah disusun, diusulkan, dan ditindaklanjuti. ICAS mendorong *penelitian terlibat dan pembelajaran*; menekankan pada penelitian dan pembelajaran yang menarik secara akademis dan relevan secara sosial, serta menyiratkan keberpihakan pada kelompok miskin.

Seri buku ini secara keuangan didukung oleh Inter-Church Organization for Development Cooperation (ICCO), Belanda. Penyunting seri ini adalah Saturnino M. Borrás Jr., Max Spoor, dan Henry Veltmeyer. Serangkaian buku dalam seri ini tersedia dalam berbagai bahasa.

*Mengenang orangtua saya:
Esther dan Harry*

TERIMA KASIH

PERTAMA-TAMA, terima kasih kepada Saturnino M. Borras (Jun Borras) atas imajinasi dan energinya dalam membangun seri “buku kecil dengan ide besar” tentang perubahan agraria, dan atas undangannya kepada saya untuk menulis judul pertama seri ini. Saya harap buku ini berkontribusi pada debat produktif di antara buku-buku yang direncanakan terbit dalam seri ini.

Saya berutang banyak kepada rekan yang telah lama bekerja sama dengan saya: Terence J. Byres (Terry Byres). Kami bersama-sama menyunting *Journal of Peasant Studies* selama 1985–2000 dan kemudian memulai *Journal of Agrarian Change* pada 2001. Kedua jurnal ini dipersembahkan untuk menjelajahi kajian mengenai dinamika kelas dalam perubahan agraria di masa lalu maupun masa kini.

Buku ini menggambarkan periode panjang pemikiran terkait isu yang dibahas, periode-periode di mana saya memperoleh manfaat dari karya banyak orang. Saya tidak akan menyebutkan mereka satu per satu di sini. Sebagian, meski tidak semua, muncul di dalam teks dan daftar pustaka. Dalam menulis buku ini, saya menghadapi tantangan dalam memilih, meringkas, dan menempa penyajiannya. Hasil akhirnya tentu saja jauh lebih baik setelah diberi komentar oleh para sahabat: Elena Baglioni, Jairus Banaji, Terry Byres, Jens Lerche, dan Tony Weis. Tidak semua pihak akan setuju dengan apa saja yang ditulis dalam buku ini. Karena itu, saya adalah satu-satunya penanggung jawab isi buku ini.

Henry Bernstein

PRAKATA ICCO

INTER-CHURCH Organization for Development Cooperation (ICCO) bekerjasama dengan Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS) untuk menerbitkan Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria.

ICCO bekerja untuk mewujudkan dunia yang berkeadilan tanpa kemiskinan. Dunia yang membuka ruang bagi orang-orang untuk bisa mengklaim dan mendapatkan hak mereka di dalam kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip utama bagi kami adalah penghidupan yang terjamin dan berkelanjutan serta kehidupan yang berkeadilan dan bermartabat bagi semua. Pertanian dan sistem pangan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita ini. ICCO bersama ICAS memahami bahwa pemikiran tentang pedesaan yang menjadi arus utama saat ini berkontribusi terhadap kemiskinan, malnutrisi, pelanggaran hak (hak atas pangan dan hak-hak lain), dan pemanfaatan tanah dan air yang tidak berkelanjutan sehingga berujung pada polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pemikiran arus utama semacam itu tidak akan menuntun pada sistem agraria alternatif yang berkelanjutan. ICCO memahami bahwa dibutuhkan lebih banyak penelitian dan tukar pendapat di antara para ilmuwan, praktisi, dan pembuat kebijakan guna menemukan jawaban-jawaban atas berbagai persoalan tersebut. “Jawaban-jawaban” berarti tidak hanya satu jawaban. Dunia sudah tidak bisa lagi menyederhanakan masalah dan mengembangkan satu solusi yang “cocok untuk semua”, sehingga berujung pada “senjata pamungkas” yang cenderung salah sasaran. Kita membutuhkan solusi yang majemuk, bisa beradaptasi pada konteks lokal, dan dapat menggerakkan pemikiran para pembuat kebijakan, aktivis, dan pelaku-pelaku lain di berbagai sektor. Kita membutuhkan berbagai masukan da-

ri mereka yang menderita karena kelaparan, tergusur dari tanah mereka, dan tetap memiliki gagasan dan energi untuk memperbaiki penghidupan dan mewujudkan hak-hak asasi manusia.

Tipe-tipe sistem agraria yang didukung oleh ICCO untuk berkontribusi mewujudkan visi kami di antaranya pertanian yang mampu memberi makan orang setempat, menyumbang pada nilai tambah secara lokal, dan membangun lingkungan yang lestari. ICCO juga mendukung sistem pertanian yang menempatkan manusia sebagai inti dan mendukung penentuan nasib sendiri, pemberdayaan dan tata kelola petani untuk hidup mereka sendiri, tetapi juga bernegosiasi dengan konsumen. Sistem pertanian seperti ini memungkinkan petani perempuan dan laki-laki untuk mengorganisir diri sesuai dengan kebutuhan dan membuat pilihan-pilihan sendiri. Kondisi itu dibangun di atas karakteristik lingkungan setempat (tanah, air, dan keanekaragaman hayati). Kami juga memahami bahwa sistem pertanian terikat dengan sektor-sektor lain dan tidak mungkin bertahan dalam isolasi, sebagaimana dapat kita lihat dalam migrasi (ulang) dari desa ke kota dan sebaliknya, juga dalam perdagangan dan pasar. Di atas segalanya, kita melihat orang yang tinggal di pedesaan yang seharusnya bisa menentukan pilihan sendiri dan disokong oleh lingkungan politik, sosial, dan ekonomi yang sehat.

Untuk bisa mewujudkan berbagai hal tersebut, akses dan kontrol atas sumberdaya produktif—seperti air, tanah, materi genetik (benih dan bibit)—yang berkeadilan, stabil, dan dapat diandalkan menjadi sangat penting. Berkaitan dengan hal ini, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, ICCO mendukung produsen skala kecil untuk terlibat dalam pengambilan keputusan tentang penghidupan mereka. ICCO juga bekerja untuk relasi kuasa yang lebih setara antara sistem pertanian dan sistem-sistem yang lain. ICCO memahami keterkaitan antara sistem pertanian dan pangan di Utara dan Selatan. Kami pun memahami bahwa keterhubungan

itu berserta kuasanya yang timpang perlu ditantang agar upaya memberi makan dunia bisa terus berlanjut.

Sistem-sistem agraria alternatif ini padat pengetahuan. Kita memerlukan kajian-kajian relevan yang dapat mendukung dan merangsang perkembangan lanjutan tipe sistem agraria ini dan mendukung perubahan agraria yang berpihak pada golongan miskin. ICCO bekerja untuk dan menuju pencapaian keadilan, demokrasi, dan keberagaman dalam sistem-sistem agraria dan pangan. Guna mewujudkan hal ini, alat-alat analisis dan kerangka kerja sangat dibutuhkan bagi aksi-aksi kolektif dan kerja advokasi yang didukung informasi memadai. Dalam konteks inilah kami menemukan pentingnya seri buku ini bagi ICCO, mitra ICCO di seluruh dunia, dan pembaca umum.

Utrecht, Februari 2015

PRAKATA PENYUNTING ICAS

BUKU *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria* karya Henry Bernstein adalah buku pertama dari Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria yang digagas Initiatives in Critical Agrarian Change (ICAS). Setidaknya ada dua alasan penting mengapa seri ini dimulai dengan karya Henry: kepentingan strategis akan adanya lensa analisis ekonomi politik agraria dalam kajian agraria kontemporer dan buku yang memiliki kualitas kelas dunia. Buku ini membentuk kerangka dan menaikkan standar. Buku ini membantu memastikan bahwa buku-buku berikutnya dalam seri ini relevan secara politik dan teliti secara ilmiah. Pengantar tentang seri ini akan menempatkan buku ini dalam sudut pandang yang berhubungan dengan proyek intelektual dan politik ICAS.

Sampai saat ini, kemiskinan global masih dapat disebut sebagai fenomena pedesaan, dengan rakyat miskin pedesaan menyumbang tiga per empat dari seluruh penduduk miskin dunia. Karena itu, tantangan untuk mengakhiri kemiskinan dunia, yang merupakan isu multidimensi (ekonomi, politik, sosial, kultural, gender, lingkungan, dan lain-lain), bertalian erat dengan perlawanan rakyat pekerja di pedesaan terhadap sistem yang menyebabkan dan terus-menerus mereproduksi kemiskinan pedesaan. Memperhatikan pembangunan pedesaan tetap menjadi isu penting dalam kajian pembangunan, tetapi itu tidak berarti mengabaikan isu-isu perkotaan. Tantangannya adalah bagaimana memahami hubungan antara kedua isu ini dengan lebih baik. Pemahaman tersebut diperlukan karena jalan keluar dari kemiskinan pedesaan yang dibuat melalui kebijakan neoliberal dan upaya-upaya dari lembaga keuangan dan lembaga pembangunan internasional nyaris hanya menggantikan kemiskinan pedesaan dengan kemiskinan perkotaan.

Banyak dari lembaga-lembaga (seperti World Bank) yang menyebarkan pemikiran arus utama dalam isu agraria itu punya sumber keuangan untuk mendominasi penelitian di bidang ini serta menghasilkan dan menyebarkan publikasi yang berorientasi kebijakan. Para pemikir kritis menghadapi tantangan pengarusutamaan ini dengan berbagai cara, tetapi usaha mereka biasanya terbatas pada lingkaran akademis, dengan jangkauan dan pengaruh yang terbatas.

Karena itu, tetap ada kebutuhan mendesak bagi para akademisi (guru, sarjana, dan pelajar), aktivis gerakan sosial, dan praktisi pembangunan di Selatan dan Utara terhadap buku kajian agraria kritis yang akurat secara ilmiah tetapi mudah dipahami, relevan secara politik, berorientasi kebijakan, dan tidak mahal. Untuk merespons kebutuhan ini, ICAS meluncurkan Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria. Idennya adalah menerbitkan buku kecil debat teoretis yang menjelaskan isu pembangunan tertentu berdasar pada pertanyaan-pertanyaan kunci: Apa saja isu dan perdebatan terkini dalam suatu topik? Siapa saja sarjana/pemikir kunci dan praktisi kebijakan dalam topik itu? Bagaimana posisi tersebut muncul dan berkembang dari waktu ke waktu? Bagaimana alur masa depan yang mungkin terjadi dan apa saja materi yang menjadi rujukan kunci? Mengapa penting bagi para pekerja organisasi nonpemerintah, aktivis gerakan sosial, lembaga bantuan pembangunan pemerintah dan badan donor nonpemerintah, pelajar, akademisi, peneliti, dan ahli kebijakan untuk mengaitkan diri secara kritis dengan poin-poin kunci itu? Setiap buku akan menggabungkan pembahasan yang teoretis dan berorientasi kebijakan dengan contoh-contoh empiris dari latar lokal dan nasional yang berbeda.

Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria akan tersedia dalam beberapa bahasa, awalnya setidaknya dalam tiga bahasa sebagai tambahan dari edisi bahasa Inggris: Tionghoa, Spanyol, dan Portugis. Edisi bahasa Tionghoa adalah hasil kerjasama dengan

College of Humanities and Development, China Agricultural University, Beijing, dikoordinasi oleh Ye Jingzhong; edisi bahasa Spanyol adalah hasil koordinasi dengan Program Doktorat Kajian Pembangunan, Autonomous University of Zacatecas, Meksiko, dikoordinasi oleh Raúl Delgado Wise; dan edisi bahasa Portugis dengan State University of Sao Paulo, Presidente Prudente (UNESP), Brasil, dikoordinasi oleh Bernardo Mançano Fernandes.

Mengingat konteks dan tujuan dari Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria di atas, kami merasa sangat senang dan terhormat dapat menerbitkan karya Henry Bernstein sebagai buku pertama dalam seri ini: buku ini benar-benar tepat dari segi tema, keterbacaan, relevansi, dan ketelitian. Kami bersemangat dan optimis mengenai masa depan seri ini.

*Saturnino M. Borras Jr., Max Spoor, dan Henry Veltmeyer
Penyunting ICAS untuk Seri Kajian Petani
dan Perubahan Agraria*

PRAKATA PENERJEMAH

DI kalangan penekun studi agraria di Indonesia, nama Henry Bernstein memang tidak masuk dalam jajaran ahli Indonesia (*Indonesianist*) peneliti pedesaan dan agraria; ia dikenal bukan karena pernah meneliti di negeri ini. Dengan pengalaman penelitian yang ekstensif di Afrika Selatan dan belahan dunia lain, ia telah memberikan kontribusi yang sangat bermakna bagi pengembangan pengetahuan tentang perubahan agraria. Melalui lensa Marxian, ia dengan konsisten dan secara bernuansa telah memungkinkan pembacaan berbasis analisis kelas yang teliti terhadap proses-proses partikular dan universal dalam lintasan perubahan agraria global. Posisi Bernstein dan rekan sejawatnya, Terence J. Byres, sebagai penyunting yang mengawali dan menggawangi lahirnya *Journal of Peasant Studies* dan *Journal of Agrarian Change* berhasil menyediakan wahana produksi dan akumulasi pengetahuan tentang pedesaan dan perubahan agraria, yang sampai hari ini masih diakui memiliki kualitas akademis terbaik di bidangnya. Miskinnya penggunaan perspektif ekonomi politik Marxian di Indonesia untuk menjelaskan dan memahami perubahan agraria dan pedesaan, kecuali melalui produksi karya akademis di awal Revolusi Hijau melalui studi-studi Survei Agro Ekonomi pada pertengahan 1960-an sampai 1980-an, menjadi kesempatan besar untuk menyebarkan alat analisis yang ditawarkan oleh Bernstein guna memperkaya studi agraria Indonesia. Alasan itulah yang mendasari dimulainya penerjemahan buku ini.

Gagasan untuk menerjemahkan buku *Class Dynamics of Agrarian Change* karya Henry Bernstein sebenarnya sudah dimulai sejak 2011. Dalam versi bahasa Inggris, buku ini telah menjadi bahan diskusi oleh sekelompok orang yang terdiri atas para aktivis, peneliti, dan

dosen dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mendapatkan beasiswa untuk mengikuti “Tailor-Made Training on Agrarian Transition in the 21st Century” di Institute of Social Studies (ISS), Den Haag. Setelah mengulas dan mendiskusikannya, muncul dorongan untuk menerjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Bersama dengan Laksmi A. Savitri, Direktur Sajogyo Institute waktu itu, kami membahas pentingnya penerjemahan buku ini.

Kesempatan untuk mendiskusikan proses penerbitan buku ini dalam bahasa Indonesia semakin terbuka lebar ketika kami mengikuti kursus di ISS, sehingga memungkinkan untuk berdiskusi langsung dengan pengelola Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS), Saturnino M. Borras Jr. (Jun Borras) dan Ben White. Waktu itu juga terdapat diskusi dengan sang penulis, Henry Bernstein, dalam kesempatannya menghadiri kolokium bertajuk “Agrarian Transformation and Surplus Population in the Global South” di ISS.

Dalam diskusi-diskusi tersebut, kami menyadari adanya kendala-kendala utama dalam rencana penerjemahan buku ini, salah satunya adalah banyaknya istilah ekonomi politik dan kajian agraria yang belum tentu dapat dicari padanannya dalam bahasa Indonesia, juga sifat dari buku ini yang secara teoretis padat dan koheren. Dengan nada bercanda, Jun Borras menyatakan, “Bahkan para profesor Tiongkok sekalipun bercucuran keringat menerjemahkan buku ini.”

Proses penerjemahan dan penerbitan buku ini memang memakan waktu cukup panjang, sekitar dua tahun. Penerjemahan dilakukan oleh Dian Yanuardy, Muntaza, dan Stephanus Aswar Herwinarko. Untuk mengatasi masalah perbedaan penggunaan gaya bahasa dan istilah, proses penyelarasan penerjemahan seluruhnya dilakukan oleh Dian Yanuardy. Setelah draf pertama terjemahan selesai, kami meminta seorang pakar studi agraria Indonesia, Gunawan Wiradi, untuk menjadi penyunting ahli guna

mendiskusikan dan memeriksa naskah terjemahan. Ahmad Nashih Luthfi juga memeriksa dan melakukan perbaikan atas bagian-bagian yang dianggap masih janggal. Selanjutnya, di bagian akhir proses penerbitan, Laksmi A. Savitri membantu fase akhir penyuntingan dengan memberikan masukan dan perbaikan yang sangat berharga.

Beberapa istilah bahasa Inggris di buku ini memang tidak mudah untuk diterjemahkan. Perbedaan istilah “*agriculture*” dan “*farming*”, misalnya, memaksa kami untuk bolak-balik menggunakan versi penerjemahan yang berbeda, memeriksa dan mengubah kembali. Begitu juga dengan berbagai kerumitan penerjemahan, seperti kami temui dalam istilah “*enclosure*”, “*dispossession*”, “*peasant agriculture*”, “*fund of rent*”, dan lain-lain, yang membuat kami berpikir keras untuk mencari padanan yang tepat.

Untuk kata “*agriculture*”, kami secara bergantian menggunakan istilah “pertanian” dan “budidaya pertanian”, dengan merujuk pada definisi “*agriculture*” dalam Oxford Dictionary: “*the science or practice of farming.*” Pemilihan istilah “pertanian” dan “budidaya pertanian” mempertimbangkan alasan bahwa, dalam istilah “*agriculture*”, sudah terdapat penggunaan pengetahuan dan teknologi dalam usaha tani. Sebaliknya, untuk istilah “*farming*”, kami menggunakan istilah “bertani” dan “usaha tani”, yang mengisyaratkan suatu cara dan laku bertani yang belum sering digabungkan dengan peternakan dan lebih dekat dengan istilah “cocok tanam”. Sementara itu, untuk istilah “*enclosure*” dan “*dispossession*”, digunakan istilah “perampasan”, meskipun istilah tersebut sering diterjemahkan sebagai “pemagaran”. Istilah “perampasan” digunakan untuk mempermudah pemahaman pembaca. Kami mesti menjelaskan bahwa “perampasan” adalah tindakan penggunaan kekuatan ekstraekonomi yang dipakai untuk mengubah sifat dasar kepenguasaan tanah, yakni dari tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh umum menjadi tanah yang dimili-

ki secara privat. Sementara itu, untuk istilah “*fund of rent*”, daripada menggunakan istilah “dana sewa”, kami menerjemahkannya menjadi “biaya renten” supaya nuansa eksploitasi dan penghisapan yang melekat dalam istilah tersebut dapat lebih terasa.

Kami berterima kasih atas bantuan sejumlah pihak yang membuat penerbitan buku ini menjadi mungkin, terutama kepada Jun Borrás, Ben White, dan Noer Fauzi Rachman (Sajogyo Institute); juga kepada penyunting ahli, Gunawan Wiradi dan Laksmi A. Savitri. Ahmad Nashih Luthfi memberikan perbaikan atas naskah terjemahan awal. Kerja keras penerbit INSISTPress dan semua pihak, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, turut mendorong keberhasilan penerbitan buku ini.

Akhirnya, segala ketidaksempurnaan dalam proses penerjemahan dan penerbitan buku ini menjadi tanggung jawab kami. Selamat membaca!

Bogor, 23 Juni 2014
Dian Yanuardy

PENDAHULUAN

Ekonomi Politik Perubahan Agraria

EKONOMI politik agraria, sebagaimana diuraikan dalam pernyataan misi *Journal of Agrarian Change*, menyelidiki “relasi sosial dan dinamika produksi dan reproduksi, properti dan kekuasaan dalam struktur kelas agraria dan proses-proses perubahannya secara historis maupun kontemporer.” Untuk memahami perubahan agraria dalam dunia modern, perlu analisis yang berpusat pada kapitalisme dan perkembangannya. Kapitalisme yang saya maksudkan adalah sistem produksi dan reproduksi yang didasarkan pada relasi sosial antara kapital dan tenaga kerja: kapital mengeksploitasi buruh guna mengejar laba dan akumulasi, sementara buruh harus bekerja untuk kapital agar bisa bertahan hidup. Di luar definisi awal dan umum ini, dan bahkan di dalamnya, terdapat banyak kompleksitas dan tantangan yang akan digali dan dijelaskan dalam buku ini.

Pertama-tama, saya ingin memberikan gambaran situasi, memperkenalkan pendekatan, dan mengidentifikasi isu-isu kunci yang dibahas.

Gambaran Besar: Usaha Tani dan Populasi Dunia

Tony Weis (2007: 5) menyatakan bahwa “asal mula ekonomi pangan global kontemporer dapat ditelusuri dari serangkaian perubahan revolusioner yang terjadi selama sekian milenium, sekian abad, dan sekarang terpampat hanya dalam hitungan dekade.”

Milenium – Kira-kira sejak 12.000 tahun yang lalu, sejumlah bentuk usaha tani menetap telah menjadi fondasi material masyarakat. Acuan yang menyatakan bahwa perubahan revolusioner terjadi selama sekian milenium menunjukkan bahwa proses tersebut biasanya berlangsung secara bertahap, sekalipun akibat akibat susulannya bersifat mendalam. Karena itu, perubahan ini sering disebut sebagai perubahan “evolusioner”. Peradaban agraris bisa ditemukan hingga mencakup sebagian besar masyarakat di Asia, wilayah-wilayah “tergarap” di Afrika Utara dan Eropa, dan sebagian wilayah yang biasanya berpenduduk lebih jarang di Afrika Sub-Sahara dan Benua Amerika. Dalam masyarakat agraris ini mayoritas penggarap tanah adalah petani kecil. Pada 1750, mereka menopang populasi dunia yang berjumlah sekitar 770 juta.

Abad – Sejak paruh kedua abad XVIII, kemunculan dan persebaran industrialisasi mulai membentuk suatu perekonomian dunia yang baru, “menyegerakan perkembangan sejarah”, dan mentransformasi usaha tani. Pada 1950, populasi dunia tumbuh hingga 2,5 miliar.

Dekade – Populasi dunia tumbuh hingga 6 miliar pada 2000 (dan diyakini akan mencapai sekitar 9 miliar pada 2050). Kondisi ini menyiratkan peran dari peningkatan produktivitas pertanian yang berhasil mengimbangi laju pertumbuhan populasi. Pada 2008, untuk pertama kali populasi global di perkotaan menyamai populasi pedesaan, bahkan mulai melampauinya.

Dengan demikian, satu bagian dari gambaran besar tersebut adalah pertumbuhan produksi pangan dan populasi dunia, terutama sejak 1950-an. Kedua hal itu adalah aspek dari perkembangan kapitalisme dan perekonomian dunia yang dibentuknya. Bagian lain dari gambaran tersebut adalah ketimpangan global berskala besar dalam hal pendapatan dan jaminan mata pencaharian, serta ketimpangan dalam hal kualitas hidup dan harapan hidup, termasuk ketimpangan produktivitas. Di satu sisi, sebenarnya pro-

duksi sudah lebih dari cukup untuk memberi makan penduduk dunia. Di sisi lain, banyak sekali orang kelaparan hampir setiap waktu atau bahkan sepanjang waktu.

Siapakah Petani Saat Ini?

Beberapa Angka

Begitu negara-negara menempuh industrialisasi, proporsi tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan. Pada 2000, proporsi total tenaga kerja pertanian di Amerika Serikat sebesar 2,1%; di Uni Eropa (dengan lima belas negara anggota) sebesar 4,3%; di Jepang 4,1%; serta di Brasil dan Meksiko berturut-turut 16,5% dan 21,5%. Di Tiongkok, proporsi dari total tenaga kerja pertanian mengalami penurunan dari 71% pada 1978 menjadi kurang dari 50%, atau masih lebih dari 400 juta orang. Dengan penambahan 260 juta orang di India dan 200 juta di Afrika yang bekerja dalam usaha tani—kedua kasus tersebut mencakup sekitar 60% dari “populasi yang aktif secara ekonomi”—jelas bahwa mayoritas populasi agraria dunia sekarang berada di Dunia Ketiga, atau negara-negara Selatan.

Gambaran ini diperkuat oleh perkiraan dari Food and Agriculture Organization bahwa saat ini “pertanian menyediakan pekerjaan bagi 1,3 miliar orang di dunia, 97% dari mereka ada di negara-negara berkembang” (World Bank 2007: 77).¹ Sebagian dari 1,3 miliar itu memenuhi syarat sebagai “petani”, tergantung dari jenis petani seperti apa mereka, di mana, dan *kapan* bertani: Apakah selama masa-masa puncak dalam kalender pertanian tahunan saja? Ketika curah hujan baik atau buruk? Waktu pasaran baik atau buruk? Dengan kata lain, tidak semua petani adalah petani sepanjang waktu. Banyak orang desa tidak memenuhi syarat sebagai “petani” dalam pengertian yang kaku karena mereka tidak punya tanah atau alat-alat lain untuk bertani, atau terlibat hanya dalam “usa-

ha tani marginal”. Mereka mungkin mayoritas di sebagian wilayah pedesaan selama rentang waktu tertentu atau sepanjang waktu. Peter Hazell *et al.* (2007: 1) menyatakan bahwa usaha tani marginal “tidak dapat menyediakan pekerjaan atau pendapatan yang cukup sebagai mata pencaharian utama dalam rumah tangga.” Hazel *et al.* (2007) menunjukkan, di India, sebagai contoh, istilah “usaha tani marginal” digunakan untuk usaha tani dengan lahan kurang dari 1 hektare. Usaha tani semacam itu membentuk 62% dari seluruh penguasaan tanah di India, tetapi hanya menguasai 17% dari seluruh lahan garapan.

Istilah dan Konsep: Petani dan Petani Skala Kecil

Istilah seperti “petani” (*peasant*), “petani kecil” (*small farmer*) atau “petani skala kecil” (*small-scale farmer*), dan “petani keluarga” (*family farmer*) kerap kali digunakan secara tertukar sehingga membingungkan. Masalah ini bukan semata persoalan semantik, melainkan memiliki perbedaan dan persoalan analitis yang penting. Istilah “petani” biasanya merujuk pada usaha tani rumah tangga yang dikelola untuk reproduksi sederhana, terutama untuk menyediakan pangan sendiri (subsistensi). Pada definisi dasar ini sering ditambahkan anggapan mengenai ciri-ciri petani. Misalnya, solidaritas, saling mendukung secara timbal balik (resiprositas), egalitarianisme, serta keterikatan pada nilai-nilai kehidupan yang berbasis rumah tangga, komunitas, kekerabatan, dan tempat. Berbagai definisi dan penggunaan istilah “petani” (serta “petani skala kecil” dan “petani keluarga”) mempunyai elemen dan tujuan normatif yang kuat: “berpihak kepada petani” (Williams 1976) melawan segala kekuatan yang menghancurkan atau meruntuhkan petani dalam struktur dunia modern (kapitalis). Dalam pandangan saya, istilah “petani” (*peasant*) dan “kepetanian” (*peasantry*) sebaiknya dibatasi hanya untuk keperluan analisis ketimbang penggunaan yang bersifat normatif, serta digunakan pada dua jenis

kondisi historis: masyarakat prakapitalis yang kebanyakan adalah petani keluarga skala kecil (simak Bab 1) dan proses transisi menuju kapitalisme (simak Bab 2 dan Bab 3).

Seiring perkembangan kapitalisme, karakter sosial usaha tani skala kecil berubah. *Pertama*, “petani” menjadi produsen komoditas skala kecil (*petty commodity production*). Mereka harus memproduksi kebutuhan hidup (subsistensi) mereka dengan cara bergabung dalam struktur pembagian kerja yang lebih luas dan terintegrasi ke pasar. “Komodifikasi subsistensi” ini menjadi dinamika sentral dalam perkembangan kapitalisme, sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2. *Kedua*, produsen komoditas berskala kecil ini tunduk pada proses diferensiasi kelas. Kerangka historis dari proses ini disajikan dalam Bab 2 hingga Bab 5, sementara landasan teoretisnya ditelaah lebih lanjut dalam Bab 6 hingga Bab 8. Saya berpendapat, sebagai hasil dari diferensiasi kelas, “petani” atau “petani keluarga” tidak dapat dilihat sebagai satu “kelas” tunggal, melainkan terpilah menjadi kelas-kelas petani kapitalis skala kecil, produsen komoditas berskala kecil yang relatif sukses, dan buruh tani.

Terkait ukuran, sebagian sumber menyebutkan “unit usaha tani kecil” sebagai usaha tani yang menggarap lahan kurang dari 2 hektare. Sementara sumber lain menggambarkan unit usaha tani kecil di negara-negara Selatan dari aspek tingkat penggunaan teknologi yang rendah, ketergantungan pada tenaga kerja keluarga, dan berorientasi “subsistensi” (ciri-ciri yang mirip “petani”). Dengan demikian, satu kriteria bersifat spasial (luasan lahan), sementara kriteria lain bersifat sosiologis (jenis pertanian). Kedua kriteria ini bisa berbeda menurut kondisi usaha tani masing-masing:

Satu unit usaha tani berlahan 10 hektare di banyak kawasan Amerika Latin bisa jadi lebih kecil dari angka rata-rata nasional, sebagian besar unit usaha tani itu diolah oleh tenaga

kerja keluarga, dan memproduksi terutama untuk subsistensi Sebaliknya, unit usaha tani dengan ukuran yang sama pada lahan beririgasi di Bengal Barat bisa jadi jauh lebih luas dari ukuran rata-rata di wilayah tersebut, unit pertanian itu mungkin banyak mempekerjakan buruh upahan, dan mampu memproduksi surplus yang signifikan untuk dijual. (Hazell *et al.* 2007: 1)

Akhirnya, istilah “usaha tani keluarga” sering kali mencampuradukkan antara lahan pertanian yang *dimiliki* keluarga, *dikelola* keluarga, atau dikerjakan oleh *tenaga kerja* keluarga. Sebagai usaha tani keluarga mengombinasikan ketiga ciri tersebut, sebagian yang lain tidak, sebagaimana akan saya jelaskan lebih lanjut dalam Bab 6.

Potret dari Selatan

Melampaui statistik, definisi, dan konsep yang telah dibahas sejauh ini, lima nukilan cerita berikut ini menggambarkan sketsa pertanian di India bagian utara, Bangladesh, Tanzania, Brasil, dan Ekuador.

Dengan strategi baru bisnis pertanian padat modal, yang diperkenalkan ke wilayah pedesaan pada akhir 1960-an, pemerintahan Kongres memiliki sarana-sarana untuk merealisasikan mimpi imperial: pertanian progresif kalangan elite. Dalam waktu satu atau dua tahun ... seluruh distrik mampu menghasilkan panen bermutu dari lahan bekas milik zamindar² ... dengan penguasaan seluas 30, 40, 50, 100 acre³, pelipatgandaan lahan gandum Meksiko dan lahan padi Filipina terbaru, sumur yang mengalirkan air 16.000 galon⁴ setiap jam, yang sebagian besar dengan mempekerjakan buruh berupah sangat murah, serta

pemakaian traktor, gudang yang penuh pupuk, dan gudang pendingin. (Whitcombe 1980: 179)

Bagi hasil tidak lebih baik. Saya mengerjakan semua, dan ketika masa panen, Mahmud Haj mengambil separuh hasil panen. Ketika saya bekerja upahan, setidaknya saya membawa pulang nasi setiap malam, sekalipun itu tidak mencukupi. Tetapi, ketika saya menggarap lahan dengan bagi hasil, saya harus menunggu sampai panen untuk menikmati hasilnya. Sementara itu, saya tidak punya sapi atau bajak. Saya harus menyewa dari tetangga. Ongkosnya mahal—saya membajak tanah selama dua hari untuk bisa menyewa sapi itu selama sehari. Di negara ini, tenaga manusia dihargai separuh dari tenaga sepasang sapi! (Penduduk desa tunakisma, dikutip dalam Hartmann dan Boyce [1983: 163])

Para perempuan menyangi kopi; mereka memetik, menumbuk, dan menjemur kopi hingga kering. Mereka mengemas dan menimbanginya. Tetapi, ketika panen dihargai tinggi, suami mereka mengambil semua uang itu. Suami itu memberi 200 shilling kepada istrinya masing-masing dan esok paginya ia pergi dengan bus ... sering kali pergi ke kota dan menginap di rumah pelacuran hingga bangkrut. Kemudian mereka kembali dan menyerang istri mereka, berkata “kenapa kau belum menyangi kopi?” Ini perbudakan sejati. Kerja tidak mempunyai batas-batas. Kerja tidak pernah berakhir. (Aktivis perempuan pedesaan, dikutip dalam Mbilinyi [1990: 120–121])

Alasan dari semua ini adalah spekulasi tanah: 2.000 hektare hutan alam akan dibuka, 1.000 hektare akan diubah menjadi padang penggembalaan, kemudian penyadap karet kehilang-

an sumber mata pencaharian. Dari hal ini berkembang perjuangan memperebutkan sumberdaya ekstraktif di Amazon, yang juga menjadi wilayah masyarakat asli. Orang-orang Indian ... tidak menginginkan kepemilikan pribadi atas tanah, kami menginginkan tanah ini dimiliki oleh Serikat dan penyadap karet mesti menikmati hak garap [Pada 1980] seorang tokoh yang sangat penting, yang memimpin semua pergerakan di Amazon, dibunuh. Para tuan tanah ... telah membunuhnya. Tujuh hari kemudian, para pekerja membalas dendam dan membunuh seorang tuan tanah. Inilah cara keadilan bekerja. (Mendes 1992: 162, 168, wawancara diterbitkan setelah pembunuhan Mendes pada 2 Desember 1988)

Selama krisis, *hacendado* itu berpindah ke Guayaquil. Ayah saya mengenalnya dengan baik dan ia akan menyewakan tanahnya kepada kami sebanyak yang kami mau. *Hacendado* itu hanya ingin seseorang menjaga propertinya hingga harga kakao kembali pulih. Saya dan Javier pun punya lahan kecil. Kami menanam jagung, buncis, buah-buahan. Kami bahkan mempunyai satu atau dua ekor sapi. Tetapi, itu masa yang sangat berat. Kadang kami tidak punya tujuan untuk menjual apa yang kami panen. Saat itu, hanya ada suami saya dan saya. Kami bekerja berdampingan di lahan. Kami tidak punya anak yang bisa membantu. Kerabat tidak bisa banyak membantu. Hanya kami berdua yang melakukan segalanya. Kami hanya memiliki sedikit peralatan dan tidak punya sumberdaya. Kami juga tidak benar-benar memiliki tanah. Akhirnya, saya berkata, mari kita ke Guayaquil seperti Paco, saudara laki-laki Javier. (Buruh migran perempuan asal Ekuador, dikutip dalam Striffler [2004: 14–15])

Potongan kisah pertama menggambarkan petani kaya yang makmur, yang banyak diuntungkan oleh Revolusi Hijau dalam produksi gandum di India. Kebijakan produksi gandum itu diperkenalkan Partai Kongres yang menguasai pemerintahan nasional sejak akhir 1960-an. Elizabeth Whitcombe mengidentifikasi para petani tersebut sebagai mantan *zamindar* atau pemilik lahan, tetapi termasuk juga petani kaya yang dapat mengakumulasi hingga menjadi petani kapitalis (Byres 1981). Mereka memiliki bisnis pertanian yang dimodali secara besar-besaran dan menggunakan *input* dalam jumlah besar (dibutuhkan guna mendapat panen terbaik dari varietas gandum dan padi unggul yang diperkenalkan Revolusi Hijau), di antaranya traktor, pompa pengairan, dan pupuk yang ditumpuk di gudang penyimpanan. Varietas unggul yang mereka gunakan—dan dapat dilipatgandakan untuk penanaman selanjutnya—berasal dari pusat riset pertanian di belahan dunia yang jauh. Ukuran lahan pertanian mereka tampak sangat besar bagi kebanyakan tetangga mereka, termasuk jika dibandingkan dengan hampir semua petani di Bangladesh dan Tanzania, misalnya, tetapi terhitung kecil bila dibandingkan dengan sejawat mereka di Brasil.

Kisah kedua tentang penduduk desa yang miskin dan tunakisma di Bangladesh. Kisah ini menyajikan banyak kontras dengan kisah yang pertama. Kisah ini menunjukkan perjuangan sehari-hari tanpa henti demi menafkahi hidup, terutama untuk kebutuhan paling dasar: menjamin kecukupan makan. Penduduk desa menggunakan lahan sewa, tenaga hewan, dan alat bajak guna menanam padi milik sendiri, dengan bekerja kepada orang lain demi upah. Dibanding kisah yang pertama, kisah ini tidak sedikit pun memberi gambaran mengenai wilayah lain di luar desa tempat si petani bagi hasil tinggal. Pada saat bersamaan, pembahasan tentang bekerja demi upah bisa merangsang kita untuk mempertanyakan siapa

yang menjadi tenaga kerja pada pertanian padi-padian komersial di India bagian utara yang digambarkan pada kisah pertama.

Kisah ketiga, dari Tanzania, memberi gambaran yang kuat mengenai relasi gender yang sangat timpang (lihat Bab 1). Tidak seperti dua kisah sebelumnya, kisah ini berkait dengan tanaman ekspor yang diproduksi untuk pasar internasional, dalam kasus ini diproduksi oleh para petani kecil. Kita mungkin akan bertanya bagaimana tanah, tenaga kerja, dan sumberdaya lain yang digunakan untuk penanaman kopi memengaruhi budidaya tanaman pangan untuk konsumsi rumah tangga. Di sini, pembayaran setelah hasil panen yang bagus, yang terutama berupa pemasukan uang tunai untuk setahun, tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan dibelanjakan untuk “pesta” oleh laki-laki kepala keluarga.

Dalam kisah tentang Brasil, kita berjumpa dengan topik yang sudah lama akrab dalam sejarah agraria dunia modern, yakni perebutan tanah untuk penggunaan yang berbeda, dan tidak sedikit berupa perebutan atas hutan—dalam kasus ini adalah antara mereka yang memperoleh mata pencaharian dari menyadap karet dari pohon karet liar dan mereka yang ingin membuka hutan untuk membuat padang rumput bagi peternakan skala besar atau menanam kedelai yang akan diproses untuk makanan ternak. Kita juga melihat sebuah konflik mengenai konsepsi kepemilikan tanah: antara tanah sebagai hak milik pribadi untuk penggunaan eksklusif sang pemilik dan tanah sebagai hak milik bersama. Dengan hak yang disebut terakhir, komunitas atau kelompok tertentu berbagi hak guna, yakni hak bersama untuk memanfaatkan tanah. Lebih dari itu, sebagaimana di banyak negara yang terbentuk oleh sejarah kolonial, konflik tanah terjadi antara sekelompok manusia yang berbeda secara etnik dan budaya, termasuk kekuasaan mereka.

Potongan kisah terakhir menggambarkan usaha pasangan muda tunakisma di Ekuador untuk mengelola usaha tani sederhana

dengan menyewa tanah dari seorang *hacendado*, pemilik sebuah *hacienda*, unit perkebunan luas di Amerika Latin. Pemilik lahan pernah menanam lahan dengan kakao, tetapi ditelantarkan ketika harga menurun drastis. Inilah krisis yang dimaksud oleh Maria. Di sini, kita berjumpa dengan jenis komoditas budidaya ekspor internasional yang lain—sebagaimana dalam kasus kopi di Tanzania serta daging sapi dan kedelai di Brasil—serta gambaran ringkas kesulitan usaha tani skala kecil. Maria menceritakan kepada kita bahwa dia dan suaminya, Javier, kekurangan tenaga kerja, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai jenis tanah yang mereka tanami dan peralatan yang mereka gunakan untuk bercocok tanam. Dia juga menyatakan, meski mereka bercocok tanam untuk memenuhi konsumsi sendiri, mereka juga menjual sebagian hasil panen. Mereka membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan dasar yang tidak bisa diproduksi sendiri. Karena masih muda, mereka memutuskan untuk mengikuti Paco, saudara Javier, mengadu nasib demi penghidupan yang lebih layak di kota pelabuhan besar Guayaquil di Pantai Pasifik Ekuador.

Kelima sketsa tersebut menunjukkan begitu beragamnya jenis usaha tani dan relasi sosial yang terbentuk, begitu juga kondisi pasar bagi tanaman, *input*, dan tenaga kerja, serta kondisi lingkungan bertani di wilayah yang berbeda dan bagi tipe masyarakat yang berbeda di Selatan. Keragaman ini membuat segala macam generalisasi empiris yang sederhana menjadi tidak mungkin. Tetapi, dalam seluruh detail spesifik dan lokal tersebut, kisah-kisah di atas menyajikan secara sekilas beberapa topik dan dinamika perubahan agraria yang lebih luas:

- diferensiasi kelas dan gender di pedesaan;
- pembagian akses atas tanah, pembagian kerja, dan pembagian hasil kerja;

- properti dan mata pencaharian, kemakmuran dan kemiskinan;
- warisan kolonial dan aktivitas pemerintah;
- jalur perkembangan agraria dan pasar internasional (teknologi, permodalan, dan komoditas pertanian); dan
- relasi kuasa dan ketimpangan, pertarungan dan kekerasan yang kerap digunakan untuk memelihara relasi tersebut, dari kekerasan “domestik” (gender) di Tanzania hingga kekerasan kelas yang terorganisir di Brasil.

Ekonomi politik agraria, dan ekonomi politik kapitalisme secara lebih luas, digunakan dalam buku ini untuk menggali beberapa topik dan dinamika yang lebih luas tersebut dari pendekatan teoretis Karl Marx.

Ekonomi Politik Marx

Tinggal di Inggris sejak 1850-an hingga 1870-an, Marx (1818–1883) menyaksikan transformasi yang ditempa oleh Revolusi Industri pertama di dunia. Dalam karya besarnya yang teoretis (dan belum selesai), *Capital*, Marx berusaha mengidentifikasi berbagai relasi kunci dan dinamika “corak produksi kapitalis” pada bentuk industri (yang pada saat itu) paling maju. Bagi Marx, kapitalisme—dan terutama kapitalisme industri—dari watak khas dan akibat-akibat susulannya, adalah “sejarah yang mendunia”. Kemunculan kapitalisme sebagai corak produksi yang baru, dan tentu saja revolusioner, bukan sama sekali alamiah atau tak terelakkan. Tetapi, begitu logika unik kapitalisme terbentuk, kapitalisme akan memaksakan diri agar berlaku di setiap bagian dunia. Logika unik kapitalisme ialah eksploitasi dan akumulasi serta kompetisi dan perkembangan terus-menerus kapasitas produktif (Bab 2).

Marx menganalisis cara produksi kapitalis dengan mengacu pada kapitalisme industri di bagian barat-laut Eropa. Fakta ini meninggalkan banyak ruang bagi beragam tafsir dan perdebatan mengenai sejarah kapitalisme *sebelum* industrialisasi modern dan *setelah* masa Marx, di antaranya:

- bagaimana kapitalisme berkembang terutama dalam masyarakat agraris sebelum industrialisasi (Bab 2–Bab 3); dan
- bagaimana perubahan agraria dibentuk oleh kapitalisme industri pada saat kapitalisme industri terbentuk dan menyebar (Bab 3–Bab 5).

Tujuan saya adalah menggunakan beberapa konsep Marx tentang teori corak produksi kapitalis untuk memahami sejarah agraria yang kompleks dan beragam dalam dunia modern. Saya mengajukan beberapa topik umum mengenai perjalanan kapitalisme yang bersifat mendunia dan berupaya menghubungkan topik-topik umum itu dengan variasi-variasi kompleks yang memberi bentuk pada sejarah-sejarah tertentu (meminjam rumusan dari konteks lain dari antropolog Michael Gilson [1982: 51]). Perlu saya tekankan bahwa Marx tidak menyediakan segala sesuatu yang perlu kita ketahui mengenai kapitalisme, baik dari segi teori maupun sejarah, hal yang juga dia tekankan. Relasi antara sistem teorinya (yang sangat *abstrak* dan tidak tuntas) dan penerapannya dalam penelitian historis atau penelitian yang *konkret* justru menjadi sumber ketegangan dan perdebatan sengit. Dalam “The Method of Political Economy”, Marx (1973: 10) menyatakan bahwa “sesuatu yang konkret ... adalah kumpulan dari berbagai determinasi,” atau secara lebih longgar kita bisa sebut sebagai “faktor-faktor penyebab”.

Setiap bab dalam buku ini memperkenalkan sejumlah gagasan dan pertanyaan teoretis, serta memberi gambaran secara historis dan singkat, yang kadang melalui generalisasi ringkas. Generalisasi tersebut, sebagaimana saya gunakan dalam Bab 2 hingga Bab 5 untuk menguraikan bangunan dunia kapitalis modern, sesungguhnya takbisa dengan adil menggambarkan seluruh variasi dan kekhususan sejarah. Catatan yang sama dapat diberlakukan pada cara pandang mengenai periodisasi sejarah: periode dibutuhkan untuk mengidentifikasi perubahan—yang biasanya menandai kurun tertentu dalam satu abad atau bagian dari abad—dan kita tidak bisa memahami sejarah tanpa hal itu, tanpa mempertanyakan apa yang berubah, bagaimana, mengapa, dan *kapan*. Namun demikian, periodisasi memunculkan bahaya yang dapat mengaburkan kompleksitas dari keterputusan atau keberlanjutan proses tertentu yang bergerak melintasi sejarah. Periode sejarah dalam buku ini berfungsi sebagai “penanda” perubahan-perubahan penting: bukan untuk menandai bahwa perubahan dari satu periode ke periode lain selalu menjadi patahan sempurna dan dramatis dari apa yang terjadi sebelumnya, sekalipun beberapa proses sejarah menghasilkan perubahan yang lebih radikal daripada yang lain. Dengan uraian kerangka ini, garis besar dan sketsa sejarah dalam buku ini menawarkan gambaran suatu pendekatan analisis yang bisa diuji sendiri oleh pembaca—bisa dipertanyakan, diterapkan, diadaptasi, atau ditolak.

Memahami pendekatan analisis tersebut dan menguji kegunaannya adalah sesuatu yang menantang. Ini adalah satu buku yang menantang, tetapi bukankah sulit memahami dunia yang kita diami, dengan segala kompleksitas dan kontradiksinya, secara sederhana? Tujuan saya ialah menyediakan beberapa alat untuk memikirkan hal itu, bukan bermaksud menceritakan dongeng moralitas sederhana yang mungkin secara ideologis menarik (misalnya, “kecil itu indah”

lawan “besar itu buruk” atau petani kecil yang baik hati lawan pertanian korporat yang jahat).

Akhirnya, arena terkuat dari perdebatan tentang gagasan-gagasan Marx, serta bagaimana menerjemahkan dan menggunakan gagasan-gagasan Marx, justru muncul di kalangan Marxis atau mereka yang sangat dipengaruhi oleh Marx. Mereka yang telah akrab dengan sejarah ini dan perdebatan-perdebatannya tentu dapat mengenali tafsiran dari ekonomi politik materialis yang saya tampilkan dalam buku kecil ini. Tetapi, buku ini tidak mengasumsikan pengetahuan ekonomi politik sebelumnya sudah harus dikuasai. Untuk itu, saya menyediakan daftar istilah-istilah kunci. Penulis hanya berharap pembaca akan mendapati bahwa buku ini cukup penad, menarik, dan menggugah untuk direfleksikan dan digali lebih lanjut.

Catatan

¹ Jumlah “petani kecil” di Selatan kerap dilebih-lebihkan, kadang terlalu dibesarkan, oleh mereka yang “berpihak kepada petani” (lihat lebih lanjut dalam bab berikutnya). Joan Martinez-Alier (2002) dan Samir Amin (2003), misalnya, masing-masing memberikan angka 2 miliar dan 3 miliar.

² Zamindar adalah golongan elite pada masa Kerajaan Mughal. Pada masa kolonial Inggris, mereka menjadi kelas pemilik tanah yang menguasai lahan luas di suatu wilayah. Lebih lanjut, simak Eric R. Wolf, *Europe and the People Without History* (2010: 241–244)—*catatan dari penerjemah*.

³ 1 acre sama dengan sekitar 0,4047 hektare—*catatan dari penerjemah*.

⁴ 1 galon sama dengan sekitar 4,546 liter—*catatan dari penerjemah*.

BAB 1

Produksi dan Produktivitas

Kerja dan Alam

Kita mengandaikan tenaga kerja dalam suatu bentuk yang di dalamnya ia merupakan suatu ciri khusus manusia. Seekor laba-laba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyamai pekerjaan seorang penenun, dan seekor lebah lewat bangunan sel-selnya menyamai pekerjaan seorang arsitek. Tetapi yang langsung membedakan arsitek yang paling buruk dari seekor lebah yang paling pandai adalah bahwa ia telah membangun sel itu di dalam kepalanya sebelum ia (si arsitek) membangunnya dari lilin. Pada akhir setiap proses kerja muncul suatu hasil yang sudah sejak awal dibayangkan oleh pekerja itu, dengan demikian hasil itu sudah ada secara ideal/dalam angan-angan. Manusia tidak saja menghasilkan suatu perubahan bentuk pada bahan-bahan alam; ia juga mewujudkan [*verwirklicht*] maksudnya sendiri pada bahan-bahan itu. (Marx 1976: 283–284)¹

Definisi awal dan umum tentang “produksi” adalah “proses di mana tenaga kerja digunakan untuk mengubah alam guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia.” Sebagaimana dikemukakan Marx, tenaga kerja mensyaratkan *kepelakuan* (*agency*): tujuan, pengetahuan, keterampilan, termasuk energi, dari produsen. Dengan melakukan tindakan terhadap lingkungan alam, para produsen dengan demikian mengubah ekosistem yang mereka tinggali sekaligus menjadi bagian dari ekosistem tersebut.²

Gagasan tentang *produktivitas* terkait erat dengan produksi dan menjadi persoalan pokok kesejahteraan manusia—pemenuhan berbagai kebutuhan hidup manusia. Beragam konsep tentang produktivitas mempertunjukkan hasil dari penggunaan satu daripada lain cara dalam mengerjakan sesuatu. Ukuran-ukuran produktivitas memperhitungkan jumlah barang yang diproduksi dengan menggunakan sumberdaya dalam jumlah tertentu.

Salah satu ukuran produktivitas dalam usaha tani adalah panen, yakni besaran produksi tanaman yang dituai dari luasan lahan tertentu.³ Ukuran lain dari produktivitas berkait dengan tenaga kerja, yakni besaran produksi tanaman yang bisa dihasilkan oleh seseorang dengan menggunakan upaya tertentu yang umumnya diukur atau disetarakan menurut jumlah jam kerja yang digunakan, atau disebut sebagai waktu kerja. Produktivitas tenaga kerja bergantung pada seberapa canggih teknologi atau peralatan yang digunakan oleh para produsen. Sebagai contoh, seorang petani di Amerika Serikat yang menggunakan traktor dan mesin pemanen mampu memproduksi 1 ton padi-padian, atau yang setara dengan itu, dengan menggunakan sedikit waktu dan tenaga daripada petani di India yang menggunakan bajak yang ditarik oleh sapi. Sebaliknya, petani India bisa memproduksi 1 ton padi-padian dengan menggunakan waktu dan usaha fisik yang lebih sedikit ketimbang seorang petani di Afrika Sub-Sahara yang mengolah lahan dengan cangkul dan peralatan tangan yang lain.

Selain itu, kita juga dapat membayangkan berapa rata-rata panen dalam satu periode waktu tertentu yang dihasilkan oleh para produsen dengan menggunakan alat berbeda-beda. Satu tahun adalah periode yang penad karena faktor utama dalam usaha tani di hampir semua tempat ialah musim, bergantung pada kondisi cuaca. Kita bisa saja menjumpai, dalam satu tahun, petani Afrika mampu memproduksi 1 ton padi-padian, petani India 5 ton, dan petani Amerika 2.000 ton. Produktivitas tenaga kerja petani India

lima kali lipat dari produktivitas tenaga kerja petani Afrika, dan produktivitas tenaga kerja petani Amerika empat ratus kali lipat dari petani India dan dua ribu kali lipat dari petani Afrika. Angka yang menakjubkan ini dikemukakan oleh agronom asal Prancis, Marcel Mazoyer dan Laurence Roudart (2006: 11). Keduanya juga mengamati bahwa kesenjangan antara rata-rata produktivitas tenaga kerja terendah dan tertinggi dalam sistem pertanian dunia mengalami peningkatan masif sejak 1950 (lihat Bab 4–Bab 5).⁴

Kembali ke contoh sederhana tadi, kita dapat membuat beberapa amatan lebih lanjut. *Pertama*, peningkatan produktivitas tenaga kerja berhubungan dengan penggunaan bentuk-bentuk lain energi selain kekuatan otot manusia, di antaranya energi dari hewan yang berupa tenaga hewan dan energi yang dihasilkan oleh mesin pembakaran-dalam yang ada pada traktor dan mesin pemanen. Karena itu, pemanfaatan dan penggunaan bentuk-bentuk energi lain dapat melepaskan produksi dan produktivitas dari keterbatasan yang terdapat dalam energi tubuh manusia. *Kedua*, pemanfaatan dan penggunaan bentuk-bentuk energi lain juga memungkinkan penggarapan lahan lebih luas dengan jumlah pekerja yang sama. Areal lahan yang diolah per pekerja pertanian di Amerika Serikat diperkirakan lima puluh kali lipat lebih luas dari rata-rata dunia (Weis 2007: 83). *Ketiga*, produktivitas tenaga kerja pertanian bukan semata-mata soal bentuk energi yang digunakan dalam penggarapan lahan. Seperti halnya produktivitas lahan (jumlah panen), produktivitas tenaga kerja juga mencerminkan kualitas *input* yang lain, misalnya benih, pupuk, pengairan, dan lain-lain. Akhirnya, ketika produktivitas tenaga kerja meningkat, jumlah produsen yang lebih sedikit mampu menyediakan makanan untuk lebih banyak orang.

Berbagai konsep dan ukuran produktivitas bisa saling bertenangan satu sama lain. Sebagai contoh, dalam keadaan tertentu, hasil lahan bisa jadi adalah ukuran yang lebih penad ketimbang

hasil tenaga kerja. Pada ilustrasi sederhana di atas, rata-rata panen padi-padian secara signifikan lebih tinggi di Amerika Serikat ketimbang di Afrika Sub-Sahara, meski selisih jumlah panen itu jauh lebih kecil ketimbang kesenjangan yang luar biasa dalam hal produktivitas tenaga kerja.

Ukuran produktivitas yang lain ialah penghitungan atas lingkungan, misalnya penghitungan energi, dan yang terbaru ialah penghitungan atmosferis. Penghitungan energi sudah dimulai sejak abad XIX. Berangkat dari ujung yang lain proses kerja (menjaga *output*, dan bukan *input*, tetap konstan), efisiensi dapat dihitung melalui satuan energi (kalori) yang digunakan untuk memproduksi sejumlah panen, dari energi atau nilai kalori tertentu. Dari contoh ini, usaha tani dengan “*input* rendah”, misalnya penanaman padi-padian dengan cangkul, bisa dianggap lebih efisien daripada pertanian mekanik padi-padian dengan “*input* tinggi”, sekalipun usaha tani *input* rendah menghasilkan panen lebih rendah dan produktivitas kerja yang jauh lebih rendah (sehingga hanya mampu memberi makan lebih sedikit orang).

Sebagai tambahan, kita bisa menghitung biaya-biaya tersirat (implisit) dari penggunaan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya bahan bakar minyak yang menggerakkan mesin pertanian, serta biaya dari polusi dan kerusakan lingkungan yang lain, misalnya pengikisan atau degradasi tanah. Elemen-elemen ini membentuk apa yang sekarang disebut sebagai “tapak ekologis” dari jenis-jenis produksi dan konsumsi tertentu, baik dalam aktivitas bertani maupun aktivitas ekonomi yang lain.

Sejauh ini saya telah menggambarkan satu aspek produktivitas, yaitu peralatan dan teknologi yang digunakan dalam usaha tani, dan menyiratkan aspek lain, yaitu kualitas (dan kuantitas) tenaga kerja manusia—penguasaannya atas berbagai kapasitas yang dibutuhkan untuk jenis tugas-tugas tertentu. Produktivitas tenaga kerja akan terpengaruh jika berbagai kapasitas itu tidak tersedia

secara memadai. Contoh, seorang produsen yang kurang terampil menggunakan peralatan secara efektif—entah cangkul, hewan pembajak, atau traktor—atau seorang produsen yang kemampuannya dalam mengelola pertanian yang sulit di Afrika atau India diperlemah oleh rendahnya tingkat nutrisi dan kesehatan karena kemiskinan. Aspek ketiga yang juga telah tersirat adalah “bahan-bahan mentah” untuk aktivitas bertani yang tersedia pada lingkungan alam yang berbeda-beda. Bahan-bahan mentah ini sedemikian bervariasi dan bisa dikelola secara lebih atau kurang efektif—bisa terdegradasi, ditingkatkan, atau dilestarikan. Produktivitas juga tergantung pada:

- kesuburan tanah, yang bisa semakin menurun atau bisa dipertahankan atau ditingkatkan melalui penggunaan pupuk organik atau kimia, dan metode budidaya tanaman yang lain;
- jenis dan kualitas benih, yang mungkin bisa diperbaiki; dan
- ketersediaan air dan pengelolaannya yang efektif, termasuk menangani ketaktentuan hujan pada sistem usaha tani yang tidak beririgasi.

Aspek-aspek produksi dan produktivitas yang dibahas sejauh ini berkait dengan *kondisi-kondisi teknis* usaha tani. Tetapi, sebagaimana dinyatakan oleh Marx (1973: 86): “ekonomi politik bukanlah teknologi.” Aktivitas petani melibatkan semua itu dalam berbagai relasi dengan orang lain. Apakah itu dalam proses-proses kerja bertani, apakah peralatan dan bahan-bahan yang mereka gunakan—termasuk lahan yang mereka garap atau lahan tempat ternak merumput—dimiliki sendiri atau milik orang lain, hak seperti apa yang mereka miliki atas hasil panen yang diproduksi dengan tenaga kerja mereka, dan lain-lain. Persoalan-persoalan ini mengarahkan kita pada *kondisi-kondisi sosial produksi*, yakni semua

relasi antarmanusia yang membentuk corak bagaimana produksi, termasuk kondisi-kondisi teknis produksi, diorganisasikan.

Pembagian Kerja dan Kerjasama

Kita dapat mengasumsikan bahwa tiga petani dalam contoh sederhana di atas tidak membuat peralatan mereka sendiri. Asumsi ini mungkin tampak jelas bagi petani Amerika, tetapi juga cukup aman berasumsi bahwa banyak petani di India dan Afrika sekarang ini menggunakan bajak dan cangkul yang diproduksi oleh pabrik. Petani mesti memperoleh peralatan mereka dari pihak lain yang bekerja untuk memproduksi berbagai alat pertanian. Inilah contoh sederhana dari *pembagian kerja secara sosial* di antara produsen bermacam-macam barang dan jasa. Aktivitas para produsen itu bersifat saling melengkapi dan berhubungan satu sama lain melalui pertukaran produk. Ketika pembagian kerja secara sosial semakin kompleks, situasi ini membuat bermacam-macam barang dan jasa semakin tersedia melintasi ruang geografis lebih luas. Untuk itu, dibutuhkan sarana transportasi dan komunikasi yang efektif.

Kita juga dapat berasumsi bahwa ketiga petani tersebut bekerja dengan menggunakan tenaga mereka sendiri, tetapi asumsi seperti ini tidak bisa diberlakukan untuk pabrik-pabrik yang memproduksi cangkul, bajak, dan traktor. Produksi pabrik membutuhkan *pembagian kerja teknis*: perpaduan tugas-tugas berbeda yang dilakukan oleh sejumlah pekerja untuk memproduksi satu jenis produk. Situasi ini menunjukkan diperlukannya *spesialisasi* pekerja pada tugas-tugas yang berlainan, sehingga menuntut adanya kerjasama dan koordinasi di antara mereka, seiring meluasnya skala produksi yang melampaui kemampuan seorang produsen untuk bekerja sendiri-sendiri. Spesialisasi membuat produktivitas kerja yang lebih tinggi menjadi mungkin daripada yang bisa dicapai, katakanlah, oleh seo-

rang ahli mesin yang melakukan semua tugas yang dibutuhkan untuk memproduksi satu traktor.⁵

Seiring kian meluasnya pembagian kerja teknis, dibutuhkan kerjasama yang semakin kompleks. Kerjasama juga dapat meningkatkan produktivitas kerja petani yang menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul, dengan menyertakan berbagai hal di bawah ini:

- menurunkan ongkos dengan cara membangun fasilitas bersama (misalnya, tempat penyimpanan benih dan tangki penampung air);
- “efek pelengkapan”, yang berarti “menyumbang tenaga kerja individual pada suatu proses yang hanya berguna jika rampung secara utuh” (misalnya, kerja menggali sebagian dari saluran irigasi atau membangun sebagian dari pagar untuk melindungi tanaman); dan
- efek waktu, yang berarti mengerahkan tenaga untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam waktu sempit (berkait dengan musim dalam usaha tani, misalnya musim hujan). (von Freyhold 1979: 22–25)

Gagasan utama dalam pembagian kerja teknis dan kerjasama pada contoh-contoh di atas adalah bahwa “keseluruhan lebih besar daripada total penjumlahan bagian-bagiannya” (Marx menyebutnya sebagai “pekerja kolektif”). Pembagian kerja teknis dan pengaruh-pengaruhnya terhadap produktivitas membutuhkan organisasi sosial. Karena itu, apa pun yang dilakukan produsen atau pekerja tertentu tidak dapat dipahami secara terpisah dari aktivitas-aktivitas pekerja yang lain.

Dengan penjelasan ini, kita telah memperluas pemahaman kita mengenai kondisi-kondisi teknis produksi, terutama dengan

merujuk pada *kepelakuan* yang disebut di awal. Apa yang diistilahkan oleh Marx sebagai “kekuatan-kekuatan produktif” mencakup tidak hanya kultur teknologi dan teknis tetapi juga kapasitas manusia untuk mengorganisasi diri dalam mengambil berbagai keputusan terkait produksi, untuk menjalankan produksi, dan berinovasi. Semua ini dibentuk oleh kondisi-kondisi sosial produksi.

Reproduksi

Sebagaimana disinggung di atas, elemen-elemen dalam proses produksi itu sendiri harus diproduksi. Lahan yang digunakan untuk bertani sekalipun, yang sejatinya adalah “pemberian” alam, telah diubah melalui interaksi manusia dengan lahan. Misalnya, kesuburan tanah bisa menurun, tetapi bisa juga dijaga supaya tetap subur, bahkan kesuburannya bisa ditingkatkan. Semua itu membutuhkan produksi terus-menerus kondisi-kondisi usaha tani, seperti halnya dengan berbagai aktivitas manusia yang lain. Inilah yang diistilahkan sebagai *reproduksi*: reproduksi alat-alat produksi (tanah, peralatan, benih, ternak), reproduksi produsen yang sekarang dan produsen masa depan, serta reproduksi relasi-relasi sosial di antara para produsen dan antara produsen dengan yang lain. Untuk sementara, mari kita berasumsi bahwa seluruh kebutuhan untuk reproduksi, menjamin kondisi-kondisi produksi *di masa depan*, harus dipenuhi oleh apa yang diproduksi *sekarang*. Kita bisa menganggap apa yang diproduksi pada waktu tertentu, sebut saja hasil panen yang diproduksi karena ada permintaan, sebagai bermacam-macam “biaya” reproduksi.

Saya mulai dengan yang paling kentara, yaitu *biaya konsumsi*. Setiap orang perlu makan untuk hidup, dan biaya konsumsi diartikan sebagai biaya yang dibutuhkan langsung dan sehari-hari untuk makan (sebagaimana kebutuhan untuk tempat tinggal,

istirahat, dan kebutuhan dasar lain). Sebagian dari hasil panen mesti dialokasikan untuk konsumsi bagi produsen dan bagi mereka yang bergantung pada produsen, yaitu anak-anak dan manula atau mereka yang takcakup bertani.

Berikutnya, *biaya penggantian*. Peralatan yang digunakan untuk bertani bisa aus seiring waktu. Sementara berbagai *input* yang lain (atau “perkakas kerja” dalam istilah Marx), misalnya benih dan pupuk yang digunakan di setiap daur produksi usaha tani, cenderung habis lebih cepat. Karena itu, sebagian dari hasil produksi sekarang harus dialokasikan untuk menggantikan barang-barang habis pakai itu. Penggantian bisa terjadi dengan berbagai cara, tergantung pada perbedaan kondisi-kondisi sosialnya. Sepanjang sejarah, penggantian selalu berlangsung di tingkat rumah tangga: beberapa bagian dari hasil panen dipilih dan disimpan sebagai bibit untuk daur penanaman selanjutnya; peralatan sederhana dibuat oleh para petani atau tetangga mereka yang terampil (hasil kerja itu dibayar dengan imbalan tertentu). Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan biaya penggantian mencerminkan suatu klaim atas tenaga kerja dan produknya. Boleh jadi dengan menyimpan beberapa bagian dari panen untuk benih, menggunakan lumbung guna menyimpan hasil panen sebelumnya sebagai persediaan makan untuk orang yang melakukan tugas-tugas reproduksi di sela musim-musim bertani, atau mendapatkan alat-alat dasar produksi dan konsumsi yang tidak diproduksi sendiri oleh petani.

Di antara sekian klaim atas biaya penggantian, ada satu yang secara khusus punya posisi penting, yaitu produksi keturunan produsen berikutnya, atau dinamakan sebagai *reproduksi keturunan*. Apa yang sudah saya uraikan sejauh ini tidak punya acuan dan tidak menggunakan preposisi *gender*—Marx dalam kutipan di atas mengikuti cara pandang lama bahwa “*man*” dalam bahasa Inggris adalah istilah generik untuk menyebut seluruh manusia; Marx juga menganggap bahwa arsitek dalam analogi di atas adalah laki-laki

(kenyataannya semua arsitek pada masanya memang laki-laki). Saya memunculkan gender di sini karena proses mengandung dan melahirkan anak—langkah pertama dan penting dalam reproduksi keturunan—adalah kapasitas khusus perempuan yang ditentukan secara biologis. Tetapi, penggunaan kapasitas itu termasuk sebagai praktik sosial, dibentuk oleh relasi-relasi sosial. Walau “sudah ditakdirkan secara alamiah” bahwa hanya perempuan yang bisa mengandung dan melahirkan anak, tidak ada yang “alamiah” dalam hal *apakah semua perempuan* bisa mengandung dan melahirkan anak, *kapan* mereka mengandung dan melahirkan anak, *berapa banyak* anak yang dilahirkan, dan dalam beberapa budaya ada tuntutan kepada perempuan untuk melahirkan anak laki-laki. Kecuali aktivitas menyusui, pengasuhan anak yang selalu berkisar di seputar perempuan—nenek, bibi, kakak perempuan, atau pembantu perempuan—juga bukan sesuatu yang “alamiah”. Selain itu, tidak ada keharusan biologis yang membuat nyaris seluruh tugas memelihara keturunan produsen saat ini dilakukan oleh perempuan. Misalnya, memasak, bersih-bersih, mencuci baju, mengambil air, dan mengumpulkan kayu bakar—aktivitas-aktivitas *kerja domestik* yang penting untuk reproduksi tenaga kerja.

Kerja domestik menggambarkan tipe pembagian kerja yang lebih lanjut dan berbeda. Sebelumnya kita telah menilik makna pembagian kerja sebagai spesialisasi aktivitas produktif di antara dan di dalam unit-unit produksi. Dalam kasus gender, spesialisasi dibentuk oleh posisi seseorang dalam struktur relasi-relasi sosial berdasarkan gender. Relasi-relasi gender—relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, berikut ideologi yang membentuk atau membenarkannya—menyediakan kasus yang begitu tersebar luas mengenai pembagian kerja secara sosial, meski bentuk relasi-relasi gender di berbagai masyarakat dan kelompok di dalam masyarakat sangat beragam. Dalam sejarahnya, relasi-relasi gender juga mengalami perubahan (menunjukkan bahwa relasi-relasi gender tidak

“dibentuk” secara alamiah) dan meluas melampaui ranah kerja domestik hingga terentang pada aktivitas-aktivitas produksi dan reproduksi yang lain, tidak terkecuali pada sistem usaha tani, yang juga menunjukkan adanya serangkaian pembagian kerja berbasis gender.

Selanjutnya adalah *biaya seremonial*, yakni biaya yang merujuk pada alokasi dari hasil kerja untuk kegiatan-kegiatan yang membentuk dan menyusun ulang relasi-relasi sosial dan relasi-relasi budaya dalam komunitas tani (Wolf 1966). Misalnya, ritual-ritual untuk persiapan tanam dan perayaan setelah panen. Contoh lain termasuk perayaan ritus-ritus daur hidup (misalnya, kelahiran dan pernikahan), mendirikan rumah bagi rumah tangga baru, dan mengenang kematian anggota komunitas (misalnya, perkabungan dan pemakaman).

Biaya konsumsi, biaya penggantian, dan biaya seremonial, semua ini ada dalam masyarakat yang berpusat pada berbagai kebutuhan atau aktivitas “subsistensi” untuk anggotanya. Ketiganya juga ada dalam masyarakat yang mungkin memiliki tingkat diferensiasi sosial yang tipis, kecuali dalam hal gender dan keturunan, misalnya otoritas khusus dari para “tetua”. Bentuk klaim yang keempat dan terakhir dari hasil kerja, yaitu *biaya renten*, merupakan bidang relasi-relasi sosial yang cukup berbeda.

Surplus, Eksploitasi, dan Akumulasi

Biaya penggantian dan seremonial membutuhkan “surplus” produk di atas apa yang dibutuhkan untuk konsumsi langsung. Kondisi ini berlaku di semua masyarakat. Kita bisa membedakan masyarakat menjadi tiga kategori luas sesuai dengan tahapan evolusi. *Pertama*, kita bisa mengistilahkannya dengan tepat sebagai “masyarakat subsisten”, yakni masyarakat yang mereproduksi diri pada tingkat konsumsi yang konstan (dan jumlah populasinya

juga biasanya konstan). Ini tidak memaknakan bahwa masyarakat tersebut memang “miskin”. Kelompok-kelompok kecil pemburu dan pengumpul, atau mereka yang mempraktikkan perladangan berpindah (pertanian berpindah), malah kerap mampu memenuhi kebutuhan terbatas mereka dengan relatif sedikit usaha dan penggunaan waktu kerja—lebih sedikit daripada yang dibutuhkan oleh pertanian menetap pada umumnya (Sahlins 1972).

Menurut sejarawan Colin Duncan (1996: 13), pertanian “umumnya diartikan sebagai pembudidayaan (atau pengerjaan) tanah di petak-petak lahan,” berbeda dengan “perladangan berpindah” dan penggembalaan nomaden. Sama seperti yang lain, Duncan juga mengamati bahwa ini “merupakan suatu patahan yang tegas dari cara interaksi sebelumnya antara manusia dan alam” (Duncan 1996: 13). Pertanian menetap muncul melalui domestikasi (penjinakan) yang dilakukan manusia terhadap tanaman dan binatang, serta memungkinkan adanya biaya renten dan kemunculan historis masyarakat kategori *kedua*: masyarakat agraris yang terbagi atas *kelas*, yang perkembangannya tergambarkan dari peningkatan jumlah dan kepadatan populasi serta pembentukan kelas-kelas penguasa, pemerintah, kota, dan budaya urban.

Biaya renten merujuk pada bermacam-macam pembayaran yang harus dilakukan petani kepada pihak lain. Pihak lain tersebut bisa jadi tuan tanah, yang menerima biaya renten dalam bentuk barang (bagian dari hasil panen petani), tenaga kerja, atau uang; atau negara, yang menuntut pembayaran pajak dalam bentuk barang dan uang, atau kerja wajib untuk membangun prasarana umum, atau wajib militer; atau kelompok otoritas keagamaan yang sekaligus tuan tanah atau yang mempunyai kekuasaan untuk membebaskan pajak atau zakat; pihak lain itu bisa juga lintah darat atau tengkulak, yang darinya para petani berutang dengan menggadaikan nilai panen mereka berikutnya, ketika praktik ekonomi uang mulai berlaku.⁶

Selanjutnya, dalam masyarakat agraris yang terbagi atas kelas, “surplus” harus diproduksi melebihi kebutuhan produsen untuk biaya konsumsi, biaya penggantian, dan biaya seremonial, guna menopang kelas-kelas dominan yang bukan produsen. Kapasitas untuk *menghakmiliki surplus tenaga kerja*—tenaga kerja yang melampaui kebutuhan produsen untuk reproduksi diri—menandakan adanya relasi-relasi sosial berbentuk *eksploitasi*.

Kelas-kelas dominan atau penguasa pada masyarakat agraris yang terbagi atas kelas terdiri atas dinasti bangsawan, aristokrat sipil dan militer, birokrat sipil dan agama, serta kelompok pedagang. Konsumsi dan reproduksi mereka, juga kelompok pengiring yang sering berjumlah besar yang melayani mereka (pelayan, prajurit, pejabat keagamaan, juru tulis, pelukis istana, dan penyair—dan arsitek!), bersandar pada eksploitasi terhadap produsen, entah budak, hamba feodal, petani kecil, atau perajin. Beberapa masyarakat ini—peradaban-peradaban agraris yang masyhur di Asia dan Afrika Utara, Eropa, dan Amerika Tengah—mengalami periode ekspansi wilayah dan penyebaran populasi. Ekspansi tersebut kadang kala terkait erat dengan inovasi-inovasi teknis serta pengorganisasian usaha tani dan aktivitas produktif yang lain, termasuk inovasi di bidang komunikasi (misalnya, penemuan aksara), transportasi (terutama transportasi air), perdagangan, dan kekuatan militer.

Meskipun kelas-kelas penguasa berupaya mengatur aktivitas ekonomi—upaya untuk menghakmiliki surplus tenaga kerja—dan kadang kala memberikan rangsangan kegiatan ekonomi (misalnya, dengan pembangunan dan perawatan bangunan irigasi), mereka tidak berusaha secara sistematis untuk “menabung” dan menginvestasikan kembali surplus produk yang dihakmiliki untuk pengembangan kapasitas produktif masyarakat mereka. Justru mereka disibukkan dengan usaha untuk menguasai tanah dan tenaga kerja sebagai sumber kekayaan (melalui sewa, pajak, dan

upeti), kekuasaan (untuk menghidupi dan menyokong tentara), dan kejayaan (memampukan mereka mengonsumsi kemewahan, membangun istana, kuil, dan gereja, serta bertindak sebagai patron agama dan seni).

Eksplotasi tenaga kerja yang digerakkan oleh kebutuhan untuk memperluas skala produksi dan meningkatkan produktivitas demi menciptakan laba—singkatnya, *akumulasi*—adalah karekteristik dalam masyarakat kategori *ketiga*, yaitu kapitalisme. Ini adalah topik untuk bab selanjutnya, bahkan seluruh buku ini. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menghimpun beberapa gagasan dan konsep dari bab ini dalam kaitan dengan empat pertanyaan kunci ekonomi politik.

Ekonomi Politik: Empat Pertanyaan Kunci

Empat pertanyaan kunci ekonomi politik berikut ini merujuk pada relasi-relasi sosial dalam produksi dan reproduksi.

Siapa memiliki apa?

Siapa melakukan apa?

Siapa mendapatkan apa?

Digunakan untuk apa hasil yang mereka dapatkan itu?

Siapa memiliki apa?

Pertanyaan *pertama* berkaitan dengan relasi-relasi sosial dalam berbagai rezim “properti”: bagaimana alat-alat produksi dan reproduksi didistribusikan. “Kepemilikan” (*ownership*) dan “properti” (*property*) mempunyai arti yang berbeda-beda bagi tipe masyarakat yang berbeda pada momen sejarah yang berbeda. Gagasan dan praktik *kepemilikan pribadi* dan *barang milik pribadi* ditemukan dalam konteks kapitalisme dan membantu untuk menjelaskan kapitalisme itu sendiri. Persoalan ini sangat terkait

khususnya dengan *tanah*, basis dari usaha tani. Meluasnya konversi tanah menjadi barang milik pribadi—atau menjadi *komoditas*—merupakan salah satu karakteristik dalam kapitalisme.

Siapa melakukan apa?

Pertanyaan *kedua* adalah mengenai pembagian kerja secara sosial. Pihak yang melakukan aktivitas produksi dan reproduksi sosial telah terstruktur oleh berbagai relasi sosial. Hal itu terjadi, misalnya, di antara mereka yang mengerjakan tugas-tugas khusus dalam unit-unit produksi, para produsen yang membuat jenis-jenis barang yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan, dan di antara kelas-kelas yang berbeda dalam masyarakat agraris dan masyarakat kapitalis.

Siapa mendapatkan apa?

Pertanyaan *ketiga* adalah mengenai pembagian “hasil kerja” secara sosial, atau kerap disebut sebagai distribusi “pendapatan”. Seperti halnya kepemilikan dan properti atau barang milik (di atas), hasil kerja tidak hanya mengacu pada pendapatan sebagaimana diperoleh dalam kapitalisme, yaitu pendapatan uang bagi individu atau korporasi. Dalam masyarakat prakapitalisme, dan di beberapa bidang kehidupan penting dalam konteks kapitalisme sekarang ini, terdapat hasil kerja yang tidak berwujud pendapatan uang. Salah satu contohnya ialah pangan yang diproduksi oleh petani kecil untuk konsumsi mereka sendiri. Contoh lain ialah hasil kerja domestik dan kerja lain yang tak berbayar.

Digunakan untuk apa hasil yang didapat itu?

Pertanyaan *keempat* adalah mengenai relasi-relasi sosial dalam konsumsi, reproduksi, dan akumulasi. Saya telah menguraikan hal ini sebagai biaya konsumsi, biaya penggantian, biaya aktivitas seremonial, dan biaya renten. Tiga biaya yang disebut pertama

ditemukan di semua masyarakat agraris sejak awal mula. Sementara biaya rentan muncul seiring dengan terbangunnya masyarakat agraris yang terbagi atas kelas. Saya juga telah mencatat tentang penghakmilikan surplus tenaga kerja untuk tujuan-tujuan akumulasi produktif sebagai keunikan kapitalisme. Pertanyaan terakhir ini berkait dengan bagaimana relasi-relasi sosial yang berbeda dalam produksi dan reproduksi menentukan penggunaan dan distribusi produk sosial.

Keempat pertanyaan kunci tersebut dapat digunakan pada tempat dan skala aktivitas ekonomi yang berlainan, dari rumah tangga sampai “komunitas” hingga struktur kelas ekonomi di tingkat regional, nasional, dan internasional. Keempat pertanyaan kunci tersebut juga bisa diterapkan pada jenis-jenis masyarakat yang berbeda pada momen sejarah yang berbeda. Pada keempat pertanyaan tersebut juga terdapat urutan yang tersirat: relasi-relasi sosial properti membentuk pembagian kerja secara sosial, yang menentukan distribusi pendapatan secara sosial, yang pada gilirannya menciptakan ragam penggunaan produk sosial untuk konsumsi dan reproduksi—yang, dalam kasus kapitalisme, melibatkan akumulasi.

Catatan

¹ Terjemahan kutipan ini disalin dari *Capital* edisi Indonesia. Lihat Karl Marx, *Kapital: Buku I* (2004: 167)—catatan dari penerjemah.

² Poin ini diambil dari konsep ekologi yang mencakup manusia dan alam di luar manusia serta interaksi di antara keduanya.

³ Demi menyederhanakan pembahasan, saya tidak akan memasuki topik mengenai hasil tanam atau hasil ternak, sekalipun kedua hal itu penting dalam proses peningkatan produktivitas pertanian, sebagaimana disinggung di bawah. Salah satu ukuran dari hasil tanam adalah perbandingan antara tanaman yang dipanen terhadap jumlah benih yang ditanam. Bahasan terakhir ini sudah menjadi perhatian besar para sejarawan agraria.

- ⁴ Kesenjangan ini dapat ditunjukkan dari pembagian komoditas pertanian dalam perdagangan dunia saat ini. Sepuluh persen total produksi pertanian dunia diperdagangkan secara internasional. Produksi pertanian dari Amerika Serikat dan Uni Eropa masing-masing mencapai 17%; gabungan Kanada, Australia, dan Selandia Baru mencapai 15%; disusul Brasil, Argentina, Chili, dan Uruguay bersama-sama menyumbang 13%. Singkatnya, 62% ekspor pertanian dunia (diukur dari nilainya) berasal dari negara-negara yang jika ditotal berpenduduk 15% dari total populasi dunia dan hanya memiliki 4% tenaga kerja pertanian dari total jumlah tenaga kerja pertanian di dunia (Weis 2007: 21).
- ⁵ Situasi pada permulaan adanya kendaraan bermotor, sebelum produksi skala besar di pabrik-pabrik besar.
- ⁶ Hal ini menunjukkan suatu peralihan dari asumsi awal bahwa semua kebutuhan reproduksi harus dipenuhi dari apa yang diproduksi sekarang. Utang di sini mencerminkan suatu klaim atas pendapatan atau produksi di masa depan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan reproduksi saat ini.

BAB 2

Asal Mula dan Perkembangan Awal Kapitalisme

Menguraikan Karakteristik Kapitalisme

Kapitalisme sebagai suatu “cara produksi” dapat ditunjukkan dari tiga ciri yang saling berkaitan di bawah ini.

Produksi Komoditas yang Meluas

Dalam kapitalisme, produksi komoditas itu secara unik bersifat sistematis dan *meluas*. Barang-barang dan jasa terus berkembang. Barang-barang dan jasa diproduksi sebagai komoditas untuk dipertukarkan di pasar supaya mendapatkan laba. Persaingan di antara para kapitalis menggerakkan inovasi dan produktivitas—suatu perkembangan *sistemis* dari “kekuatan-kekuatan produktif” yang hanya ada (unik) dalam kapitalisme (dan juga memunculkan kecenderungan untuk menghasilkan produksi berlebih; simak Bab 4).

Keharusan Akumulasi

Kapitalisme terkenal dari betapa pentingnya *kapital produktif*. Kapital produktif diinvestasikan pada alat-alat produksi (tanah, peralatan, mesin, bahan baku, dan lain-lain) dan tenaga kerja yang menggunakan alat-alat produksi tersebut. Kapital produktif kemudian mengelola ini semua untuk membuat komoditas-komoditas baru, menciptakan nilai baru sebagai tahap penting dalam mewujudkan laba bagi investasi. Marx merumuskannya seperti ini:

uang (kapital), atau M, diinvestasikan dalam berbagai komoditas (alat-alat produksi dan tenaga kerja), atau C, agar menghasilkan komoditas-komoditas yang memiliki nilai uang lebih besar, atau M'. Jadi, rumus singkatnya adalah M-C-M'. Kemudian, laba (nilai lebih) diinvestasikan kembali guna membuat laba yang lebih banyak melalui siklus *akumulasi* yang tiada hentinya dalam menghasilkan produksi dan laba berikutnya—inilah yang disebut oleh Marx sebagai *reproduksi kapital yang diperluas*. Kapitalisme adalah satu-satunya cara produksi yang mensyaratkan tenaga kerja dan alat-alat produksi (terlebih tanah) tersedia seluas-luasnya sebagai komoditas.

Tenaga Kerja sebagai Komoditas

Di sini kita akan diantarkan pada ciri paling khusus dari cara produksi kapitalis sebagaimana telah disinggung sedikit di bagian Pendahuluan: bahwa cara produksi kapitalis bergantung pada *relasi sosial* antara para kapitalis sebagai pemilik alat-alat produksi dan para pekerja yang mempertukarkan tenaga kerja mereka, atau kapasitas bekerja mereka, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup (sarana-sarana untuk reproduksi). Tenaga kerja di sini sangat penting karena menjadi satu-satunya komoditas yang penggunaannya dalam produksi menciptakan nilai yang lebih besar daripada nilai tenaga kerja itu sendiri. Secara teoretis, hal ini karena

- nilai tenaga kerja (seperti halnya nilai komoditas lain) mencerminkan tenaga kerja yang digunakan ketika memproduksi nilai tersebut, dan dinyatakan dalam bentuk upah, yang demi itulah tenaga kerja dipertukarkan; dan
- tenaga kerja menjadi barang milik kapitalis yang membawanya dan mengatur penggunaan tenaga kerja tersebut

untuk memproduksi komoditas-komoditas baru yang menghasilkan nilai lebih besar.

Marx mengistilahkan investasi pada tenaga kerja sebagai *kapital variabel*, sementara investasi pada alat-alat produksi (mesin, bahan baku, dan lain-lain) sebagai *kapital konstan*. Kapital yang pertama disebut “variabel” karena hanya penggunaan tenaga kerja “hidup” yang mampu menghasilkan nilai baru. Sedangkan kapital berikutnya disebut “konstan” karena alat-alat produksi hanya bisa memberikan nilai yang telah ada pada dirinya (sebagai tenaga kerja “mati”, hasil dari produksi sebelumnya) untuk menciptakan komoditas-komoditas baru. Selisih antara nilai kapital variabel (bagian dari M pada rumus sederhana di atas) dan nilai komoditas-komoditas baru yang dihasilkan melalui investasi (M') adalah *nilai lebih*. Nilai lebih merupakan bentuk khusus yang di dalamnya surplus tenaga kerja dirampas untuk jalannya produksi kapitalis dan menjadi sumber laba kapitalis.¹

Tenaga kerja mempunyai sifat unik yang lain, yakni tidak terpisahkan dari pikiran dan tubuh pemiliknya (buruh). Karena itu, melalui aksi kolektif, para buruh—sebagai penjual kapasitas kerja—bisa melawan, melemahkan, atau membalik kondisi eksploitasi terhadap diri mereka.

Marx mengamati bahwa, dalam kapitalisme, para pekerja “bebas” untuk mempertukarkan tenaga kerja mereka demi upah kepada mereka yang memiliki alat-alat produksi (para kapitalis). Marx di sini bermaksud ironis. Dalam kapitalisme, para pekerja memang secara legal bebas (tidak seperti budak, misalnya), tetapi bagaimana jika mereka “memilih” untuk tidak mempertukarkan tenaga kerja mereka demi upah? Maksud Marx adalah paksaan-paksaan legal dan politik yang mengikat buruh, seperti halnya perbudakan atau perhambaan pada tipe masyarakat kelas sebelumnya, dalam kapitalisme digantikan oleh “paksaan samar dari

kekuatan-kekuatan ekonomi”: jual tenagamu atau kamu akan kelaparan—kamulah yang punya “pilihan”!

Dan Akumulasi Primitif

Produksi komoditas yang meluas, akumulasi, dan komoditas tenaga kerja tidak muncul begitu saja secara utuh, tiba-tiba, serentak, dan ada di mana-mana. Di mana dan kapan muncul, bagaimana, dan mengapa, semua ini masih menjadi persoalan dalam perdebatan mengenai asal mula dan perkembangan kapitalisme. Konsep kunci dalam perdebatan ini ialah akumulasi primitif: proses-proses yang melalui itulah masyarakat prakapitalis menjalani transisi menuju kapitalisme. Kondisi-kondisi sosial produksi kapitalis, eksploitasi, dan akumulasi pada mulanya harus diciptakan melalui cara-cara yang sudah ada pada masyarakat prakapitalis. Karena itu, akumulasi primitif biasanya diidentifikasi sebagai dinamika dan relasi-relasi “nonpasar”, atau “paksaan ekstraekonomi”, sebagai pembeda dari kapitalisme maju yang memiliki karakteristik kekuatan-kekuatan ekonomi berupa paksaan yang digerakkan oleh pasar.

Asal Mula Kapitalisme #1: Jalur-Jalur Transisi Agraria

Jalur Inggris

Bagi sejumlah ilmuwan, kapitalisme modern muncul sebatas melalui Revolusi Industri sejak akhir abad XVIII. Dapat dipastikan bahwa kemunculan industrialisasi modern (berbasis pabrik), dan segala sesuatu yang mengiringinya, mencerminkan suatu patahan yang tegas dari seluruh sejarah sebelumnya, yakni sejarah masyarakat agraris. Tetapi, bagi sejumlah ilmuwan yang lain, suatu *transisi menuju pertanian kapitalis* mendahului dan menjadi fondasi bagi hadirnya Revolusi Industri yang pertama di Inggris. Menurut pandangan ini,

asal mula kapitalisme terjadi sebagai transisi dari feodalisme di Eropa, semula di Inggris selama abad XV dan abad XVI. Feodalisme berdiri di atas relasi kelas antara pemilik tanah dan tenaga kerja petani. Dari situlah “surplus” yang dihasilkan oleh para petani dirampas oleh para tuan tanah melalui berbagai jenis renten, sebagaimana dicatat dalam Bab 1. Para petani memproduksi kebutuhan subsistensi mereka dari unit-unit pertanian kecil. Untuk itulah mereka membayar sewa atau memberikan upeti kepada tuan tanah feodal, mungkin mereka juga harus bekerja di perkebunan tuan tanah, sebagai bentuk jasa tenaga kerja atau sewa tenaga kerja (lihat Tabel 3.1 di Bab 3).

Pada akhir era pertengahan di Eropa (abad XIV dan abad XV), terjadi krisis sosial ekonomi yang meluas dan menghasilkan dampak berbeda bagi beragam masyarakat feodal. Inggris adalah negara feodal pertama yang secara bertahap memberi jalan bagi pembentukan struktur kelas baru pada masyarakat agraris yang terdiri atas kelas pemilik tanah kapitalis, kapital agraria, dan buruh tunakisma. *Pemilik tanah kapitalis* berbeda dengan pemilik tanah pada masyarakat kelas agraris prakapitalis karena sekarang lahan menjadi komoditas yang dimiliki oleh pemilik lahan yang memiliki hak pemilikan pribadi. Karena itu, tanah bisa dipindahtangankan: bisa dijual dan dibeli, disewakan, atau digadaikan. Artinya, para pemilik tanah kapitalis di pedesaan tidak perlu menanam sendiri lahan mereka (menjadi petani kapitalis), melainkan bisa menyewakan kepada petani yangenggarapnya.

Bentuk-bentuk penyewaan (*tenancy*) sudah ada sejak masyarakat agraris sebelum kapitalisme, dan saat ini pun masih dipraktikkan meluas di beberapa wilayah di Dunia Ketiga, terutama di Asia, contohnya petani bagi hasil di Bangladesh yang disebut di bagian Pendahuluan. Tetapi, pada transisi Inggris menuju kapitalisme agraria, tampak ciri mencolok, yaitu hadirnya petani penyewa yang menjadi bagian dari kemunculan kapital agraria. Mereka menyewa lahan pertanian secara komersial dan *untuk*

tujuan-tujuan komersial, yakni dengan berinvestasi pada produksi komoditas supaya menghasilkan banyak laba dan mengakumulasi. Singkatnya, lahan menjadi kapital produktif. Karena itu, muncul pertanyaan: siapa yang menyediakan tenaga kerja untuk menggarap lahan yang mereka sewa?

Pertanyaan ini berkaitan dengan kelas yang ketiga dan sangat penting dalam kapitalisme agraria, yaitu buruh tani tak bertanah atau tunakisma. “Tunakisma” tentu adalah penanda sosial yang kuat dalam masyarakat agraris. Jika Anda tidak punya lahan untuk digarap—apakah itu yang diakses melalui hak pakai sebagai anggota dari satu komunitas tani atau diakses melalui bentuk sewa-menyewa atau dengan pembukaan lahan baru untuk bercocok tanam—lalu bagaimana Anda bisa menjamin sarana untuk bertahan hidup? Kelas buruh tani tunakisma dibentuk melalui akumulasi primitif, yakni bentuk perampasan terhadap petani pedesaan yang menjadi syarat agar mereka mengalami *proletarianisasi*. Dalam kasus Inggris, mekanisme perampasan itu melalui konversi tanah menjadi komoditas, yakni komodifikasi (lalu menyewakan tanah itu kepada petani kapitalis penyewa). Komodifikasi tanah meliputi penutupan akses atas lahan bersama: lahan yang digunakan oleh komunitas tani untuk menggembala ternak, mengumpulkan kayu bakar, memancing, berburu, serta aktivitas-aktivitas lain yang menyediakan segala sesuatu untuk subsistensi yang diperoleh melalui kegiatan budidaya.

Meski Marx mampu mengidentifikasi ciri-ciri tertentu dari kemunculan kapitalisme secara umum, sesungguhnya ia melakukan hal itu berbasis pada pengalaman sejarah tertentu, yaitu sejarah Inggris. Hal ini tidak mengejutkan mengingat karya-karya matangnya dikerjakan di sana, ketika Inggris memiliki perekonomian kapitalis yang paling maju dan mengalami masa puncak Revolusi Industri pertama. Namun, kita perlu mencatat bahwa

kasus “klasik” dari transisi agraria di Inggris ini dapat dianggap sebagai pengecualian *karena* merupakan transisi yang pertama. Singkatnya, jalur Inggris belum tentu menyediakan model umum transisi agraria, baik mekanismenya (bagaimana hal itu muncul) atau bentuk khususnya (tiga serangkai kelas yang meliputi pemilik tanah kapitalis, kapital agraria, dan buruh terproletarianisasi). Beberapa contoh sejarah lain yang terkenal dapat memberikan penjelasan atas hal ini.

Jalur Prusia dan Amerika

Menambahkan transisi jalur Inggris versi Marx, Lenin (1870–1924) mengidentifikasi apa yang ia sebut sebagai jalur Prusia dan Amerika (Lenin 1964a). Pada jalur Prusia, pemilik tanah feodal prakapitalis bertransformasi menjadi produsen komoditas kapitalis, mengubah tenaga kerja petani sebelumnya menjadi pekerja yang bergantung pada upah—dan sering kali mengerahkan buruh tani musiman dari wilayah-wilayah pedesaan miskin dari berbagai tempat.² Lenin menyebutnya sebagai jalur Prusia karena dicontohkan oleh Jerman Timur abad XIX (buruh taninya berasal dari Polandia).

Jalur Amerika juga berbeda karena kapitalisme agraria di Amerika Serikat bagian utara dan barat tidak muncul sebagai transisi dari feodalisme sebagaimana di Dunia Lama Eropa (dan sebagian wilayah jajahan di Amerika Latin; simak Bab 3). Pada jalur Amerika, pertanian kapitalis muncul dari petani berlahan sempit yang sebelumnya independen, lalu secara berangsur semakin tunduk pada paksaan ekonomi dalam relasi komoditas sejak akhir abad XVIII (Post 1995). Dalam kondisi menyenjang ini, kuncinya terletak pada diferensiasi kelas dari mereka yang awalnya adalah kaum petani kecil—topik yang telah diperkenalkan sebelumnya dan akan digali lebih mendalam pada bab selanjutnya. Bagi Lenin, jalur Amerika menawarkan prospek yang lebih berkemajuan bagi Rusia daripada jalur Prusia

yang berpusat pada kelas militer-pemilik tanah berwatak autokratik yang berasal dari golongan feodal: golongan junker Prusia yang serupa dengan golongan tsar di Rusia.

Ketiga jalur yang dijelaskan sejauh ini diringkas dalam Tabel 2.1. Tabel tersebut diambil dari karya seminal Terence J. Byers (1996).

Jalur Asia Timur

Byres (1991) juga menunjukkan peran sektor agraria pada kemunculan industrialisasi kapitalis di Jepang dan Korea Selatan, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.2. Pada kasus ini, tidak berlangsung transisi ke arah kapitalisme agraria sebagaimana jalur Inggris dengan perampasan lahan dari petani kecil melalui penutupan akses atas lahan bersama. Di sini kita melihat akumulasi primitif untuk kepentingan industrialisasi melalui, sebagaimana dijelaskan Preobrazhensky (1965: 85), “pajak oleh pemerintah yang memberatkan petani *dan transformasi sebagian alat-alat [produksi] agar dapat menjadi kapital*” (cetak miring oleh saya).³

Sketsa jalur-jalur transisi ini memberi gambaran mengenai keragaman dan kerumitan sejarah, serta menawarkan tantangan untuk ditelaah. Sebagai contoh, dalam kasus Asia Timur, pertanian petani kecil menyumbang sebagian “surplus” menuju industrialisasi kapitalis *tanpa* transisi menuju kapitalisme agraria, sebagaimana terjadi secara berbeda pada jalur Inggris, Prusia, dan Amerika. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas:

- apakah perkembangan kapitalisme (selalu) terlebih dulu membutuhkan transisi menuju kapitalisme agraria (seperti kasus Inggris)?
- adakah serangkaian hubungan yang lebih luas antara perkembangan kapitalisme dan proses-proses perubahan agraria, dalam hal faktor-faktor pendorong perubahan dan bentuk-bentuk produksi pada lahan yang dihasilkan faktor-faktor tersebut?

- apakah perkembangan kapitalisme dapat dipahami dengan lebih baik, secara teoretis maupun historis, jika dilihat dari jalur-jalur “nasional” yang berbeda (Inggris, Prusia, dan Amerika, Jepang, Korea), atau jika dilihat dari akibat-akibat kapitalisme sebagai satu “sistem dunia”, yang muncul di tempat dan masa awal yang berlainan, berikut perkembangan lanjutannya?

TABEL 2.1

Jalur Transisi Agraria: Inggris, Prusia, Amerika Serikat

JALUR INGGRIS ABAD XV–XVIII	Dari hamba menjadi penyakap (abad XIV, abad XV); diferensiasi kelas petani secara bertahap	Dari bangsawan feodal menjadi pemilik tanah yang memiliki hak kepemilikan pribadi (abad XVI–XVIII, termasuk penutupan akses atas lahan bersama)	“Tiga serangkai” pemilik tanah kapitalis-petani kapitalis (termasuk petani penyakap)-buruh tani upahan	Transisi awal menuju pertanian kapitalis; ciri-ciri khususnya mencakup tuan tanah yang hendak meningkatkan produktivitas penggarap penyewa guna mendorong investasi pada produksi → “revolusi pertanian” pada abad XVIII
JALUR PRUSIA ABAD XVI–XIX	Penghapusan perhambaan pada 1807 (dipengaruhi oleh Revolusi Prancis)	Junker (simak penjelasan sebelumnya)	Dari sistem produksi manorial pada tanah bangsawan (<i>Grundherrschaft</i>) menuju ekonomi perkebunan komersial (<i>Gutherrschaft</i>), sebagian besar dengan buruh upahan yang terikat (bekas budak); sejak 1870-an pekerja (migran) upahan meningkat	“Metamorfosis internal dari ekonomi tuan tanah feodal” (Lenin); atau bentuk “kapitalisme dari atas”; bandingkan Jerman Selatan dan Jerman Barat; tidak ada kelas junker, diferensiasi petani → kemunculan pertanian kapitalis “dari bawah”

PETANI	TUAN TANAH	BENTUK PRODUKSI	KARAKTER TRANSISI
<p>JALUR AMERIKA ABAD XIX</p> <p>Tidak ada feodalisme; petani kecil independen di Amerika Utara pada abad XVII–XVIII, perkebunan yang mempekerjakan budak di Amerika Selatan pada abad XVII–XIX</p>	<p>Tidak ada pemilik tanah luas kecuali perkebunan di Southeastern</p>	<p>Konversi petani kecil independen menjadi produsen komoditas skala kecil sejak akhir abad XVIII; penyebaran pertanian (komersial) keluarga dari 1860-an, terutama dengan perluasan permukiman ke arah barat Sungai Mississippi, dengan didukung oleh pemerintah; relatif kekurangan tenaga kerja dan biaya upah tinggi → mekanisasi sejak 1870-an</p>	<p>Produksi komoditas skala kecil yang berasal “dari bawah” di Northeast dan sampai ke permukiman di wilayah padang rumput; pertanian kapitalis di California pada abad XIX; transisi yang tertunda menuju pertanian kapitalis dengan skala lebih besar di Amerika Selatan (sebagian besar setelah 1945)</p>

TABEL 2.2

Jalur Transisi: Asia Timur

Jalur Jepang abad XIX–XX	Berpusat pada penayakan dan meningkat selama 1860-an–1940	Kebanyakan adalah penduduk pedesaan dengan kepentingan meningkatkan usaha tani	Pertanian keluarga petani penayak (dengan industri lokal dan kerajinan yang meluas), hingga <i>land reform</i> pasca-1945 pemilik penggarap	Akumulasi primitif melalui penarikan pajak (lawan penjarahan) terhadap petani; peran utama negara
--------------------------	---	--	---	---

Jalur Korea Selatan

JALUR	PETANI	TUAN TANAH	BENTUK PRODUKSI	KARAKTER TRANSISI
(a) Periode kolonial Jepang (paruh awal abad XX)	Berpusat pada penya- kapan (seba- gaimana jalur Jepang)	Orang Jepang (kolonial) dan pribumi	Intensitas kerja yang ekstrem pada petani kecil yang menjadi pembayar se- wa dan pajak yang berat	Tidak ada transisi pada periode ini se- lain beberapa investasi oleh negara kolonial (mi- salnya untuk irigasi) guna mendorong produksi pa- di dan gula untuk ekspor ke Jepang
(b) 1950-an, <i>land reform</i> 1960-an	Pemilik penggarap	Pemilik penggarap	Intensitas kerja yang ekstrem pada pertanian keluarga	Negara mendorong akumulasi primitif un- tuk indus- trialisasi, difasilitasi oleh pajak yang mem- beratkan petani

Selanjutnya saya akan menggambarkan suatu pendekatan yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas dan pertanyaan serupa yang menggunakan pendekatan berbeda dari penyelidikan jalur-jalur “nasional” transisi menuju kapitalisme agraria.

Asal Mula Kapitalisme #2: Perjalanan Panjang Kapitalisme Perdagangan

Pendekatan terhadap asal mula dan perkembangan kapitalisme sebelum industrialisasi modern ini berpusat pada sejarah panjang “kapitalisme perdagangan”. Menurut beberapa ilmuwan, kapitalisme perdagangan berlangsung sejak abad XII hingga sekarang,

atau lebih umum diketahui sejak pertengahan abad XV. Pendekatan ini dikembangkan dalam kerangka Marxis yang diterapkan secara eksplisit dalam tulisan Jairus Banaji (2010) dan dalam langgam yang berbeda oleh Giovanni Arrighi (1994). Arrighi lebih menekankan pada siklus akumulasi finansial dan pembentukan negara, serta kurang menekankan pada relasi kelas antara kapital dan tenaga kerja. Karya ambisius Jason Moore (2003, 2010a, 2010b) berupaya untuk membahas sejarah yang lebih panjang dari perkembangan kapitalisme ini dalam hal keterhubungan antara pola-pola akumulasi, perluasan wilayah geografisnya berupa pembukaan “wilayah-wilayah pinggiran untuk komoditas” (pertanian, kehutanan, pertambangan, energi), dan perubahan ekologis.

Kapital dalam Kapitalisme Perdagangan

Pelaku-pelaku utama dalam sejarah panjang kapitalisme perdagangan meliputi kelas bangsawan pemilik tanah (dan selanjutnya pemilik tanah kolonial) yang mengelola produksi komoditas terspesialisasi di perkebunan mereka (Banaji 1997), kelas saudagar yang meminjamkan kredit dan material kepada para tukang dan produsen barang manufaktur yang lain (Banaji 2007), kelas kapital yang dengan cepat meningkatkan aktivitas ekstraktif seperti pertambangan dan kehutanan (Moore 2003, 2010a), dan kelas bankir yang banyak mendanai perkembangan aktivitas ekstraktif, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana ditunjukkan Arrighi (1994; juga Banaji 2007). Semua pelaku ini disebut sebagai kapitalis dalam pengertian sesungguhnya: mengeksploitasi tenaga kerja guna memperoleh laba; melakukan investasi untuk memperluas skala produksi, sering kali dengan meningkatkan produktivitas; serta mengembangkan dan mendanai tempat-tempat dan sumber-sumber produksi komoditas baru sekaligus tempat-

tempat dan sumber-sumber pasar yang diperuntukkan bagi komoditas.⁴ Semua ini terjadi sebelum kemunculan kapital industri modern, dan dalam banyak contoh terjadi sebelum, atau tidak tergantung pada, jenis-jenis baru kapital dan tenaga kerja agraria yang dihasilkan oleh transisi agraria jalur Inggris.

Buruh dalam Kapitalisme Perdagangan

Apa yang dilakukan kapital, dalam berbagai ragam bentuknya, dapat dijelaskan secara ringkas sebagai eksploitasi terhadap tenaga kerja, suatu kondisi yang digerakkan oleh kebutuhan memperluas skala produksi demi mengejar laba. Adakah penjelasan ringkas serupa yang dapat diterapkan untuk melingkupi berbagai bentuk historis tenaga kerja yang dieksploitasi kapital? Apa yang membuat tenaga kerja menjadi sasaran “penghisapan” kapital, istilah lain yang digunakan Marx, dan dengan demikian menjadi sasaran eksploitasi?

Di awal saya telah memberi jawaban standar atas pertanyaan itu: mereka yang tidak memiliki apa pun selain tenaga atau kapasitas bekerja (proletar) harus menjual tenaga demi upah agar memperoleh kebutuhan hidup (alat-alat reproduksi). Tetapi, dalam transisi menuju kapitalisme, petani kecil mungkin akan kehilangan kemampuan untuk mereproduksi diri di luar relasi komoditas dan pasar, *tanpa* perlu kehilangan tanah (dan alat-alat produksi lain). Bahkan, dinamika *komodifikasi subsistensi* ini, sebagaimana disebutkan oleh Robert Brenner (2001), mungkin memberi penjelasan lebih umum mengenai penghisapan tenaga kerja oleh kapital daripada bentuk khusus penghisapan seperti penjarahan langsung sebagaimana sering diisyaratkan dalam gagasan tentang “proletarianisasi”. Dengan begitu, kondisi “bebas” pada tenaga kerja upahan hanya merepresentasikan satu bentuk, meski bentuk tersebut adalah bentuk yang paling “maju”, dari komodifikasi

subsistensi.

Gagasan “kapitalisme perdagangan” dapat menggunakan konsep “kapital” dan “kapitalis” secara lebih luas dan lebih fleksibel daripada konsep-konsep yang dikaitkan dengan gagasan Marx tentang “cara produksi kapitalis” yang ia bikin teorinya dalam kaitan dengan kapitalisme industri. Hal ini berlaku pula bagi konsepsi “kelas-kelas tenaga kerja” dalam “kapitalisme perdagangan”. Gagasan penting dalam argumen Banaji yakni kapital mempunyai kapasitas mengeksploitasi tenaga kerja lewat rentangan tatanan sosial yang luas dalam keadaan sejarah yang berbeda-beda, termasuk perbudakan dalam produksi komoditas perkebunan yang terspesialisasi. Ia juga dapat menggambarkan perbandingan antara bangunan rezim tenaga kerja dan proses-proses kerja pada perkebunan komersial, yang meluas sejak akhir Mesir Romawi, masa kolonial Meksiko dan Peru, hingga masa setelah kemerdekaan Amerika Latin dengan *hacienda*-nya dan masa kolonial di Afrika Selatan dan Kenya dengan pertanian pemukim Eropa (Banaji 1997). Lebih lanjut, perbandingan tersebut menunjukkan betapa cair dan ambigu kategori seperti “buruh tunakisma”, “petani penyakap”, dan “petani kecil” dalam realitas sosial. Orang yang sama bisa berpindah di berbagai posisi tersebut pada waktu yang berbeda atau bahkan berada dalam semua posisi itu pada saat bersamaan. Asumsi mengenai pemilahan antara tenaga kerja “bebas” dan “takbebas”, dengan cara yang sama, juga bisa cair dan ambigu. Sekalipun buruh upahan proletar “bebas” (seperti dijelaskan di atas) tetap merupakan bentuk tenaga kerja paling “maju” dalam kapitalisme, dan tumbuh dalam bobot yang relatif seturut dengan perkembangan kapitalisme, tetapi mereka bukan satu-satunya tipe tenaga kerja yang dieksploitasi kapital; sehingga mereka bukanlah keunikan tersendiri dari asal mula dan perkembangan kapitalisme.

“Jalur-Jalur” Transisi dan “Sejarah Mendunia” Kapitalisme

Akhirnya, jelas bahwa mereka yang berfokus pada sejarah yang lebih panjang dari “kapitalisme perdagangan” berpendapat bahwa kapitalisme adalah “sejarah yang mendunia” sejak asal mulanya, yakni bahwa kapitalisme membutuhkan keterlibatan pola-pola perdagangan dan permodalan internasional. Satu ilustrasi bagus terkait hal ini adalah empat “rezim akumulasi” yang muncul berurutan dalam sejarah sistem dunia kapitalis versi Arrighi (Arrighi dan Moore 2001): Genoa-Iberia (abad XV hingga awal abad XVII), Belanda (akhir abad XVI hingga akhir abad XVIII), Inggris (dari pertengahan abad XVIII hingga awal abad XX), dan Amerika (dari akhir abad XIX, dengan hegemoni atau dominasinya yang mulai terkikis sejak akhir abad XX?). Dilihat dari sudut pandang ini, awal transisi menuju kapitalisme agraria di Inggris berlangsung selama periode hegemoni kapitalisme dunia oleh Belanda, sementara Inggris menjadi hegemonik hanya ketika memelopori Revolusi Industri.⁵

Teori dan Sejarah: Kompleksitas

Pembahasan di bagian ini menyingkap dua konsepsi yang berbeda tentang kapitalisme agraria. Konsepsi *pertama* berdasar pada generalisasi atas jalur Inggris beserta struktur kelas pemilik tanah kapitalis dan kapital agrariannya yang mempekerjakan buruh upahan tunakisma (kaum proletar) sebagai keunikan tersendiri dari kapitalisme agraria. Sementara itu, konsepsi *kedua* tampak dalam penolakan Banaji atas kapitalisme agraria dalam bentuknya yang tunggal, seragam, atau “murni”. Banaji mengajukan gagasan bahwa lebih baik “kapitalisme agraria dilihat sebagai ... sesuatu yang didasarkan atas penjarahan dan kontrol terhadap tenaga kerja

oleh kelas-kelas agraria yang terlibat dalam pertanian yang bersifat bisnis” (Banaji 2002: 115). Banaji menekankan bahwa terdapat banyak bentuk konkret penjarahan dan kontrol oleh kapital terhadap tenaga kerja agraria yang terjadi dalam beragam kondisi sejarah: beragam alur pergerakan penghisapan tenaga kerja yang terhubung dengan berbagai alur pergerakan akumulasi.

Persoalan lain yang menimbulkan pertentangan—yang dari situlah muncul dua pendekatan yang berlainan—adalah apakah abstraksi yang diformulasikan oleh Marx untuk meneorikan “cara produksi kapitalis” industri dapat, dan harus, diterapkan *secara mundur* ke masa sebelumnya dalam upaya memahami asal mula dan perkembangan awal kapitalisme, terutama pada masyarakat agraria. Pertimbangkan, sebagai contoh, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- seberapa ketat seharusnya pemilahan antara kapital yang diinvestasikan dalam produksi dan kapital yang diinvestasikan dalam sirkulasi komoditas—dalam *Capital*-nya Marx, masing-masing disebut sebagai kapital industri dan kapital perdagangan—dapat diterapkan pada sejarah “kapitalisme komersial” *sebelum* industrialisasi?
- seberapa ketat seharusnya tenaga kerja—basis perampasan nilai lebih (eksploitasi) dan laba bagi kapitalis—dibatasi hanya pada kaum proletar yang bekerja sebagai buruh upahan “bebas”?
- bagaimana kita menentukan dari sekian banyak bentuk khusus kapital dan tenaga kerja dalam sejarah, mana yang “kapitalis”—elemen integral dari asal mula dan perkembangan kapitalisme—dan mana yang bukan? Jika bukan demikian, apakah bentuk-bentuk khusus itu “prakapitalis”? Apakah bentuk-bentuk khusus itu bagian dari akumulasi primitif? Atau, mungkinkah bentuk-bentuk khusus itu me-

representasikan bentuk kapitalisme dalam tahapan “maju” yang berbeda di tempat berbeda dan pada masa berbeda di sepanjang lintasan perkembangan kapitalisme?

- apakah bentuk-bentuk kapital dan tenaga kerja yang kurang “maju”, di sektor-sektor dan cabang-cabang tertentu dalam sistem kapitalis yang lebih luas, pada waktu dan tempat tertentu, terhubung dengan bentuk-bentuk yang lebih “maju” sebagai aspek integral dari perkembangan kapitalisme yang sangat takrata pada skala global?

Saya telah menyinggung pertanyaan pertama dan kedua di atas. Pertanyaan ketiga dan keempat secara khusus menandai perpindahan dari serangkaian gagasan dan perdebatan mengenai asal mula kapitalisme menuju deretan gagasan dan perdebatan mengenai struktur dan kerja ekonomi dunia kapitalis. Bagian penting dari yang disebut terakhir adalah fase-fase kolonialisme Eropa yang beragam sejak abad XVI hingga abad XX, apa yang mendorongnya, bentuk kapitalisme apa yang diambil, jenis perubahan agraria seperti apa yang muncul, serta apa akibat-akibat susulan dari perubahan agraria tersebut—semua itu menjadi pembahasan dalam Bab 3. Kita akan melihat bahwa penafsiran atas dinamika historis-dunia ini dibentuk, pada beberapa bagian penting, oleh isu-isu menyangkut pendekatan alternatif mengenai asal mula kapitalisme yang telah dibahas di sini.

Catatan

¹ *Tingkat nilai lebih* adalah perbandingan antara nilai baru terhadap nilai kapital variabel yang diinvestasikan untuk menghasilkan nilai baru tersebut, sementara *tingkat laba* adalah perbandingan antara nilai baru terhadap nilai kapital variabel dan nilai kapital konstan yang diinvestasikan untuk menghasilkan nilai baru tersebut.

² Ini satu pola umum di banyak pedesaan di Selatan, bahkan di Utara saat ini: orang-orang Afrika Barat dan Afrika Utara di Eropa bagian selatan; orang-orang

Eropa Timur dan Eropa Tengah di Eropa bagian utara; orang-orang Amerika Latin di Amerika Serikat.

- ³ Cerita ini tentu saja lebih rumit sebagaimana seluruh proses sejarahnya. Sembari menjadi sasaran peningkatan pajak selama abad XIX hingga awal abad XX, petani Jepang—didorong oleh tuan tanah dan pemerintah—juga meningkatkan hasil panen padi dalam jumlah besar dan menghasilkan serangkaian industri lokal yang dinamis menggunakan bahan-bahan hasil pertanian (Francks 2006).
- ⁴ Moore (2010a) menunjukkan perkembangan utama kekuatan-kekuatan produktif pada abad setelah 1450 dalam hal pertambangan perak, produksi gula, kehutanan, pembuatan besi, dan pembuatan kapal. Tetapi, perlu dicatat bahwa daftar tersebut tidak mencakup pertanian padi-padian.
- ⁵ Perhatikan bahwa Belanda sangat dekat mengejar Inggris dalam hal transisi pertama menuju kapitalisme agraria—sekali pun, sekali lagi, Belanda menempuh jalur yang agak berbeda—begitu juga dalam hal awal industrialisasi kapitalis. Skema Arrighi menunjukkan suatu pergeseran pusat-pusat kekuasaan ekonomi dalam perkembangan kapitalisme global, dari Eropa bagian selatan ke Eropa bagian utara, serta perdagangan dan keuangan dari kiblat Mediterania ke kiblat Atlantik.

BAB 3

Kolonialisme dan Kapitalisme

KAPAN dan bagaimana kapitalisme berkembang sebagai suatu sistem dunia dan meluas di berbagai wilayah pada masa modern, sejarahnya beragam dan rumit. Dalam bab ini saya hanya menggambarkan satu elemen penting dalam bangunan dunia modern, yakni beragam tipe kolonialisme dan dampak-dampaknya yang mencengkeram di Amerika Latin, Asia, dan Afrika pada waktu berbeda-beda.

Fase-Fase Kolonialisme

Feodalisme dan Kapitalisme Perdagangan (Abad XVI)

Dorongan, bentuk, dan intensitas kumulatif “ekspansi Eropa” melalui kolonialisme awalnya digerakkan oleh krisis feodalisme yang disambut dengan perkembangan kapitalisme perdagangan (Bab 2). Pada abad XVI, kali pertama kekuasaan kolonial mencengkeram di Karibia dan sebagian Amerika Latin. Penaklukan Spanyol di kedua kawasan itu telah membawa dampak-dampak demografis dan ekologis yang sangat menghancurkan. Didorong untuk mencari harta karun, dimulailah penjelajahan dari Eropa ke kawasan Hindia melalui rute barat. Penjelajahan itu berujung pada pembukaan besar-besaran tambang perak di Peru dan kemudian Meksiko. Pertambangan itu menyerap sangat banyak pekerja paksa dari penduduk pribumi. Kala itu, Inggris dan Belanda, dua negara kecil di bagian barat laut Eropa, bergerak cepat menuju kapitalisme agraria dan selanjutnya kapitalisme industri (Bab 2). Spanyol dan Portugis,

keduanya menjajah Brasil, menghadapi persaingan yang kian ketat dari Inggris dan terutama Belanda, baik dalam perkembangan ekonomi domestik maupun perdagangan laut internasional.

Pedagang, Budak, dan Perkebunan (Abad XVII dan Abad XVIII)

Sepanjang abad XVII, bentuk-bentuk baru pendudukan, produksi, dan perdagangan kolonial tampak dari kepentingan Inggris di Amerika Utara serta pendudukan Inggris dan Belanda di Karibia. Di Virginia, wilayah koloni Inggris di Amerika Utara, terbentuk ekonomi perkebunan. Awalnya menggunakan kuli kontrak dari Eropa, kemudian beralih ke tenaga budak dari Afrika. Dibandingkan perdagangan rempah-rempah dan sutra mewah dari Asia, ekspor tembakau dan kapas dari koloni-koloni Inggris di Amerika, juga gula dari koloni di Karibia, jadi semakin penting bagi ekonomi Inggris, terutama bagi kemunculan kelas pemilik pabrik. Ringkasnya, kolonisasi Inggris di Amerika Utara dan Karibia mengawali bentuk perdagangan internasional baru. Dari produksi bahan-bahan mentah skala besar di wilayah koloni untuk kegiatan manufaktur di Eropa, pengambilan tenaga budak dari Afrika untuk produksi perkebunan, hingga perkembangan pasar untuk barang-barang Eropa di wilayah koloni. Tujuan pertama perdagangan budak Afrika adalah perkebunan-perkebunan tebu di pesisir Brasil. Belanda memainkan peran utama dalam penyebaran produksi berbasis perbudakan ke kawasan-kawasan pesisir dan pulau-pulau utama di Karibia. Budak dikirimkan untuk memenuhi permintaan para pedagang dan pabrik gula di Belanda. Sementara Inggris mengembangkan sistem perkebunan yang mempekerjakan budak di wilayah yang sekarang disebut Southern United States [atau secara ringkas disebut South, kawasan Amerika Serikat bagian tenggara].

Di luar semua momen penting kolonisasi dan hubungannya dengan alur pergerakan akumulasi di Eropa tersebut, terjadi pe-

nurunan nisbi dalam perdagangan internasional Eropa pada paruh kedua abad XVII. Dalam periode itu juga terjadi penurunan nisbi atas kekayaan perusahaan-perusahaan dagang Eropa di luar negeri. Hal ini terkait dengan berbagai peristiwa pergolakan di Eropa, salah satu yang berpengaruh adalah perang perdagangan merkantilis. Perang jenis baru ini terjadi terutama di laut dengan menggunakan armada bersenjata.

Abad XVIII adalah abad kebangkitan dan intensifikasi ekspansi Eropa. Perdagangan budak asal Afrika Barat di wilayah Atlantik meningkat pesat. Para petualang dan pedagang Eropa memperluas wilayah jelajah mereka, termasuk melakukan penjarahan dan memburu keuntungan komersial di sepanjang pesisir Afrika dan daratan Asia. Berbagai aktivitas ini adalah lanjutan dan perkembangan dari bentuk-bentuk ekspansi yang telah dimulai pada abad XVI. Ekspansi kali ini ditandai dengan konflik bersenjata di antara sesama negara Eropa, juga antara mereka dan bangsa-bangsa di wilayah-wilayah yang ingin mereka taklukkan. Kemenangan Inggris atas Prancis untuk menguasai India dan Kanada menjadi contoh yang menunjukkan betapa luasnya wilayah ekspansi kolonial dan persaingan bangsa-bangsa Eropa pada pertengahan abad XVIII.

Alhasil, di sepanjang abad XVII dan abad XVIII, “ekspansi Eropa” semakin intensif, sementara pembagian kerja internasional seperti yang dikenal sekarang mulai terbentuk. Sebagian besar kolonisasi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dagang ketimbang oleh negara-negara Eropa sendiri, kecuali kolonisasi Spanyol dan Portugis di Amerika Latin. Tentu saja, pada saat bersamaan, negara-negara Eropa menyokong perusahaan-perusahaan dagang mereka, contohnya East India Company (EIC) dan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Sokongan itu berupa sarana-sarana politik, diplomatik, dan militer, terutama angkatan laut.

*Kapitalisme Industri dan Imperialisme Modern
(Abad XIX dan Abad XX)*

Selama abad XIX, ekonomi dunia kapitalis dibentuk secara cepat oleh industrialisasi, dengan titik balik pada 1870-an dan bermulanya “Revolusi Industri kedua” (lihat Bab 4). Kondisi ini melahirkan permintaan komoditas pertanian tropis yang semakin besar untuk pengolahan dan manufaktur, juga permintaan atas mineral dari tambang-tambang di wilayah jajahan. Sejak 1870-an, dunia mengalami peningkatan investasi luar negeri dalam sektor ekstraktif kolonial (perkebunan, pertanian, pertambangan) dan jalur-jalur transportasi yang menghubungkannya ke pasar dunia (rel kereta, pengapalan). Gelombang besar terakhir dari ekspansi kolonial (di Afrika Sub-Sahara, Asia Tenggara, dan Asia Barat) kini dikendalikan oleh negara-negara Eropa, bukan oleh perusahaan-perusahaan dagang mereka. Dunia juga menyaksikan meningkatnya kepekaan industri Inggris, walaupun dilindungi sebagian oleh sistem penjajahannya dalam persaingan dengan ekonomi Jerman dan Amerika Serikat yang dengan cepat terindustrialisasi. Jepang juga muncul sebagai kekuatan industri non-Barat yang pertama.

Afrika adalah contoh dari cepatnya gelombang terakhir ekspansi kolonial. Pada 1876, Eropa menguasai sekitar sepersepuluh wilayah Afrika, terutama bagian utara yang berbatasan dengan Laut Tengah dan wilayah-wilayah koloni yang sekarang menjadi Afrika Selatan. Pada 1900, mereka memperluas dominasi hingga mencakup 90% benua Afrika. “Perebutan Afrika” diformalisasi pada Konferensi Berlin pada 1884–1885. Ketika itu, ekonomi dunia mengalami siklus pertama lonjakan yang diikuti dengan kemerosotan akibat kapitalisme industri yang disebut sebagai Depresi Besar Eropa pada akhir abad XIX (1873–1896), lantas diikuti “zaman keemasan” pada 1896–1914.

Bagi Lenin (1964b), Depresi Besar pada akhir abad XIX menandai suatu titik balik kritis dari tahap awal kapitalisme “kompeti-

tif” ke arah apa yang dia sebut sebagai kapitalisme monopoli atau imperialisme yang dicirikan oleh konsentrasi modal dalam bentuk korporasi industri besar yang berhubungan erat dengan bank. “Monopoli” bukan berarti terhentinya kompetisi, melainkan mengambil bentuk yang lebih ekstrem dan berbahaya yang berujung pada Perang Dunia I pada 1914, proses yang menjadi stimulus langsung bagi teori imperialisme Lenin. Ia menunjukkan bahwa ekspansi kolonial Eropa pada akhir abad XIX tidak seperti gelombang kolonialisasi pertama. Ekspansi kali ini didorong oleh kebutuhan menemukan jalan keluar baru untuk mengeksport modal, karena dua alasan. *Pertama*, dinamika akumulasi yang harus terus melaju memaksa kapitalisme industri menambah sumber-sumber bahan mentah dan memperluas pasar bagi barang-barang hasil industrinya. *Kedua*, pencarian peluang investasi di luar negeri karena kompetisi yang kuat di Eropa telah menekan tingkat keuntungan kapital.

Teori imperialisme Lenin mendapatkan kritik dari aspek analisis, empiris, dan ideologis. Salah satu kritik itu menyatakan bahwa dua elemen utama imperialisme yang diidentifikasi Lenin menggunakan contoh negara-negara Eropa yang memiliki perbedaan jalur perkembangan kapitalisme dan dengan luasan wilayah jajahan yang timpang. Di satu sisi, Inggris menjadi contoh negara dengan ekspor kapital dan punya kekuasaan kolonial yang luas, meski jauh lebih banyak investasi luar negerinya mengarah ke wilayah koloni Eropa di Amerika daripada ke wilayah-wilayah koloni di Asia dan Afrika. Di sisi lain, Jerman pada saat itu merupakan contoh terbaik dari kombinasi dan konsentrasi korporasi industri raksasa dan perbankan, yang disebut Lenin (mengikuti Hilferding 1981) sebagai “kapital keuangan”, serta memiliki wilayah koloni lebih sedikit. Kritik lainnya terhadap Lenin adalah karena ia terlalu melebih-lebihkan proses-proses yang ia identifikasi, yang sebetulnya lebih jelas terlihat sekarang dalam

bentuk “globalisasi” dibandingkan dengan bentuknya pada awal abad XX.¹

Sementara Lenin berupaya mengaitkan kemerosotan ekonomi di Eropa pada abad XX dengan kemunculan imperialisme modern dan berakhirnya gelombang besar kolonialisasi kapitalis, bagian teorinya yang terus berlanjut adalah: imperialisme tidak bergantung pada wilayah jajahan. Pada konteks 1916, ia mengambil contoh Argentina, negara yang merdeka secara politik (kebanyakan penduduknya adalah imigran Eropa), yang digambarkan Lenin sebagai “semikoloni” dari kapital Inggris. Ia juga mencontohkan Portugis, satu negara klien Inggris sekaligus kekuatan kolonial kecil di Afrika dan Asia (setelah kehilangan Brasil, salah satu bekas permata pada mahkota imperium Portugis).

Imperialisme sebagai bentuk internasional kapitalisme modern yang khas karenanya punya makna berbeda dengan “imperium” sebagai suatu entitas politik. Imperium kolonial Inggris, misalnya, merupakan salah satu dari sekian banyak contoh, seperti imperium Roma atau imperium besar masa lalu di Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Timur. Lenin secara gamblang menyatakan bahwa imperialisme modern akan terus hidup setelah kolonialisme berakhir. Selanjutnya, cukup masuk akal menyatakan bahwa imperialisme sebagai suatu ekonomi dunia yang sepenuhnya bersifat kapitalis hanya bisa dimatangkan lewat kemerdekaan dari kolonialisme di Asia dan Afrika untuk membuka jalan bagi “paksaan samar dari kekuatan ekonomi”, baik secara internasional maupun domestik, untuk menggantikan kekerasan politik dan legal dalam kekuasaan kolonial (Wood 2003).

Penjelasan lebih lanjut mengenai periode sejak berakhirnya imperium kolonial akan saya bahas dalam Bab 4 dan Bab 5. Selanjutnya, saya hendak mengelaborasi secara ringkas ulasan mengenai kapitalisme dan kolonialisme ini, guna menggambarkan bagaimana kolonialisme memengaruhi kehidupan orang-orang

dalam berbagai masyarakat agraris yang mereka taklukkan. Saya memberi perhatian khusus pada tenaga kerja dan tanah mereka.

Kolonialisme dan Perubahan Agraria

Proyek kolonial bergantung pada bagaimana membuat wilayah-wilayah koloni “membiayai diri” dan menghasilkan keuntungan bagi kekuasaan kolonial. Hal ini mengharuskan kontrol atas tenaga kerja rakyat tanah jajahan dari masyarakat agraris, sehingga membutuhkan intervensi terhadap institusi dan praktik-praktik alokasi dan tata guna tanah yang kadang kala menghancurkan, atau memodifikasi institusi dan praktik tersebut. Pembentukan ekonomi kolonial melibatkan penghancuran metode subsistensi petani dan sewa-menyewa prakolonial (dalam masyarakat kelas agraria). Di sini saya hanya bisa menggambarkan beberapa cara bagaimana kekuasaan kolonial berupaya mengubah struktur berbagai macam relasi agraria yang berbeda-beda, yang mereka temukan di tempat dan waktu yang berbeda, dan beberapa pengaruhnya (baik disengaja maupun tak disengaja).

Amerika Latin dan Karibia

Perubahan agraria akibat kolonialisasi paling awal terjadi di Karibia, Amerika Latin, dan Amerika Utara, wilayah-wilayah produksi berbasis perbudakan pada masa kebangkitan ekonomi dunia kapitalis, mulai dari perkebunan tebu jajahan Portugis di Brasil, jajahan Inggris dan Prancis di Karibia, hingga perkebunan kapas dan tembakau di koloni-koloni Inggris di bagian selatan Amerika Utara. Pada masa penaklukan tanah jajahan, zona-zona perkebunan Dunia Baru tersebut dihuni masyarakat “subsisten” yang nisbi kecil. Perampasan paksa terhadap masyarakat pribumi guna memperoleh tanah berlangsung relatif mudah, sementara pemilik perkebunan kolonial mengatasi masalah ketersediaan tenaga kerja melalui impor

budak. Perbudakan pada akhirnya dihapuskan di tanah jajahan Inggris pada 1833 dan di Amerika Serikat pada 1865, Brasil pada 1888, dan Kuba pada 1889.

Di kebanyakan jajahan Spanyol di Amerika, bentuk lain penguasaan atas tanah mendominasi kehidupan ekonomi pedesaan dan sebagian besar kehidupan sosial, politik, dan budaya pedesaan sejak akhir abad XVII. Bentuk penguasaan tanah itu disebut *hacienda* atau perkebunan besar perorangan. Sistem *hacienda* mengadaptasi institusi feodal dan praktik-praktik yang akrab bagi penjajah Spanyol. Sistem ini mengombinasikan pemberian hak kepada pendatang untuk menarik pajak upeti dari masyarakat pribumi dalam bentuk barang atau tenaga kerja (*encomienda*) dengan hak atas tanah (*mercedes de tierras*) yang awalnya diberikan sebagai imbalan atas jasa militer kepada Kerajaan Spanyol. Kombinasi tanah dan tenaga kerja dalam *hacienda* menciptakan suatu tipe penguasaan tanah yang secara struktural sangat mirip dengan tanah perkebunan bangsawan di masa feodalisme Eropa, termasuk dua bentuk dasar untuk pengorganisasian usaha tani, seperti tercantum dalam Tabel 3.1 (berdasarkan Kay 1974).

Untuk mengamankan penguasaan atas tenaga kerja pedesaan dibutuhkan perampasan dan penjarahan tanah, sebagai upaya untuk menghancurkan akses petani pribumi atas sarana-sarana subsistensi. Perluasan keragaman bentuk sistem *hacienda* mencerminkan beberapa faktor. Bentuk awal dan perluasan sistem ini melibatkan pertarungan panjang, terutama di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi serta komunitas petani yang kuat, seperti di sebagian Amerika Tengah dan Pegunungan Andes. Pada daerah dengan kepadatan penduduk rendah seperti dataran rendah Argentina, Uruguay, dan Chili, bentuk *hacienda* muncul belakangan dan lebih cepat, dengan ketersediaan tenaga kerja yang dapat dipenuhi melalui imigrasi.

TABEL 3.1
Dua Jenis *Hacienda*

TATA GUNA LAHAN	REZIM TENAGA KERJA	BENTUK PERAMPASAN SURPLUS
A. Lahan pertanian gabungan (terutama lahan garapan petani kecil)	Petani kecil menggarap tanah yang dialokasikan kepada mereka dan proses-proses kerja dikontrol	Sewa dalam bentuk barang, sewa dalam bentuk uang, bagi hasil panen
B. Perkebunan tuan tanah (lahan pertanian tuan tanah plus sebidang tanah untuk petani “subsisten” atau <i>minifundia</i>)	Petani bekerja di perkebunan tuan tanah (lahan yang luas) sembari mengelola sebidang tanah untuk subsistensi mereka	Sewa dalam bentuk tenaga (= bekerja di pertanian tuan tanah tanpa dibayar)

Faktor utama lainnya berhubungan dengan waktu dan tempat. Pertarungan antara tuan tanah kolonial dan petani pribumi juga dipengaruhi oleh pola sejarah komersialisasi pertanian dalam perkembangan dan fluktuasi pasar dunia. Ketika potensi keuntungan pertanian meningkat dengan meningkatnya permintaan pasar, tuan tanah berupaya memperluas lahan mereka dan memaksa penyewa *hacienda* untuk lebih banyak bekerja, sehingga mengubah sewa dalam bentuk barang atau uang menjadi sewa tenaga kerja. Ketika pemilik tanah menghadapi kekurangan tenaga kerja untuk pertanian komersialnya dan tidak mampu mengatasinya melalui pemaksaan, mereka mungkin harus membayar kerja para penyewa, setidaknya sebagian, sehingga mendorong terjadinya transisi dari sewa tenaga menjadi kerja upahan (sebagaimana terjadi di sepanjang berbagai jalur transisi di Eropa).

Terdapat perdebatan di antara para sejarawan mengenai di mana, seberapa banyak, dan *kapan* praktik jeratan utang menja-

di instrumen dalam merekrut tenaga kerja untuk perkebunan komersial besar. Jeratan utang merupakan suatu tatanan di mana mereka yang berutang, khususnya petani kecil dan buruh pedesaan tunakisma, harus bekerja untuk membayar utang mereka kepada pemberi utang—tuan tanah, petani kaya, tengkulak, atau umum ditemukan di Asia adalah pihak ketiga yang membeli atau “mencalokan” utang. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa transisi menuju kerja upahan di Amerika Latin berlangsung relatif lebih awal (sejak abad XVII di beberapa wilayah produksi komersial *hacienda*), sekalipun kerja upahan sering dan untuk waktu yang lama menyandang elemen-elemen ikatan utang dan paksaan lainnya terhadap “kebebasan” tenaga kerja upahan. Hal ini menyentuh isu tentang bagaimana menjelaskan ciri tenaga kerja pertanian, seperti dicatat dalam Bab 2, juga akan saya jelaskan kembali di akhir bab ini.

Sebagian besar bangsa Amerika Latin merdeka dari penjajahan pada paruh pertama abad XIX (sebelum sebagian besar Afrika dijajah) dengan mewariskan keterampilan tanah yang meluas dan konsentrasi kepemilikan tanah rampasan tersebut pada *hacienda-hacienda*; pembatasan sebagian besar usaha tani masyarakat pribumi hanya di level sub-subsisten yang disebut *minifundios*, yang berlawanan dengan *latifundios* yang luas (nama lain *hacienda*); serta meluasnya fenomena tenaga kerja upahan pedesaan yang kerap kali berkombinasi dengan usaha tani marginal dan elemen-elemen ikatan utang dan pemaksaan pemerintah.

Amerika Latin memasuki suatu ledakan ekspor pertanian baru sejak 1870-an hingga 1920-an, yang melibatkan perluasan dan intensifikasi produksi *hacienda*, dari wilayah tropis dan subtropis di Amerika Tengah hingga usaha tani padi-padian dan ternak di padang rumput Uruguay, Argentina, dan Chili. Di dataran rendah Meksiko bagian selatan,

kombinasi antara pasar yang kuat untuk ekspor pertanian tropis (sisal, karet, tebu), kekurangan tenaga kerja, isolasi geografis, dan ... kesediaan pemerintah untuk mendukung pemilik perkebunan dengan kekerasan menjelaskan perbudakan total masyarakat suku Maya dan Yaquis ... di Meksiko awal 1870-an, di Guatemala di mana pengurangan tanah Indian dibarengi oleh aturan-aturan antigelandangan, di Bolivia di mana dua per tiga populasi pedesaan menjadi tergantung kepada *hacienda*, dan pada kenyataan bahwa di sepanjang punggung Pegunungan Andes, sumberdaya dan sarana-sarana mata pencaharian mandiri bagi kebanyakan kaum pedesaan kian terkikis. (Bauer 1979: 37, 52)

Beberapa masalah kekurangan tenaga kerja diatasi melalui imigrasi. Antara 1847 dan 1874, lebih dari seperempat juta orang kuli kontrak Tiongkok memeras keringat di perkebunan Kuba dan pesisir Peru. Di Brasil, dengan berakhirnya perbudakan, pemilik kebun kopi berhasil membuat pemerintah menyubsidi biaya imigrasi massal dari Eropa. Sejak 1884 hingga 1914, lebih dari 900 ribu imigran tiba di Sao Paulo, kebanyakan mereka bekerja di perkebunan kopi (Stolcke dan Hall 1983).

Amerika Latin saat ini mungkin mempunyai rentang terluas bentuk-bentuk relasi sosial agraris dan pertanian di seluruh dunia. Di satu sisi, secara nisbi terdapat sedikit orang yang menjadi tenaga kerja pertanian daripada yang ada di wilayah utama lain belahan dunia Selatan. Brasil memiliki konsentrasi kapital agribisnis modern yang luar biasa, para ahli teknik dan keuangan dengan potensi untuk menjadi ekonomi pertanian ekspor terbesar di dunia, sementara negara-negara “kerucut selatan” seperti Argentina, Uruguay, dan Chili juga merupakan pengeksport pertanian utama dengan cabang-cabang pertanian yang terkapitalisasi dan terspesialisasi secara canggih. Di sisi lain, terdapat contoh-contoh

ketangguhan atau kebangkitan identitas “petani” di wilayah-wilayah populasi masyarakat pribumi yang lebih terkonsentrasi di Amerika Tengah dan Andes, serta lebih jauh ke selatan di zona-zona pertanian skala kecil. Pertarungan memperebutkan tanah dan kondisi-kondisi pertanian kontemporer menghasilkan apa yang sekarang dikenal sebagai gerakan sosial pedesaan, seperti La Vía Campesiana (“jalan petani”) di Amerika Tengah dan Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST, atau Gerakan Pekerja Tanakisma) di Brasil.

Asia Selatan

Ekspansi Inggris pada abad XVIII ke pedalaman Asia Selatan yang kebanyakan penduduknya merupakan petani pedesaan, akhirnya menciptakan penguasaan kolonial terbesar dan menjadi “permata pada mahkota” kerajaan kolonial Inggris. Pada abad XIX, penjarahan itu secara bertahap memberi jalan bagi penguasaan secara lebih sistematis atas sumber-sumber pendapatan pajak dan laba, membentuk suatu transisi dari perompakan ke birokrasi. Barrington Moore (1966: 342) mencirikannya sebagai sesuatu yang terkait dengan dua sistem utama pajak tanah kolonial di India.

Sistem pertama berasal dari Ketetapan Permanen Bengal (*The Permanent Settlement of Bengal*) dan area sekitarnya di India bagian utara sejak 1793. Ketetapan ini mengubah *zamindar* (yang keturunannya kita bahas pada sketsa pertama di Pendahuluan) dari pemungut penghasilan petani dan pajak untuk pemerintahan Mughal menjadi tuan tanah dengan hak kepemilikan tertentu atas tanah. Pemerintah kolonial yang membuat kebijakan “Ketetapan” tersebut berharap dengan cara demikian *zamindar* akan menjadi kelas borjuis pemilik properti yang solid dan mereplikasi kapitalisme agraria Inggris. Untuk beragam alasan, ambisi ini tidak terealisasi (seperti fantasi imperial lainnya). Variasi kekuasaan *zamindar* sangat luas di pedesaan Raj (dengan skala subkontinentalnya) yang

beragam, merupakan hasil tempaan pertarungan *zamindar* dengan kasta penggarap di satu sisi dan dengan kelas rentenir dan kelas pedagang kapitalis di sisi lain.

Ketetapan Bengal, bersama inkorporasi sekitar enam ratus wilayah yang dikuasai para pangeran atau bangsawan ke dalam sistem kolonial Inggris atau British Raj (pemerintahan kolonial, “kerajaan” dalam bahasa Hindi), merupakan cara untuk mengamankan sekutu politik pribumi dalam mengelola wilayah jajahan yang sangat luas. Ini adalah salah satu contoh dari banyak praktik kolonial yang lebih umum, yaitu “berkomplot dengan struktur kekuasaan lama (prakolonial)” (Bagchi 2009: 87), juga dilakukan lebih dahulu oleh Spanyol di Amerika Latin melalui jabatan *cacique* (raja, ketua, atau pemimpin pribumi), dan selanjutnya di Afrika melalui “pemerintahan taklangsung” yang menggabungkan para kepala kampung di tingkat terendah dalam hierarki administrasi kolonial guna memelihara ketertiban pedesaan, mengelola pemungutan pajak, dan mengerahkan tenaga kerja.

Kebijakan utama “ketetapan” tanah lainnya adalah sistem *ryotwari* (dari kata “*ryot*” atau “petani kecil”), diberlakukan di selatan sebagian besar Bombay dan Madras. Kebijakan ini mempertegas hak kepemilikan atas tanah, utamanya bagi para pengelolanya, yang kemudian menjadi subjek pajak tahunan. Barrington Moore (1966: 344) menyimpulkan:

Penataan [tanah] adalah titik awal semua proses perubahan pedesaan di mana pemberlakuan hukum dan ketertiban serta hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan memperdalam masalah parasit tuan tanah. Lebih penting lagi, penataan ini membentuk dasar bagi suatu sistem politik dan ekonomi di mana pendatang asing, tuan tanah, dan rentenir mengambil surplus ekonomi dari petani, lantas gagal berinvestasi pada

pertumbuhan industrial sehingga menghilangkan kemungkinan untuk meniru cara Jepang memasuki era modern.

Inti dari gagasan Moore adalah sistem pertanahan tersebut secara umum menjadikan penarikan sewa dari petani penyakap lebih menguntungkan bagi tuan tanah, daripada berinvestasi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, sehingga menjadi lebih “bersifat parasit” daripada menjadi tuan tanah yang produktif.²

Kerajaan Inggris di India (*British Raj*), bagaimanapun, bukanlah kolonialisme lewat pembukaan koloni permukiman bagi pendatang dari Eropa sebagaimana penjajahan Inggris di Amerika Utara dan Amerika Latin. Tidak ada pengambilalihan tanah dalam skala yang signifikan untuk mengakomodir orang Eropa, walaupun terdapat beberapa perkebunan untuk tanaman ekspor. Satu-satunya areal tanah terluas yang dijarah adalah areal di bawah penguasaan departemen kehutanan pemerintahan kolonial, yang kebanyakan dimanfaatkan untuk eksploitasi kayu komersial; penghapusan hutan sebagai sumberdaya bersama yang tersedia bagi petani pedesaan, para penggembala, dan masyarakat adat “tribal” ini telah menipiskan sumberdaya untuk kebutuhan subsistensi mereka. Pada saat bersamaan, para petani secara besar-besaran terintegrasi ke dalam ekonomi kapitalis internasional melalui sarana, dalam istilah Krishna Bharadwaj (1985), “komersialisasi paksa”. Mereka semakin terikat kewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan uang; mereka memproduksi komoditas ekspor seperti kapas, rami, dan opium (yang diperdagangkan dengan Tiongkok untuk ditukar dengan teh bagi konsumsi Inggris) sebagaimana juga makanan untuk pasar domestik maupun ekspor; serta sewa dan pajak para petani telah menopang tidak hanya tuan tanah pribumi, pedagang, dan rentenir, tetapi juga keuntungan kamar dagang-kamar dadang Inggris

dan pendapatan administrasi kolonial serta pemerintah imperial Inggris.

Bagi kebanyakan petani kecil pedesaan, “komersialisasi paksa” dan komodifikasi subsistensi yang meluas tidak menghasilkan peningkatan hasil pertanian besar-besaran, apalagi produktivitas. Pemerasan “biaya renten” yang harus ditanggung oleh petani miskin, jeratan utang, dan pengalihan sumberdaya yang awalnya untuk produksi pangan yang dikonsumsi sendiri, semua itu telah berkontribusi pada citra India dan Tiongkok sebagai negara yang rentan kelaparan. Meskipun kelaparan dikaitkan dengan kondisi cuaca ekstrem, perlu diperhatikan bahwa India melanjutkan ekspor pangan selama kelaparan besar-besaran pada akhir abad XIX dan berlangsung lagi pada 1943–1944 di Bengal (Sen 1981). Kemampuan sebagian besar petani India untuk menghadapi konsekuensi cuaca buruk dan panen yang rendah dihancurkan oleh komodifikasi subsistensi, permintaan pajak kolonial, dan ideologi ekonomi pemerintahan kolonial (Davis 2001).

Perlu diperhatikan pula bahwa impor barang-barang produksi pabrik dari Inggris, seperti tekstil katun, menghancurkan manufaktur dan kerajinan masyarakat pribumi, yang merupakan modal penting bagi diversifikasi ekonomi pedesaan. Amiya Bagchi (2009) menyatakan bahwa dampak kolonialisme pada abad XIX adalah meningkatnya “ruralisasi” dan “pembentukan petani kecil” di India, sejalan dengan meningkatnya kemiskinan, dan penetrasi imperialis serupa di Tiongkok juga mempunyai dampak yang serupa sekalipun tanpa pemerintahan kolonial langsung.

Perkembangan produksi komoditas juga mendorong diferensiasi kelas di kalangan petani di India sebagaimana di tempat lainnya (di India kerap kali mengikuti ketimpangan kasta yang telah ada). Banaji (2002: 114) menyimpulkan:

Percepatan ekspansi perdagangan pada abad XIX melekat pada sejenis kapitalisme yang berakar pada pertumbuhan dominasi kasta atas dan menengah sebagai petani kaya. Mereka punya andil bagi penyebaran penggunaan tenaga kerja pertanian permanen (para buruh), mereka mendominasi pasar kredit lokal ... dan kemudian secara besar-besaran menguasai pasar tanah di tempat-tempat di mana pasar tanah berkembang.

Banaji juga menyebutkan bahwa perkembangan “jenis kapitalisme” tersebut beragam di seluruh pedesaan Raj yang berbeda, begitu juga dengan kekuatan “petani kaya” dibandingkan dengan tuan tanah dan rentenir serta klaim petani kaya tersebut atas surplus pertanian.

Afrika Sub-Sahara

Kolonialisasi sistematis terhadap Afrika Sub-Sahara sejak akhir abad XIX menghasilkan tiga “wilayah makro”, yang diidentifikasi Samir Amin (1976) sebagai *économie de traite* (yang diterjemahkan secara bebas sebagai “ekonomi perdagangan”), cadangan tenaga kerja, dan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi. “Wilayah makro” pertama dicirikan oleh produksi ekspor oleh petani kecil, dan di beberapa kasus oleh produsen pribumi berskala besar, serta biasanya dikelola oleh kamar dagang metropolitan. Seperti di India, *économie de traite* ini tidak diikuti oleh pengambilalihan tanah yang luas dan penjarahan terhadap petani kecil. Komodifikasi ekonomi pedesaan berlangsung tanpa institusi hak kepemilikan individu dan pasar tanah, dan dalam banyak kasus terealisasi melalui migrasi dan pembukaan areal baru untuk kakao dan sawit (di tepi hutan) dan kapas serta kacang tanah (di padang rumput luas)—yang merupakan empat jenis tanaman ekspor klasik di Afrika Barat.

“Wilayah makro” kedua yaitu cadangan tenaga kerja yang terentang dari timur hingga bagian tengah dan selatan Afrika, di mana terdapat perluasan pencaplokan tanah untuk permukiman kolonial. Nalar penjarahan terhadap orang Afrika dan mengonsentrasikan mereka dalam “cadangan tenaga kerja pribumi” memiliki dua tujuan ganda: untuk menyediakan tanah bagi permukiman dan lahan pertanian orang kulit putih, juga untuk memaksakan ketersediaan tenaga kerja reguler bagi perkebunan dan lahan pertanian luas serta bagi kompleks-kompleks pertambangan di Rhodesia, baik Northearn maupun Southern (sekarang Zambia dan Zimbabwe) dan di Afrika Selatan yang menarik besar-besaran penambang migran dari selatan Mozambik, Nyasaland (sekarang Malawi), dan Basutoland (sekarang Lesotho). Alienasi dari tanah telah membatasi petani Afrika pada wilayah “cadangan pribumi” yang semakin penuh sesak dan miskin dalam hal pertanian, seraya menundukkan mereka melalui tekanan-tekanan ekonomi dan politik dalam mengamankan kebutuhan subsistensi melalui migrasi buruh secara berkala.

“Afrika yang dipenuhi perusahaan-perusahaan pemegang konsensi” menjadi ciri khas wilayah lembah Sungai Kongo yang merupakan simbol sejarah ekstraksi dan penjarahan sumberdaya yang sangat brutal hingga saat ini. Perusahaan pemegang konsensi dianugerahi wilayah sedemikian luas untuk eksploitasi, dengan konsekuensi-konsekuensi serius bagi penduduk dan sumberdaya alamnya. Tetapi, pada umumnya mereka tak mampu mempertahankan kondisi-kondisi bagi pertanian kapitalis yang lebih sistematis dan berkelanjutan, baik bagi pendatang pemukim maupun perkebunan itu sendiri, yang menempati secara luas wilayah ke timur (Kenya) dan selatan (Southern Rhodesia/Zimbabwe dan Afrika Selatan).

Di sebagian besar Afrika Sub-Sahara—kecuali kawasan permukiman orang Eropa yang luas—para petani, termasuk penggembala, tidak dilucuti kepemilikannya, melainkan “didorong” untuk memasuki ekonomi moneter sebagai produsen komoditas pertanian dan/atau sebagai penyedia tenaga kerja. Kondisi proletarianisasi penuh dari mayoritas produsen yang jumlahnya sangat besar toh tidak terbentuk, sebagaimana ditekankan Samir Amin dan yang lain. Sarana-sarana “pendorong”—pembayaran pajak dan kewajiban menanam jenis tanaman tertentu, penyediaan jasa tenaga kerja atau menjadi buruh migran kontrak—mulanya melibatkan “komersialisasi paksa” seperti di India, sekalipun pajak kolonial di Afrika bukan berdasarkan tanah melainkan berdasarkan orang, dalam bentuk pajak rumah dan pajak kepala, dan kadang pajak ternak. Tetapi, penting dicatat adanya inisiatif beberapa petani Afrika yang memelopori produksi komoditas untuk ekspor dengan memobilisasi tanah dan tenaga kerja melalui sarana-sarana adat, tanpa atau terlepas dari tindakan pemerintah kolonial. Contoh yang terkenal adalah produksi kakao di Ghana sejak awal abad XX, sebagaimana dikemukakan oleh Polly Hill (1963) dalam kajiannya yang sangat berpengaruh. Pembentukan dan ekspansi pertanian kakao melibatkan migrasi ke areal hutan yang awalnya berpenduduk jarang, serta melibatkan pengerahan tenaga kerja melalui bentuk-bentuk penyakapan tertentu.

Dalam jumlah yang cukup besar, kaum tani Afrika saat itu menjadi makmur pada waktu-waktu tertentu. Kondisi itu terjadi terutama ketika mereka mampu memobilisasi tanah dan tenaga kerja guna memadukan produksi komoditas dengan pertanian subsistensi, serta ketika mampu meraup untung dari kondisi pasar internasional tanaman ekspor yang sedang bergairah. Hal ini terjadi khususnya pada sepanjang 1920-an dan selama dua dekade 1950-an dan 1960-an, yang terentang dari akhir masa penjajahan dan awal kemerdekaan. Cerita-cerita sukses itu biasanya melibatkan

diferensiasi sosial di pedesaan; sebagian petani memperoleh keuntungan lebih daripada yang lain. Tetapi, bersamaan dengan itu, kekuatan petani produsen komoditas di sebagian Afrika pada masa lampau sangatlah berbeda dengan kondisi pertanian yang jauh lebih buruk di sebagian besar pedesaan Afrika saat ini.

Pola-Pola Perubahan Agraria

Puncak kolonialisme di Asia dan Afrika tercapai selama konsolidasi ekonomi dunia kapitalis sejak akhir abad XIX hingga pertengahan abad XX. Pada periode ini, perkebunan yang terbentuk pada awal periode kapitalisme di Karibia, Amerika Latin, dan Asia digantikan dengan suatu tipe baru “perkebunan industrial”. Wilayah-wilayah pinggiran baru untuk produksi perkebunan juga meluas, terutama di Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan wilayah tropis Amerika Selatan, melalui pembukaan hutan tropis yang luas atau dengan menyerobot lahan yang dikelola oleh petani kecil, seperti di Indonesia, wilayah utama dari koloni Belanda yang tersisa. Perkebunan membutuhkan buruh dalam jumlah yang sangat besar, yang dikerahkan dari petani termiskin dan buruh tunakisma yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Pengerahan tenaga kerja ini kadang dilancarkan atau dipandu dengan kekerasan. Singkatnya, industri perkebunan telah memperluas secara besar-besaran skala monokultur yang terspesialisasi secara ketat, guna menyuplai pasar internasional dengan beragam tanaman industri seperti karet, minyak sawit, kapas, sisal, serta minuman dan makanan—teh, kopi, gula, cokelat, dan pisang—yang menjadi barang konsumsi massal bagi penduduk perkotaan yang sedang tumbuh di negara-negara industri.

Pola lain dari perubahan yang meluas ini adalah meningkatnya inkorporasi kaum tani kolonial di Asia dan Afrika sebagai produsen tanaman ekspor (kapas, minyak sawit, kacang tanah, tembakau, kopi, dan kakao), sebagai produsen bahan makanan pokok untuk

pasar domestik dan ekspor, serta sebagai produsen tenaga kerja, melalui migrasi buruh untuk membangun rel kereta dan jalan raya serta untuk bekerja di perkebunan, pertambangan, dan pelabuhan. Proses-proses inkorporasi ini menghasilkan tipe struktur kelas yang berbeda di antara populasi pertanian di wilayah-wilayah koloni (kadang mengacu pada diferensiasi sosial yang telah ada, seperti kasta di India), dan sekarang sebagian menjadi tergantung pada komodifikasi subsistensi, sementara sebagian lagi memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk akumulasi.

Pola-pola perubahan agraria pada periode lanjut kolonialisme dan masa kemerdekaan politik yang mengikutinya harus dikaitkan dengan dinamika dan perkembangan lain perekonomian global yang saya bahas dalam Bab 4 dan Bab 5. Sebagai kesimpulan, saya meninjau tiga isu dalam debat seputar kapitalisme dan kolonialisme. Ketiganya berhubungan dengan pertanyaan di akhir Bab 2 dan membahas lebih lanjut peran perubahan agraria dalam perkembangan ekonomi di negara-negara Selatan, menyusul kemerdekaan dari pemerintahan kolonial di Asia dan Afrika.³

Rezim Tenaga Kerja pada Masa Kolonialisme

Saya menggunakan istilah “rezim tenaga kerja” untuk menunjukkan secara luas beragam cara dalam mengerahkan tenaga kerja dan kaitan cara-cara itu dengan bagaimana tenaga kerja diorganisasikan dalam produksi (proses kerja), serta bagaimana tenaga kerja menjaga subsistensinya. Ada empat jenis rezim tenaga kerja yang disebutkan dalam bab ini: kerja paksa, semiproletarianisasi, produksi komoditas skala kecil, dan proletarianisasi. Kita mendapati contoh rezim kerja paksa pada kasus Karibia dan Amerika Latin. Kerja paksa juga menandai momen-momen awal, setidaknya, ko-

lonialisme di Asia dan Afrika. Di sini rezim kerja paksa itu kerap berupa upeti kerja untuk pembangunan jalan dan rel kereta yang merupakan nadi perdagangan kolonial, pekerjaan pengangkutan, dan pekerjaan di perkebunan dan pertambangan. Jenis lain dari rezim kerja paksa adalah sistem kuli kontrak. Di Kerajaan Inggris, setelah berakhirnya masa perbudakan, jutaan pekerja India dan Tiongkok dikerahkan sebagai pekerja upahan untuk periode tertentu. Mereka umumnya ditempatkan di perkebunan, baik perkebunan tebu di Karibia, Afrika Selatan, Mauritius, dan Fiji maupun di perkebunan karet di Malaya (sekarang Malaysia).

TABEL 3.2
Rezim Tenaga Kerja pada Masa Kolonialisme

Kerja paksa

Perbudakan	Penuh	Ya	Tidak	Karibia, Brasil, Southern United States, abad XVI–XIX
Upeti, pajak dalam bentuk barang	Tidak	Ya	Tidak	Penjajahan Spanyol di Amerika, abad XVI–XVII; Afrika, Asia, abad XIX–awal abad XX
Sewa tenaga kerja	Penuh	Ya	Tidak	Penjajahan Spanyol di Amerika, abad XVI; Afrika, Asia, abad XIX–awal abad XX
Kontrak	Penuh	Sebagian	“Transisional”	Karibia, Afrika Timur, Malaya, Mauritius, Fiji, abad XIX–XX

Tenaga kerja semiproletar

REZIM TENAGA KERJA	PEMISAHAN PRODUSEN DARI ALAT-ALAT PRODUKSI	PAKSAAN EKSTRA-EKONOMI	TENAGA KERJA UPAHAN “BEBAS”	CONTOH
Tenaga kerja upahan + ikatan utang	Sebagian atau penuh	Tidak	“Transisional”	Penjajahan Spanyol di Amerika, abad XVII; Asia, abad XIX–XX
Tenaga kerja upahan + memiliki pertanian (“marginal”) atau mempekerjakan diri sendiri	Sebagian	Tidak	“Transisional”	India dan Afrika, abad XIX; secara lebih luas pada abad XX
<i>Tenaga kerja “keluarga” (“petani” produsen komoditas skala kecil)</i>	Tidak	Tidak	Tidak	India dan Afrika, abad XIX; secara lebih luas abad XX
<i>Proletarianisasi</i>	Penuh	Tidak	Ya	Beberapa sektor pada ekonomi kolonial, yang dimulai pada abad XVIII di Amerika Latin, abad XIX di Asia, abad XX di Afrika

Tabel 3.2 merangkum ciri-ciri utama rezim tenaga kerja pada masa kolonialisme dan membantu menggarisbawahi ide-ide analitis tertentu. Tetapi, tabel tersebut hanya mengacu pada tiga “determinasi”: pemisahan produsen dari alat-alat produksi, paksaan ekstraekonomi, dan tenaga kerja upahan “bebas”, di antara banyak kemungkinan “determinasi” lain yang ikut membuka proses sejarah yang konkret (Marx, sebagaimana dikutip dalam Pendahuluan). Sebagai contoh, penggunaan kata “transisional” pada beberapa sel di kolom keempat menandakan bahwa beberapa rezim tenaga ker-

ja upahan tidak memerlukan penjarahan atau “kebebasan” secara penuh dari pekerja. Hal ini tidak berarti bahwa buruh “semiproletariat” pasti bisa disebut “transisional” hanya atas dasar kesementaraan atau watak peralihannya. Sebagian pihak berpendapat, di banyak bagian negara-negara Selatan, semiproletarianisasi adalah hasil komodifikasi subsistensi yang lebih umum terjadi, ketimbang proletarianisasi secara penuh. Sementara pendapat lain menyebut bahwa dibutuhkan perincian “konkret” terkait di mana, kapan, dan mengapa semiproletariat terbentuk (simak lebih lanjut Bab 7).

Kualifikasi kedua yang berkaitan dengan Tabel 3.2 telah dibahas dalam Bab 2: bahwa kategori tenaga kerja pedesaan, termasuk pembedaan antara tenaga kerja “bebas” dan “takbebas”, kerap kali cair dan ambigu dalam realitas sosial. Hal ini juga dikemukakan dalam gagasan mengenai bentuk-bentuk “hibrid” dalam kapitalisme agraria dengan rezim tenaga kerja “hibrid” (Banaji 2010).

Akhirnya, tabel tersebut tidak mengidentifikasi tenaga kerja usaha tani “keluarga” sebagai tipe tenaga kerja yang terikat karena tekanan kekuatan ekstraekonomi, sekalipun dibutuhkan periode “komersialisasi paksa” sebelumnya untuk menarik mereka ke dalam relasi komoditas. Di sini saya berasumsi bahwa sejak berakhirnya masa penjajahan, petani rumah tangga “terkunci ke dalam” produksi komoditas melalui “paksaan samar dari kekuatan ekonomi”—komodifikasi subsistensi—seperti halnya proletariat dan semiproletariat yang dipaksa untuk menjual tenaga kerja mereka. Saya akan kembali pada pembahasan ini nanti.

Mengingat kembali dua pendekatan yang telah diuraikan dalam Bab 2, mereka yang menopang pendapat mengenai sejarah panjang kapitalisme komersial beranggapan bahwa bentuk-bentuk produksi agraria yang dibangun oleh kolonialisme Eropa di Amerika Latin, Asia, dan Afrika merupakan bentuk produksi kapitalis, terlepas dari apakah rezim tenaga kerjanya bersifat hibrid, atau “takbebas” secara penuh atau sebagian. Sebaliknya, mereka yang menopang gagasan tentang jalur transisi agraria yang ketat (tipe

Inggris) menyebut bentuk-bentuk produksi agraria itu sebagai “prakapitalis” atau “nonkapitalis” sepanjang rezim tenaga kerjanya tidak didasarkan pada penggunaan tenaga kerja upahan “bebas” oleh kapital. Pada saat yang sama, bentuk-bentuk produksi tersebut dapat dipandang berkontribusi pada akumulasi primitif, yang membawa kita ke isu kedua.

Apakah Kolonialisme Dibutuhkan bagi Kemunculan Kapitalisme?

Bagi sebagian ilmuwan, kapitalisme mulai menjadi suatu sistem dunia ketika dibentuk melalui kolonialisme. Karena itu, para ilmuwan ini menandai kelahiran kapitalisme mulai dari momen kedatangan Columbus di Dunia Baru pada 1492. Ini memberikan kerangka historis dari tesis terkenal Andre Gunder Frank tentang “keterbelakangan” di negara-negara Dunia Ketiga (Frank 1967) dan pada versi yang sedikit berbeda, Immanuel Wallerstein menyatakannya sebagai “sistem dunia modern” (1979), yang selanjutnya dimodifikasi dan dikembangkan oleh Arrighi dan Moore (Bab 2), di antara beberapa yang lain.

Pandangan ini mungkin mendapatkan dukungan dari Marx (1976: 915), yang menulis:

Penemuan emas dan perak di Amerika, pembasmian, perbudakan, dan pembantaian masyarakat pribumi di pertambangan, awal dari penaklukan dan perampasan terhadap India, dan perubahan Afrika menjadi suatu cagar untuk perburuan komersial dari kaum kulit hitam, semuanya menandai kelahiran era produksi kapitalis.

Amatan Marx digaungkan oleh ekonom Bolshevik, E. Preobrazhensky, pada 1920-an ketika ia mengulas bagaimana “akumulasi primitif sosialis” dapat dicapai di Uni Soviet tanpa keberadaan sumber-sumber eksternal akumulasi primitif yang

memfasilitasi kemunculan kapitalisme. Menurutnya, “Kebijakan kolonial negara-negara yang terlibat perdagangan dunia ... menjarah masyarakat pribumi dalam bentuk pajak, menyita properti mereka, ternak dan tanah mereka, kotak-kotak penyimpanan logam berharga mereka, mengubah warga taklukan menjadi budak, bentuk penipuan kasar yang tak ada habisnya, dan seterusnya” (Preobrazhensky 1965: 85).

Bila diperhatikan, sebagian besar *metode* perampasan dalam pernyataan Marx dan Preobrazhensky ini juga ditemukan dalam catatan sejarah ekspansi dan penaklukan oleh negara dan kerajaan agraris prakapitalis. Bagi beberapa ilmuwan, hal ini berarti bahwa kolonialisme secara langsung maupun taklangsung mungkin telah memfasilitasi transisi menuju kapitalisme di Eropa, tetapi tidak bisa menyediakan *kondisi yang memadai* untuk transisi tersebut. Transisi itu membutuhkan formasi relasi sosial baru dan struktur produksi yang dirintis selama transisi agraria di Inggris (dan bagian lain di barat-laut Eropa), yang kemudian berujung pada kapitalisme industri. Pendapat ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membandingkan rentetan fase dan bentuk kolonialisme Eropa, sejak abad XVI oleh Spanyol dan Portugis—“feodal” maupun “komersial”—hingga kolonialisme kapitalis Inggris dan Prancis pada pertengahan abad XIX hingga pertengahan abad XX. Sebagai contoh, kekayaan dan kekuasaan Spanyol pada abad XVI didanai secara besar-besaran oleh perak dari tanah jajahan, yang kemudian membuka jalan bagi kemunduran ekonomi Spanyol, ketika Inggris dan negara-negara Eropa lain menjalani transisi menuju kapitalisme agraria dan kemudian kapitalisme industrial. Ringkasnya, kekayaan tidaklah sama dengan modal yang diinvestasikan pada pengembangan produksi dan produktivitas.⁴ Apakah juga sesuatu yang penting bahwa negara Spanyol yang sekarang ketinggalan telah kehilangan kuasa atas Amerika pada paruh pertama abad XIX, ketika kapitalisme industri tengah berkembang cepat di negara-

negara Eropa lain, dan ketika tipe baru kolonialisme muncul pada periode penting penguasaan Eropa di Asia dan lalu di Afrika?

Suatu debat berlanjut mengenai apakah akumulasi primitif di wilayah-wilayah koloni memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi di Eropa, khususnya sejak akhir abad XVIII dan terutama ketika kapitalisme industri bergerak menuju fase “ekspansif” sejak pertengahan abad XIX. Meskipun sebagian besar perdebatan itu menyoroti penyebab kolonialisme dan dampak-dampaknya bagi perkembangan kaum kapitalis di Eropa, itu semua adalah isu yang berbeda dari dampak kolonialisme terhadap tanah jajahan, termasuk perombakan sistem ketenagakerjaan, tanah, dan aktivitas pertanian yang kadang kala masif dan kerap kali brutal. Boleh jadi, kemungkinan bahwa kerusakan dan penghancuran sosial ekologis akibat penaklukan dan eksploitasi kolonial *tidak* berkontribusi secara signifikan bagi akumulasi di Eropa, menunjukkan ketimpangan jauh lebih besar yang tergambarkan dalam perkembangan global kapitalisme.

Perkembangan Ekonomi Bangsa-Bangsa Koloni?

Marx (1976: 91) menyatakan bahwa bangsa-bangsa yang berada dalam transisi menuju kapitalisme dapat “menderita tidak hanya dari perkembangan produksi kapitalis, tetapi juga dari ‘ketaksempurnaan’ perkembangan tersebut.” Pandangan mengenai mengapa perkembangan kapitalis “taksempurna” di negara-negara koloni pada masa kemerdekaan mereka sering kali dikaitkan dengan gagasan bahwa inkorporasi tanah jajahan di Amerika Latin, Asia, dan Afrika ke dalam ekonomi dunia kapitalis menciptakan “ke-terbelakangan” pada masyarakat mereka. Dalam hal rezim tenaga kerja, sebagian pihak berpendapat bahwa kolonialisme gagal mentransformasi relasi sosial produksi, termasuk di pertanian, dengan cara yang cukup kapitalis. Pernyataan provokatif dari argumentasi ini adalah bahwa negara-negara koloni mengalami

keterbelakangan bukan karena mereka dieksploitasi, melainkan karena mereka “tidak cukup dieksploitasi” (Kay 1975). Maksud Kay adalah negara-negara koloni tersebut mengalami transformasi relasi produksi kapitalis secara taksempurna, tidak cukup menimbulkan dorongan untuk secara terus-menerus meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga juga tingkat eksploitasi (dijelaskan dalam Bab 2). Ketaksempurnaan di sini mengacu pada bertahannya relasi prakapitalis atau nonkapitalis dalam ekonomi bangsa-bangsa koloni, sebagai dampak—sengaja atau taksengaja—dari kebijakan kolonial dan praktik-praktik kapital kolonial.

Pendapat lain tentang ketidaksempurnaan di atas berhubungan dengan isu akumulasi primitif, yaitu tesis “pengurusan surplus”: bagaimana kekuasaan Eropa mengatur produksi dan perdagangan kolonial sedemikian rupa untuk menghisap “surplus” demi keuntungan mereka sendiri dan kelas-kelas kapital mereka—sejenis akumulasi primitif yang memfasilitasi perkembangan kapitalisme industri di Eropa. Ekonomi kolonial adalah sumber bahan mentah yang penting, baik sumber pertanian maupun mineral, yang diproduksi oleh “tenaga kerja murah” dari kalangan petani kecil dan pekerja semiproletariat. Industrialisasi dihambat (sebagaimana bentuk-bentuk produksi agraria yang lebih “maju” di wilayah pertanian berpenduduk padat), karena kekuasaan kolonial berupaya mencegah kompetisi dengan industri mereka sendiri sekaligus menjaga agar bangsa-bangsa koloni tetap menjadi “ceruk” pasar untuk ekspor manufaktur dan komoditas mereka. Dalam pandangan ini, ketidaksempurnaan perkembangan kapitalisme tampak sebagai akumulasi terbatas, sehingga terbatas pula pembentukan kelas kapitalis masyarakat pribumi, di tanah jajahan.

Penguasa kolonial itu sendiri—khususnya selama fase terakhir kolonialisme dalam periode kapitalisme industri—menyatakan bahwa misi mereka adalah untuk membawa peradaban bagi

masyarakat Asia dan Afrika, sekalipun dengan cara bertahap dan terkontrol guna menghindari kekacauan sosial dan politik. Pemberadaban ini melibatkan pembangunan ekonomi yang dipahami sebagai perluasan relasi komoditas (partisipasi dalam pasar dan ekonomi moneter). Pandangan bahwa kolonialisme “dibutuhkan secara objektif” untuk menabur benih kapitalisme di masyarakat prakapitalis di negara-negara Selatan juga bisa mengklaim adanya dukungan dari Marx dengan cara sebagai berikut. Kapitalisme adalah representasi dari kemajuan, sekalipun menyakitkan, karena kapitalisme adalah sistem ekonomi yang lebih produktif ketimbang tipe-tipe masyarakat kelas sebelumnya. Kapitalisme mengeksploitasi tenaga kerja lebih “efisien” sebagai basis perkembangan kekuatan produktif yang belum pernah terjadi dan berkelanjutan. Dengan demikian, setelah merdeka dari penjajahan, tujuan yang cocok bagi strategi pertumbuhan ekonomi, yang butuh intervensi aktif negara, adalah perluasan dan pendalaman proses-proses perkembangan kapitalisme yang telah dirintis oleh kolonialisme. Sehingga, kegagalan mencapai tujuan tersebut secara jelas dan tegas dapat menjelaskan mengapa kemajuan ekonomi tidak terjadi (Warren 1981; Sender dan Smith 1986).

Isu-isu yang disoroti di bagian terakhir bab ini berupaya untuk menggaungkan debat-debat tentang pembangunan sosial ekonomi di negara-negara Selatan saat ini. Sebagai contoh, apakah petani skala kecil di negara-negara Selatan mencerminkan relasi sosial prakapitalis atau nonkapitalis dan bentuk-bentuk produksi yang menghambat perkembangan ekonomi? Apakah mereka mencerminkan suatu tipe bercocok tanam dan cara hidup yang *anti*-kapitalis dan menjanjikan alternatif dari dominasi pertanian kapitalis (seperti gagasan tentang “jalan petani” yang diisyaratkan dalam Pendahuluan)? Jika kita membuang gagasan mengenai elemen prakapitalis yang penting dan “terus bertahan”

dalam perekonomian negara-negara Selatan, apakah itu sekadar menggeser debat ke ide-ide tentang bentuk-bentuk kapitalisme yang lebih atau kurang “maju”, yang sama bermasalahnya (pertanyaan ketiga di akhir Bab 2)? Bagaimana jawaban atas semua pertanyaan ini dan pertanyaan lainnya dipengaruhi oleh perkembangan kapitalisme yang takrata dalam skala global (pertanyaan keempat di akhir Bab 2)? Bab selanjutnya menyelidiki lebih lanjut isu-isu yang diangkat oleh pertanyaan-pertanyaan di atas, mengenai dinamika kelas dalam perubahan agraria sejak berakhirnya kolonialisme.

Catatan

¹ Perhatikan bahwa para sejarawan masa kini kerap mengacu dekade sebelum 1914 sebagai “zaman keemasan” pertama globalisasi.

² Dalam hal ini, terdapat persamaan dengan *hacienda* kolonial awal di Amerika Latin (pada periode *encomienda*) dan dengan kepemilikan tanah feodal pada umumnya, serta berlawanan dengan peran “tuan tanah yang berkembang” dalam transisi Inggris dan Jepang yang dibahas dalam Bab 2.

³ Yang semakin memperumit keadaan, perbedaan posisi atas isu ini kerap kali menyatakan memperoleh dukungan dari tulisan Marx, yang kurang lebih bisa diterima; terlebih lagi, Marx mengubah sebagian gagasannya seiring berjalannya waktu.

⁴ Poin serupa menyoroti mengapa peradaban besar agraris prakapitalis tidak berkembang menuju kapitalisme industri, meski mereka punya kekayaan dan kekuasaan, bahkan ketika peradaban besar tersebut memiliki teknologi lebih maju daripada Eropa pada masa modern awal—contoh yang sering dinyatakan adalah Tiongkok—serta mempunyai elemen kapitalisme komersial (Pomeranz 2000; Goody 2004). Selama periode yang digambarkan dalam bab ini, seluruh imperium politik dari semua peradaban tersebut telah runtuh, mulai dari Aztec dan Inca pada abad XVI di Amerika Latin hingga Mughal di India pada abad XVII dan Dinasti Qing di Tiongkok pada abad XIX, juga keruntuhan terakhir akibat Perang Dunia I dan merupakan bekas-bekas kerajaan lama Eurasia, seperti Hapsburg (Austria-Hungaria), Romanov (Rusia), dan Ottoman (Turki).

BAB 4

Usaha Tani dan Budidaya Pertanian, Lokal dan Global

BAB 2 dan Bab 3 telah mengulas topik-topik umum, yakni perubahan tata guna lahan dan tenaga kerja serta dinamika kelas, dalam pembentukan dunia modern. Ulasannya merentang dari asal mula dan perkembangan awal kapitalisme hingga akhir masa kolonialisme. Dengan demikian, kedua bab tersebut mengisyaratkan sejumlah (usaha) ekspansi skala, misalnya dalam luasnya usaha-usaha pertanian di tempat-tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda, dalam jangkauan geografis perdagangan komoditas-komoditas pertanian, serta dalam volume dan nilai perdagangan.

Bab ini berangkat dari sudut pandang yang berbeda tetapi melengkapi. Di sini saya akan mengulas isu-isu mengenai peningkatan skala dengan merujuk khusus pada dua proses yang saling berkaitan. *Pertama*, bagaimana usaha tani sebagai aktivitas yang sangat lokal pada masanya menjadi bagian dari “budidaya pertanian” atau “sektor pertanian”. *Kedua*, bagaimana ekspansi geografis pasar hasil pertanian dalam kapitalisme, termasuk sumber-sumber permintaan dan penawarannya, bergantung pada peningkatan skala sosial melalui perluasan dan “pemantapan” relasi-relasi komoditas dan pembagian kerja secara sosial.

Istilah “usaha tani” (*farming*) dan “budidaya pertanian” (*agriculture*) sering kali digunakan secara tertukar, sesuatu yang berusaha saya hindari, kecuali ketika menjelaskan apa yang diproduksi di lahan pertanian—tanaman dan hewan—sebagai hasil “pertanian”. Saya cenderung mengandalkan istilah “agraria”

untuk menggambarkan berbagai relasi sosial dan praktik usaha tani, masyarakat yang berbasis usaha tani, dan proses-proses perubahan dalam bercocok tanam (usaha tani). Adalah berguna untuk membedakan antara usaha tani dan budidaya pertanian ketika kita menilik tentang perubahan agraria, terutama sejak 1870-an. Posisi penting periode ini telah dibahas dalam Bab 3. Dalam bagian ini, periode 1870-an hingga 1970-an digali lebih lanjut untuk menjelaskan aspek-aspek kunci pergeseran dari usaha tani ke budidaya pertanian berikut ini:

- perubahan teknis berbasis industri;
- pembentukan pasar global dan pembagian kerja dalam budidaya pertanian, terutama pangan pokok; dan
- pembentukan “sektor pertanian” sebagai objek kebijakan.

Sebagaimana dalam Bab 2 dan Bab 3, dalam bagian ini saya hanya menyajikan garis besar kerangka sejarah dan contoh-contoh terpilih yang dapat meletakkan gagasan dan isu tertentu pada konteks masing-masing. Bab 5 akan mengantar pada bahasan kekinian.

Dari Usaha Tani ke Budidaya Pertanian

Dalam bukunya yang luar biasa mengenai struktur ekonomi global, Herman Schwartz (2000: 13) menuliskan:

[Sebelum kapitalisme industri] hampir tidak ada yang pernah mengangkut padi-padian melalui jalur darat lebih dari 20 mil. [Karena itu] seluruh kehidupan ekonomi, sosial, dan politik sebenarnya terjadi dalam lingkup ekonomi mikro. Kegiatan-kegiatan itu berpusat pada pasar kota yang dikelilingi oleh pertanian di pedalaman yang berjarak sekitar 20 mil Sejak

abad XV hingga akhir abad XIX, pertanian berada di jantung ekonomi global (dan juga di jantung sebagian besar ekonomi “lokal”) Pangan dan bahan-bahan mentah yang berasal dari pertanian menyumbang lebih dari separuh perdagangan internasional setidaknya hingga 1929.

Meski tampak saling bertentangan, kedua pengamatan tersebut berguna untuk membahas pergeseran dari usaha tani ke budidaya pertanian. Berdasarkan pengamatan pertama, usaha tani atau bertani adalah apa yang petani lakukan dan sudah lakukan selama sekian milenium, yakni mengolah tanah dan memelihara ternak, atau perpaduan keduanya. Biasanya aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan pada suatu sistem petakan lahan dan padang penggembalaan yang berpagar. Para petani harus selalu mengelola kondisi-kondisi alam yang terkait aktivitas mereka, dengan seluruh ketidakpastian dan risikonya, termasuk perubahan iklim (curah hujan dan suhu udara) serta kecenderungan degradasi biokimia tanah, kecuali kalau ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memelihara atau memulihkan kesuburan tanah. Karena itu, usaha tani yang berhasil membutuhkan tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai berbagai kondisi ekologis, juga kemauan untuk selalu menggunakan dan mengadopsi cara-cara penanaman yang lebih baik, sejauh masih dalam batas-batas risiko dan ketidakpastian yang bisa ditanggung. Bahkan, (atau terutama) para petani yang menggunakan apa yang dinamakan “teknologi sederhana” sekalipun—peralatan-peralatan tangan seperti tongkat penggali, cangkul, parang, dan kapak—menunjukkan adanya kapasitas besar untuk melakukan percobaan-percobaan skala kecil dan menghimpun pengetahuan. Antropolog Paul Richard (1986) telah memaparkannya dalam kajian yang mendetail tentang petani padi di Sierra Leone.

Menengok kembali beberapa elemen yang dijabarkan dalam Bab 1, kondisi-kondisi *sosial* minimum untuk bertani meliputi akses atas tanah, tenaga kerja, peralatan, dan benih. Secara historis, unit sosial terpenting yang dapat menjamin pengadaan sarana-sarana bertani dan penyelenggaraan aktivitas bertani adalah rumah tangga pedesaan. Sekali lagi, (sebagaimana istilah “properti” dan “pendapatan” yang dinyatakan sebelumnya) amatan ini juga perlu catatan: rumah tangga petani di masyarakat berbeda pada waktu berbeda sangat beragam dalam hal ukuran, komposisi, dan relasi-relasi sosial di dalam rumah tangga itu sendiri (khususnya relasi-relasi gender) serta dengan rumah tangga-rumah tangga lain di dalam komunitas pedesaan.

Sebelum kapitalisme industri, usaha tani dibatasi menurut skala sosial dan spasial. Usaha tani melekat pada pembagian kerja secara sosial yang relatif sederhana, sementara kelompok-kelompok atau kelas-kelas di luar pertanian pada umumnya tidak terlalu memengaruhi bagaimana para petani bertani. Tentu saja gambaran sederhana ini perlu disertai beberapa catatan untuk menunjukkan batasan atau cakupannya. *Pertama*, institusi-institusi luar kadang menyediakan kondisi-kondisi produksi yang penting yang tidak mampu disediakan sendiri oleh rumah tangga tani secara individu maupun dalam skala desa. Contoh yang paling dikenal adalah pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi utama oleh negara, misalnya di Asia Timur (Bray 1986), demikian juga di Asia Barat (Mesopotamia), Afrika Utara (Mesir), dan Amerika Tengah prakolonial (Meksiko). *Kedua*, para pengusaha pemilik lahan yang berada di garis depan kapitalisme perdagangan (Bab 2) secara aktif mengelola proses kerja di perkebunan mereka. *Ketiga*, sejarah mengagumkan penyebaran jenis tanaman pangan pokok, tanaman-tanaman pangan yang lain, dan ternak dari tempat asalnya ke wilayah-wilayah lain tempat mereka diadopsi kadang disertai akibat-akibat susulan ekologis dan sosial yang amat mendalam

(Grigg 1974: Bab 3; Crosby 1986 mengenai “imperialisme ekologis” oleh kolonialisme pendudukan di Amerika dan tempat-tempat lain). *Keempat*, berkembangnya transportasi *air* memberi cukup kemudahan untuk mengangkut dan memperdagangkan produk-produk pertanian dalam jumlah besar. Peradaban-peradaban agraris, terutama di wilayah-wilayah kering, biasanya dimulai dari lembah-lembah sungai besar. Selain jadi sumber pengairan, adanya sungai besar juga mempermudah pengangkutan dengan tongkang dan kapal berisi padi-padian untuk memberi makan kaum bangsawan, tentara, dan masyarakat nonpertanian di kota-kota kecil maupun kota-kota besar (biasanya terbentuk di tepian sungai). Transportasi maritim menjadi kunci bagi perdagangan pertanian di Mediterania, misalnya, sejak zaman kuno.

Namun, di sepanjang perjalanan sejarahnya hingga setidaknya sekarang, bertani adalah cara hidup dan aktivitas yang sangat *lokal*.¹ Lokalisme bertani meliputi beberapa hal berikut ini:

- pemeliharaan kesuburan tanah dengan menggunakan pupuk “hijau” dan kotoran hewan yang berasal dari atau dekat lahan pertanian, misalnya dalam sistem bera dan rotasi tanaman—dikenal dengan istilah “sistem putaran agroekologis tertutup”;
- pengumpulan atau pertukaran tenaga kerja antar-rumah tangga yang berdekatan, terutama pada momen-momen penting dalam kalender musim tanam, misalnya memastikan ketepatan waktu tanam dan waktu panen, terutama ketika kondisi cuaca tak menentu; dan
- penyediaan barang-barang dan jasa oleh perajin setempat bagi petani yang mungkin tidak memproduksi sendiri, termasuk peralatan-peralatan yang mereka gunakan dalam bertani.

Perpaduan usaha bertani dan produksi barang-barang kerajinan rumah tangga seperti alat sulam dan tenun, untuk mengambil beberapa contoh umum, telah menyebar luas dan lama-kelamaan dihancurkan oleh perkembangan kapitalisme dan dorongan ke arah spesialisasi pembagian kerja. Marx mengamati hal ini di Inggris, sementara Bagchi menyajikannya untuk kasus India (Bab 3 di atas). Di India, kolonialisme berdampak pada *meningkatnya* “ruralisasi” dan “pembentukan petani kecil”, yakni kehidupan yang secara ekonomi lebih terbatas di pedesaan.

Dalam masyarakat agraris sebelum kemunculan kapitalisme, baik di kawasan-kawasan pertanian utama di Eropa maupun tanah-tanah jajahan, bertani dilakukan oleh sebagian besar orang. Apa yang kemudian kita sebut sebagai “pertanian” tidak lebih dari agregasi, total penjumlahan, para petani dan aktivitas-aktivitas mereka. Para petani terhubung dengan yang bukan petani pada tingkat tertentu melalui pemerasan renten dan pajak, serta pada umumnya melalui pertukaran yang terbatas dan tidak dipengaruhi oleh pembagian kerja yang lebih luas, proses perubahan teknologi, dan dinamika pasar. Elemen-elemen yang disebut terakhir kemudian datang sebagai penanda “sektor pertanian” dalam kapitalisme industri.

Istilah “sektor pertanian” ditemukan dan digunakan sejak kemunculan dan pengembangan ekonomi “modern”, yakni ekonomi kapitalis. Marx menyatakan bahwa pembagian kerja secara sosial antara pertanian dan industri, antara pedesaan dan perkotaan, muncul sebagai ciri-ciri perkembangan kapitalisme. Pertanian baru dapat dianggap sebagai “sektor” ketika sektor industri semakin menguat di Utara, lantas diikuti oleh industrialisasi yang dijadikan tujuan ekonomi utama “pembangunan nasional” bagi negara-negara Selatan setelah lepas dari penguasaan kolonial.

Saya mendefinisikan “budidaya pertanian” atau “sektor pertanian” dalam ekonomi kapitalis modern sebagai pertanian

bersama dengan seluruh kepentingan ekonomi serta institusi-institusi khusus dan aktivitas-aktivitasnya, pada “hulu” dan “hilir” pertanian, yang memengaruhi aktivitas-aktivitas dan reproduksi petani. “Hulu” di sini merujuk pada kondisi-kondisi produksi yang menjadi syarat untuk bertani dan bagaimana semua itu terjamin. Mulai dari penyediaan alat-alat kerja, atau *input* (peralatan, pupuk, benih), serta pasar untuk tanah, tenaga kerja, dan kredit—dan yang paling utama tentu saja pengerahan tenaga kerja. “Hilir” mengacu pada apa yang terjadi pada hasil tanaman dan ternak ketika dibawa ke luar lahan pertanian—pemasaran, pemrosesan, dan distribusi—serta bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut memengaruhi pendapatan petani. Pendapatan dibutuhkan oleh petani untuk reproduksi diri mereka. Saat ini, agen-agen yang berkuasa di hulu dan hilir pertanian kapitalis dicirikan oleh, dalam istilah yang digunakan Weis (2007), kapital *input* pertanian dan kapital pangan hasil pertanian.

Dalam kapitalisme, pertanian menjadi semakin sering diartikan sebagai suatu sektor yang berdiri sendiri dengan melihat posisinya dalam pembagian kerja secara sosial, juga sebagai sebuah objek kebijakan publik. Keduanya saling berkaitan dan berhubungan dengan dinamika pokok yang ditekankan sebelumnya, yakni komodifikasi subsistensi. Melalui komodifikasi subsistensi, petani-petani yang sebelumnya sebagian besar sanggup memenuhi kebutuhan sendiri, kini menjadi semakin bersandar pada pasar (pertukaran komoditas) demi kebutuhan reproduksi. Akibatnya, mereka menjadi bergantung pada pendapatan berupa uang, baik digunakan untuk membayar pajak dan/atau sewa secara tunai (ketimbang dalam bentuk barang atau jasa tenaga kerja), membeli barang-barang konsumsi yang tidak bisa lagi disediakan oleh tenaga kerja mereka sendiri atau yang berasal dari ekonomi lokal, maupun membeli alat-alat produksi—pupuk, benih, peralatan, dan perkakas pertanian yang lain.²

Periode 1870-an hingga saat ini adalah penanda perubahan revolusioner dalam kondisi-kondisi teknis pertanian, berkebalikan dengan perubahan evolusioner yang mencirikan sejarah panjang usaha tani sebelum masa itu, yang mencakup inovasi bertahap dan pelan-pelan dalam pemuliaan tanaman dan hewan serta peningkatan metode pengolahan lahan dan penggembalaan ternak. Transisi awal menuju pertanian kapitalis di Inggris sejak abad XVI sekalipun tidak menghasilkan revolusi teknis yang sebanding dengan yang terjadi kemudian.³

Garis pembatas sejarah 1870-an di sini menandai dampak dari Revolusi Industri kedua, sebagaimana disebutkan dalam Bab 3. Sementara basis material Revolusi Industri pertama ialah besi, batu bara, dan mesin uap; basis material Revolusi Industri kedua ialah baja, bahan-bahan kimia, listrik, dan bahan bakar minyak. Dari waktu ke waktu—dan mengalami percepatan sejak 1940-an—Revolusi Industri kedua dan inovasi-inovasinya mentransformasi tiga aspek produktivitas dalam pertanian berikut ini (telah disebutkan dalam Bab 1):

- pengaruh pupuk-pupuk kimia dan bahan-bahan kimia lain yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas lahan (hasil panen);
- demikian juga pengaruh pemuliaan tanaman dan hewan secara ilmiah (dimudahkan oleh pengetahuan baru tentang genetika dan penerapannya) terhadap hasil panen; dan
- mesin pembakaran-dalam dan penggunaannya pada traktor serta mesin-mesin pertanian lain yang mentransformasi produktivitas kerja.

“Ibu Kota Alam” dan Rezim Pangan Internasional Pertama (1870-an–1914)

Menengok kembali pengamatan Schwartz (di atas), dari sepanjang lima abad ekonomi global yang ia rujuk, pengangkutan komoditas-komoditas pertanian dalam jumlah besar mengandalkan terutama jalur perairan: sungai, danau, laut, dan samudra. Komoditas pertanian pertama yang biasanya diangkut dalam jumlah besar melintasi berbagai samudra adalah gula. Komoditas ini berasal dari perkebunan-perkebunan yang mempekerjakan budak di Brasil dan Karibia. Revolusi transportasi darat yang secara besar-besaran memperluas skala perdagangan internasional untuk komoditas pertanian adalah penemuan dan meluasnya persebaran rel kereta. Ini sepadan dengan transportasi laut dalam hal kemampuannya melintasi jarak yang jauh. Rel kereta telah memungkinkan wilayah-wilayah padang rumput di Argentina, Australia, Kanada, dan terutama Amerika Serikat menjadi eksportir terbesar padi-padian dan daging di dunia. Inilah basis dari rezim pangan internasional (RPI) pertama, dari 1870-an hingga 1914: “pasar [internasional] pertama yang dikendalikan oleh harga untuk sarana-sarana pokok kehidupan” (Friedman 2004: 125). Inilah rezim “pemukim kolonial”, dalam istilah Friedman, yang “membuka” wilayah-wilayah pinggiran yang luas guna memperluas pertanian gandum dan peternakan besar untuk ekspor ke Eropa, yang mengalami urbanisasi cepat dan semakin bergantung pada impor pangan pokok. Wilayah-wilayah pinggiran tersebut kebanyakan adalah lahan belum terjamah, berpenduduk jarang, dan sebelumnya masih sedikit ditanami.

Dengan demikian, setelah barat-laut Eropa yang menjadi tempat berlangsungnya transisi pertama ke arah pertanian kapitalis, lokasi penting dalam sejarah pertanian kapitalis berikutnya adalah

Midwestern United States [atau Midwest, sebutan geografis untuk kawasan utara dari Amerika Serikat bagian tengah]. Padang rumput luas di Midwest membangkitkan pertumbuhan di Chicago. William Cronon (1991) menyebutnya sebagai “Ibu Kota Alam”. Pada paruh kedua abad XIX, Chicago dengan pertanian daerah pedalamannya, yang semakin meluas berkat pembangunan rel kereta, membuka hubungan kesalingterkaitan yang erat di antara beberapa aspek pertanian berikut ini:

- ekstensifikasi monokultur padi-padian (untuk memberi makan manusia dan ternak);
- pemotongan ternak dan pengolahan daging dengan alat-alat industri dan dalam skala industri;
- industri manufaktur perkakas pertanian (khususnya bajak baja dan kemudian traktor);
- infrastruktur pemeliharaan dan pengangkutan padi-padian dan daging (yang memerlukan alat pendingin) untuk menempuh jarak yang jauh dalam jumlah besar yang sebelumnya belum pernah terjadi; dan
- bursa berjangka dan inovasi-inovasi institusional lain untuk membiayai produksi dan perdagangan komoditas-komoditas pertanian.

Jadi, Chicago memelopori banyak aspek dalam agribisnis modern yang kemudian menginkorporasi dan membentuk pertanian. Chicago juga memberikan contoh terjalannya “struktur berkelindan yang mencakup produksi padi-padian dan daging di luar wilayah tropis” (*temperate grain-livestock complex*). Struktur berkelindan ini telah menjadi faktor yang sangat penting dalam perdagangan hasil pertanian dan pembagian kerja internasional sejak 1870-an.

Karena tidak sanggup bersaing dengan padi-padian impor yang lebih murah, para petani Eropa beralih ke produksi intensif pro-

duk-produk yang bernilai lebih tinggi, seperti produk olahan susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran, juga dengan menelantarkan pertanian dan meninggalkan pedesaan. Selain kedua zona utama pertanian nontropis tersebut, zona lain yang menggenapinya adalah produksi dan ekspor hasil pertanian tropis dari Asia dan Afrika, yang inkorporasi kolonialnya tuntas pada waktu bersamaan. “Perkebunan industrial” pada masa ini (Bab 3) melempangkan jalan perubahan bagi daerah tropis dan jajahan, dari usaha bertani menuju budidaya pertanian, sebagaimana dicontohkan oleh Midwest. Apa yang membedakan perkebunan industrial dari bentuk-bentuk perkebunan sebelumnya adalah hubungan antara organisasi dan metode produksinya, antara struktur kepemilikan dan kaitan eratnya dengan modal keuangan, teknik pengiriman, pengolahan industrial, dan manufaktur. Aspek-aspek inilah, menurut Ann Stoler (1985: 17) dalam kajiannya mengenai perkebunan di Sumatra, yang menandai “perubahan seantero dunia ke arah agribisnis” pada akhir abad XIX. Laiknya padang rumput di dalam struktur berkelindan produksi padi-padian dan daging di luar wilayah tropis, beberapa zona dalam produksi perkebunan industrial adalah wilayah-wilayah baru pertanian. Dalam kasus ini, wilayah-wilayah baru itu dibentuk melalui pembukaan besar-besaran areal hutan tropis.

Singkatnya, pembagian kerja global dalam produksi dan perdagangan hasil pertanian muncul sejak 1870-an, yang terdiri atas:

- zona-zona baru produksi padi-padian dan daging di “Eropa baru” (Crosby 1986), yang terbentuk melalui kolonialisme para pemukim baru di Amerika nontropis, Afrika bagian selatan, Australia, dan Selandia Baru;
- pola-pola pertanian yang lebih beraneka ragam di sebagian Eropa ketika migrasi keluar desa berlangsung semakin cepat; dan

- spesialisasi tanaman-tanaman ekspor di tanah-tanah jajahan di Asia dan Afrika serta wilayah-wilayah tropis bekas jajahan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, baik yang dikelola di ladang petani kecil, lahan petani kapitalis, maupun perkebunan industrial.

Elemen kunci dari pembagian kerja global dan dinamika ekonominya tersebut adalah peralihan dari usaha bertani ke budidaya pertanian. Peralihan ini mengaitkan perubahan revolusioner kondisi-kondisi teknis dan organisasi produksi (terutama di “Eropa baru” dan Eropa itu sendiri, serta di perkebunan-perkebunan industrial di wilayah tropis) dengan semakin meluasnya skala perdagangan internasional, baik untuk makanan pokok yang dihasilkan dari struktur berkelindan produksi padi-padian dan daging di wilayah nontropis, “aneka pangan tropis”—bahan-bahan makanan dan minuman seperti gula, cokelat, pisang, teh, dan kopi—maupun untuk tanaman industri seperti karet, kelapa sawit, kapas, sisal, dan rami yang kebanyakan diproduksi di daerah tropis.

Berkenaan dengan pertanian sebagai objek kebijakan, pada sisi penawaran dalam RPI pertama,

Pertanian pemukim telah menurunkan harga komoditas pertanian melalui perampasan secara politik dan kolonisasi tanah-tanah bukaan baru Produksi komoditas khusus ... [itu] secara aktif dipromosikan oleh negara-negara penjajah melalui kebijakan pertanahan dan imigrasi serta pembangunan infrastruktur sosial, terutama rel kereta dan bantuan kredit. (Friedmann dan McMichael 1989: 101)

Sementara itu, pada sisi permintaan, jalan menuju tata perdagangan yang relatif bebas telah disiapkan melalui pencabutan

Undang-Undang Gandum (*Corn Laws*) di Inggris pada 1846.⁴ Undang-undang tersebut memberi perlindungan pada para pemilik tanah dan petani Inggris, serta keuntungan sewa mereka, dari impor padi-padian murah. Meski pencabutan undang-undang tersebut terjadi sebelum titik balik bersejarah 1870-an, keduanya saling terhubung dalam beberapa cara. Pada 1840-an, Inggris memiliki kelas kapitalis industri pertama yang percaya diri dalam hal kemampuan dan kekuatan kompetitif internasionalnya untuk melawan “kepentingan pertanian” domestik demi kepentingan-kepentingan “perdagangan bebas”, termasuk pangan impor murah supaya upah, dengan demikian juga ongkos tenaga kerja, tetap rendah. Pencabutan Undang-Undang Gandum dan langkah Inggris berikutnya untuk mendukung pemberlakuan peraturan serupa di negara-negara Eropa lain telah membuka jalan bagi tata perdagangan yang relatif bebas dalam “rezim pangan internasional” yang muncul beberapa dekade kemudian. Pada masa itulah pertanian padi-padian Inggris menghadapi tekanan kompetitif yang serius dari impor padi-padian yang jumlahnya mulai meningkat pesat.⁵

Bab 3 menyajikan ulasan mengenai beberapa ciri kebijakan negara-negara kolonial di Asia dan Afrika pada masa itu, yang memaksakan komodifikasi subsistensi terhadap para petani kecil dan mendorong penciptaan perkebunan industrial, pertanian pendatang-pemukim, dan perhutanan komersial. Komodifikasi subsistensi dapat mengambil, dan memadukan, bentuk-bentuk aktivitas yang berlainan untuk memperluas dan memantapkan pembagian kerja secara sosial. Termasuk di dalamnya adalah menekan para petani kecil untuk menanam tanaman-tanaman ekspor khusus, memproduksi pangan bagi tenaga kerja upahan yang kian meningkat di pertambangan, konstruksi, manufaktur, dan perkebunan industrial, serta mengikat para petani kecil pada kerja upahan musiman. Selain itu, sejak abad XIX, pemerintah

kolonial juga mendirikan departemen-departemen pertanian di wilayah jajahan mereka di Asia dan Afrika, dengan penelitian pertanian yang pada masa kolonial memusatkan perhatian pada tanaman-tanaman ekspor utama, misalnya karet dan gula, serta nyaris mengabaikan tanaman pangan pokok wilayah tropis.

Akhirnya, sebagaimana dicatat dalam Bab 3, terdapat pula wilayah-wilayah baru untuk pertanian yang diciptakan oleh masyarakat pribumi. Mereka bermigrasi dan membuka lahan untuk menanam tanaman-tanaman ekspor baru. Meski mereka melakukannya atas inisiatif sendiri, selama periode itu dan setelahnya, produksi ekspor khusus semakin mengintegrasikan mereka dengan perusahaan-perusahaan kapitalis yang memperdagangkan, mengirim, dan mengolah hasil panen mereka. Salah satu aspek dari integrasi tersebut adalah perkembangan standar mutu dan regulasi perdagangan internasional terhadap produk-produk tropis seperti kopi, kakao, dan karet (Daviron 2002).

Dari Perdagangan Bebas ke Proteksionisme (1914–1940-an)

Ekonomi dunia kapitalis dipengaruhi secara mendalam oleh Perang Dunia pada 1914–1918 dan 1939–1945 serta Depresi Besar pada 1930-an, dengan akibat-akibat susulannya bagi perdagangan internasional. Tunduk pada ketakrataan perkembangan kapitalis di berbagai belahan dunia dan sekalipun terdapat kemerosotan ekonomi dunia, proses yang digambarkan di atas berlanjut dengan satu pengecualian krusial. RPI pertama runtuh pada 1914, dan berbagai kebijakan masa perang, bersama dengan depresi ekonomi, menghasilkan tersebar luasnya proteksionisme pertanian di negara-negara industri kapitalis.⁶ Satu contohnya, yang menjadi kunci atas apa yang terjadi selanjutnya, adalah pengenalan kebijakan komprehensif untuk mendukung pertanian di Amerika Serikat pada

1930-an sebagai bagian dari Janji Baru (*New Deal*) pemerintahan Roosevelt.⁷ Kebijakan ini menjamin harga minimum, atau “harga dasar”, bagi petani. Selain itu, surplus persediaan, yakni padi-padian yang tidak bisa dijual dengan harga yang berlaku di pasar, ditanggung oleh pemerintah.

Pada waktu bersamaan, Inggris, Prancis, dan penguasa-penguasa kolonial Eropa yang lain berupaya untuk lebih menggencet lagi populasi petani di Asia dan Afrika. Badan-badan pemasaran untuk komoditas-komoditas pertanian penting yang didirikan untuk menopang para petani (dan industri-industri pertanian secara umum) di Eropa diadaptasi di tanah jajahan di Afrika agar diperoleh pendapatan yang lebih besar dari para petani. Di India, Depresi Besar mengintensifkan pola yang telah ada, yakni menggantikan penanaman tanaman pokok untuk konsumsi domestik dengan produksi komoditas ekspor seperti kapas, rami, gula, dan padi-padian. Kebijakan ini mengakibatkan kelaparan besar-besaran di Bengal pada 1943–1944 (Bab 3).

Rezim Pangan Internasional Kedua (1940-an–1970-an)

Ciri-ciri utama dari periode setelah Perang Dunia II adalah kemunculan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara-negara “adikuasa” yang saling bersaing; persaingan mereka untuk mendapatkan sekutu dari negara-negara Asia dan Afrika setelah meraih kemerdekaan (yang didukung oleh dua negara adikuasa tersebut untuk alasan yang berlainan); dan pemulihan dan ekspansi besar-besaran ekonomi dunia kapitalis sejak 1950-an hingga awal 1970-an. Ciri-ciri tersebut turut membentuk perkembangan pertanian, berikut dampak-dampaknya dalam usaha bertani, di tiga wilayah utama pembagian kerja global, sebagaimana diuraikan di atas.

Sejak akhir 1940-an, di Amerika Serikat dan negara-negara industri di Utara pada umumnya, berlangsung percepatan yang berarti dalam laju transformasi teknis pertanian melalui “kimiaisasi” (pupuk, pestisida, herbisida), mekanisasi, dan pengembangan bibit dan ternak unggul (dibiakkan untuk mendapatkan hasil susu dan daging yang lebih besar secara terus-menerus). Bagian penting dari percepatan transformasi teknis di pertanian negara-negara Utara ialah peningkatan skala dan pemusatan korporasi *input* pertanian di hulu pertanian. Peran mereka dalam membentuk metode-metode bertani juga memberi andil terhadap kecenderungan pemusatan dalam pertanian, dengan unit-unit pertanian yang semakin sedikit, berukuran lebih besar, dan lebih terkapitalisasi, sehingga meningkatkan skala pertanian dan menumbuhkan produktivitas tenaga kerja. Dari 1950 hingga 1972, mereka yang bekerja di pertanian di Amerika Serikat menurun dari 15% menjadi 5% dari total angkatan kerja (Friedmann 1990: 24). Pengaruh lain termasuk peningkatan pesat kesenjangan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas lahan antara para petani kapitalis skala besar—di Utara maupun di Selatan—dan para petani skala kecil yang terpusat di Selatan, sebagaimana disinggung dalam Bab 1.

Hal ini segera menghasilkan problem kapitalisme yang lazim, sebagaimana dianalisis oleh Marx, yakni produksi berlebih: kondisi ketika persaingan kapitalis dan pertumbuhan produktivitas menghasilkan sejumlah komoditas yang tidak bisa lagi dijual karena kekurangan “permintaan efektif”—istilah para ekonom untuk menyebut apakah terdapat daya beli yang mencukupi untuk membeli komoditas yang ditawarkan. Sebaliknya, hal ini menampakkan ciri mendasar kapitalisme: bahwa “permintaan efektif” memperlihatkan siapa *memperoleh* apa—pendapatan yang dapat dibelanjakan para konsumen (termasuk dengan kredit)—dan

bukan siapa *membutuhkan* apa. Inilah topik utama dalam perdebatan mengenai ekonomi pangan global saat ini; bahwa tidak terjadi kekurangan mutlak dalam produksi pangan, tetapi banyak orang mengalami kelaparan karena kurangnya pendapatan untuk membeli pangan yang layak.

Berlanjutnya kebijakan “dukungan usaha tani” dari pemerintah Amerika Serikat—yang pada kenyataannya mendukung industri pertanian—berkontribusi pada masalah tersebut, tetapi juga menemukan suatu “solusi”, setidaknya untuk sementara, dalam kerangka RPI kedua. Solusi yang dimaksud berpusat pada pembuangan surplus pangan Amerika Serikat sebagai bantuan pangan, semula untuk membantu rekonstruksi se usai perang di Eropa Barat, lalu berlanjut ke negara-negara Dunia Ketiga. Bantuan pangan adalah salah satu bagian strategi kebijakan luar negeri semasa Perang Dingin. Friedmann (2004) menyebut hal ini sebagai “rezim perdagangan-industri pangan”. Disebut “perdagangan” karena rezim ini memberikan subsidi produksi dan mengatur perdagangan untuk kepentingan pertanian Amerika Serikat, juga Eropa, termasuk perusahaan-perusahaan niaga raksasa yang memperdagangkan padi-padian, sembari melayani kepentingan kebijakan luar negeri di negara-negara Dunia Ketiga; dan disebut “industri” karena semakin pentingnya korporasi-korporasi *input* pertanian selama rezim tersebut.

Takrupa RPI pertama yang begitu dikendalikan oleh harga pasar, dengan tekanan kompetitifnya pada pertanian padi-padian Eropa, RPI kedua memadukan kebijakan perdagangan “merkantil” dengan “organisasi korporat dari struktur berkelindan pertanian-bisnis pangan transnasional yang berpusat pada ekonomi Atlantik” (Friedmann 1993: 18). Dalam struktur berkelindan ini, melalui *Common Agricultural Policy* (CAP) dalam kerangka regional yang ki-

ni bernama Uni Eropa,⁸ negara-negara Eropa mereplikasi karakter “nasional” kebijakan pertanian Amerika Serikat dalam memberikan dukungan produksi pertanian dan ekspor hasil pertanian.

Meningkatnya pendapatan riil di negara-negara Utara selama ledakan ekonomi sesuai perang tercermin dari peningkatan konsumsi yang bahkan membentuk budaya massal baru, yakni konsumerisme. Secara khusus, peningkatan besar-besaran konsumsi sehari-hari untuk daging serta makanan terproses dan makanan cepat saji menandakan tingginya peningkatan industri hilir pangan hasil pertanian dalam “struktur berkelindan pertanian-bisnis pangan transnasional” (*transnational agro-food complex*).

Hukum Engel, dirumuskan oleh ahli statistik asal Jerman bernama Ernst Engel (1821–1896), menyatakan: ketika pendapatan meningkat, maka jatah yang dibelanjakan untuk pangan menurun. Dalam istilah teknis ilmu ekonomi, “elastisitas pendapatan atas permintaan pangan” adalah kurang dari 1. Artinya, setiap unit tambahan dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, hanya sebagian—dan bagian yang makin berkurang—yang dihabiskan untuk pangan. Tetapi, hal ini tidak berarti bahwa hanya sedikit uang yang dibelanjakan untuk pangan. Sebagai contoh sederhana, sebut saja satu rumah tangga dengan pendapatan tahunan 10.000 dolar menghabiskan 10%, atau 1.000 dolar, untuk pangan. Seiring waktu, pendapatan itu menjadi dua kali lipat, atau 20.000 dolar, dan jatah yang digunakan untuk pangan turun menjadi 7%, atau 1.400 dolar, alias bertambah 40% dari *jumlah* yang sebelumnya dibelanjakan untuk pangan.⁹ Singkatnya, industri pangan hasil pertanian berekspansi dan bersaing untuk menyediakan—dan merangsang—jumlah total biaya yang dihabiskan untuk pangan. Terutama sejak 1950-an, dan pada skala geografi dan ekonomi yang semakin membesar saat ini (Bab 5), beberapa dari nama-nama besar industri pangan hasil pertanian telah “lepas landas”, lebih-lebih mereka yang bergerak dalam penyediaan dan penyembelih-

an ternak serta pemrosesan daging. Termasuk pula, mereka yang berada dalam rantai industri makanan siap saji yang kini menjadi waralaba global.

Bagi negara-negara Selatan, impor gandum dari Amerika Serikat dan kemudian Uni Eropa—mulanya melalui pinjaman lunak untuk bantuan pangan—dapat menyediakan pangan dengan lebih murah daripada pertanian domestik. Kebijakan impor diterapkan dalam rangka mendorong industrialisasi di negara-negara yang sebelumnya sebagian besar sanggup memenuhi kebutuhan sendiri dalam produksi pangan (mengulang kasus Inggris setelah pencabutan Undang-Undang Gandum sekitar seabad lalu). Hal ini ditekankan oleh Friedmann (1990) sebagai “asal mula ketergantungan pangan Dunia Ketiga,” sebagaimana dicontohkan dari sebagian Amerika Latin, Afrika Utara, dan Asia Barat.

Modernisasi Pertanian pada Momen Pembangunanisme (1950-an–1970-an)

Sebagian besar negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika saat bangkit dari penjajahan masih sebagai masyarakat agraris. Tetapi, sekarang mereka punya komitmen pada “pembangunan nasional”, sebagaimana sebagian besar negara-negara di Amerika Latin yang secara umum lebih terindustrialisasi.¹⁰ Modernisasi pertanian biasanya menjadi elemen utama dalam gagasan tentang “pembangunan nasional”, meski sering kali takluk pada hasrat industrialisasi. Memberi prioritas pada industrialisasi bisa berarti mengganti produksi padi-padian domestik dengan impor gandum murah, atau “menunda” modernisasi pertanian sampai pembangunan industri nasional bisa menyediakan berbagai *input* modern untuk tujuan tersebut. Pandangan yang terakhir ini dominan dalam rencana pembangunan di India pada dua puluh tahun pertama kemerdekaan, sebelum Revolusi Hijau diluncurkan.

Sepanjang periode puncak “pembangunanisme” pada 1950-an hingga 1970-an, serangkaian langkah kebijakan diadopsi dan diterapkan oleh pemerintah negara-negara Selatan untuk “modernisasi” pertanian. “Pembangunanisme” adalah upaya mengejar pembangunan dengan dipandu oleh negara. Kebijakan pertanian juga digunakan untuk memutus beberapa kontradiksi dan ketegangan sosial yang berakar dari sejarah kolonial. Langkah ini coba dilakukan terutama di Amerika Latin, selain juga di Asia dan Afrika. Karena itu, sebagai contoh, *land reform*, dalam bentuknya yang sangat beragam, tersebar luas pada periode ini (lihat Bab 6), sebagaimana pemukiman ulang penduduk pedesaan yang dipaksa atau disponsori oleh pemerintah (praktik jamak pada masa kolonial), misalnya, di sebagian Afrika dan Asia Tenggara. Pada 1970-an, *Integrated Rural Development Programs* (IDRPs) juga dipromosikan dengan gencar, terutama oleh World Bank dan United States Agency for International Development (USAID). IDRPs adalah satu “paket” terpadu yang mencakup pemberian bantuan untuk layanan pendidikan dan kesehatan serta ekonomi ke pedesaan. IDRPs dipandang oleh beberapa pihak sebagai tanggapan atas kesuksesan perang pembebasan nasional di Vietnam yang dipimpin oleh komunis dan berbasis petani.

Pada periode ini, kebijakan-kebijakan pembangunan pedesaan dan pertanian mengalami banyak “pergeseran paradigma” yang beragam dan berulang-ulang, atau lebih sederhananya adalah perubahan langgam, seperti terjadi sekarang.¹¹ Meski terdapat keragaman, berbagai kebijakan dan program modernisasi berbagi satu logika utama: mempromosikan *pertanian yang lebih produktif berbasis pada pemantapan relasi-relasi komoditas*, baik melalui pengembangan “petani skala kecil” maupun pertanian skala besar, milik negara maupun swasta. Ini sering kali diupayakan oleh pemerintah di negara-negara Selatan dalam kerangka “kemitraan” dengan World Bank, lembaga-lembaga bantuan bilateral, khususnya

Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, serta perusahaan agribisnis swasta (nasional dan internasional). Semua menyediakan rancangan modernisasi pertanian.

Istilah “*lebih produktif*” mengarah pada kondisi-kondisi teknis pertanian: varietas-varietas unggul dan metode-metode budidaya, penggunaan banyak pupuk kimia dan kredit “lunak”, serta penyuluhan teknis bagi para petani (dipromosikan melalui dinas penyuluhan). Ini biasanya dilakukan berdasarkan jenis tanaman, baik tanaman ekspor maupun tanaman pangan, paling terkenal selama Revolusi Hijau sejak 1960-an dengan benih-benih varietas unggul dari “tiga besar” padi-padian: jagung, gandum, dan beras.¹² “Paket” ini menggabungkan benih-benih varietas unggul dengan pupuk-pupuk, membutuhkan pengairan memadai agar menghasilkan panen yang lebih besar, sebagaimana digambarkan dalam kisah India bagian utara di Pendahuluan buku ini.

“*Pemantapan relasi-relasi komoditas*” mencakup integrasi para petani lebih mendalam ke pasar. Artinya, mereka memproduksi komoditas-komoditas khusus tertentu untuk dijual, serta membeli dan menggunakan lebih banyak alat-alat produksi (berbagai *input* “modern”) dan alat-alat konsumsi, bisa jadi termasuk pangan. Alat-alat untuk tujuan ini biasanya mencakup:

- skema-skema pinjaman untuk berbagai biaya produksi musiman dan modal tetap, melalui bank-bank pertanian milik negara atau badan-badan publik yang lain;
- subsidi untuk pupuk dan, di wilayah-wilayah berpengairan di India, listrik untuk pembangkit pompa sumur tabung;
- mempermudah pemasaran dengan cara memperbarui infrastruktur transportasi dan organisasi-organisasi khusus seperti koperasi dan badan-badan pertanian seminegara (sebagian diadaptasi dari masa kolonial, misalnya badan pemasaran hasil panen); dan

- “menata” harga, terutama harga minimum atau “harga dasar”, yang ditentukan oleh pemerintah untuk tanaman-tanaman utama.

Pada 1970-an, saya tinggal di Tanzania saat badan-badan tanaman pertanian seminegara berkembang besar-besaran hingga mencakup penelitian dan pengembangan, penyediaan *input* dan pinjaman, angkutan, penyimpanan dan pemrosesan, serta pemasaran. Ini membangkitkan ingatan saya, bahwa itu semua sebagai suatu upaya untuk meniru, pada kondisi yang sangat berbeda, cara-cara yang digunakan oleh korporasi-korporasi di hulu dan hilir pertanian di negara-negara Utara untuk mengintegrasikan dan mengendalikan “sektor pertanian” (Bernstein 1981). Jonathan Barker (1989) menggambarkan program-program modernisasi pertanian di Afrika Sub-Sahara semacam itu sebagai upaya untuk menciptakan “kaum tani milik negara”.

Sulit untuk membuat generalisasi terkait dampak-dampak dari upaya-upaya modernisasi pertanian sepanjang momen “pembangunanisme”. Pasalnya, ukuran-ukuran kebijakan, “paket” teknis dan kelembagaan, serta kapasitas pemerintah dalam mengerjakan kebijakan-kebijakan tersebut beragam. Semua itu diterapkan pada kondisi-kondisi ekologis dan jenis-jenis pertanian yang juga jauh lebih beragam. Pada kenyataannya, menilai pengaruh kebijakan—suatu profesi yang cukup besar jumlah pelakunya—selalu menantang karena “kinerja” pertanian dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Mulai dari cuaca, dampak-dampak berbagai kebijakan makroekonomi (misalnya, dan khususnya, terkait kurs valuta asing dan suku bunga), hingga gelagat pasar dan harga, lokal maupun internasional. Terdapat pula cerita-cerita sukses pada skala-skala yang berbeda. Misalnya, cerita sukses terbesar adalah Revolusi Hijau di India yang memungkinkan negara itu mencapai swasembada padi-padian dalam waktu singkat. Pernyataan ini tidak bermaksud

menyatakan bahwa “keberhasilan” Revolusi Hijau tidak terbatas. Terdapat batasan-batasan dalam pertumbuhan panen gandum dan padi yang didapatkan dari “paket” biokimia dan masalah-masalah mengenai ongkos lingkungannya, dan karena itu juga tersirat masalah keberlanjutan, di beberapa wilayah. Tidak semua petani diuntungkan secara setara lewat penerapan Revolusi Hijau (simak Bab 7) dan tidak semua konsumen pangan diuntungkan oleh dampak Revolusi Hijau. Sebagai contoh, sebagian lahan yang dikelola untuk menanam padi-padian dengan kualitas lebih tinggi dan lebih mahal diambil dari lahan padi-padian “kasar”, seperti jawawut, dan kacang-kacangan, sumber protein utama untuk makanan kaum miskin.

Kesimpulan

Menjawab pertanyaan tentang petani mana yang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan pertanian yang berlainan, juga oleh proses-proses perubahan agraria dalam kapitalisme secara lebih luas, membutuhkan analisis mengenai proses diferensiasi antarpetani. Topik tersebut menjadi pembahasan utama dalam Bab 7 dan Bab 8. Sebelum membahas periode globalisasi neoliberal dalam bab selanjutnya, saya menutup bab ini dengan suatu amatan mengenai prospek pencapaian pembangunan ekonomi saat ini, termasuk industrialisasi, yang ditempuh melalui pertumbuhan pertanian yang dipandu oleh ekspor, dibandingkan dengan periode-periode awal dari struktur ekonomi kapitalis global.

Transisi-transisi awal menuju kapitalisme industri, dan peran pertanian dalam transisi-transisi tersebut, berlangsung ketika harga-harga berbagai komoditas pertanian pada umumnya lebih tinggi dalam bentuk riil¹³ dibandingkan sekarang. Dasar pertukaran internasional¹⁴ “bergerak lebih menguntungkan pertanian ... sepanjang abad XIX dan bahkan hingga Perang Dunia I,” se-

mentara dasar pertukaran internasional sejak 1940-an banyak “bergerak menjauh dari komoditas-komoditas pertanian dan lebih menguntungkan barang-barang manufaktur, untuk pertama kali sejak Revolusi Industri” (Kitching 2001: 154–155). Pembalikan tersebut sebagian mencerminkan masifnya pertumbuhan produktivitas pertanian di negara-negara Utara. Bagi sebagian besar negara-negara Selatan, promosi atas ekspor komoditas-komoditas pertanian tropis, pada momen pembangunanisme dan setelahnya (Bab 5), cenderung menghasilkan produksi berlebih secara sistematis. Hal ini menurunkan harga komoditas-komoditas pertanian di pasar internasional (kopi mungkin menjadi contoh yang paling banyak diketahui).

Gavin Kitching (2001) juga mengingatkan kita bahwa negara-negara kaya pada masa sekarang memiliki penduduk dan tingkat pertumbuhan populasi yang lebih kecil pada saat industri mereka berkembang, ketimbang negara-negara utama di Selatan sekarang ini. Teknologi industri juga secara umum lebih padat karya daripada saat ini. Dengan demikian, industri membutuhkan dan lebih dapat menyerap buruh migran dari kawasan-kawasan pedesaan yang terusir akibat akumulasi primitif dan perkembangan pertanian kapitalis. Sekalipun demikian, kita dapat mencatat bagaimana pada sepanjang “zaman keemasan” pertama globalisasi, eksodus para petani kecil dan buruh-buruh pertanian dari pedesaan Eropa berkontribusi, dalam jumlah yang sangat besar, pada migrasi yang melintasi Samudra Atlantik menuju Amerika Utara dan Amerika Selatan.

Catatan

¹ “Lokal” di sini tidak boleh dicampuradukkan dengan “statis”. Sejarah panjang kegiatan bertani mencakup pergerakan untuk membuka dan menduduki wilayah-wilayah baru untuk budidaya—sehingga menciptakan lokalitas-lokalitas baru.

- ² Namun, sebagian teoretikus berpendapat bahwa meskipun terjadi pembentukan pertanian kapitalis, bukan berarti *aktivitas bertani* yang terserap ke dalamnya pasti bersifat kapitalis. Saya akan kembali membahas ihwal ini dalam Bab 6 dan Bab 7.
- ³ Sebagian sejarawan berpendapat bahwa perolehan panen yang besar dari “usaha tani bernilai tinggi” kapitalistis di Inggris dari abad XVI sampai XVIII bersandar pada metode-metode padat kerja, tanpa kenaikan berarti dalam hal produktivitas tenaga kerja.
- ⁴ “Corn” di sini adalah “gandum”, bukan “jagung” dalam pengertian “maize” sebagaimana di Amerika.
- ⁵ Perhatikan pula pentingnya kelanjutan isu ini dalam politik pertanian dan kebijakan pembangunan masa kini: perbandingan harga pangan terhadap harga barang-barang industri, atau “dasar pertukaran” antara sektor pertanian dan sektor industri di dalam negeri dan dalam perdagangan internasional. Lebih lanjut, lihat uraian selanjutnya.
- ⁶ Keruntuhan RPI, dan munculnya proteksionisme, sering kali dicatat terjadi pada 1929, yakni pada permulaan Depresi Besar.
- ⁷ *New Deal* adalah program investasi publik [penanaman modal yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah], selain program-program lain, yang bertujuan untuk memberantas pengangguran besar-besaran demi memulihkan pertumbuhan ekonomi.
- ⁸ CAP diinisiasi pada 1962 dan saat ini berjumlah hampir sekitar separuh dari anggaran belanja Uni Eropa.
- ⁹ Sebaliknya, rumah tangga-rumah tangga miskin di Selatan harus membelanjakan jatah terbesar dari pendapatan mereka (yang jauh lebih kecil) untuk pangan, bahkan kadang kala tidak sanggup membeli makanan yang cukup; terdapat nukilan mengenai ihwal ini dalam kisah singkat petani bagi hasil di Bangladesh dalam Pendahuluan buku ini.
- ¹⁰ Dalam beberapa kasus, misalnya Brasil dan Chili, kedua negara ini memiliki pengalaman pertumbuhan industri yang signifikan ketika perdagangan dunia mulai menurun selama 1930-an, melalui “substitusi impor”, yakni produksi barang-barang manufaktur yang sebelumnya mereka impor.
- ¹¹ Ini adalah sindrom umum. Model-model pembangunan konvensional menyasar skenario “saling menguntungkan”—untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan mengakhiri kemiskinan—tetapi resep-resep model tersebut dikacaukan oleh ketimpangan dan kontradiksi kapitalisme. Karena itu, muncul kebutuhan untuk menemukan pendekatan-pendekatan dan gagasan-gagasan yang tampaknya “baru”, atau menemukan kembali dan melabeli ulang model-model lama, yang kemudian dalam praktiknya akan menghadapi problem serupa.
- ¹² Kenyataannya, Revolusi Hijau dimulai dengan pengembangan varietas unggul di Amerika Serikat pada 1930-an. Kisah ini dipaparkan dalam kajian penting karya Jack Kloppenburg (2004).

¹³ “Dalam bentuk riil” pada konteks ini berarti perubahan harga setelah dikurangi rata-rata inflasi tahunan yang terjadi—*catatan dari penerjemah*.

¹⁴ “Dasar pertukaran” adalah istilah dalam ilmu ekonomi yang berarti “jumlah satuan barang yang harus dilepaskan (dibayar) untuk memperoleh satu satuan barang yang lain dalam transaksi tukar-menukar antara dua pihak. Misalnya, antara negara maju dan negara berkembang dalam perdagangan internasional atau antara sektor pertanian dan sektor industri dalam negeri.” Lihat T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (2004: 414)—*catatan dari penerjemah*.

BAB 5

Globalisasi Neoliberal dan Pertanian Dunia

SEJAK 1970-an, ekonomi dunia kapitalis mengalami suatu proses perubahan mendalam yang lazim disebut sebagai globalisasi. Posisi penting dan makna globalisasi yang terjadi sekarang, serta alasan dan dampaknya, masih sangat kontroversial. Dalam arti terluasnya, globalisasi mengacu pada beberapa bentuk baru restrukturisasi kapital pada skala dunia dan meliputi beberapa unsur berikut:

- deregulasi pasar finansial dan “finansialisasi” semua aspek kegiatan ekonomi;
- semakin meningkatnya deregulasi dalam perdagangan internasional;
- pergeseran dalam hal produksi, lokasi produksi, serta strategi dan teknologi penjualan yang digunakan oleh korporasi agribisnis dan manufaktur; dan
- hadirnya banyak kemungkinan baru dari perkembangan teknologi informasi, termasuk kemungkinan untuk mengatur kegiatan ekonomi (produksi dan pemasaran), serta dalam komunikasi massa.

Menilik ke belakang, era 1970-an tampaknya telah menjadi penanda pasti atas terjadinya pergeseran-pergeseran struktural selanjutnya dalam ekonomi dunia, seperti halnya 1870-an, satu abad sebelumnya. Globalisasi pada era sekarang juga dipicu oleh resesi

yang terjadi dalam ekonomi dunia kapitalis dan “penyesuaian-penyesuaian”-nya, yang telah mendorong terjadinya ekspansi besar-besaran aliran komoditas dan uang secara internasional. Globalisasi ditandai juga dengan menurunnya daya saing industri Amerika Serikat (seperti terjadi sebelumnya di Inggris). Beverly Silver dan Giovanni Arrighi (2000: 56) merumuskannya sebagai berikut: “Krisis kapitalis yang mendalam pada 1970-an pertama-tama dan utamanya adalah cerminan dari ketidakmampuan kapitalisme yang dilembagakan oleh hegemoni Amerika Serikat untuk mewujudkan janji-janji *Global New Deal*”¹—yang mencakup dukungan bagi “pembangunanisme” di negara-negara Selatan yang dilakukan secara selektif. Krisis ini berujung pada “runtuhnya rezim internasional yang ramah buruh dan ramah pembangunan selama tiga puluh tahun sebelumnya dan beralih pada rezim yang ramah kapital.” “Ramah” di sini terkait dengan apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang akan timbul sesudahnya: “Di bawah rezim baru tersebut, krisis kapitalisme segera berubah menjadi suatu krisis buruh terorganisir serta krisis negara kesejahteraan di negeri-negeri kaya, krisis Komunisme, dan krisis negara pembangunan di negeri-negeri miskin.”

Istilah “globalisasi *neoliberal*” menunjukkan bahwa perubahan dan dinamika pada masa sekarang bukan sekadar dampak “otomatis” dari watak pengulangan siklus dan kontradiksi kapitalisme (produksi berlebih, akumulasi berlebih, dan tekanannya terhadap laju keuntungan), tetapi juga mencerminkan program ideologis dan politis tertentu—yaitu neoliberalisme—untuk mengatasi masalah-masalah kapital (Harvey 2005, terutama Bab 2). Program ini menggantikan usaha politik sebelumnya untuk membangun sebuah “*Global New Deal*” seperti yang disebut oleh Silver dan Arrighi. Program neoliberal ditujukan untuk meningkatkan kebebasan dan mobilitas bagi kapital serta untuk “menggulung negara”, meskipun sangat selektif dalam praktiknya.

Pertama, neoliberalisme ditujukan untuk mengurangi atau menghapus apa yang telah didapatkan oleh kelas pekerja. Pengurangan atau penghapusan itu ditetapkan dalam regulasi dan layanan negara terkait dengan kontrak kerja, jam dan kondisi kerja, upah minimum, hak berserikat, layanan kesehatan, pendidikan, serta jaminan sosial dan pensiun. *Kedua*, pasar kapital global merongrong kemampuan negara untuk melaksanakan kebijakan ekonomi makro nasional secara otonom. Pasar kapital itu tidak dikendalikan aturan—di dalamnya sejumlah besar uang bergerak dengan kecepatan yang belum pernah tercapai sebelumnya—dan digerakkan oleh keinginan untuk mengejar keuntungan jangka pendek. Jadi, mantra kebijakan neoliberal untuk meningkatkan “daya saing” dalam pasar global serta agenda privatisasi perusahaan dan layanan publik adalah aspek-aspek untuk memperdalam komodifikasi atas seluruh aspek kehidupan sosial. *Ketiga*, dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi, neoliberalisme meluncurkan program penyesuaian struktural, liberalisasi ekonomi, privatisasi, dan agenda “reformasi negara” yang diberlakukan di negara-negara Selatan (dan negara-negara bekas blok Soviet). Semua ini menandai berakhirnya proyek pembangunan yang dipandu oleh negara.

Runtuhnya Rezim Pangan Internasional Kedua

Runtuhnya RPI kedua terjadi seiring waktu dan dinamika globalisasi yang lebih luas. Keruntuhan itu mulai terjadi pada awal 1970-an, dipicu oleh “kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan muncul tiba-tiba” dalam pasar pangan dunia ketika Amerika Serikat menghapus embargo penjualan padi-padian ke Uni Soviet dan mengirimkan gandum ke sana dengan harga murah (Friedmann 1993: 40). Kejadian itu menjadi catatan adanya kontradiksi pada produksi berlebih: pembuangan

surplus dan peningkatan biaya untuk menstabilkan harga, dengan dampak yang harus ditanggung oleh pihak “pedagang” pada RPI kedua. Eropa juga memberi andil pada produksi berlebih ketika meniru kebijakan Amerika Serikat dalam mendukung pertanian. Eropa pun mulai memproduksi surplus padi-padian di masa damai untuk kali pertama dalam satu abad (di sana terjadi juga beberapa surplus komoditas lain seperti produk olahan susu).

Makin ketatnya persaingan dalam perdagangan produk pertanian internasional telah mengaitkan tekanan untuk menata lini “perdagangan” RPI kedua dengan perubahan wilayah geografis di lini “industrial” (produksinya). Misalnya, Argentina dan Brasil menjadi dua dari empat penghasil kedelai terbesar dunia (dua negara yang lain adalah Amerika Serikat dan Tiongkok). Kedelai sebagian besar diolah menjadi pakan ternak untuk produksi intensif di kandang penggemukan. Produksi kedelai terus berkembang, meningkat dua kali lipat dalam rentang 1990–2005, hingga bergabung bersama “tiga besar” padi-padian (gandum, beras, dan jagung) untuk membentuk “empat besar” hasil panen ladang dunia (Weis 2007: 17). Kisah kedelai menggambarkan percepatan laju pertumbuhan dalam hal kekuasaan, pengaruh, dan kontrol atas produksi, pengolahan dan penjualan makanan global oleh perusahaan agribisnis transnasional, baik perusahaan *input* pertanian maupun perusahaan pangan hasil pertanian. Perusahaan-perusahaan semacam itu kini berdesakan dengan berbagai batasan dalam lini “perdagangan” RPI kedua. Padahal, sebelumnya perusahaan-perusahaan itu sangat diuntungkan oleh RPI kedua. Korporasi pun menjadi “agen utama (global) yang berusaha untuk ... mengelola kondisi produksi dan konsumsi agar stabil, sehingga memungkinkan mereka untuk merencanakan investasi, mengolah bahan pertanian, dan memasarkannya” (Friedmann 1993: 52). Hasilnya, proses ini menandai terjadinya suatu pergeseran menuju regulasi (korporasi) *swasta* dalam ekonomi

pangan global, meskipun subsidi besar pertanian di Amerika Serikat dan Uni Eropa masih terus berlanjut.

Dalam hal politik kepentingan pertanian, berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet telah melemahkan tujuan strategis kawasan trans-Atlantik dalam RPI kedua (termasuk dalam hal bantuan pangan). Sementara itu, munculnya kembali masalah produksi berlebih membuat Amerika Serikat memasukkan perdagangan pertanian ke dalam agenda *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) di Putaran Uruguay pada 1986–1994. Sebelumnya, Amerika Serikat menolak untuk memasukkan perdagangan hasil pertanian ke dalam proses dan aturan GATT.²

Pertanian Global pada Masa Neoliberalisme

Dari kekacauan pasar dunia untuk produk pertanian yang menyusul runtuhnya RPI kedua, boleh jadi RPI ketiga mulai terbentuk, yaitu suatu “rezim pangan korporat-dagang multilateral” (Friedmann 2004). “Perdagangan multilateral”, persaingan internasional yang disebut di atas, mengganti wajah merkantilis RPI kedua, sementara wajah “industri” RPI kedua tetap berlanjut, tetapi dengan kekuasaan korporat yang semakin besar atas wilayah *hulu* dan *hilir* pertanian. Apakah RPI ketiga yang disertai usaha untuk meregulasi dan melawan rezim baru ini akan bisa mencapai derajat keutuhan dan stabilitas nisbi seperti dua RPI sebelumnya, hal ini masih terbuka untuk diperdebatkan, apalagi ketika dihadapkan pada tekanan lingkungan seperti menyusutnya cadangan minyak dan perubahan iklim. Terlihat jelas bahwa inflasi global secara dramatis pada harga padi-padian yang mulai terjadi pada 2005, dan memuncak pada 2008, mengulang (meski tidak dengan alasan serupa) inflasi yang terjadi pada 1970-an ketika akhir dari RPI kedua bermula.

Topik-topik kunci berikut ini mengisi diskusi tentang globalisasi neoliberal dan dampaknya terhadap pertanian selama beberapa dasawarsa belakangan:

- liberalisasi perdagangan, pergeseran pola perdagangan global komoditas pertanian, dan adanya pertarungan di dalam dan seputar WTO;
- dampak perdagangan berjangka komoditas pertanian terhadap harga pasar dunia, yaitu munculnya spekulasi yang didorong oleh “finansialisasi”;
- dihapuskannya subsidi dan beberapa bentuk bantuan lain bagi petani kecil di negara-negara Selatan karena “pengetatan” yang memang diharuskan dalam neoliberalisme, beserta pengurangan anggaran pemerintah dan bantuan internasional untuk sebagian besar usaha pertanian di Selatan;
- meningkatnya pemusatan korporasi global, baik dalam industri *input* pertanian maupun industri pertanian pangan, yang ditandai dengan adanya merger, akuisisi, dan munculnya kekuatan ekonomi korporasi yang jumlahnya kian berkurang dan menguasai pangsa pasar yang lebih besar;
- teknologi pengorganisasian baru yang diterapkan korporasi-korporasi itu di sepanjang rantai komoditas, mulai dari aktivitas bertani, pemrosesan, dan manufaktur, hingga distribusi eceran; misalnya, “revolusi supermarket” dalam penyediaan pangan secara global dan penguasaan pasar dalam penjualan pangan, juga masuknya rantai supermarket besar di Tiongkok, India, dan beberapa negara lain di Selatan;
- kombinasi antara teknologi pengorganisasian tersebut dengan kekuatan ekonomi korporat, yang membentuk seka-

ligus mengendalikan praktik dan “pilihan” petani maupun konsumen;

- desakan oleh korporasi untuk diberlakukannya paten hak kekayaan intelektual dalam bidang bahan tanaman genetik melalui klausul-klausul WTO di dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), serta isu mengenai “pembajakan kekayaan hayati” oleh korporasi;
- inovasi terbaru dalam bentuk rekayasa genetik tumbuhan dan hewan (*genetically modified organisms* atau organisme yang direkayasa secara genetik [GMOs]). Bersama dengan pertanian monokultur terspesialisasi, rekayasa genetik ini turut menyusutkan keanekaragaman hayati;
- wilayah profit terbaru berupa produksi bahan bakar hayati yang dikuasai oleh beberapa korporasi agribisnis yang didukung subsidi negara di Amerika Serikat dan Eropa, serta dampaknya terhadap produksi padi-padian dunia untuk konsumsi manusia;
- dampak-dampak kesehatan, yang mencakup semakin tingginya kadar bahan kimia beracun dalam makanan yang ditanam dan diolah secara “industrial”; rusaknya gizi dalam menu makanan yang terdiri atas makanan sampah, makanan cepat saji, dan makanan olahan; semakin banyaknya obesitas dan penyakit yang terkait dengan kegemukan, diiringi terus berlangsungnya, bahkan mungkin kian meningkatnya, kelaparan dan gizi buruk;
- kerugian lingkungan yang ditimbulkan oleh semua hal di atas, termasuk naiknya tingkat penggunaan energi dan emisi karbon dalam industrialisasi pertanian, pemrosesan, dan pemasaran pangan; misalnya, makanan harus menempuh jarak yang sangat jauh dari produsen ke konsumen, dengan truk, kapal, dan pesawat terbang; dan

- akibat dari semua hal di atas, muncul persoalan “keberlanjutan” dari sistem pangan global yang tumbuh secara terus-menerus berikut reproduksinya yang semakin meluas di sepanjang jalur seperti tercatat di atas.

Deratan topik penting dan sangat menarik perhatian di atas terungkap dengan baik dalam banyak debat publik di Utara maupun Selatan, juga muncul dalam banyak sekali publikasi.³ Bahkan, dengan sekadar mengurutkan semua tema itu, karena sempitnya ruang dalam buku ini, sudah menunjukkan adanya kaitan dengan, dan perkembangan lebih lanjut dari, apa yang sudah disinggung sebelumnya, khususnya:

- cepatnya perubahan teknis yang luar biasa dalam dunia pertanian serta industri hulu dan hilir pertanian (terutama “kimiaisasi”);
- bagaimana perubahan itu digerakkan oleh strategi memburu laba dan akumulasi dari industri *input* pertanian dan industri pangan hasil pertanian (serta lobi mereka yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan publik); dan
- akibat yang beragam bagi usaha tani dan konsumsi pangan di Utara dan Selatan, serta bagaimana dampak itu terben-tuk oleh pembagian kerja internasional dan perdagangan komoditas pertanian internasional.

Akhir Pembangunanisme

Sudah saya sebutkan di atas bahwa salah satu ciri kunci globalisasi neoliberal di Selatan adalah adanya agenda “reformasi” kebijakan liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan “penggulangan peran negara”. Hal ini diwujudkan dengan beberapa program penyesuaian struktural oleh World Bank dan IMF terhadap pemerintahan yang

terbebani utang mendadak dalam jumlah besar—aspek penting lain dari periode sejak 1970-an. Gerak menuju liberalisasi juga digagas oleh beberapa pemerintah, seperti di India sejak 1990-an. Agenda kebijakan ekonomi makro baru itu pun menandai berakhirnya periode sebelumnya, yaitu periode pembangunan yang dipandu negara, antara lain dengan menurunkan pembiayaan dan bantuan pemerintah untuk pembangunan pertanian, terutama bagi petani kecil.

Meski tidak mungkin melakukan generalisasi dengan tepat atas dampak globalisasi neoliberal terhadap pertanian di seluruh Dunia Ketiga, beberapa kecenderungan bisa kita catat. *Pertama*, kecenderungan mendalamnya relasi komoditas terus berlanjut, tetapi dengan tingkat investasi, arahan, dan kendali negara yang semakin tipis—termasuk pengurangan atau penghapusan subsidi langsung dan tidak langsung, terutama bagi para petani kecil; “mungkin itu adalah aspek yang paling berbahaya bagi pertanian yang telah mengalami penyesuaian struktural,” tulis Annette Desmarais (2007: 48; juga ditekankan oleh Bello 2009). Dalam hubungan ini, dampak globalisasi neoliberal terhadap usaha tani cenderung berakibat negatif bagi petani-petani yang lebih miskin di Selatan, yang di banyak wilayah menimbulkan gelombang baru “deagrarianisasi” (hilangnya akses petani kecil terhadap usaha tani) atau “*depeasantization*” (berkurangnya atau hilangnya kemampuan untuk terus menjadi petani kecil) (simak Bab 6 dan Bab 7).

Kedua, usaha mewujudkan “pembangunan nasional” lewat industrialisasi dan produksi untuk pasar domestik (“substitusi impor”) juga ditinggalkan. Dalam logika pasar yang ditentukan oleh liberalisasi impor, usaha-usaha itu dianggap “tidak kompetitif” jika sebuah komoditas bisa diimpor dengan harga lebih rendah daripada diproduksi di dalam negeri. Orientasi pasar domestik dalam “pembangunanisme” digantikan oleh promosi produksi ekspor

menurut apa yang dibayangkan sebagai “keuntungan komparatif”. Contohnya antara lain:

- memperluas tanaman ekspor “tradisional” seperti kopi, coklat, teh, gula, kapas, dan kelapa sawit (dalam kasus tertentu “merehabilitasi” penanamannya);
- mendorong diusahakannya komoditas berharga tinggi, terutama produk hortikultura seperti buah, sayuran, dan bunga potong segar, serta produk budidaya perikanan seperti udang, yang biasanya dikirim lewat pesawat udara ke supermarket di Amerika Utara dan Eropa; dan
- memperluas produksi berskala besar untuk kedelai, gula, dan padi-padian, sebagian dari hasil pertanian ini digunakan untuk bahan bakar hayati dan pakan ternak, terutama di beberapa daerah Amerika Latin.

Ketiga, seperti ditunjukkan oleh contoh-contoh tersebut, komodifikasi dan spesialisasi yang semakin mendalam pada produksi komoditas pertanian dilakukan oleh berbagai tipe petani di berbagai tempat; mulai dari petani “keluarga” hingga petani kapitalis menengah dan besar, serta dalam beberapa kasus tertentu dilakukan oleh korporasi pertanian.

Tamatnya Kaum Tani?

Berakhirnya “kaum tani”, atau petani skala kecil atau petani keluarga, telah disuarakan—dan diperdebatkan dengan sengit—di berbagai tempat dan kesempatan selama dua abad atau lebih. Secara empiris, dipersoalkan apakah berakhirnya kaum tani itu betul-betul terjadi atau belum? Di mana? Sejauh mana? Secara analitis, juga dipersoalkan mengapa akhir dari kaum tani itu terjadi atau mengapa belum terjadi? Apakah akhir dari kaum tani

itu terjadi pada derajat yang berbeda dan di beberapa tempat yang berbeda? Secara normatif, persoalan ini diperdebatkan pula: apakah akhir dari kaum tani memang diperlukan untuk perkembangan ekonomi modern, dan apakah lenyapnya mereka merupakan hal yang baik atau buruk?

“Pelenyapan kaum tani” (Kitching 2001) dianggap sebagai sesuatu yang harus terjadi oleh mereka yang memeluk konsepsi modernisasi kapitalis dan/atau konsepsi sosialis, termasuk oleh banyak kaum Marxis yang menganggap bahwa lenyapnya kaum tani adalah hal yang baik, betapapun menyakitkannya. Mereka meyakini bahwa capaian kemajuan menuju modernitas selalu menyebabkan gejolak besar. Mereka berpandangan bahwa penciptaan sesuatu yang baru mengharuskan dihancurkannya sesuatu yang lama. Pandangan ini adalah inti dalam analisis Marx tentang perkembangan kapitalisme, di luar semua penderitaan yang ditimbulkan oleh kapitalisme, sehingga Marx menceritakannya dengan sangat menarik (Marx juga tidak suka meromantisir apa yang ada sebelum munculnya kapitalisme).

Pandangan bahwa “pelenyapan kaum tani” adalah hal yang buruk berasosiasi dengan populisme. Seperti yang dijelaskan oleh Gavin Kitching dengan begitu jernih, gagasan populis menjadi tanggapan yang selalu muncul terhadap pergolakan sosial besar yang menandai perkembangan kapitalisme di sepanjang sejarah dunia modern. Pembelaan pada nilai dan kepentingan intrinsik produsen kecil, baik perajin maupun petani kecil sebagai simbol “rakyat”, selalu muncul sebagai suatu ideologi dan gerakan perlawanan terhadap perubahan yang disebabkan oleh akumulasi kapital. Itulah yang terjadi di dua pusat akumulasi awal (Eropa barat daya dan Amerika Utara) serta kawasan lain yang terkena dampak perkembangan kapitalisme akibat menyatunya daerah itu dengan ekonomi dunia yang semakin meluas, mulai dari Rusia abad XIX hingga negara-negara Selatan pada masa sekarang. Populisme

agraria, khususnya, adalah pembelaan bagi petani kecil atau petani keluarga terhadap bahaya yang mengancam reproduksi mereka, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh kapitalisme dan para agen kelas kapitalis—mulai dari pedagang dan bank hingga kapitalis pemilik tanah luas, kapital agraria, dan agribisnis—juga yang ditimbulkan oleh proyek “pembangunan nasional” yang dipandu negara dalam segala varian kapitalis, nasionalis, dan sosialisnya. Kolektivisasi pertanian Soviet pada 1930-an adalah contoh paling jelas dari varian sosialis dalam proyek pembangunan nasional semacam itu.

Harriet Friedmann (2006: 462) menyebut “serangan besar-besaran terhadap kelompok petani kecil yang tersisa di dunia” (yang tumbuh dari sisa gelombang serangan sebelumnya), sementara Philip McMichael (2006: 476) mengamati bahwa “‘rezim korporasi pangan’ ... melucuti kepemilikan petani sebagai suatu syarat untuk mengukuhkan kekuasaan pertanian korporat”—contoh dari apa yang disebut Harvey (2005) sebagai “akumulasi melalui penjarahan” (yang sesungguhnya adalah gelombang baru akumulasi primitif). Jika melihat kembali ulasan dalam Bab 2 dan Bab 3, maka persoalannya bisa dirumuskan seperti ini: apakah komodifikasi subsistensi yang sedang berlangsung dan makin intensif dalam kondisi globalisasi saat ini akan mencapai puncaknya dalam bentuk lenyapnya akses atas tanah dan tersingkirnya pertanian skala kecil secara lebih menyeluruh daripada yang terjadi pada masa lalu? Apakah globalisasi adalah sejenis klimaks dari proses sejarah dunia “pelenyapan kaum tani”, yang sampai sekarang proses itu berlangsung secara tidak merata dan tidak lengkap di berbagai zaman dan tempat dalam sejarah kapitalisme?

Farshad Araghi (2009) mengusulkan suatu kerangka kerja yang bernas untuk menimbang persoalan itu dalam bentuk urutan periode berikut ini:

1492–1832: “era penutupan akses atas lahan bersama pada masa kolonial dan akumulasi primitif kapital awal di tanah Inggris” ditandai oleh tibanya Columbus di Kepulauan Karibia dan diakhiri oleh pemberlakuan Undang-Undang Fakir Miskin yang baru (*Poor Law Amendment Act*) di Britania Raya yang menandai “mulai dilakukannya usaha sistematis oleh kaum borjuasi industri liberal Inggris untuk melucuti sistem kesejahteraan dasar” (Araghi 2009: 120). Tujuannya adalah menaklukkan kelas pekerja, seperti ketika borjuasi industri yang sama unjuk kekuatan melawan “kepentingan pertanian” Inggris dengan menghapus Undang-Undang Gandum empat belas tahun kemudian (Bab 4 di atas).

1832–1917: “rezim pangan kapital” menandai kemunculan dan dominasi kapitalisme industri serta pembagian kerja global yang diciptakannya. “Kebijakan agraria melalui globalisme liberal-kolonial pada periode ini adalah ... penyusutan kaum tani, proletarianisasi, dan urbanisasi di dalam negeri serta pembentukan petani kecil, ruralisasi, dan eksploitasi habis-habisan para pekerja paksa di wilayah koloni” (Araghi 2009: 122).

1917–1975, masa ini diawali oleh Revolusi Bolshevik dan diakhiri oleh kemenangan dari perjuangan pembebasan nasional Vietnam serta dianggap sebagai periode “mundurnya kaum reformis global dari liberalisme klasik” (Araghi 2009: 122), termasuk munculnya negara pembangunan (Uni Soviet menjadi contoh utama dan pertama).

1970-an hingga sekarang: globalisasi neoliberal. Dalam periode ini, pelenyapan kaum tani dan penggusuran penduduk secara nisbi pada masa se usai perang memberi jalan bagi munculnya pelenyapan kaum tani dan penggusuran penduduk secara mutlak dengan adanya gelombang “perampasan global” (*global enclosure*) (Araghi 2009: 133–134).

Saya merangkum kerangka pikir Araghi tersebut di sini karena ia menyajikan perbandingan dan kontras terhadap penjelasan sejarah yang digunakan di buku ini, juga karena Araghi menyimpulkan bahwa “pelenyapan kaum tani secara global bukanlah proses yang tuntas atau tuntas dengan sendirinya, bukan pula proses yang mengantar pada matinya kaum tani. Kelas-kelas sosial tidak sekadar berakhir dan mati; kelas sosial tetap hidup dan bertransformasi melalui pertarungan sosial” (Araghi 2009: 138). Kesimpulan ini mengantar kita untuk memeriksa arti dari istilah-istilah seperti kaum tani, atau petani kecil atau petani keluarga, juga membuat kita harus memikirkan lebih mendalam apakah kaum tani adalah satu kelas sosial, selain memikirkan implikasi yang ditimbulkan oleh bermacam jawaban atas pertanyaan itu. Bab 6 membahas ulang beberapa isu dan gagasan yang terkait dengan tetap hidupnya kaum tani atau petani keluarga dalam kapitalisme modern hingga masa sekarang. Bab 7 membahas lebih mendalam beberapa isu dan gagasan tentang pembentukan kelas di pedesaan. Bab 8 menjelajahi beberapa kompleksitas analisis kelas, dengan acuan khusus pada pergeseran dari sosiologi ekonomi tentang relasi kelas menuju sosiologi politik tentang aksi kelas.

Catatan

¹ Merujuk *New Deal*-nya Roosevelt di Amerika Serikat pada 1930-an (Bab 4), ini adalah tentang peranan kunci investasi publik, dan perencanaan, dalam merangsang serta membentuk pertumbuhan ekonomi.

² GATT didirikan pada 1974 untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional, lalu pada 2004 digantikan dengan WTO.

³ Misalnya, dan dalam kualitas yang beragam, Desmarais (2007), Weis (2007), Patel (2007), van der Ploeg (2008), Albritton (2009), dan Bello (2009), semua bersikap kritis terhadap korporasi pertanian dan menyokong jalan alternatif untuk petani kecil (lihat Bab 7 dan Bab 8).

BAB 6

Pertanian Kapitalis dan Petani Nonkapitalis?

SEJAUH ini saya telah beberapa kali menyebut tentang perkembangan kapitalisme yang takrata. Dalam bab ini saya menyajikan berbagai penjelasan mengapa perkembangan kapitalisme dalam dunia pertanian sangat takrata, dengan acuan khusus pada beberapa isu mengenai usaha bertahan hidup atau keteguhan para petani kecil, atau keluarga petani. Penjelasan ini harus selalu diuji berkaitan dengan beberapa kondisi historis tertentu. Karena kondisi-kondisi itu terus berubah, relevansi penjelasan itu juga berubah, sebagaimana akan saya jelaskan. Tiga penjelasan umum berikut ini sudah disinggung sebelumnya:

- “hambatan-hambatan” bagi investasi kapital dalam pertanian;
- kepentingan kapital dalam memungkinkan atau mendorong reproduksi pertanian skala kecil; dan
- perlawanan para petani-skala kecil terhadap penjarahan dan proletarianisasi (disebut oleh Araghi dengan istilah “pertarungan sosial” di akhir Bab 5).

Beberapa “Hambatan” terhadap Pertanian Kapitalis

Kondisi-Kondisi Teknis Produksi: “Masalah” Kapital dengan Alam

Satu gugus penjelasan mengemukakan beberapa faktor yang menghalangi kapital untuk melakukan investasi secara lebih luas

dan lebih langsung dalam dunia pertanian dibandingkan dalam bidang-bidang produksi lainnya. Sebagai contoh, sementara usaha manufaktur mengubah bahan-bahan yang sudah diambil dari alam (sebagaimana dilakukan oleh industri *input* pertanian dan industri pangan hasil pertanian), usaha tani mengubah alam melalui aktivitas-aktivitas yang benar-benar mengolah alam. Karena itu, pertanian berhadapan dengan ketaktentuan lingkungan alam dan proses-proses ekologis serta pengaruh yang ditimbulkan oleh kedua hal itu terhadap pertumbuhan organisme tanaman dan hewan.

Penjelasan kedua, yang menyangkut kondisi-kondisi alamiah yang khas dalam pertanian, berpusat pada perbedaan antara waktu kerja dan waktu produksi (Mann dan Dickinson 1978). Dalam usaha tani, berbeda dengan produksi industrial, waktu produksi lebih panjang daripada waktu kerja (untuk penyiapan tanah, penanaman, pembenihan, dan lain-lain), sebab waktu produksi meliputi waktu yang dibutuhkan untuk menunggu masa pertumbuhan tanaman dan hewan berjalan secara alami. Ini berarti, kapital pun “terikat” dan takbisa menghasilkan laba sebelum tanaman atau ternak siap dipanen. Tetapi, sebagaimana disebutkan dalam Bab 5, kecenderungan khas pertanian kapitalis modern adalah usahanya untuk membuat pertanian semirip mungkin dengan produksi industrial: kecenderungan untuk *menyederhanakan*, *membakukan*, dan *mempercepat* proses alamiah sebisa mungkin. Inovasi teknologi dalam pertanian diarahkan—tidak hanya oleh industri *input* pertanian pada khususnya, tetapi juga oleh industri pangan hasil pertanian—agar menghasilkan produk panen dari bahan baku tanaman maupun hewan yang bisa tumbuh lebih terprediksi, lebih besar, dan lebih cepat. Inovasi ini dilakukan dengan pengelolaan tanah (pemupukan); pemberantasan gulma (herbisida) dan hama (pestisida); pengelolaan iklim (irigasi dan rumah kaca); pemuliaan sifat tanaman (rekayasa genetika, pematangan buatan); serta pengendalian perkembangan ternak

(pakan konsentrat, hormon perangsang pertumbuhan, rekayasa genetika).

Bagi para pengkritik pertanian kapitalis modern, inovasi-inovasi semacam itu menunjukkan kian intensifnya “industrialisasi” pertanian, dengan kerugian ekologis yang semakin parah dan semakin besar. Tak ketinggalan kerugian kesehatan sebagai dampak dari bagaimana pangan ditanam dan diproses, serta semakin rendahnya nilai gizi dan semakin tingginya kandungan racun dalam banyak makanan. Berikut ini dua di antara banyak contoh. *Pertama*, pergeseran ekologis budidaya berbasis ladang dalam 150 tahun terakhir, dan terus mengalami intensifikasi. Mulai dari “sistem putaran agroekologis tertutup” (Bab 4), dengan interaksinya yang rumit antara tanah, tanaman, dan organisme mikro, hingga sistem-sistem penyederhanaan yang radikal melalui penggunaan pupuk dan bahan-bahan kimia lain yang semakin banyak. Dalam penyederhanaan itu, tanah hanya dianggap sebagai medium penyerap zat kimia yang sekadar “numpang lewat” demi menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih cepat dan hasil panen yang semakin besar. Penyederhanaan itu menyebabkan tanah menjadi tandus sehingga semakin membutuhkan pupuk kimia untuk menumbuhkan tanaman apa pun. Pada gilirannya, “kimiaisasi” yang semakin intensif akan memperbesar kandungan racun dalam tanah (dan perairan), juga dalam tanaman yang tumbuh di sana dan makanan yang kita santap.

Contoh *kedua* adalah “operasi pemberian pakan hewan yang dikandangan”. Operasi ini ditujukan untuk menghasilkan sebanyak mungkin daging sapi, ayam, dan babi di kandang yang sempit mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Operasi ini betul-betul merupakan sejenis sistem “numpang lewat” dengan menggunakan tubuh binatang sebagai medium penyerap makanan konsentrat dan perangsang pertumbuhan hormon, beserta antibiotika dosis tinggi yang diberikan untuk melawan risiko men-

jangkitnya penyakit pada ternak yang dipelihara berdesak-desakan. Produksi unggas barangkali merupakan contoh paling mencolok dari pertanian yang terindustrialisasi, sebab suatu “pabrik” ayam berstandar beserta lingkungannya yang tertutup dan terkendali itu memang sepenuhnya bersifat cergas. Pabrik itu bisa didirikan di tempat mana saja yang menguntungkan, sehingga “membebaskan” kapital dari kendala penyediaan tanah dan batasan-batasan spesifik setempat, yang mencirikan seluruh sejarah pertanian hingga sekarang.¹

Dinamika Sosial Produksi:

Sewa, Proses Kerja, Ongkos Tenaga Kerja

Dinamika sosial produksi tertentu bisa menjadi penghalang bagi pertanian kapitalis. Ada beberapa penjelasan terkait hal ini. *Pertama*, karena beban sewa lahan merupakan ongkos yang mengurangi laba, hal ini mendorong kapital untuk menimpakan ongkos tersebut kepada para petani “keluarga” (Djurfeldt 1981). Dengan cara yang sama, para petani keluarga dibiarkan menanggung risiko dan penantian sampai komoditas-komoditas pertanian akhirnya mendatangkan nilai. *Kedua*, halangan yang berkaitan dengan proses tenaga kerja. Mengawasi dan mengendalikan kecepatan dan kualitas kerja di ladang atau kebun jauh lebih sulit dan lebih mahal ketimbang mengawasi dan mengendalikan tenaga kerja di pabrik. Karena itu, menggunakan tenaga kerja keluarga di ladang lebih menguntungkan ketimbang membayar buruh upahan. *Ketiga*, pada saat industrialisasi yang berlangsung pesat beserta urbanisasi yang mengiringinya menaikkan tingkat upah, usaha tani keluarga masih bisa menikmati “keuntungan dari selisih antara tenaga kerja dan harga” daripada pertanian kapitalis. Inilah salah satu penyebab “gagalnya kapitalisme agraria” atau pertanian kapitalis di Inggris, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat antara 1846 dan 1919, sebagaimana disebutkan oleh Niek Koning (1994).

Penjelasan-penjelasan di atas bisa ditafsirkan dari sudut pandang yang berbeda. Semua itu bisa dilihat sebagai cara bagaimana pertanian skala kecil memiliki *daya saing*, dalam pemahaman bahwa para petani kecil masih bisa menanggung kerugian dan risiko yang tidak diinginkan oleh petani kapitalis. Karena itu, tergantung situasi-situasi yang dihadapi, para petani skala kecil bisa menyediakan komoditas-komoditas pertanian dengan harga lebih murah daripada para petani kapitalis yang menganggap bahwa investasi pada aktivitas-aktivitas pertanian *hulu* dan *hilir* lebih menguntungkan. Hal ini mengantarkan kita pada perangkat penjelasan kedua mengenai ketakrataan perkembangan kapitalisme dalam pertanian, yakni keuntungan bagi kapital dengan membiarkan pertanian ditangani oleh para petani “keluarga”.

Eksplotasi: Keuntungan “Usaha Tani Keluarga” bagi Kapital?

Sebagaimana telah disebutkan, keuntungan yang diperoleh kapital dari usaha tani “keluarga” bisa saja menjadi salah satu “hambatan” pertanian kapitalis. Meski “hambatan” itu bukan tidak mungkin untuk dihilangkan, tetapi kapital hanya berusaha untuk menggesernya. Saya juga telah menunjukkan bahwa gagasan-gagasan tentang keuntungan kapital merujuk pada proposisi bahwa pertanian skala kecil bisa bersaing dengan pertanian kapitalis. Di sini saya ingin menjernihkan beberapa ambiguitas dan kompleksitas yang terkait dengan bagaimana gagasan-gagasan itu dirumuskan dan diterapkan, dalam kaitannya dengan karakter sosial *tenaga kerja* yang digunakan dalam usaha tani keluarga, dari situ terkait pula beberapa isu tentang *eksplotasi*.

Pada 1920-an, ahli ekonomi pertanian tersohor asal Rusia, A.V. Chayanov (1888–1937), menulis:

Di negara-negara kapitalis yang paling maju, misalnya negara-negara di Amerika Utara, meluasnya perkembangan kredit hipotek, pembiayaan finansial usaha tani untuk perputaran kapital, dan dominasi kapital yang diinvestasikan dalam transportasi, elevator, irigasi, dan usaha-usaha lain ...[merupakan] cara-cara baru yang digunakan oleh kapitalisme untuk memasuki sektor pertanian. Cara-cara itu mengubah petani menjadi tenaga kerja yang bekerja dengan alat-alat produksi orang lain. Meski terbukti tetap ada produsen komoditas skala kecil yang tersebar dan independen, cara-cara tersebut mengubah pertanian menjadi suatu sistem ekonomi yang dipusatkan dalam serangkaian usaha terbesar, dan lewat usaha-usaha itulah pertanian masuk ke dalam bidang yang dikuasai oleh bentuk-bentuk kapitalisme keuangan yang paling maju. (Chayanov 1966: 202)

Pendapat Chayanov ini sangat maju pada zamannya. *Pertama*, perhatikan pernyataannya yang meyakinkan bahwa “sistem ekonomi” pertanian kapitalis modern telah membentangi melampaui industri *input* pertanian dan industri pangan hasil pertanian hingga membentuk penguasaan “oleh bentuk-bentuk kapitalisme keuangan yang paling maju.” Sistem ini dapat diterapkan pada pasar tanah dan perdagangan komoditas-komoditas pertanian, yang sering kali merupakan aktivitas-aktivitas yang sangat spekulatif, serta pada kredit produksi petani. *Kedua*, Chayanov menyebut petani (keluarga) yang tampak independen sebagai produsen komoditas skala kecil.² *Ketiga*, Chayanov ingin mengungkapkan bahwa, dalam pertanian kapitalis modern, petani semacam itu tidak “independen” sama sekali tetapi menduduki lokasi kelas pekerja dalam hubungannya dengan kapital: “tenaga kerja yang bekerja dengan alat-alat produksi orang lain.” Karena itu, para petani dieksploitasi sebagaimana tenaga kerja dieksploitasi oleh kapital di sektor-sektor yang lain, meski dalam bentuk yang

berbeda—dan kemungkinan besar selama eksploitasi itu masih menguntungkan kapital.

Chayanov beranggapan bahwa para petani itu adalah “produsen komoditas *skala kecil*” yang mengolah tanah pertanian mereka dengan tenaga kerja keluarga (atau rumah tangga) tanpa mempekerjakan buruh upahan. Asumsi ini cukup membatasi, secara teoretis maupun historis, untuk beberapa alasan yang terkait dengan skala, pengertian “usaha tani keluarga” dan relasinya dengan kapital pada ranah hulu dan hilir pertanian. *Pertama*, pada masa Chayanov, skala masih lebih banyak diukur dengan *luasan* tanah pertanian, yaitu petak tanah yang bisa dikerjakan menggunakan tenaga kerja keluarga dengan sarana produksi yang tersedia saat itu. Dalam kapitalisme modern, ukuran skala yang lebih tepat adalah *kapitalisasi*: jumlah kapital yang dibutuhkan untuk membangun macam-macam model usaha tani—“biaya awal” dalam istilah ekonomi—dan untuk reproduksi mereka. Hal ini dapat memberi efek terhadap ukuran usaha tani, ketika mekanisasi membuat pekerja yang nisbi sedikit mampu mengerjakan lahan yang lebih luas, seperti dalam pertanian padi-padian dan biji-bijian penghasil minyak. Di pihak lain, beberapa cabang hortikultura yang paling produktif—buah dan sayuran segar, kebun buah dan anggur, serta bunga-bunga—ditandai dengan usaha tani yang membutuhkan areal lahan yang tidak luas tetapi sangat padat modal dan tenaga kerja.

Kedua, konsep “usaha tani keluarga” sering digunakan untuk menyebut beberapa pengertian, seperti berikut ini: usaha tani yang *dimiliki* keluarga, *dikelola* keluarga, atau *dikerjakan* oleh keluarga. Penyebutan semacam ini bisa menyesatkan. Sebuah usaha tani yang dimiliki oleh keluarga bisa saja merupakan perusahaan kapitalis penuh yang dijalankan oleh seorang majikan yang digaji dan dikerjakan oleh tenaga kerja upahan. Demikian pula, sebuah usaha tani yang dikelola keluarga bisa

saja berupa sebuah perusahaan kapitalis yang mempekerjakan pekerja upahan dan/atau mempekerjakan kontraktor spesialis untuk membajak, menanam, menyemprot, dan memanen (seperti yang bisa ditemukan di sebagian ladang padi-padian di Amerika Serikat). Ini menyisakan usaha tani yang dikerjakan oleh keluarga sebagai tipe yang paling mendekati usaha tani “keluarga”, dan merupakan satu-satunya contoh yang paling memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap petani dalam pengertian apa pun. Saya akan membicarakan kembali isu ini, untuk sementara perlu dicatat bahwa perusahaan yang disebut sebagai usaha tani yang dikerjakan keluarga sering kali juga mempekerjakan tenaga kerja upahan.

Ketiga, usaha tani yang paling punya kecenderungan untuk terinkorporasi secara penuh ke dalam pertanian kapitalis modern, sebagaimana digambarkan Chayanov untuk Amerika Utara—misalnya usaha tani yang menyuplai korporasi pangan melalui kontrak yang merinci secara spesifik: “sarana, proses produksi, dan produk” yang mereka minta (Albritton 2009: 82)—biasanya merupakan perusahaan kapitalis yang mempekerjakan buruh upahan. Dalam pengertian ini, usaha pertanian itu tidak berbeda dengan perusahaan kapitalis skala kecil yang mengkhususkan diri membuat komponen kendaraan atas dasar kontrak dengan pabrik otomobil besar. Pemilik usaha pertanian semacam itu, “petani”, tidak bisa “dieksploitasi” oleh korporasi yang menjalin kontrak dengan mereka dan oleh bank yang memberi pinjaman (sekalipun perusahaan kecil itu mengatakan bahwa mereka dieksploitasi!); lebih mungkin mereka mengeksploitasi pekerja yang mereka pekerjakan (sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2).

Chayanov punya konsep lain tentang eksploitasi yang lebih dikenal dan digunakan secara luas dalam “kajian petani”, yaitu konsep *swaeksploitasi* (*self-exploitation*). Konsep ini dirumuskan dari argumennya bahwa keharusan untuk reproduksi dalam

usaha tani dengan tenaga kerja keluarga mengharuskan ongkos tenaga kerja tambahan tidak dihitung ketika terjadi kondisi buruk. Rumah tangga tidak menghitung ongkos tenaga mereka sendiri dalam mengerjakan lahan mereka sebagaimana petani kapitalis harus memasukkan biaya upah tenaga kerja dalam penghitungan pengeluaran dan keuntungan yang diharapkan. Sebetulnya, para petani kecil cenderung bertani lebih intensif daripada tenaga kerja dalam usaha tani kapitalis, meski tingkat produktivitasnya rendah. Demikian pula, mereka sering terpaksa untuk membeli atau menyewa tanah dengan harga tinggi dan harus menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang lebih rendah daripada para petani kapitalis.

Gagasan bahwa petani kecil-keluarga bersedia menanggung biaya produksi dan reproduksi, termasuk dengan tingkat konsumsi lebih rendah—karenanya mengeksploitasi diri sendiri—daripada yang akan diterima oleh para petani kapitalis, bukanlah gagasan unik dan asli milik Chayanov. Gagasan ini bisa ditemukan dalam beberapa penjelasan lain tentang kemampuan bertahan yang terlihat jelas pada usaha tani skala kecil—atau “keteguhan kaum tani”—di sepanjang era kapitalisme modern, termasuk penjelasan tokoh Marxis, Karl Kautsky (1988), pada akhir abad XIX. Argumen ini menegaskan bahwa kemampuan bertahan atau “keteguhan” itu bisa ditolerir dan bahkan didorong oleh kapital selama usaha tani petani kecil atau usaha tani keluarga bisa tetap menghasilkan komoditas pangan “murah” yang menurunkan biaya upah tenaga kerja bagi para kapitalis, dan memang mereka sendiri menghasilkan tenaga kerja yang “murah” juga. Maksudnya, tenaga kerja para petani kecil pun bisa dibayar murah karena upah mereka tidak harus menutup keseluruhan biaya reproduksi rumah tangga, karena sebagian dipenuhi lewat usaha tani mereka sendiri—yang kadang dipandang sebagai “subsidi” bagi kapital yang mempekerjakan buruh migran pedesaan. Hal ini terlihat dalam kondisi kolonial (yang diulas da-

lam Bab 3) tentang “semiproletarianisasi” dan akan dibahas lagi dalam Bab 7.

Merangkum penyelidikan ringkas ini, bisa dikatakan bahwa banyak argumen dalam ilmu ekonomi politik berusaha menjelaskan mengapa evolusi pertanian kapitalis tidak sepenuhnya menghasilkan usaha tani kapitalis. Topik yang selalu ditemukan dalam penjelasan-penjelasan itu adalah bahwa pertanian kapitalis selalu menemukan cara-cara yang dapat digunakan untuk menceburkan atau meleburkan petani kecil atau petani keluarga ke dalam struktur pasar dan dinamika akumulasi, sepanjang cara-cara itu mendatangkan keuntungan bagi kapital. Hal ini sering kali, kalau tidak bisa dikatakan harus, dikaitkan dengan gagasan bahwa petani memang “dieksploitasi” oleh kapital, langsung atau tidak langsung, baik di Selatan maupun Utara, di mana porsi pendapatan petani dari total hasil pertanian semakin menurun, bila dibandingkan dengan semakin besarnya porsi *input* (dan ongkos-ongkosnya) yang menguntungkan korporasi *input* pertanian, serta porsi pengolahan dan pemasaran yang keuntungannya mengalir ke korporasi pangan hasil pertanian (Weis 2007: 82).

Terakhir, harus diakui bahwa petani kecil di beberapa wilayah Selatan “dilewatkan” oleh penetrasi kapitalisme ke dalam sektor pertanian, dalam pengertian Chayanov, kadang kala untuk jangka yang panjang.³ “Keteguhan kaum tani” barangkali mencerminkan kenyataan bahwa akumulasi primitif berlangsung tidak merata dan berlarut-larut, meski sekarang akumulasi itu sudah tuntas di beberapa tempat dengan kian intensifnya “akumulasi melalui penjarahan” seperti yang disebutkan berbagai pihak (Bab 5). Pendeknya, proses semacam ini tidak selalu ada, serta dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini juga ditunjukkan oleh pandangan bahwa kapitalisme menciptakan jalan untuk merangkul petani skala kecil sepanjang hal itu menguntungkan bagi kapital. Tetapi, cukupkah kita menganggap bahwa perubahan hanya ditentukan

oleh kepentingan kapital? Bagaimana dengan pertarungan sosial yang disebut oleh Araghi?

Peran Perlawanan

Banyak ahli memahami perkembangan usaha tani yang tidak merata dalam kapitalisme, termasuk pada masa kolonial di negara-negara Selatan, sebagai sejarah *perlawanan* oleh petani kecil dan kaum tani terhadap komodifikasi, penjarahan, dan proletarianisasi. Perlawanan semacam itu mewujud dalam berbagai perjuangan atas tanah, sewa, pajak, utang, tanam paksa, kerja paksa, dan kontrol tenaga kerja yang dijalankan negara kolonial maupun negara merdeka untuk mencengkeram kaum petani kecil atas nama kemajuan—baik dalam misi kolonialisme untuk “memberadabkan” orang-orang kulit berwarna (Bab 3) maupun untuk tujuan “modernisasi” pertanian sebagai strategi pembangunan ekonomi (Bab 4). Contoh perlawanan semacam itu banyak sekali, dalam ukuran besar maupun kecil, skala heroik maupun sehari-hari. Perlawanan skala heroik bisa dilihat dalam buku Eric Wolf, *Peasant Wars of the Twentieth Century* (1969), dengan studi kasus Meksiko, Rusia, Tiongkok, Vietnam, Aljazair, dan Kuba pada 1900-an hingga 1960-an.⁴ Pada kondisi sekarang, perlawanan skala heroik tereskpresikan dalam keyakinan bahwa globalisasi neoliberal telah memunculkan gerakan tandingan, “perlawanan agraria global” (McMichael 2006).⁵

Perlawanan dalam skala lebih kecil bisa ditemukan dalam buku James C. Scott, *Weapons of the Weak* (1985), satu hasil penelitian di sebuah desa di Malaysia pada akhir 1970-an. Scott mengungkapkan dengan sangat menggugah bahwa dampak berlanjut dan kumulatif dari “bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari petani” di beberapa tempat pedesaan yang secara sosial terdiferensiasi lebih banyak berperan memperbaiki kondisi petani, jika dibandingkan dengan

episode konflik dan pemberontakan yang terjadi sesekali dan lebih dikenal luas.⁶ Meski demikian, apakah bermanfaat jika perhatian pada satu sisi, yaitu kepentingan dan kekuasaan kapital yang dianggap tanpa batas, digantikan dengan perhatian pada sisi lain, yaitu kisah tentang perlawanan pada bermacam skala dari skala heroik hingga sehari-hari?

Dalam kondisi penjajahan, negara-negara kolonial sering kali tidak siap melakukan tugas besar untuk menjarah kaum tani, terutama di pedesaan padat penduduk, dengan semua pergolakan dan kekacauan yang akan timbul. Tetapi, sebagaimana kita lihat dalam Bab 3, negara-negara kolonial memulai dengan memberlakukan aturan yang secara langsung atau taklangsung, sengaja atau taksengaja, menuju pada komodifikasi subsistensi petani. Hal ini difasilitasi dengan melakukan pembauran atau adaptasi hierarki pribumi—“struktur kekuasaan lama [prakolonial]” (Bagchi 2009: 87)—ke dalam sistem administrasi pedesaan, termasuk kontrol atas tanah: *caciques* di Amerika Latin, *zamindar* di India bagian utara, kepala suku di Afrika Sub-Sahara (Mamdani 1996). Di India dan Afrika, negara kolonial kadang juga berusaha mempromosikan “*yeomanry*”, satu kelas petani kapitalis kecil dari masyarakat tani itu sendiri.

Proyek kolonial dan dampaknya terhadap masyarakat tani pribumi sering dibentuk dan dihambat oleh kontradiksinya sendiri. Misalnya, Michael Cowen dan Robert Shenton (1991a, 1991b) berpendapat bahwa kolonialisme Inggris di Afrika ditujukan untuk mendorong kemajuan ekonomi tanpa menimbulkan gangguan sosial dan politik. Artinya, kolonialisme ini ditujukan untuk secara bertahap mengantar orang-orang Afrika ke dalam produksi dan konsumsi komoditas—basis material peradaban borjuis, dengan tetap mempertahankan tatanan sosial melalui sarana “adat”, yaitu dengan memperkuat “komunitas” pedesaan, identitas “kesukuan” dan otoritas patriarkal, serta posisi kepala suku. Dengan begitu,

orang dihambat untuk mendapatkan kenikmatan dari hak-hak kaum borjuis seperti kepemilikan tanah pribadi dan akses atas kredit bank. Dalam pandangan Cowen dan Shenton, proyek kolonial telah menunda perkembangan kapitalisme yang lebih sempurna, yang seharusnya bisa lebih menguntungkan bagi orang Afrika.

Terakhir, sebagian kaum tani kecil terjajah merintis cara-cara baru menuju produksi komoditas khusus. Penelitian Polly Hill (1963) tentang para petani migran yang menanam kakao di Ghana bagian selatan (disebut dalam Bab 3) memberikan contoh yang terkenal tentang transformasi-diri petani subsisten menjadi produsen komoditas. Lebih jauh, Hill menjelaskan bahwa seiring waktu para petani produsen komoditas yang paling sukses beralih menjadi petani kapitalis. Secara lebih umum, kaum tani kecil tidak hanya menjadi korban pasif atau lawan aktif dari kekuasaan kolonial, banyak di antara mereka berusaha *mencari solusi* ketika menghadapi pergeseran menuju produksi komoditas (komodifikasi subsistensi), dalam kondisi yang kurang lebih kondusif, memobilisasi lahan dan tenaga kerja dalam skala berbeda dengan tingkat keberhasilan beragam. Hal serupa terjadi dalam cara kaum tani menanggapi desakan “pembangunan nasional” yang berlangsung setelah lepas dari kekuasaan kolonial.

Dengan kemerdekaan politik dan periode “pembangunanisme”, terdapat beberapa strategi yang sengaja diterapkan untuk mendorong pengembangan petani kecil mengikuti alur modernisasi dan komodifikasi yang lebih jauh. Beberapa dari kebijakan yang diterapkan untuk mencapai hal itu diulas dalam Bab 4. Di sini saya akan khusus membahas suatu kebijakan lain yang sangat penting (sehingga juga sangat diperdebatkan). Kebijakan itu, disebut dalam Bab 5, adalah reforma agraria berbasis pertanahan (*land reform*) yang bersifat redistributif. Pembicaraan tentang kebijakan ini menutup pembahasan analitis bab ini dan berkaitan dengan bab berikutnya.

Kasus Land Reform

Land reform telah menandai momen-momen kunci sejarah modern sejak Revolusi Prancis pada akhir abad XVIII. Redistribusi hak milik tanah bisa terlaksana dalam bermacam bentuk, yaitu:

- pengambilalihan tanah pertanian dan perkebunan yang luas, lalu membagikan tanah tersebut kepada para petani kecil;
- memberikan hak kepemilikan petak-petak tanah kepada petani kecil yang sudah menggarapnya, untuk membebaskan mereka dari beban sewa dan kekuasaan tuan tanah serta untuk memberikan penguasaan tanah yang lebih terjamin;
- nasionalisasi atau sosialisasi tanah pertanian dan perkebunan luas; dan
- dekolektivisasi tanah pertanian negara dan komune-komune di bekas wilayah Soviet, Tiongkok, Vietnam, dan Kuba.

Land reform senantiasa merupakan suatu proses politik, meski sering dijalankan dengan dasar nalar ekonomi dan selalu menimbulkan dampak sosial ekonomi. Terdapat dua jenis *land reform*, yaitu *land reform* yang diasosiasikan dengan slogan “tanah untuk penggarap” dan terejawantahkan sebagai “*land reform* dari bawah”, sedangkan yang kedua adalah “*land reform* dari atas”. Dalam “*land reform* dari bawah”, aksi politik kaum tani kecil dalam melawan kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan sosial, dan penindasan memainkan peran sangat menentukan. “*Land reform* dari bawah” marak dan memuncak mulai 1900 hingga 1970-an, antara lain di Meksiko dan Rusia pada 1910-an, di Eropa Timur dan Eropa Selatan serta Tiongkok pada tahun-tahun antara dua Perang Dunia (dan di Tiongkok *land reform* terus berlanjut hingga 1950-an dan 1960-an), di Bolivia pada 1950-an, di Vietnam dan Aljazair pada 1950-an dan 1960-an, di Peru pada 1960-an, di Mozambik dan Nikaragua pada

1970-an dan 1980-an. Perjuangan melawan kepemilikan tanah luas dan kekuasaan sosialnya berlangsung sangat intensif ketika di-tautkan dengan perjuangan antikolonial atau antiimperialis.

Dalam beberapa contoh, “*land reform* dari atas” pada era sesudah Perang Dunia II merupakan tanggapan atas “ancaman” terjadinya pergolakan sosial yang ditunjukkan oleh “perang petani” dan revolusi sosial, misalnya di Italia, Jepang, dan Korea pada 1940-an dan 1950-an di bawah pendudukan militer Amerika Serikat, dan di Amerika Latin dengan “Aliansi untuk Kemajuan” (*Alliance for Progress*) yang dipimpin Amerika Serikat pada 1960-an, setelah terjadinya revolusi Kuba. Dalam beberapa contoh lain, “*land reform* dari atas” dirintis oleh penguasa yang melaksanakan modernisasi di berbagai bangsa antara 1950-an hingga 1970-an, mulai dari pemerintahan Nehru di India dan Nasser di Mesir hingga Iran pada pemerintahan syah terakhir.

“*Land reform* dari atas” lenyap dari agenda kebijakan pertanian dan pembangunan setelah 1970-an, tetapi muncul lagi pada 1990-an, setelah mengalami pemaknaan ulang sebagai pembaharuan yang berbasis pasar dengan prinsip “penjual dan pembeli sama-sama mau”. Berikut ini bagaimana International Fund for Agricultural Development (IFAD) merumuskannya: “*land reform* yang terjadi di masa lalu terlalu bersifat penyitaan yang kasar, terlalu bergantung pada negara atau bersifat atas-bawah. *Land reform* ‘gelombang baru’ ini, yang bersifat terdesentralisasi, *ramah terhadap pasar*, dan melibatkan aksi atau konsensus masyarakat sipil, kadang ber-kelayakan dan konsisten dengan hak kepemilikan yang adil dan bertahan lama” (IFAD 2001: 75, penekanan ditambahkan).

Dasar nalar ekonomi “*land reform* dari atas” adalah bahwa petani kecil dengan kepemilikan tanah yang terjamin dan dengan insentif yang tepat akan bisa menaikkan produktivitas, tidak seperti para pemilik tanah luas yang suka menelantarkan tanah, menggunakannya untuk spekulasi atau mengambil renten yang

tidak mereka investasikan lagi untuk produksi pertanian. Karena itu, “*land reform* dari atas” tidak bertujuan untuk membagi-bagi tanah pertanian kapitalis yang secara komersial berhasil, karena pertanian kapitalis itu mewakili modernisasi pertanian. Hal itu disebut oleh bekas menteri *land reform* dalam pemerintahan Partai Kristen Demokrat di Chili pada 1960-an, Eduardo Frei:

Seporsi tertentu petani kecil yang menerima tanah [dari *land reform*] bisa jadi gagal menjadi *wirausahawan* pertanian Kita harus berhati-hati terhadap ikatan kelembagaan yang terlalu kaku antara penerima tanah dan tanahnya, agar *seleksi alam* bisa terjadi dan *memungkinkan mereka yang gagal untuk disingkirkan*. (Chonchol 1970: 160, penekanan ditambahkan).

Beberapa *land reform* yang berorientasi “modernisasi” telah mempercepat langkah perkembangan kapitalis dalam bidang pertanian, seperti yang disarankan Chonchol, sedangkan dalam banyak kasus kelompok termiskin dari penduduk pedesaan mendapatkan tanah lebih sempit daripada para petani yang lebih kaya dan para calon petani kapitalis. Itulah yang terjadi di India, Mesir, Iran, dan meluas di Amerika Latin, misalnya, terutama bagi para petani perempuan dan para buruh tani yang umumnya memiliki hak atas tanah paling lemah. Dalam karya yang berpengaruh tentang India, ditulis pada 1960-an, seorang ahli ekonomi Swedia yang bernama Gunnar Myrdal menyatakan bahwa *land reform* yang dijalankan setelah kemerdekaan “memperkuat posisi politik, sosial, dan ekonomi strata atas penduduk pedesaan, dan pemerintah sangat membutuhkan dukungan mereka” (Myrdal 1968: 1387). Myrdal dikutip oleh sejarawan David Low (1996: 25) yang menerapkan argumen itu untuk kasus Iran, Mesir, dan banyak negara di Asia dan Afrika.

Kesimpulan

Apa yang bisa ditambahkan oleh ulasan pendek dan selektif tentang *land reform* untuk beberapa isu yang dibicarakan dalam bab ini?

Pertama, ulasan tentang *land reform* ini menyajikan contoh tentang bagaimana dinamika politik bisa menjadi sangat penting dalam “keteguhan” pertanian skala kecil dalam kapitalisme.

Kedua, ulasan ini memperjelas bahwa dasar nalar ekonomis “*land reform* dari atas” adalah untuk menjadikan para petani kecil sebagai produsen komoditas, menjadi “wirausahawan” dalam istilah Chonchol, yakni menjadi petani yang memiliki daya saing dan bisa bertahan di dalam pasar. Hal ini berkaitan dengan salah satu dari beberapa topik utama bab berikutnya.

Ketiga, persoalan tentang siapa yang mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis *land reform* juga berhubungan dengan persoalan yang dibicarakan dalam Bab 7 terkait dengan pembentukan kelas di kalangan petani.

Catatan

¹ Brasil, Thailand, dan Tiongkok melipatgandakan andil mereka dalam perdagangan unggas dunia, dari 23% pada 1995 menjadi 46% pada 2003 (Burch 2003).

² Untuk menyebut “produsen komoditas skala kecil”, Chayanov menggunakan istilah “*small commodity producers*”, sementara Bernstein menggunakan “*petty commodity producers*”—catatan dari penerjemah.

³ Ini tidak berarti bahwa petani kecil itu “dilewatkan” oleh relasi komoditas, sebagaimana saya jelaskan dalam Bab 7.

⁴ Karya penting Barrington Moore Jr. (1966) membandingkan peranan pertarungan kelas antara pemilik tanah luas dan petani dalam pembentukan negara pada abad XVII di Inggris, abad XVIII di Prancis, dan abad XIX di Amerika Serikat (Perang Saudara di Amerika dan penghapusan budak sebagai “revolusi kapitalis terakhir”) serta Tiongkok, Jepang, dan India pada abad XX (satu-satunya contoh dari negara kolonial).

⁵ Konsep “gerakan tandingan” terhadap pembangunan kapitalis tanpa regulasi berasal dari karya terkenal Karl Polanyi (1957).

⁶ Di sini Scott (2005) juga bersikap skeptis terhadap klaim mengenai “perlawanan agraria global” kontemporer, yang akan dibahas dalam Bab 8.

BAB 7

Pembentukan Kelas di Pedesaan

APAKAH para “petani keluarga” di Selatan (“petani kecil”) merupakan satu “kelas” sosial sebagaimana ditegaskan banyak orang? Lalu, sebagaimana pendapat sebagian orang, apakah “kelas” itu juga mencakup para petani keluarga di Utara? Dasar umum dari pandangan tersebut adalah para petani itu merupakan usaha tani dengan tenaga kerja keluarga yang terlibat dalam reproduksi sederhana (“subsistensi”), dan para petani itu berbagi nilai dan moralitas bersama (dibahas dalam Pendahuluan). Mereka yang “berpihak pada petani keluarga” biasanya menekankan kehendak para petani keluarga untuk punya otonomi: bertani dengan cara yang mereka sukai, cara yang secara sosial adil dan ramah lingkungan (termasuk usaha untuk membangun kembali ekonomi pangan lokal). Karena itu, mereka melakukan perlawanan terhadap tekanan globalisasi pertanian yang kejam.¹

Bisakah kita mengidentifikasi sebuah kelas lewat cita-cita atau serangkaian nilainya? Dalam perspektif ekonomi politik yang disajikan dalam buku ini, kelas dibangun berdasarkan relasi-relasi sosial produksi. Berangkat dari sini, sebuah kelas hanya bisa diidentifikasi lewat hubungannya dengan kelas lain. Bagi sebagian penganut populisme agraria (Bab 5), “petani keluarga” juga dianggap sebagai sebuah kelas karena hubungannya dengan kapital, yakni sebagai kelas yang “dieksploitasi” oleh kapital dalam arti tertentu. Bab 6 membahas beberapa kemungkinan makna eksploitasi *tenaga kerja keluarga* (yang berbeda dari tenaga kerja upahan) dalam pertanian: sebagai tenaga kerja yang bekerja dengan

sarana produksi milik orang lain atau sebagai tenaga kerja yang mengeksploitasi diri sendiri sehingga memunculkan eksploitasi taklangsung oleh kapital atau sekurangnya mengeksploitasi diri sedemikian rupa sehingga menguntungkan kapital.²

Sebagian ahli memandang petani keluarga di Selatan sebagai sebuah kelas yang secara historis dieksploitasi oleh kapital dan negara, dan merupakan elemen inti dalam akumulasi yang dijalankan selama masa kolonialisme dan pembangunanisme (Bab 4), dan mereka sekarang menjadi korban *penjarahan*, atau “penyusutan kaum tani (*depeasantization*) secara global” dalam istilah Araghi (Bab 5). Penjarahan atau peminggiran menyiratkan bahwa petani kecil yang jumlahnya makin menyusut tersedia untuk “dieksploitasi”, kiranya lantaran kapital (atau pertanian kapitalis) tidak lagi membutuhkan mereka.

Dalam bab ini saya menyelidiki apakah petani keluarga bisa menjadi sebuah kelas tunggal yang dieksploitasi, atau sebetulnya mereka terpilah menjadi beberapa kelas terpisah. Penyelidikan ini saya lakukan terlebih dahulu dengan menimbang relasi dan dinamika *komodifikasi*, *produksi komoditas berskala kecil*, dan *diferensiasi*, sebelum membahas *kelas-kelas tenaga kerja* dalam kapitalisme. Semua konsep ini telah disebut sebelumnya dalam buku ini, juga dibicarakan bersama dan diperiksa lebih lanjut di sini, dalam urutan yang semakin kompleks. Saya juga akan membahas sejumlah “determinasi” lain untuk menggali secara teoretis sumber dan bentuk kompleksitas itu di dunia nyata.

Dinamika Kelas “Usaha Tani Keluarga”

Komodifikasi

Komodifikasi adalah proses di mana elemen-elemen produksi dan reproduksi sosial dihasilkan untuk, dan diperoleh dari, pertukaran pasar; dan elemen-elemen itu tunduk pada disiplin dan

desakan pasar. Dalam kapitalisme, proses komodifikasi didasari oleh kemunculan dan pembentukan historis relasi sosial mendasar antara kapital dan tenaga kerja upahan. Kecenderungan utama kapitalisme terhadap generalisasi produksi komoditas tidak berarti bahwa semua elemen sosial memang perlu, dan secara keseluruhan, dikomodifikasikan. Kecenderungan itu lebih menandakan komodifikasi subsistensi: bahwa *reproduksi tidak bisa berlangsung di luar relasi-relasi komoditas* dan di luar disiplin yang diberlakukan oleh relasi-relasi komoditas itu (yaitu “paksaan samar dari kekuatan-kekuatan ekonomi” menurut Marx).

Tentu saja, proses komodifikasi pertanian skala kecil itu menampakkan banyak sekali variasi. Bagi Marx dan banyak pengamat lain, termasuk Karl Polanyi (1957), perampasan dan konversi lahan menjadi hak milik pribadi adalah momen yang sangat menentukan dalam berlangsungnya akumulasi primitif di Inggris (Bab 2). Tetapi, masih ada kemungkinan rentetan lain bagi komodifikasi elemen produksi dan reproduksi. Misalnya, salah satu rentetan kolonialisme adalah: *pertama*, komodifikasi atas tanaman (yang biasanya terjadi sebagai akibat diberlakukannya “komersialisasi paksa” untuk memulai komodifikasi selanjutnya), lantas dilakukanlah komodifikasi atas sebagian sarana konsumsi, lalu terjadilah komodifikasi atas peralatan dan sarana kerja lain, kemudian kerja itu sendiri pun dikomodifikasikan (tenaga kerja sebagai komoditas), dan terakhir komodifikasi tanah (yang merupakan sasaran kerja). Sampai masa kini, hak kepemilikan pribadi yang diatur dan dilindungi hukum masih belum terbentuk efektif, serta ditolak dan dipersoalkan di sejumlah daerah pedesaan di Selatan. Tetapi, ini bukan halangan bagi berkembangnya relasi-relasi komoditas dalam pertanian, sebagaimana ditunjukkan oleh “pasar vernakular” yang memperjualbelikan tanah, yaitu tanah yang diperlakukan sebagai milik pribadi dalam praktik (*de facto*), meski tidak secara hukum (*de jure*). Sesungguhnya, geliat

pasar tanah vernakular ini sering kali bisa ditemukan di beberapa wilayah tempat berlangsungnya produksi komoditas skala kecil, atau tidak terlalu kecil, yang dinamis (Chimhowu dan Woodhouse 2006).

Produksi Komoditas Skala Kecil

Dalam kapitalisme, produksi komoditas skala kecil mengombinasikan “posisi” atau “lokasi” kelas kapital dan tenaga kerja: kapital berbentuk tanah, peralatan, benih, pupuk, dan bahan-bahan kimia lain, sedangkan tenaga kerja berwujud keluarga atau rumah tangga. Produksi komoditas skala kecil adalah satu “kesatuan kontradiktif” posisi-posisi kelas karena beberapa sebab. *Pertama*, posisi kelas tersebar tidak merata di dalam rumah tangga usaha tani, khususnya kalau ada pembagian kepemilikan, pembagian kerja, alokasi pendapatan dan belanja yang didasarkan pada gender, sebagaimana terlihat pada contoh Tanzania di bagian Pendahuluan. *Kedua*, ada kontradiksi antara mereproduksi sarana produksi (kapital) dan mereproduksi produsen (tenaga kerja). Dalam kerangka yang digunakan dalam Bab 1, hal ini terkait dengan distribusi pendapatan (termasuk dari pinjaman) antara penggunaan biaya penggantian dan biaya renten di satu pihak, dan di pihak lain biaya konsumsi dan biaya reproduksi keturunan—suatu pola distribusi yang biasanya sangat berbasis gender. *Ketiga*, kombinasi yang kontradiktif antar-posisi kelas merupakan sumber timbulnya diferensiasi di antara usaha-usaha produksi komoditas skala kecil, yang akan saya bahas nanti.

Pendekatan ini berlawanan dengan anggapan menyesatkan yang dulu lebih dikenal: bahwa petani kecil di Selatan adalah para petani “subsisten” yang tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dari bertani. Selain untuk mengamankan tercapainya tujuan itu, keterlibatan petani ke dalam pasar dianggap sebagai masalah kemauan dan pilihan be-

bas mereka—saya mengistilahkannya sebagai model “subsistensi plus”. Saya sendiri berpendapat bahwa ketika rumah tangga petani sudah tercebur ke dalam relasi-relasi komoditas kapitalis, mereka pasti tunduk pada dinamika dan keterpaksaan yang ditimbulkan dari komodifikasi, yang *diinternalisasikan* ke dalam relasi dan praktik mereka. Jika mereka bertani hanya untuk konsumsi sendiri, itu terjadi karena mereka telah terintegrasi ke dalam relasi-relasi komoditas dengan cara-cara lain, biasanya dengan menjual tenaga kerja sendiri. Dalam hal ini, produksi “subsistensi” umumnya dibiayai dari upah, yang juga digunakan untuk membeli bahan makanan ketika usaha tani mereka sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik secara rutin maupun hanya ketika hasil panen buruk. Akibatnya, situasi ini membalikkan “subsistensi plus”: kemampuan “petani kecil” memenuhi kebutuhan makanan mereka dari produksi sendiri dibentuk oleh sejauh apa mereka terintegrasi ke dalam relasi-relasi komoditas.

Diferensiasi Kelas

Dalam Bab 3, saya mengungkapkan bahwa menjelang akhir masa kolonial, sejak 1940-an di Asia dan mulai akhir 1950-an di Afrika, dan sebelumnya di Amerika Latin, semua petani kecil itu “terkurung di dalam” produksi komoditas oleh “paksaan samar dari kekuatan-kekuatan ekonomi”: komodifikasi atas subsistensi mereka. Begitu komodifikasi terjadi, timbullah kecenderungan diferensiasi petani ke dalam beberapa kelas, menurut rumusan Lenin (1964a), kelas petani kaya, petani menengah, dan petani miskin:

- mereka yang bisa mengakumulasi aset produksi sekaligus mereproduksi diri sebagai kapital dalam skala lebih besar, dengan terlibat dalam *reproduksi yang meluas*; mereka ini adalah calon petani kapitalis, “petani kaya” menurut istilah Lenin;

- mereka yang mampu mereproduksi diri sebagai kapital dalam skala produksi yang sama dengan sebelumnya, dan sebagai tenaga kerja yang setara dengan konsumsi mereka (dan secara turun-temurun)—disebut Marx dengan istilah *reproduksi sederhana*; mereka ini adalah petani skala menengah, yang sama dengan konsep Lenin “petani kecil menengah”;
- mereka yang berjuang mereproduksi diri sebagai kapital, sampai harus bekerja keras mereproduksi diri mereka sebagai tenaga kerja dalam usaha tani sendiri; mereka tunduk pada apa yang saya sebut dengan istilah *himpitan reproduksi sederhana*; mereka adalah para petani miskin, atau “petani kecil miskin” menurut Lenin.

Petani kapitalis yang baru tumbuh itu cenderung menggunakan tenaga kerja upahan untuk menambah atau menggantikan tenaga kerja keluarga. Kaum tani miskin mengalami kontradiksi paling tajam dalam usaha mereproduksi diri mereka sebagai tenaga kerja dan kapital, dan boleh jadi mengurangi konsumsi hingga tingkat paling parah agar dapat tetap memiliki sepetak kecil tanah atau seekor sapi, membeli benih atau untuk melunasi utang. Seperti yang disebutkan Chayanov (1991: 40): “Selama berlangsungnya pertarungan ekonomi yang paling ganas untuk mempertahankan eksistensi, ... [petani kecil] yang tahu bagaimana caranya menahan lapar adalah kelompok yang paling bisa beradaptasi dengan pertarungan itu.”

Para petani menengah, terutama mereka yang menjadi produsen komoditas skala kecil yang relatif stabil, menjadi perhatian khusus, karena mereka mendekati inti gagasan populisme agraria (Bab 6) dan mirip dengan gambaran ideal mengenai “petani mandiri” (*yeoman*) bagi sejumlah pemerintahan kolonial. Gambaran ini kadang mencerminkan anggapan bahwa kondisi “petani kecil

menengah” adalah sesuatu yang lazim dalam komunitas pedesaan sebelum kapitalisme masuk. Komunitas pedesaan semacam itu kadang secara romantis dipandang sebagai komunitas yang secara intrinsik egaliter. Karena itu, munculnya petani kaya dan petani miskin dilihat sebagai penyimpangan yang buruk, mirip dengan kondisi hilangnya berkah akibat hadirnya kekuatan jahat yang berasal dari luar komunitas petani.

Skema teoretis yang disajikan di sini mengusulkan suatu pandangan yang berbeda, yaitu bahwa para petani menengah juga merupakan produk dari diferensiasi kelas. Proses-proses komodifikasi menaikkan biaya “awal” (Bab 6) dan biaya reproduksi kapital dalam usaha tani, memperbesar risiko yang terkait dengan biaya yang semakin tinggi, dan meningkatkan persaingan dalam memperebutkan tanah dan/atau tenaga kerja yang digunakan untuk mengolah tanah itu. Jadi, para petani keluarga “menengah” juga memapankan usaha komoditas mereka dengan mengorbankan tetangga mereka yang lebih miskin, yang tidak bisa menanggung biaya dan tidak mampu mengambil risiko sehingga mereka membiarkan kesempatannya diambil oleh mereka yang mampu. Mereka sangat mungkin tersingkir dari pertanian, atau bila mereka bisa mendapatkan kredit, mereka pasti terbebani utang yang berat dan terperosok ke dalam pertanian marginal (seperti yang disinggung dalam bagian Pendahuluan).

Revolusi Hijau di India memberi petunjuk untuk memahami aspek diferensiasi ini. Janji Revolusi Hijau adalah paket biokimia dengan *input* pertanian maju yang mereka tawarkan “netral dalam hal skala”. Artinya, paket itu bisa digunakan dan menguntungkan pada lahan dengan ukuran berapa pun, tidak seperti mekanisasi, misalnya, yang membutuhkan skala ekonomi minimum. Tetapi, “netral skala”—atribut bagi teknologi tertentu—tidak sama dengan “netral sumberdaya”, sebab netral sumberdaya adalah atribut sosial yang terkait dengan persoalan “siapa memiliki apa?” dan

mengharuskan orang memperhitungkan diferensiasi dan dampaknya. Seperti yang dijelaskan John Harriss (1987: 321) dalam kaitan dengan paket Revolusi Hijau di India: “Persoalan utama di sini adalah bahwa mereka yang memiliki lebih banyak sumberdaya pasti berada pada posisi yang lebih baik untuk menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh teknologi yang membutuhkan uang banyak itu.”³

Petani marginal adalah mereka yang “terlalu miskin untuk bertani”. Mereka tidak selalu kekurangan akses atas tanah, tetapi tidak memiliki salah satu atau beberapa dari kemampuan berikut yang wajib tersedia agar mereka bisa mereproduksi diri melalui usaha tani mereka:

- tanah yang cukup luas dengan kesuburan yang cukup bagus;
- kemampuan membeli sarana produksi lain yang harus tersedia, seperti peralatan dan benih; dan
- kapasitas untuk mengerahkan tenaga kerja yang memadai, sering kali dipengaruhi oleh relasi gender yang tidak membolehkan perempuan petani mengerahkan tenaga kerja laki-laki.

Diferensiasi kelas petani sebagai produsen komoditas skala kecil meliputi juga beberapa faktor dan kerumitan lain. Misalnya, pasar tenaga kerja pedesaan adalah syarat sangat penting bagi produksi komoditas berskala kecil, sekalipun penggunaan tenaga kerja upahan oleh “petani kecil” sering diabaikan. Dalam konteks Eropa masa sekarang, misalnya, Toby Shelley (2007: 1) mencatat bahwa: “Prancis sekarang membanggakan pertanian petani kecil mereka yang mandiri, tetapi tanpa buruh migran dari Maroko, para petani kecil itu pasti susah.”⁴ Dalam satu penelitian tentang pedesaan Kosta Rika pada 1980-an, Marc Edelman (1999: 122, 123, 176) menyebut “petani kecil” yang mengupah pekerja atau *peon*, dan

menceritakan bagaimana para petani kecil mengeluhkan bahwa mereka tidak punya uang tunai untuk mengupah para *peon* itu. Sayangnya Edelman tidak menjelaskan siapa para *peon* itu dan dari mana asal mereka dalam struktur kelas pedesaan.

Topik atau hipotesis umum lain yang punya cakupan lebih luas adalah bahwa praktik, peruntungan, dan prospek petani pun semakin dibentuk oleh aktivitas dan pendapatan mereka di luar usaha tani yang bisa digunakan untuk biaya konsumsi (reproduksi sebagai tenaga kerja) dan biaya investasi (reproduksi sebagai kapital). Frank Ellis (1998: 10) mencatat: “Sumber pendapatan bukan-dari-tani sangat penting untuk menjelaskan standar hidup rumah tangga tani di negara-negara berkembang.” Inilah “diversifikasi mata pencaharian” pedesaan. Diversifikasi ini terkait dengan kecenderungan terjadinya diferensiasi kelas yang bisa diperkuat atau dihambat, tergantung situasinya.

Para petani kapitalis yang sedang bertumbuh itu sering kali berinvestasi dalam aktivitas yang mendukung usaha tani, seperti perdagangan dan pengolahan hasil panen, dagang eceran dan transportasi pedesaan, meminjamkan uang, menyewakan hewan atau traktor untuk membajak, atau menjual air irigasi. Mereka juga berinvestasi dalam beberapa aktivitas di kota, misalnya membiayai pendidikan untuk anak laki-laki mereka, menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan orang kota yang mapan, membangun hubungan dengan pejabat pemerintah. Selain itu, mereka juga berinvestasi dalam proses dan pengaruh politik secara umum. Pendeknya, mereka ikut dalam “diversifikasi untuk akumulasi” (Hart 1994).

Usaha tani skala menengah biasanya mengandalkan kombinasi kegiatan di lahan pertanian dengan beberapa aktivitas di luar lahan pertanian, termasuk menjadi buruh migran, sebagai sumber pendapatan untuk menyokong reproduksi untuk produksi usaha tani, terutama ketika biaya reproduksi meningkat. Usaha tani ska-

la menengah juga bertumpu pada kemampuan untuk membayar tenaga kerja upahan dari kalangan buruh tani tunakisma atau petani marginal, yang sering kali juga merupakan buruh migran. Tenaga kerja upahan bisa dipekerjakan untuk menggantikan tenaga kerja keluarga ketika para anggota keluarga itu terlibat dalam aktivitas di luar usaha tani, atau menambah tenaga kerja keluarga ketika pekerjaan usaha tani memuncak pada kalender pertanian, seperti waktu penanaman dan panen.

Para petani miskin atau petani marginal terlibat dalam aktivitas “bertahan hidup” untuk mereproduksi diri, terutama dengan menjual tenaga kerja mereka. Meski terlambat, hal itu diketahui oleh beberapa organisasi seperti IFAD dan World Bank. *Rural Poverty Report 2001* dari IFAD mencatat bahwa orang miskin pedesaan “hidup terutama dengan menjual tenaga kerja mereka” (2001: 230), dan Tabel 7.1 diambil dari *World Development Report 2008* (World Bank 2007: 205).

TABEL 7.1
Andil Populasi Orang Dewasa Pedesaan yang Bertani dengan Tenaga
Sendiri sebagai Aktivitas Ekonomi Utama (%)

WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Afrika Sub-Sahara	56,6	53,5
Asia Selatan	33,1	12,7
Asia Timur dan Pasifik (kecuali Tiongkok)	46,8	38,4
Timur Tengah dan Afrika Utara	24,6	38,6
Eropa dan Asia Tengah	8,5	6,9
Amerika Latin dan Karibia	38,4	22,8

Tabel 7.1 memperlihatkan bahwa usaha tani dengan tenaga sendiri menjadi aktivitas ekonomi utama bagi lebih dari setengah

populasi orang dewasa pedesaan hanya di Afrika Sub-Sahara. Meski demikian, tampak pula adanya kecenderungan kuat terjadinya “deagrarianisasi” atau “penyusutan kaum tani” di Afrika Sub-Sahara (Bryceson 1999), yang terlihat dari peningkatan proporsi pendapatan pedesaan yang berasal dari sumber nonpertanian. Selain itu, krisis ekonomi menyeluruh yang mencengkeram sebagian besar daerah Afrika Sub-Sahara beberapa puluh tahun terakhir telah memperbesar tekanan terhadap reproduksi lewat kombinasi lama antara bertani dan kerja berpindah-pindah, antara “cangkul dan upah” dalam istilah yang digunakan oleh Cordell *et al.* (1996). Ini terjadi karena peluang kerja di perkotaan (termasuk pekerjaan “informal” dan kegiatan mempekerjakan diri sendiri) yang bisa menjadi sumber dukungan untuk usaha tani di pedesaan telah menurun bersamaan dengan meningkatnya tekanan atas sebagian besar usaha tani rumah tangga sebagai akibat dari globalisasi neo-liberal (Bab 5).

Faktor lebih lanjut yang memperumit struktur kelas adalah kondisi takpasti pertanian skala kecil di Selatan yang menimbulkan beberapa tekanan terhadap reproduksi rumah tangga tani. Para petani menengah sering kali terdesak menjadi petani miskin karena mereka memang rentan terhadap “guncangan” seperti kemarau panjang, banjir, dan memburuknya nilai tukar antara apa yang harus mereka beli dan apa yang bisa mereka jual—keadaan semacam ini biasanya disebut dengan istilah “himpitan reproduksi sederhana”. Mereka hanya sanggup membeli *input*, makanan, dan tenaga kerja yang lebih sedikit ketika pendapatan mereka dari pertanian menurun. Situasi ini bisa saja disebabkan oleh penurunan hasil panen—akibat cuaca buruk, wabah, serangan hama, kekurangan pupuk, atau kekurangan tenaga kerja—atau karena turunnya harga jual komoditas mereka, atau karena mereka harus melunasi utang. Kerawanan itu juga bisa disebabkan oleh kerentanan *masing-masing* rumah tangga terhadap “guncangan”,

misalnya ketika anggota keluarga penting menderita sakit atau meninggal,⁵ atau ketika hewan pekerja yang berharga menderita sakit atau mati. Bila salah satunya terjadi berarti rumah tangga tani menyeberangi batas antara “bisa mengatasi” dan “jatuh ke dalam” kemiskinan.

Beberapa Variasi Diferensiasi

Ketika pada pertengahan abad XX petani kecil di Selatan “terkurung” dalam relasi-relasi komoditas, mereka pun mengalami diferensiasi secara meluas dalam kerangka kelas, dalam tingkatan yang beragam, untuk tidak mengatakannya secara takrata. Tingkat diferensiasi mereka mungkin saja terhambat, misalnya, oleh penjarahan kolonialisme di beberapa daerah, sebagai dampak dari “penghisapan tuan tanah” di India pada masa kolonial (Bab 3) atau ketika para rentenir dan tengkulak mencengkeram kuat ekonomi pedesaan. Tetapi, diferensiasi pada berbagai skala muncul dari proses-proses komodifikasi, dan kadang didorong oleh kebijakan pertanian kolonial. Seperti yang dikutip dalam Bab 6, Low (1996) mengungkapkan bahwa beberapa kelas mapan petani kaya lokal merupakan kekuatan sosial dominan di pedesaan, ketika banyak bangsa sudah merdeka dari kekuasaan kolonial di Asia dan Afrika—*dan* dengan jangkauan yang meluas hingga keluar pedesaan.

Seperti halnya pola-pola komodifikasi pertanian skala kecil, pola diferensiasi juga memiliki banyak variasi. *Kecenderungan* menuju diferensiasi yang bisa diidentifikasi secara teoretis dari kesatuan posisi-posisi kelas yang kontradiktif dalam produksi komoditas skala kecil, tidak—dan tidak bisa—tampak jelas dalam kesamaan *kecenderungan*, mekanisme, ritme, dan bentuk-bentuk diferensiasi kelas di mana pun. Hal ini karena “banyak faktor penentu” (Marx) justru menengahi antara *kecenderungan* dan kondisi-kondisi konkret serta dinamika lokal yang partikular. Saya sudah menyebutkan beberapa dari faktor penentu itu, yang

mungkin terlihat paradoks, misalnya, posisi penting pendapatan di luar usaha tani dan kerja upahan bagi reproduksi petani skala menengah, yang merusak citra ideal mereka sebagai petani keluarga “independen”, “petani kecil menengah”, atau petani mandiri yang kokoh. Demikian pula, penjualan tenaga kerja oleh orang miskin bisa menolong beberapa dari mereka untuk memiliki sebidang tanah, semarginal apa pun tanah itu. Mereka sering melakukan pengorbanan besar untuk tetap menguasai tanah itu, sebab tanah merepresentasikan suatu kepastian, dan mungkin juga harapan, dalam “perjuangan ekonomi untuk subsistensi” (Chayanov) yang mereka hadapi, sebagaimana tanah itu bisa menjadi penanda nilai dan identitas kultural.

Tergantung kondisinya, bisa juga muncul pembatasan ekspansi usaha tani mereka oleh petani kaya. Harriss (1987) meneliti satu desa di India bagian tenggara, di mana rata-rata keluarga tani menanam 1,2 hektare sawah dengan padi dan kacang tanah. Di situ ada ketakrataan di antara rumah tangga, tetapi ketakrataan itu tidak besar dalam hal distribusi lahan dan skala usaha tani, sebab ada perlawanan terhadap petani kaya yang ingin membeli tanah lebih luas di wilayah berpenduduk padat dengan tanah yang diolah secara intensif itu, juga karena adanya praktik pewarisan dengan membagi tanah di antara anak-anak laki-laki. Para petani kaya pun banyak yang kemudian berdagang beras, sebab berdagang beras lebih fisibel dan menguntungkan daripada memperbesar skala usaha tani mereka.

Sebagai pembandingan, di beberapa kondisi yang sangat berbeda di Uganda pada 1980-an, seorang kapitalis desa mengatakan kepada Mahmood Mamdani (1987: 208): “Apa yang membantu kami [melakukan akumulasi] adalah kelaparan yang terjadi pada 1980. Orang kelaparan, dan mereka menjual barang-barang dengan harga murah [termasuk tanah dan ternak]. Pada waktu itulah kami mulai membeli.” Sebagaimana sering terjadi dalam kapitalisme,

krisis bagi sebagian orang merupakan peluang bagi sebagian yang lain, inilah dinamika yang meresap ke dalam kontur-kontur yang rumit dan cair dari pembentukan kelas di pedesaan.

Kelas-Kelas Pekerja

Menimbang warisan Chayanov sekitar enam puluh tahun setelah karya-karya utamanya terbit, Theodor Shanin (1986: 19) mengamati: “Masyarakat pedesaan dan masalah pedesaan takbisa lagi dijelaskan dengan memperhitungkan masalah-masalah pedesaan itu sendiri, tetapi harus dipahami dari aliran tenaga kerja dan aliran kapital yang mana keduanya ini lebih luas daripada pertanian.” Salah satu dimensi dari masalah pedesaan itu terkait dengan kapital. Dimensi ini bisa kita sebut dengan istilah *pertanian yang melampaui usaha tani*. Bab 4 telah membahas perbedaan antara usaha tani dan “sektor pertanian” dalam kapitalisme modern, dalam pengertian ekonomi maupun politik. Sektor pertanian bisa meliputi “kapital agraria yang berada di luar daerah pedesaan”, yaitu investasi pada tanah dan usaha tani yang dilakukan oleh pebisnis perkotaan (termasuk politisi, pegawai negeri, perwira militer, dan profesional kaya) dan oleh kapital korporat agribisnis.

Ulasan tentang komodifikasi, basis kelas dalam produksi komoditas skala kecil, dan diferensiasi kelas di kalangan petani keluarga memperjelas dimensi lain, yakni dimensi tenaga kerja. Kita bisa menyebutnya sebagai *pekerja pedesaan di luar usaha tani*, yang tersedia tidak hanya oleh adanya pekerja pedesaan yang sepenuhnya “terproletarianisasi” atau menjadi tunakisma hingga sama sekali takmampu bertani sendiri, tetapi juga oleh petani marginal atau mereka yang terlalu miskin untuk bertani sebagai komponen utama mata pencaharian dan reproduksi mereka. Dua kategori tenaga kerja ini biasanya punya batas kategori sosial yang cair, serta bisa dipekerjakan secara lokal di

lahan tetangga mereka (yang merupakan produsen kapitalis atau produsen komoditas skala kecil) atau dipekerjakan sesuai musim di beberapa tempat lebih jauh di mana pertanian kapitalis dan produksi komoditas skala kecil berlangsung, kadang masih dalam satu negara, kadang di negara lain. Keberadaan “tenaga kerja lepas” (*footloose labour*), dalam istilah Jan Breman (1996), telah menyebar luas dalam kehidupan sosial daerah pedesaan di Selatan sekarang ini. Kenyataan ini memperlihatkan bagaimana jenis-jenis usaha tani di Selatan terdiferensiasi oleh dinamika kelas.

Apa yang saya sebut di sini dengan istilah “kelas-kelas pekerja” meliputi “[orang] dalam jumlah kian besar ... yang sekarang tergantung secara langsung atau *tidak langsung* pada penjualan tenaga kerja untuk reproduksi harian mereka” (Panitch dan Leys 2001: ix, penekanan saya tambahkan). Mereka harus mengusahakan reproduksi dalam kondisi pendapatan yang semakin takpasti dan “pemiskinan” yang kian hebat. Mereka pun harus menghadapi ketidakpastian peluang kerja dan kemerosotan yang ditimbulkan oleh tekanan neoliberal terhadap ketersediaan layanan sosial bagi pekerja tetap, sehingga kelas-kelas pekerja ini di sebagian besar wilayah Selatan semakin berkurang secara proporsional, dan dalam kasus tertentu secara absolut.⁶ Tekanan terhadap reproduksi menimbulkan akibat-akibat susulan lebih parah lagi bagi satu kelas yang terus bertumbuh: “kelas pekerja informal global”, menurut Mike Davis (2006: 178), yang “berjumlah satu miliar orang, bertumbuh paling cepat, dan merupakan kelas sosial paling baru di muka bumi.”

Davis merujuk pada pekerja perkotaan, tetapi perlu dipertimbangkan apakah para petani miskin di Selatan juga merupakan bagian dari “kelas pekerja informal global”. Boleh jadi mereka tidak sepenuhnya mengalami penjarahan atas *semua* sarana reproduksi diri mereka, sebagaimana diingatkan Lenin agar berhati-hati

dengan “pemahaman yang terlalu stereotip mengenai proposisi teoretis bahwa kapitalisme membutuhkan pekerja bebas yang tunakisma” (Lenin 1964a: 181). Tetapi, mereka juga tidak memiliki sarana *mencukupi* untuk mereproduksi diri, yang menandai batas kemampuan mereka bertahan sebagai produsen komoditas skala kecil.

Para pekerja miskin di Selatan telah mengusahakan reproduksi diri mereka dengan mengambil pekerjaan upahan yang takpasti, menindas, dan semakin langka. Upaya ini bisa juga mereka tempuh melalui aktivitas “ekonomi informal” skala kecil yang juga takpasti, termasuk pertanian marginal. Sesungguhnya, mata pencaharian mereka memang diusahakan melalui beberapa *perpaduan* kompleks antara pekerjaan upahan dan mempekerjakan-diri-sendiri (*self-employment*).⁷ Selain itu, mereka mengusahakan sarana reproduksi dengan melintasi tempat-tempat berbeda dalam pembagian kerja secara sosial: perkotaan dan pedesaan, pertanian dan non-pertanian, bekerja upahan dan mempekerjakan-diri-sendiri. Lokasi dan identitas sosial yang ditempati oleh para pekerja miskin itu berpadu dan bergerak di antara wilayah yang kian cair, serta menentang asumsi-asumsi lama dalam gagasan baku dan seragam tentang “buruh”, “petani”, “pedagang kecil”, “kota”, “pedesaan”, “dipekerjakan”, dan “mempekerjakan-diri-sendiri”.

Keberhasilan atau kegagalan nisbi dalam pasar kerja, pekerjaan berupah, dan aktivitas lain menjadi kunci untuk keberlangsungan (reproduksi) dari produksi komoditas pertanian skala kecil, tetapi keberhasilan atau kegagalan itu tidak tersebar merata di antara mereka yang bertani, atau bila tidak, di kalangan mereka yang punya minat pada usaha tani dan akses atas tanah. Pada gilirannya, hal itu berdampak pada mereka yang termasuk kelas-kelas pekerja, yang memadukan upaya mempekerjakan-diri-sendiri dalam usaha tani dan cabang-cabang lain “ekonomi informal” dengan kerja upahan. Sebagai petani skala kecil maupun pekerja nonpertanian,

mereka menghuni sebuah dunia sosial dengan “kapitalisme mikro yang tak kenal ampun” (Davis 2006: 181).

Kesimpulan

Untuk tujuan analitis, kadang kita perlu memikirkan kapital secara umum. Saya pun sering menggunakan istilah “kapital” dengan cara yang abstrak ini, misalnya, ketika menyebut kepentingan kapital atau dinamika kapital. Sebetulnya, kapital bisa dibedakan menurut:

- *aktivitas dan sektor*: kapital pertanian dan kapital industri, kapital keuangan dan kapital perdagangan;
- *skala*: mulai dari skala rumah tangga dan “usaha kecil”, termasuk produsen komoditas skala kecil, hingga korporasi global; dan
- *kelas-kelas kapital*: dibedakan berdasarkan kepentingan dan strategi yang dimiliki dan dijalankan oleh kapital pada aktivitas-aktivitas dan sektor-sektor tertentu serta pada berbagai skala, mulai dari lokal hingga regional, nasional, dan internasional.

Bab ini telah menggambarkan sekaligus berupaya menjelaskan lebih lanjut keberagaman konkret kelas-kelas kapital dan kelas-kelas pekerja di pedesaan Selatan serta bagaimana keberagaman itu dibentuk oleh berbagai faktor (“determinasi”) yang berasal dari luar pedesaan, di luar usaha bertani, dan di luar budidaya pertanian. Berbagai bentuk kapital dan kelas kapital telah ditengarai, mulai dari agribisnis korporat hingga para “petani kaya” atau kapitalis desa. Kaum kapitalis desa biasanya membeli tanah dan ternak dari tetangga mereka yang jatuh miskin, atau beralih usaha ke perdagangan hasil pertanian. Ketika melihat

keberagaman semacam itu serta mengamati berbagai kontradiksi dan pertarungan yang memunculkan keberagaman itu, menjadi sulit untuk meyakini gagasan yang menyatakan bahwa para petani—entah disebut dengan istilah “petani kecil”, “petani keluarga”, atau “petani skala kecil”—adalah satu kelas tunggal dan, terlebih lagi, sebagai sebuah kelas yang terbentuk melalui berbagai relasi sosial dengan kapital. Dalam bab terakhir, saya menyajikan lagi beberapa gagasan yang sudah dibahas di sini guna menyelidiki beberapa kompleksitas tambahan yang terkait dengan praktik dan proses politik—yakni sosiologi politik kelas.

Catatan

- ¹ Para petani yang memelopori cara seperti itu dalam praktik usaha tani alternatif disebut sebagai “kaum tani baru” oleh van der Ploeg (2008).
- ² Satu klaim lain yang berbeda, tetapi masih berhubungan, menegaskan bahwa istilah “para penghuni tanah”, yang meliputi semua petani kecil di mana pun, bisa menjadi sebuah kelas atau mendapatkan kualitas seperti kelas dengan bersatu dalam suatu proyek politik bersama. Hal ini dibahas lagi dalam bab berikutnya.
- ³ Mereka juga sering punya posisi lebih mudah untuk mendapatkan paket varietas unggul beserta dengan syarat-syarat yang memudahkan.
- ⁴ “Budidaya pertanian-petani-kecil-mandiri” (*self-sufficient peasant agriculture*) barangkali terkesan sebagai suatu sebutan yang aneh untuk usaha tani di Prancis masa sekarang. Shelley memang merujuk pada suatu mitos nasional tertentu, dan populis, yang di dalamnya tenaga kerja upahan, khususnya tenaga kerja imigran, tidak lagi tampak.
- ⁵ Terutama dengan hadirnya wabah HIV-AIDS yang semakin memperparah risiko kesehatan pedesaan di Selatan, terutama di beberapa daerah di Afrika.
- ⁶ Upah yang mereka terima sering kali digunakan untuk mempererat jaringan kerabat yang lebih luas, baik di kota maupun di desa.
- ⁷ Konsep “mempekerjakan-diri-sendiri” sangatlah bermasalah dan sering kali secara menyesatkan digunakan untuk menyebut “pekerja upahan dalam samaran yang tipis” (Harriss-White dan Gooptu 2000: 96).

BAB 8

Kompleksitas Kelas

Sosiologi Ekonomi dan Sosiologi Politik

Kompleksitas analitis dan variasi-variasi konkret yang dibahas dalam Bab 7 bisa dianggap sebagai aspek-aspek dari “sosiologi ekonomi” kelas. Dalam berbagai skala, aspek-aspek itu meliputi bentuk-bentuk produksi dan rezim tenaga kerja, pembagian kerja secara sosial, migrasi tenaga kerja, pemilahan dan keterkaitan desa-kota, bentuk-bentuk organisasi kapital dan pasar, serta berbagai kebijakan dan praktik pemerintah sekaligus dampak-dampaknya. Sudah disebutkan pula bahwa para petani kecil dan kelas-kelas pekerja memang saling bersinggungan atau bersilangan serta sangat heterogen dalam hal komposisi dan karakteristik mereka, paling tidak karena sangat beragamnya cara yang bisa memadukan “mempekerjakan-diri-sendiri” dan kerja upahan. Mengutip Lenin (1964a: 33), kemungkinan ragam perpaduan dari elemen-elemen tenaga kerja tersebut memang tanpa batas.

Keberagaman semacam itu dilandasi aspek kompleksitas yang paling meluas, yang sejauh ini baru disinggung secara tersirat. Sebagaimana dinyatakan oleh filsuf Etienne Balibar: dalam dunia kapitalis, relasi-relasi kelas adalah “*satu struktur yang mendeterminasi, mencakup semua praktik sosial, tanpa pernah menjadi satu-satunya struktur*” (dikutip oleh Therborn 2007: 88, penekanan seperti aslinya). Jadi, dalam kapitalisme, relasi-relasi kelas merupakan “determinasi” (penentu) *universal tetapi tidak eksklusif* dalam praktik-praktik sosial. Relasi-relasi kelas itu bersilangan dan

berpadu dengan pemilahan dan diferensiasi sosial lainnya—gender merupakan yang paling tersebar luas—yang bisa mencakup juga relasi-relasi yang menindas dan mengeksklusi berdasarkan ras dan kesukuan, agama dan kasta.

Pemilahan dan diferensiasi sosial tersebut tidak harus selalu berakar dalam kapitalisme; tidak pula selalu bisa dijelaskan oleh “kepentingan kapital”. Ada perbedaan penting antara menganggap bahwa apa pun yang ada dalam dunia kapitalisme menjadi demikian karena melayani kepentingan kapital (penjelasan “fungsionalis”), dan menyelidiki bagaimana yang ada itu muncul sebagai dampak dari dinamika kontradiktif dalam relasi-relasi sosial kapitalis—termasuk bagaimana relasi-relasi itu membentuk ulang berbagai praktik dan keyakinan yang sudah ada sebelum hadirnya kapitalisme. Dinamika kontradiktif dari relasi-relasi sosial kapitalis juga mencakup akibat-akibat susulan yang tidak diinginkan dari, di satu sisi, sejumlah jalur akumulasi dan strategi penguasaan politik oleh kelas-kelas kapitalis dan, di sisi lain, dari upaya reproduksi oleh kelas-kelas pekerja serta tantangan-tantangan dari “gerakan tandingan” terhadap penguasaan kapital.

Untuk bergeser dari sosiologi ekonomi tentang relasi-relasi dan dinamika kelas menuju topik-topik tentang identitas dan kesadaran kelas, serta dari situ menuju analisis tentang praktik politik kolektif, kita harus memperhitungkan serangkaian faktor dan determinasi lebih lanjut yang memengaruhi kepelakuan politik. *Pertama*, penting ditegaskan bahwa kekuasaan ekonomi dan sosial dari kapital—yang berakar dalam sistem kepemilikan dan relasi-relasi komoditas—harus diamankan lewat penguasaan politik dan ideologis yang dijalankan—juga secara universal tetapi tidak secara eksklusif—melalui negara. Kita seharusnya tidak beranggapan bahwa penguasaan kapital bekerja lewat kesatuan dan instrumentalisasi tujuan yang sederhana. Tidak boleh juga kita memandang bahwa penguasaan kapital pasti koheren dalam hal

bagaimana penguasaan itu berusaha membenarkan dirinya sendiri secara ideologis sebagai suatu tatanan moral maupun dalam hal strategi dan praktik politik. Tidak ada kepastian mengenai kesatuan, keterpaduan, dan keefektifan dalam hal bagaimana kelas-kelas kapitalis memandang, mengantisipasi, menilai, menghadapi, dan berupaya mengendalikan kontradiksi sosial dalam kapitalisme, baik untuk tujuan mengejar laba dan akumulasi maupun untuk memastikan adanya legitimasi—atau setidaknya persetujuan—atas apa yang mereka lakukan.

Kedua, isu kunci dalam sosiologi politik kelas pekerja (yang terfragmentasi) tersirat dalam amatan Mahmood Mamdani bahwa: “penerjemahan” dari “fakta sosial” menjadi “fakta politik” selalu bersifat sementara dan tidak dapat diprediksi (Mamdani 1996: 219). Ini khususnya terjadi oleh karena “banyak cara bagi kekuasaan untuk melakukan fragmentasi berbagai *situasi* dan *pengalaman* orang-orang yang ditindas” (Mamdani 1996: 219, 272, penekanan ditambahkan). Banyaknya variasi *situasi* itu sudah ditekankan dalam Bab 7 ketika kita membahas pola-pola komodifikasi dan pembentukan kelas di pedesaan serta pola-pola heterogenitas kelas-kelas pekerja; itulah kompleksitas sosiologi ekonomi kelas. Untuk sosiologi politik kelas, langkah penting selanjutnya adalah menyelidiki bagaimana situasi-situasi itu *dialami*, sebagaimana disarankan oleh Mamdani. Situasi-situasi itu tidak dialami dengan sendirinya dan semata sebagai eksploitasi dan penindasan kelas *secara umum*, tetapi dialami melalui berbagai identitas spesifik, seperti “penduduk kota/penduduk desa, pekerja industri/pekerja pertanian, perajin kota/perempuan petani kecil, laki-laki/perempuan, kerja pikiran/kerja tangan, muda/tua, hitam/putih, perbedaan regional, perbedaan nasional, perbedaan etnik, dan seterusnya,” sebagaimana disebutkan dalam daftar yang dibuat oleh Peter Gibbon dan Michael Neocosmos (1985: 190). Lebih dari itu, kapital-kapital tertentu sudah lazim memanfaatkan berbagai

perbedaan relasional—berdasarkan gender, generasi, tempat (kota dan desa), dan tentu saja kesukuan dan kebangsaan—dalam hal bagaimana mengerahkan tenaga kerja dan mengorganisasikannya dalam produksi maupun dalam hal bagaimana menangani perlawanan kelas-kelas pekerja.

Barbara Harriss-White dan Nandini Gooptu (2000: 89) mengemukakan kembali persoalan sentral dalam sosiologi politik kelas dengan menyatakan: “pertarungan memperebutkan kelas” mendahului, dan menjadi syarat bagi, “pertarungan antarkelas”. Dalam “memetakan dunia tenaga kerja yang tidak terorganisir di India,” mereka meneliti bagaimana pertarungan “memperebutkan kelas” yang dilakukan oleh pekerja miskin dibelokkan dan dibatasi oleh gender, kasta, agama, serta perbedaan dan pemilahan sosial yang lain. Mereka menyimpulkan bahwa mayoritas terbesar dari kelas-kelas pekerja di India “masih terlibat dalam pertarungan pertama,” yaitu pertarungan memperebutkan kelas. Sementara itu, kelas-kelas kapitalis di India sudah masuk dalam pertarungan kedua melalui tindakan-tindakan ofensif mereka terhadap kelas pekerja. Argumen ini tentu saja bisa diterapkan dan diujikan di tempat lain.

Pertarungan Kelas di Pedesaan

Tidak diragukan bahwa pedesaan-pedesaan di Selatan dipenuhi oleh pertarungan yang memperlihatkan adanya kepelakuan dan pertentangan politik berbagai macam pelaku, mulai dari agribisnis hingga kelas-kelas pemilik tanah dan kapital agraria di tingkat nasional dan lokal, hingga kelas-kelas petani “kecil” yang berlainan serta kelas-kelas pekerja yang terfragmentasi. Seluruh pertarungan itu dibentuk—secara universal tetapi tidak secara eksklusif—oleh dinamika kelas. Dengan cara-cara yang kompleks, dinamika kelas ini berpadu dengan berbagai sumber dan pengalaman struktural

dari kontradiksi sosial yang lain. Ini terjadi pada skala dan bentuk kepelakuan yang berbeda, yang akan saya bahas secara singkat berikut ini.

Dalam kaitan dengan “skala”, Bab 6 sudah menyebutkan gagasan “bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari” dalam lingkup lokal, misalnya dalam lingkup desa. Ben Kerkvliet (2009: 233) menekankan pentingnya kelanjutan pendapat James Scott bahwa “kehidupan sehari-hari memang dipenuhi oleh pertarungan kelas yang hanya sekali-sekali meledak ke permukaan.” Tetapi, “pertarungan kelas” sehari-hari semacam itu biasanya berpadu dengan, dan dialami sebagai, penindasan yang berakar dari bentuk-bentuk hierarki yang lain. Sebagai contoh, salah satu kritik terhadap buku Scott, *Weapons of the Weak*, adalah bahwa penggambarannya itu “buta gender,” mengabaikan dinamika dan dampak dari relasi-relasi gender yang timpang, juga mengabaikan kepelakuan para petani perempuan dan buruh tani perempuan (Hart 1991).

Seperti halnya “bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari”, beberapa pertarungan yang lebih terbuka dan lebih hebat, kadang terjadi pada skala regional yang lebih luas, menjadi ciri dari konflik-konflik atas tanah yang tersebar luas di Afrika Sub-Sahara. Antropolog Pauline Peters merangkum dinamika kelas dan dinamika nonkelas yang hadir dalam konflik-konflik itu, sembari menjelaskan bagaimana kedua dinamika ini saling berhubungan:

Persaingan memperebutkan tanah dengan berbagai tujuan semakin menghebat karena pertumbuhan penduduk dan pergerakan orang yang mencari tanah lebih subur atau mengungsi karena kerusuhan; kelompok-kelompok pedesaan berusaha menggalakkan produksi komoditas dan makanan, sementara pegawai yang di-PHK dari golongan pekerja formal yang makin menipis juga mencari lahan untuk mendapatkan makanan

yang lebih baik dan sumber pendapatan lain; beberapa negara membatasi hutan dan wilayah lain serta mematok beberapa wilayah yang harus dilestarikan (sering kali dengan tekanan donor dan kelompok-kelompok lobi internasional); para pejabat negara dan elite politik menguasai tanah dengan berbagai cara, mulai dari cara yang bermasalah hingga yang ilegal; dan sumberdaya-sumberdaya berharga yang terdapat di atas maupun di bawah tanah (kayu, minyak, emas, dan mineral-mineral lain) menggoda terjadinya eksploitasi yang hebat oleh bermacam-macam agen, mulai dari orang-orang setempat (pemuda pengangguran atau petani musiman yang ingin mendapatkan uang tunai) hingga jaringan internasional (korporasi internasional, pemerintah-pemerintah asing, dan para pejabat negara-negara Afrika) [Yang terjadi] bukan hanya persaingan yang semakin sengit dalam perebutan tanah, tetapi juga diferensiasi sosial yang semakin mendalam, kendati diferensiasi itu memiliki banyak bentuk—kaum muda melawan para tetua, laki-laki melawan perempuan, pertentangan antarsuku dan antaragama—semua ini juga menunjukkan pemilahan sosial baru yang, secara keseluruhan, bisa dilihat sebagai proses pembentukan kelas Semakin banyaknya ketegangan dan pertarungan antargenerasi dan antargender, atau antarkelompok yang berlabel daerah, kesukuan, atau agama, terkait erat dengan dinamika pemilahan dan eksklusivitas, aliansi dan inklusi yang membentuk struktur kelas. (Peters 2004: 279, 291, 305)

Perang-perang yang paling mengerikan di Afrika Sub-Sahara masa kini—oleh media internasional biasanya digambarkan sebagai contoh “tribalisme” dan “barbarisme” yang bersemayam dalam diri orang Afrika—punya sejarah panjang penindasan dan konflik atas tanah. Konflik-konflik itu berakar dalam warisan administrasi

politik dan pertanahan pemerintahan kolonial, dibentuk oleh pola-pola komodifikasi, dan diintensifkan oleh eksploitasi sumberdaya alam, perubahan iklim, dan intervensi selektif oleh aktor-aktor politik internasional, misalnya di Rwanda dan Kongo timur (Pottier 2002), Sierra Leone dan Pantai Gading (Chauvau dan Richards 2008), serta Darfur (Mamdani 2009). Semua ini tidak hanya pertarungan “di antara kelompok-kelompok yang berlabel daerah, kesukuan, atau agama,” tetapi juga merupakan pertarungan dengan dinamika kelas mereka sendiri, meski dengan “cara-cara yang tak terlihat dan tak terartikulasi” (Peters 1994: 210).

Contoh-contoh lain tentang pertarungan yang biasanya bersifat lokal memiliki “bentuk” kelas yang lebih kentara, terutama ketika persoalannya adalah pengerahan, pengendalian, dan pembayaran upah tenaga kerja. Satu contohnya adalah pertarungan antara para pekerja dan majikan mereka di perkebunan dan pertanian kapitalis. Contoh lain bisa dilihat di sejumlah daerah yang menjadi tempat pertumbuhan “kapitalisme petani kecil” di India, yang ditandai dengan adanya konflik terbuka antara para petani kaya/menengah dan para buruh mereka yang sering kali menjadi sasaran kekerasan sistematis (Banaji 1990). Kedua jenis pertarungan kelas pedesaan ini bisa saja menjadi sangat menghebat ketika dinamika kelasnya berpadu dengan, dan didukung oleh, diferensiasi-diferensiasi sosial yang lain—pemilahan berbasis kasta dan gender di pedesaan India serta pemilahan berdasarkan kesukuan dalam pengerahan tenaga kerja, yang sering menjadi strategi yang sengaja digunakan dalam rezim-rezim tenaga kerja perkebunan.

“Para Penghuni Tanah”

Dalam bagian terakhir ini, saya akan membahas isu tentang gerakan-gerakan agraria yang terorganisir saat ini—pada skala regional, nasional, dan bahkan transnasional—dengan memberi

perhatian khusus pada “bentuk” gerakan-gerakan agraria dalam kerangka kelas dan kerangka yang lain. Apakah gerakan-gerakan agraria yang terorganisir saat ini merupakan turunan dari gerakan-gerakan besar kaum tani pada masa lalu (Bab 6), setidaknya dalam hal skala dan nilai penting mereka, jika bukan dalam hal situasi dan metode atau mungkin pula tujuan mereka? “Perang petani pada abad XX”, sebagaimana dirumuskan Eric Wolf, diarahkan untuk melawan *rezim-rezim kuno* yang berasal dari kaum “feodal”, misalnya di Rusia dan Tiongkok, dan untuk melawan rezim lama yang berasal dari kekuasaan kolonial, misalnya di Meksiko, Vietnam, Aljazair, dan Kuba. Semuanya menjadi subjek perubahan yang meluas meski takrata ketika mereka telah terinkorporasi ke dalam ekonomi kapitalis (Bab 3). Gerakan-gerakan petani semacam itu bergerak di seputar persoalan tanah, sewa dan pajak, pemiskinan, serta penindasan ekstrem dan ketidakadilan sosial, sering kali dalam kondisi-kondisi pergolakan sosial yang hebat dan perang. Gerakan-gerakan petani itu biasanya menjadi bagian dari gerakan kemerdekaan nasional atau revolusi sosial, biasanya juga dilakukan melalui gerilya atau pertempuran jenis lain. Gerakan-gerakan semacam itu juga memiliki kekhususan sejarah dan lokalitasnya tersendiri, serta bisa saja bersifat heterogen dalam hal komposisi kelasnya. Misalnya, elemen yang paling menonjol dan banyak diperdebatkan dari rumusan yang dimaksud oleh Wolf ialah penekanannya atas peran strategis “para petani menengah” dalam gerakan-gerakan semacam itu.

Dalam dunia globalisasi neoliberal masa sekarang, ada beberapa jenis baru gerakan agraria yang menurut pendukung mereka bercita-cita merangkul semua “petani kecil”—atau semua “petani skala kecil dan menengah” (Desmarais 2007: 6, penekanan saya tambahkan)—di Selatan, dan kadang gerakan-gerakan semacam itu ditujukan untuk merangkul juga “petani keluarga” di Utara, sebagai bagian dari “para penghuni tanah”.

Proyek politik untuk membela konstituen itu dijalankan dengan melawan “korporatisasi pertanian ... (yang) diatur secara global untuk menghancurkan kaum tani *di mana pun*” (McMichael 2006: 473, penekanan ditambahkan). Proyek itu ingin “menaikkan/menstabilkan kembali ekologi-kultural pedesaan sebagai suatu kebaikan global” dengan cara menggerakkan “perlawanan agraria global”, “gerakan tanding agraria”, yang berjuang untuk mempertahankan atau merebut kembali “jalan petani”—nama salah satu gerakan paling terkenal di antara gerakan-gerakan tersebut, yakni La Vía Campesina (McMichael 2006: 472, 474, 480). Apakah “gerakan perlawanan agraria global” sungguh ada, dalam pengertian apa, apa pengaruhnya, dan seterusnya, semua pertanyaan ini takkan dibicarakan di sini.¹ Saya di sini membatasi diri untuk hanya mencatat ambisi, sebagaimana dirumuskan oleh Philip McMichael, yakni ambisi untuk membentuk suatu kesatuan “para penghuni tanah” sebagai sebuah kelas tunggal yang dieksploitasi oleh kapital korporat. Di tengah globalisasi neoliberal yang berlangsung sekarang ini, ambisi itu menyegarkan kembali sekaligus memperluas visi suatu tradisi panjang populisme agraria. Namun, kesatuan dalam bentuk apa pun dari “para penghuni tanah” takbisa diasumsikan, melainkan harus dibangun dari banyak “gerakan petani” lokal, regional, dan nasional yang heterogen, dengan seluruh variasi mereka dalam hal proses-proses spesifik perubahan agraria dan situasi-situasi dari kelas-kelas pedesaan (sosiologi ekonomi), serta variasi-variasi dalam hal khususnya sejarah, pengalaman, dan budaya perjuangan (sosiologi politik). Berikut ini beberapa contoh pendek.

Di Brasil, dengan kepemilikan tanah pribadi skala luas yang ditelantarkan, juga tidak pernah menerapkan reforma agraria redistributif dalam skala luas, “persoalan tanah” menduduki posisi penting dalam politik nasional karena aksi-aksi MST. MST “menyerbu” dan mengokupasi tanah telantar, lalu membentuk

perkampungan pertanian di atasnya, dengan ideologi yang jelas antikapitalis, yaitu menetapkan tanah sebagai milik bersama bagi mereka yang menggarap (Pendahuluan, Bab 2, dan Bab 3). MST juga bekerja dengan teliti dan dekat dengan beberapa instansi pemerintah untuk menyediakan dana bagi infrastruktur dan beberapa usaha pertanian baru. Asal-usul politik, arah pergerakan, dan budaya MST mencakup riwayat “liga petani” yang ditindas oleh kediktatoran militer pada 1960-an, satu tradisi radikal Katolikisme “sosial” dari beberapa imam dan aktivis gereja, serta aliansi-aliansi lokal dengan Partai Buruh (saat ini menjadi partai pemerintah nasional di Brasil). MST menggunakan wacana kelas yang dimaksudkan untuk menyatukan semua anggotanya dari berbagai kondisi sosial setempat di pedesaan Brasil. Misalnya, bekas pekerja perkebunan di daerah penghasil gula di bagian timur-laut Brasil dan para petani kecil di bagian selatan Brasil. Pengalaman-pengalaman yang mereka bawa membentuk berbagai harapan yang berlainan serta memengaruhi hubungan antara organisasi komunitas dan penghidupan perorangan, termasuk produksi komoditas skala kecil, di beberapa perkampungan MST, yang sering kali melenceng dari cita-cita kolektif sebagaimana dipromosikan oleh para pemimpin dan pengagum gerakan ini (Wolford 2003).

Jika kasus MST sebagai satu gerakan nasional menggambarkan perbedaan-perbedaan di dalam kelompok-kelompok tertentu para pekerja dan petani kecil, serta di antara kedua kelompok itu, pemilahan kelas lebih kentara di beberapa “gerakan petani baru” yang wilayah kerjanya berskala nasional di India. Karnataka Rajya Ryota Sangha (KRRS, Serikat Petani Negara Bagian Karnataka), salah satu anggota jaringan internasional La Vía Campesina, telah mendapatkan pengakuan luas secara internasional karena menentang penggunaan benih kapas Bt hasil rekayasa genetik. Tetapi, KRRS dijalankan untuk dan oleh para petani kaya dan petani me-

nengah yang terus menindas pekerja pedesaan. KRRS juga berupaya mendapatkan subsidi untuk pupuk kimia. Pendeknya, dasar sosial dan ranah ekologis KRRS sebagai suatu contoh “perlawanan agraria global” tidak selurus yang diklaim oleh KRRS dan beberapa orang lain.

Menariknya, ideologi “gerakan petani baru” di India itu secara eksplisit menyebut “orang-orang kota” sebagai antitesis dari “para penghuni tanah”, sekurang-kurangnya dalam pengertian tradisi populis yang menimpakan permasalahan petani pada “bias urban”. Kebijakan-kebijakan dituduh menguntungkan industri kota—dan penduduk kota secara umum, misalnya dengan penyediaan “pangan murah”—dengan mengorbankan petani. Karena itu, tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh gerakan itu cenderung terfokus pada persoalan dasar pertukaran antara hasil-hasil pertanian dan barang-barang industri (Bab 4 dan Bab 6 di atas). Dalam hal ini—perhatian mereka pada harga dan subsidi yang diterima para petani—mereka sama saja dengan organisasi-organisasi dan lobi-lobi para petani di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Para pengkritik melihat mereka sebagai gerakan yang didominasi oleh kepentingan para petani kaya.

Penutup

Saya memungkasi buku ini dengan lima pertanyaan terakhir yang saya sadur dari esai pengantar sebuah buku penting kumpulan tulisan, *Transnational Agrarian Movement Confronting Globalization* (Borras *et al.* 2008). Kelima pertanyaan ini bisa diterapkan pada seluruh “gerakan tandingan” yang terlibat dalam perjuangan agraria.

- Apa saja karakteristik struktur-struktur agraria yang melahirkan, atau tidak melahirkan, gerakan?

- Apa basis sosial dari gerakan-gerakan agraria? Kelas-kelas dan kelompok-kelompok sosial mana yang mereka klaim sebagai konstituen gerakan? Bagaimana kita bisa mengkaji klaim-klaim semacam itu masuk akal atau tidak masuk akal?
- Isu-isu atau tuntutan-tuntutan apa yang diajukan oleh gerakan? Berasal dari mana tuntutan-tuntutan itu serta kekuatan-kekuatan sosial dan politik apa yang mendukung atau menghambat tuntutan-tuntutan itu?
- Isu-isu apa yang menyatukan atau memecah belah gerakan-gerakan agraria dan mengapa terjadi demikian?
- Seberapa efektifkah aksi-aksi dari berbagai gerakan itu dalam mengubah struktur-struktur agraria yang mereka lawan dan siapakah yang diuntungkan oleh perubahan itu? Mengapa beberapa gerakan agraria terbukti lebih efektif ketimbang yang lain?

Selain lima pertanyaan ini, saya mesti menambahkan satu pertanyaan lain terkait dengan “gambaran besar” yang diajukan untuk memulai buku ini: seberapa masuk akalkah klaim-klaim “gerakan-gerakan tandingan” agraria dan para pengusung mereka bahwa hasil dari pertanian-keluarga skala kecil “*input* rendah” (“pembentukan kembali kaum tani” [*repeasantization*]) bisa memberi makan populasi dunia yang jauh lebih besar, dan jauh lebih urban, daripada ketika “petani kecil” menjadi penghasil utama pangan dunia?

Kompleksitas analitis dinamika kelas dalam proses perubahan agraria yang disajikan dalam buku kecil ini merupakan suatu upaya untuk menggeluti sejumlah kompleksitas dunia nyata kapitalisme kontemporer. Dunia nyata kapitalisme itu terbentang mulai dari bursa berjangka di Chicago dan markas korporasi agribisnis hingga diferensiasi kelas di zona-zona “kapitalisme petani kecil” yang terus berubah dan berkembang, sampai ke pertarungan pa-

ra petani dan pekerja miskin sebagaimana digambarkan dalam bagian Pendahuluan. Tantangan-tantangan yang dihadirkan oleh kompleksitas itu dalam praktiknya dihadapi oleh para aktivis yang mencoba untuk terlibat dalam membangun dan menjaga politik progresif perubahan agraria di berbagai skala, dari skala paling lokal hingga global. Demi mencapai tujuan itu, slogan-slogan yang memesonakan dan daftar para pahlawan dan para bajingan, orang-orang baik dan orang-orang jahat, tidak mencukupi. Gerakan-gerakan aktivis membutuhkan analisis yang efektif atas realitas sosial yang kompleks dan kontradiktif yang mereka usahakan untuk diubah. Dalam sebuah dunia kapitalistik, usaha memahami dinamika kelas harus selalu menjadi titik berangkat dan merupakan elemen sentral dalam analisis tersebut.

Catatan

¹ Edelman (2003) menyajikan suatu survei yang bermanfaat mengenai gerakan tersebut.

GLOSARIUM

Catatan: rujukan silang ke istilah yang terdapat dalam glosarium ini disajikan dalam cetak miring.

Agribisnis

Korporasi agribisnis di berbagai skala, termasuk skala global, yang berinvestasi dalam pertanian; lihat juga *korporasi input pertanian* dan *korporasi pangan hasil pertanian*.

Akumulasi dalam kapitalisme

Akumulasi laba yang diinvestasikan dalam produksi (atau perdagangan, atau keuangan) yang ditujukan untuk menghasilkan lebih banyak laba; lihat juga *reproduksi yang diperluas*.

Akumulasi primitif

Bagi Marx adalah proses historis yang di dalamnya beberapa kelas kunci dalam kapitalisme terbentuk; bagi beberapa orang lain, akumulasi primitif adalah proses yang terus berlanjut di dalam kapitalisme yang sudah mapan itu, dan sering kali proses itu bertumpu pada beberapa mekanisme pemaksaan “ekstraekonomi”, juga dalam relasinya dengan *penutupan akses* atas tanah, hutan, sumber air, dan lain-lahan.

Bagi hasil

Praktik yang di dalamnya pemilik tanah memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dan kadang pemilik tanah itu menyediakan sarana kerja, dengan imbalan bagi hasil panen dari tanaman yang ditanam di tanahnya itu.

Biaya awal

Jenis dan skala biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan sebuah perusahaan komoditas, termasuk mendirikan “*pertanian skala kecil*”.

Biaya konsumsi

Bagian dari produk atau pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan-kebutuhan dasar lain dari para produsen dan keluarga mereka, termasuk kebutuhan untuk *reproduksi keturunan*.

Biaya renten

Bagian dari *surplus produk* yang harus dibayarkan oleh “*petani*” atau “*petani kecil*” kepada orang lain, misalnya tuan tanah, pemberi pinjaman, dan pedagang.

Biaya seremonial

Bagian dari *surplus produk* yang digunakan dalam beberapa aktivitas kolektif di komunitas pedesaan untuk menandai, misalnya, masa panen, peristiwa-peristiwa keagamaan, atau “ritus-ritus peralihan” seperti perkawinan atau kematian.

Penyusutan kaum tani (*depeasantization*)

Proses yang di dalamnya kaum tani (*petani*) kehilangan akses atas sarana reproduksi diri mereka sebagai petani; lihat juga *akumulasi primitif*, *proletarianisasi*, “*himpitan*” *reproduksi sederhana*.

Diferensiasi

Dalam kaitan dengan *kelas*, *diferensiasi* adalah kecenderungan pemilahan *produsen komoditas skala kecil* menjadi kelas-kelas kapital dan tenaga kerja; munculnya *diferensiasi* sangat dipengaruhi oleh relasi-relasi *gender* dan dinamika relasi-relasi itu.

Eksplotasi

Perampasan *surplus produk* yang dihasilkan oleh kelas-kelas produsen, oleh kelas-kelas (dominan) nonprodusen.

Feodalisme

“Corak produksi” yang di dalamnya kelas-kelas *pemilik tanah* feodal merampas *surplus produk* dari produsen *petani* dalam bentuk sewa; lihat *biaya renten*.

Finansialisasi

Proses yang di dalamnya modal atau kapital uang menjadi dominan

terhadap bentuk-bentuk lain kapital (kapital industri, kapital perdagangan, dan lain-lain); oleh beberapa orang, finansialisasi dianggap sebagai kecenderungan khas *globalisasi* zaman sekarang dan terlihat jelas dalam krisis finansial pada 2008.

Gender

Relasi antara laki-laki dan perempuan; pembagian kepemilikan, kerja, dan pendapatan yang biasanya dibentuk oleh relasi-relasi gender yang taksetara, dengan berbagai cara; lihat juga *kerja domestik*, *reproduksi keturunan*, *pembagian kerja secara sosial*.

Globalisasi

Dianggap dan banyak diperdebatkan sebagai tahap terkini kapitalisme dunia, khususnya mulai 1970-an; globalisasi ditandai terutama oleh pasar kapital internasional dan *finansialisasi* yang tidak diatur regulasi dan adanya proyek politik *neoliberalisme*.

Hak kepemilikan bersama

Hak atas tanah dan sumberdaya-sumberdaya yang lain, misalnya sumber air, padang penggembalaan, dan hutan sumber kayu bakar, yang dimiliki bersama oleh kelompok yang diakui dan anggota-anggota kelompok itu berbagi *hak pemanfaatan* atas sumberdaya itu.

Hak pemanfaatan (*usufruct rights*)

Hak yang dimiliki petani untuk memanfaatkan tanah untuk ditanami dan menggembala ternak, memanfaatkan hutan, sumber air, dan sebagainya; hak ini dikelola sebagai *kepemilikan bersama*.

“Hilir”

Semua aktivitas yang terkait dengan komoditas pertanian ketika keluar dari lahan pertanian; contohnya adalah pemasaran, pengolahan, penjualan grosir dan eceran, dan sebagainya.

“Himpitan” reproduksi sederhana (*simple reproduction ‘squeeze’*)

Proses terjadinya tekanan atas *reproduksi* para *produsen komoditas skala kecil*, baik sebagai kapital maupun tenaga kerja; himpitan ini ditimbulkan oleh *komodifikasi subsistensi* dan sering kali menimbulkan terjadinya *penyusutan kaum tani*.

“Hulu”

Semua aktivitas yang diperlukan untuk memenuhi kondisi-kondisi pertanian sebelum pertanian itu bisa dikerjakan, meliputi akses atas tanah, tenaga kerja, sarana kerja, dan dengan komodifikasi kredit juga.

Imperialisme

Biasanya dianggap sebagai sistem penguasaan atas wilayah dan masyarakat atau negara lain yang dilakukan oleh negara imperial; bagi Lenin, imperialisme adalah “tahap terakhir” kapitalisme, tahap itu didominasi oleh negara-negara kapitalis paling maju, serta tidak mengharuskan adanya penguasaan kolonial langsung.

Kapital agraria

Kapital yang diinvestasikan dalam pertanian yang ditujukan untuk menghasilkan laba.

Kapitalisme

Sistem sosioekonomi yang didasarkan pada relasi *kelas* antara kapital dan tenaga kerja; kapitalisme terbentuk pada skala dunia.

Kelas

Relasi sosial *produksi* antara kelas-kelas produsen (tenaga kerja) dan kelas-kelas nonprodusen; lihat juga *eksploitasi*.

Kerja domestik

Aktivitas-aktivitas seperti memasak, merawat anak, dan sebagainya yang sangat penting bagi rumah tangga dan *reproduksi* sosial; *kerja domestik* biasanya dibentuk oleh relasi-relasi *gender*.

Komodifikasi

Proses yang di dalamnya elemen-elemen *produksi* dan *reproduksi* diproduksi untuk, dan didapatkan dari, pertukaran pasar dan menjadi sasaran desakan dan disiplin pasar; *kapitalisme* sangat khas karena merupakan sistem produksi komoditas yang meluas.

Komodifikasi subsistensi

Proses yang di dalamnya elemen-elemen kunci *subsistensi*, dengan demikian juga elemen-elemen kunci *reproduksi*, dari petani kecil “in-

dependen” menjadi sasaran dinamika pertukaran pasar dan berbagai desakan pasar (*komodifikasi*).

Kondisi-kondisi sosial produksi

Semua relasi, institusi, dan praktik sosial yang membentuk aktivitas *produksi* dan *reproduksi*, mencakup juga *kondisi-kondisi teknis produksi* dan *kekautan-kekuatan produktif*.

Kondisi-kondisi teknis produksi

Kekuatan-kekuatan produktif tertentu yang dikelola dalam *proses kerja*, mencakup pula *pembagian kerja teknis*.

Korporasi input pertanian

Korporasi *agribisnis* yang berinvestasi di bagian *hulu* pertanian.

Korporasi pangan hasil pertanian

Korporasi *agribisnis* yang berinvestasi di bagian *hilir* pertanian.

Merkantilisme

Sistem pengaturan politik atas perdagangan; kata sifat “*mercantile*” dalam bahasa Inggris bisa digunakan untuk menyebut sistem semacam itu, dan lebih umumnya, kata sifat ini bisa diterapkan pada aktivitas pertukaran dan komersial, juga pada mereka yang mengkhususkan diri dalam aktivitas semacam itu.

Monokultur

Pengolahan lahan luas dengan satu jenis tanaman saja, kebalikan dari sistem penanaman campuran.

Nilai lebih

Bentuk tertentu dari kerja lebih dalam kapitalisme; lihat *surplus produk*.

Neoliberalisme

Program politik dan ideologi yang ditujukan untuk “menggulung negara” serta mendukung kepentingan pasar dan para pelakunya kalangan kapitalis besar.

Panen

Ukuran produktivitas lahan: jumlah produksi tanaman yang dituai dari suatu areal lahan.

Pasar “vernakular”

Pasar yang memperjualbelikan berbagai barang dan jasa yang dalam praktiknya (*de facto*) merupakan komoditas, terutama tanah, dalam kondisi di mana hak kepemilikan pribadi yang ditetapkan secara hukum (*de jure*) masih belum ada, lemah, ambigu, dan/atau bermasalah.

Pembagian kerja secara sosial

(a) relasi-relasi sosial di antara para produsen yang relatif terspesialisasi dalam memproduksi bermacam barang dan jasa; mereka memiliki aktivitas-aktivitas yang saling melengkapi; (b) aktivitas-aktivitas bermacam kategori orang menurut posisi yang mereka duduki dalam struktur relasi sosial tertentu, terutama relasi-relasi *kelas* kapital dan tenaga kerja serta relasi-relasi *gender*.

Pembagian kerja teknis

Kombinasi berbagai tugas atau *proses kerja* yang dilakukan oleh pekerja dalam sebuah satuan tunggal *produksi*, seperti sebuah pabrik atau lahan pertanian.

Pembajakan kekayaan hayati

Sebutan yang diberikan oleh para pengkritik *korporasi input pertanian* yang berupaya mematenkan “hak kekayaan intelektual” atas materi genetik tanaman.

Pemilik tanah

Kelas yang didasarkan pada penguasaan efektif atas tanah, baik di zaman prapitalis seperti *feodalisme* maupun di dalam kapitalisme, dengan adanya hak kepemilikan pribadi atas tanah yang sudah *dikomodifikasi*.

Penutupan akses atas lahan bersama

Proses privatisasi tanah dan sumberdaya-sumberdaya lain yang dulunya dikelola sebagai *hak kepemilikan bersama*, entah proses itu dijalankan secara *de facto* (dalam praktik) maupun *de jure* (dengan status hukum); lihat juga *pasar “vernakular”*.

Petani (*peasant*)

Secara luas dan sering dengan longgar sekali digunakan untuk menye-

but “*petani kecil*” atau “*petani keluarga*” yang berorientasi *subsistensi* di berbagai kondisi dan periode sejarah, mulai dari peradaban agraria prakapitalis hingga kapitalisme sekarang, terutama di negara-negara Selatan.

Petani kecil (*small farmer*)

Biasanya digunakan untuk menyebut petani yang ukuran tanahnya ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja keluarga, dan kadang petani kecil ini dianggap berorientasi *subsistensi* atau *reproduksi sederhana*; dengan definisi ini, ukuran lahan sangat bervariasi menurut jenis pertaniannya.

Petani keluarga (*family farmer*)

Umumnya diterapkan dalam pertanian yang hanya menggunakan tenaga kerja keluarga; kadang diterapkan dalam pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh keluarga, tetapi tidak dikerjakan dengan tenaga kerja keluarga.

Petani marginal

Petani yang tidak mendapatkan bagian terbesar kebutuhan *reproduksi* mereka dari pertanian “mereka sendiri”; petani marginal adalah komponen penting dalam kelas-kelas pekerja; lihat juga *semiproletarianisasi*.

Surplus produk

Apa yang diproduksi melebihi kebutuhan *reproduksi sederhana* produsen, sehingga surplus produk merupakan produk dari “surplus tenaga kerja” mereka; ketika surplus produk itu dirampas pihak lain, maka surplus produk itu menjadi basis *eksploitasi*.

Produksi

Proses yang di dalamnya tenaga kerja digunakan untuk mengubah alam guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Produksi berlebih (*overproduction*)

Kecenderungan intrinsik kompetisi kapitalis dan akumulasi; dalam produksi berlebih, barang yang diproduksi ternyata lebih banyak daripada jumlah yang bisa dijual untuk mendapatkan tingkat rata-rata

keuntungan, sehingga produksi berlebih menimbulkan “devalorisasi” kapital yang diinvestasikan dalam produksi.

Produksi/produsen komoditas skala kecil

Produksi komoditas “skala kecil” dalam kapitalisme yang mengombinasikan posisi dari kapital dan tenaga kerja, entah dalam sebuah rumah tangga atau secara individu; *produksi* komoditas skala kecil tunduk pada *diferensiasi* kelas.

Produktivitas

Seberapa banyak hasil yang bisa diproduksi dengan penggunaan sejumlah tertentu sumberdaya; lihat juga *produktivitas tenaga kerja*, *panen*.

Produktivitas energi

Satuan energi (kalori) yang digunakan untuk memproduksi sejumlah hasil panen yang memiliki energi atau nilai kalori tertentu.

Produktivitas tenaga kerja

Banyaknya barang (atau jasa) yang bisa dihasilkan oleh seseorang dengan menggunakan upaya tertentu yang umumnya diukur atau disetarakan menurut jumlah jam kerja yang digunakan atau waktu kerja.

Produktivitas lahan

Lihat *panen*.

Proletarianisasi

Proses yang di dalamnya kelas-kelas pekerja terbentuk dari orang-orang yang sebelumnya adalah petani, perajin “independen”, dan sebagainya; lihat juga *komodifikasi subsistensi*, *tenaga kerja*, *akumulasi primitif*.

Proses kerja (labour process)

Pengorganisasian dan berbagai aktivitas tenaga kerja dalam proses produksi tertentu; lihat juga *kondisi-kondisi teknis produksi*, *kondisi-kondisi sosial produksi*.

Rantai komoditas

Semua aktivitas yang menghubungkan produksi komoditas dengan konsumsi akhir; dalam kaitan dengan komoditas pertanian, rantai

komoditas adalah perjalanan dari lahan petani hingga piring konsumen, pelaku-pelaku dan institusi-institusi, relasi-relasi dan praktik-praktik, yang membentuk perjalanan komoditas itu.

Pembentukan kembali kaum tani (*repeasantization*)

Proses yang di dalamnya mantan *petani marginal*, kaum *semiproletariat*, atau *proletariat* mengerjakan lagi pertanian sebagai komponen utama *reproduksi* mereka.

Reproduksi

Usaha untuk menjamin kondisi-kondisi kehidupan dan kondisi-kondisi *produksi* masa depan dengan mengambil dari apa yang diproduksi sekarang atau yang didapatkan sekarang.

Reproduksi keturunan

Aktivitas produksi dan membesarkan generasi selanjutnya; reproduksi keturunan biasanya dibentuk oleh relasi-relasi *gender*.

Reproduksi sederhana

Reproduksi yang terjadi pada tingkat yang sama dengan tingkat *produksi* dan tingkat konsumsi; yaitu *reproduksi* yang dilakukan tanpa *akumulasi*.

Reproduksi yang diperluas

Sebutan lain untuk *akumulasi* kapital dan investasi kapital yang digunakan untuk memperluas skala *produksi* agar menghasilkan lebih banyak laba; kebalikan dari *reproduksi sederhana*.

Rezim pangan internasional

Sistem relasi, aturan, dan praktik yang membentuk struktur pembagian kerja internasional dan perdagangan pertanian dalam kapitalisme dunia sejak 1870-an.

Rezim tenaga kerja

Berbagai cara mengerahkan atau menggerakkan tenaga kerja serta mengorganisir tenaga kerja itu dalam produksi.

Sektor pertanian

Sektor pertanian dalam pertanian *kapitalisme* modern beserta selu-

ruh kepentingan ekonomi, institusi-institusi khusus, dan aktivitas-aktivitasnya di bagian *hulu* dan *hilir* pertanian yang memengaruhi berbagai aktivitas dan *reproduksi* petani.

Semiproletarianisasi

Proses pembentukan kelas-kelas pekerja yang tidak sepenuhnya kehilangan tanah atau alat-alat *reproduksi* yang lain, misalnya dalam beberapa sistem yang didasarkan pada tenaga kerja migran pedesaan.

Subsistensi

Banyak digunakan dalam menyebut usaha untuk memenuhi kondisi-kondisi *reproduksi sederhana* di kalangan *petani*, *petani keluarga*, atau *petani kecil*; biasanya istilah ini digunakan untuk merujuk khusus pada *produksi* makanan yang ditujukan untuk konsumsi petani keluarga atau petani kecil itu sendiri; lihat *komodifikasi subsistensi*.

Tapak ekologis

Luasan areal daratan dan laut yang secara biologis produktif, dan jumlah energi yang digunakan oleh jenis teknologi tertentu untuk (a) meregenerasi sumberdaya yang dikonsumsi oleh populasi manusia dan (b) menyerap dan membuat limbah yang dihasilkan oleh teknologi itu menjadi tidak berbahaya.

Tenaga kerja

Kapasitas bekerja yang dimiliki oleh pekerja sebagai komoditas utama atau komoditas satu-satunya yang dijual oleh pekerja untuk mendapatkan upah yang bisa digunakan untuk membeli sarana *reproduksi*; tenaga kerja sangat penting dalam cara produksi kapitalis.

Kekuatan-kekuatan produktif

Teknologi dan teknis budidaya, termasuk kemampuan orang mengorganisir diri mereka untuk membuat keputusan terkait *produksi*, menjalankan keputusan itu, dan untuk melakukan inovasi; semua itu dibentuk oleh *kondisi-kondisi sosial produksi*.

DAFTAR PUSTAKA

- * bacaan berikutnya yang disarankan sebagai bacaan pengantar
 - ** bacaan berikutnya yang disarankan sebagai bacaan lanjutan
- ALBRITTON, R. 2009. *Let Them Eat Junk: How Capitalism Creates Hunger and Obesity*. London (Inggris): Pluto Press.
- AMIN, S. 1976. *Unequal Development: An Essay on the Social Formation of Peripheral Capitalism*. Hassocks (Inggris): The Harvester Press.
- _____. 2003. "World Poverty, Pauperization and Capital Accumulation." *Monthly Review* 55 (5): 1–9.
- ARAGHI, F. 2009. "The Invisible Hand and Visible Foot: Peasant Dispossession and Globalization." Dalam *Peasants and Globalization: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*, disunting oleh A.H. AKRAM-LODHI dan C. KAY, 111–147. London (Inggris): Routledge.
- ARRIGHI, G. 1994. *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times*. London (Inggris): Verso.
- ** ____ dan J.W. Moore. 2001. "Capitalist Development in World Historical Perspective." Dalam *Phases of Capitalist Development: Booms, Crisis and Globalizations*, disunting oleh R. ALBRITTON, M. ITOH, R. WESTRA, dan A. ZUEGE, 56–75. London (Inggris): Palgrave.
- BAGCHI, A.K. 2009. "Nineteenth Century Imperialism and Structural Transformation in Colonized Countries." Dalam *Peasants and Globalization: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Questions*, disunting oleh A.H. AKRAM-LODHI dan C. KAY, 83–110. London (Inggris): Routledge.
- BANAJI, J. 1990. "Illusions about the Peasantry: Karl Kautsky and the Agrarian Question." *Journal of Peasant Studies* 17 (2): 288–307.

- _____. 1997. "Modernizing the Historiography of Rural Labour: An Unwritten Agenda." Dalam *Companion to Historiography*, disunting oleh M. BENTLEY, 83–96. London (Inggris): Routledge.
- _____. 2002. "The Metamorphoses of Agrarian Capitalism." *Journal of Agrarian Change* 2 (1): 96–119.
- _____. 2007. "Islam, the Mediterranean and the Rise of Capitalism." *Historical Materialism* 15 (1): 47–74.
- _____. 2010. *Theory as History: Essays on Mode of Production and Exploitation*. Leiden (Belanda): Brill.
- BARKER, J. 1989. *Rural Communities under Stress: Peasant Farmers and the State in Africa*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- BAUER, A.J. 1979. "Rural Workers in Spanish America: Problems of Peonage and Oppression." *Hispanic American Historical Review* 59 (1): 34–63.
- BELLO, W. 2009. *The Food Wars*. London (Inggris): Verso.
- Bernstein, H. 1981. "Notes on State and Peasantry: The Tanzanian Case." *Review of African Political Economy* 8 (21): 44–62.
- BHARADWAJ, K. 1985. "A View of Commercialisation in Indian Agriculture and the Development of Capitalism." *Journal of Peasant Studies* 12 (4): 7–25.
- **BORRAS JR., S.M., M. EDELMAN, dan C. KAY. 2008. "Transnational Agrarian Movements: Origins and Politics, Campaigns and Impact." *Journal of Agrarian Change* 8 (2–3): 169–204.
- BRAY, F. 1986. *The Rice Economies: Technology and Development in Asian Societies*. Oxford (Inggris): Basil Blackwell.
- BREMAN, J. 1996. *Footloose Labour: Working in India's Informal Economy*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- BRENNER, R.P. 2001. "The Low Countries in the Transition to Capitalism." *Journal of Agrarian Change* 1 (2): 169–241.
- BRYCESON, D.F. 1999. "African Rural Labour, Income Diversification and Livelihood Approaches: A Long-Term Development Perspective." *Review of African Political Economy* 26 (80): 171–189.

- BURCH, D. 2005. "Production, Consumption and Trade in Poultry: Corporate Linkages and North-South Supply Chains." Dalam *Cross-continental Food Chains*, disunting OLEH N. FOLD dan B. PRITCHARD, 166–178. London (Inggris): Routledge.
- BYRES, T.J. 1981. "The New Technology, Class Formation and Class Action in the Indian Countryside." *Journal of Peasant Studies* 8 (4): 405–454.
- _____. 1991. "The Agrarian Question and Differing Forms of Capitalist Agrarian Transition: An Essay with Reference to Asia." Dalam *Rural Transformation in Asia*, disunting oleh J. BREMAN dan S. MUNDLE, 3–76. Delhi (India): Oxford University Press.
- _____. 1996. *Capitalism from Above and Capitalism from Below: An Essay in Comparative Political Economy*. London (Inggris): Palgrave Macmillan.
- CHAUVEAU, J.P. dan P. RICHARDS. 2008. "West African Insurgencies in Agrarian Perspective: Côte d'Ivoire and Sierra Leone Compared." *Journal of Agrarian Change* 8 (4): 515–552.
- CHAYANOV, A.V. 1966 [1925]. *The Theory of Peasant Economy*. Disunting oleh D. THORNER, B. KERBLAY, dan R.E.F. SMITH. Illinois (Amerika Serikat): Richard D. Irwin Inc. for the American Economic Association.
- _____. 1991 [1927]. *The Theory of Peasant Co-operatives*. Diterjemahkan oleh D.W. BENN. London (Inggris): I.B. Tauris.
- **CHIMHOWU, A. dan P. WOODHOUSE. 2006. "Customary vs Private Property Rights? Dynamics and Trajectories of Vernacular Land Markets in Sub-Saharan Africa." *Journal of Agrarian Change* 6 (3): 346–371.
- CHONCHOL, J. 1970. "Eight Fundamental Conditions of Agrarian Reform in Latin America." Dalam *Agrarian Problems and Peasant Movements in Latin America*, disunting oleh R. STAVENHAGEN, 159–172. New York (Amerika Serikat): Doubleday.
- CORDELL, D.D., J.W. GREGORY, dan V. PINCHÉ. 1996. *Hoe and Wage: A Social History of a Circular Migration System in West Africa*. Boulder, Colorado (Amerika Serikat): Westview Press.

- COWEN, M. dan R. SHENTON. 1991a. "The Origin and Course of Fabian Colonialism in Africa." *Journal of Historical Sociology* 4 (2): 143–174.
- _____. 1991b. "Bankers, Peasant and Land in British West Africa, 1905–1937." *Journal of Peasant Studies* 19 (1): 26–58.
- **CRONON, W. 1991. *Nature's Metropolis: Chicago and the Great West*. New York (Amerika Serikat): W.W. Norton.
- **CROSBY, A.W. 1986. *Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900–1900*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- DAVIRON, B. 2002. "Small Farm Production and the Standardization of Tropical Products." *Journal of Agrarian Change* 2 (2): 162–184.
- DAVIS, M. 2001. *Late Victorian Holocaust: El Niño Famines and the Making of the Third World*. London (Inggris): Verso.
- **_____. 2006. *Planet of Slums*. London (Inggris): Verso
- DESMARAIS, A.A. 2007. *La Via Campesina: Globalization and the Power of Peasants*. Halifax (Inggris): Fernwood Publishing, dan London (Inggris): Pluto Press.
- DJURFELDT, G. 1981. "What Happened to the Agrarian Bourgeoisie and Rural Proletariat under Monopoly Capitalism? Some Hypotheses Derived from the Classic of Marxism on the Agrarian Question." *Acta Sociologica* 24 (3): 167–191.
- DUNCAN, C.A.M. 1996. *The Centrality of Agriculture: Between Humankind and the Rest of Nature*. Montreal (Kanada): McGill-Queen's University Press.
- EDELMAN, M. 1999. *Peasants Against Globalization: Rural Social Movements in Costa Rica*. Stanford (Amerika Serikat): Stanford University Press.
- **_____. 2003. "Transnational Peasant and Farmer Movements and Networks." Dalam *Global Civil Society Yearbook 2003*, disunting oleh M. KALDOR, H. ANHEIER, dan M. GLASIUS, 185–220. Oxford (Inggris): Oxford University Press.
- ELLIS, F. 1999. "Household Strategies and Rural Livelihood Diversification." *Journal of Development Studies* 35 (1): 1–38.

- FRANCKS, P. 2006. *Rural Economic Development in Japan: From the Nineteenth Century to the Pacific War*. London (Inggris): Routledge.
- FRANK, A.G. 1967. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. New York (Amerika Serikat): Monthly Review Press.
- *FRIEDMANN, H. 1990. "The Origins of Third World Food Dependence." Dalam *The Food Question: Profits Versus People?*, disunting oleh H. BERNSTEIN, B. CROW, M. MACKINTOSH, dan C. MARTIN, 13–31. London (Inggris): Earthscan, dan New York (Amerika Serikat): Monthly Review Press.
- _____. 1993. "The Political Economy of Food: A Global Crisis." *New Left Review* 197: 29–57.
- **_____. 2004. "Feeding the Empire: The Pathologies of Globalized Agriculture." *The Socialist Register* 2005 41: 124–143.
- _____. 2006. "Focusing on Agriculture: A Comment on Henry Bersnstein's 'Is There Agrarian Question in the 21st Century?'" *Canadian Journal of Development Studies* 27 (4): 461–465.
- _____ dan P. MCMICHAEL. 1989. "Agriculture and the State System: The Rise and Decline of National Agricultures, 1870 to the Present." *Sociologia Ruralis* 29 (2): 93–117.
- GIBBON, P. dan M. NEOCOSMOS. 1985. "Some Problems in the Political Economy of 'African Socialism'." Dalam *Contradictions of Accumulation in Africa: Studies in Economy and State*, disunting oleh H. BERSNTEIN dan B.K. CAMPBELL, 153–206. Beverly Hills, California (Amerika Serikat): Sage Publications.
- GILSENAN, M. 1982. *Recognizing Islam: An Anthropologist's Introduction*. London (Inggris): Croom Helm.
- GOODY, J. 2004. *Capitalism and Modernity: The Great Debate*. Cambridge (Inggris): Polity Press.
- GRIGG, D.B. 1974. *The Agricultural System of the World: An Evolutionary Approach*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- HARRISS, J. 1987. "Capitalism and Peasant Production: The Green Revolution in India." Dalam *Peasants and Peasant Societies: Selected*

- Readings*, disunting oleh T. SHANIN. Edisi kedua. Oxford (Inggris): Blackwell.
- HARRISS-WHITE, B. dan N. GOOPTU. 2000. "Mapping India's World of Unorganized Labour." *The Socialist Register* 2001 37: 89–118.
- HART, G. 1991. "Engendering Everyday Resistance: Gender, Patronage, and Production Politics in Rural Malaysia." *Journal of Peasant Studies* 19 (1): 93–121.
- _____. 1991. "The Dynamics of Diversification in an Asian Rice Region." Dalam *Development or Deterioration? Work in Rural Asia*, disunting oleh B. KOPPEL, J.N. HAWKINS, dan W. JAMES, 47–71. Boulder, Colorado (Amerika Serikat): Lynne Rienner.
- *HARTMANN, B. dan J.K. BOYCE. 1983. *A Quiet Violence: View from a Bangladesh Village*. London (Inggris): Zed Books.
- HARVEY, D. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford (Inggris): Oxford University Press.
- HAZELL, P., C. POULTON, S. WIGGINS, dan A. DORWARD. 2007. "The Future of Small Farms for Poverty Reduction and Growth." 2020 Discussion Paper 42. Washington, D.C. (Amerika Serikat): International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- HILFERDING, R. 1981 [1910]. *Finance Capital: A Study of the Latest Phase of Capitalist Development*. London (Inggris): Routledge & Kegan Paul.
- HILL, P. 1963. *The Migrant Cocoa-Farmers of Southern Ghana: A Study in Rural Capitalism*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD). 2001. *Rural Poverty Report 2001: The Challenge of Ending Rural Poverty*. Oxford (Inggris): Oxford University Press.
- KAUTSKY, K. 1988 [1899]. *The Agrarian Question*. Dua jilid. Diterjemahkan oleh P. BURGESS. London (Inggris): Zwan.
- KAY, C. 1974. "Comparative Development of the European Manorial System and the Latin American Hacienda System." *Journal of Peasant Studies* 2 (1): 69–98.
- KAY, G. 1975. *Development and Underdevelopment: A Marxist Analysis*. London (Inggris): Macmillan.

- KERKVLIT, B.J.T. 2009. "Everyday Politics in Peasant Societies (and Ours)." *Journal of Peasant Studies* 36 (1): 227–243.
- *KITCHING, G. 1982. *Development and Underdevelopment in Historical Perspective: Populism, Nationalism and Industrialization*. London (Inggris): Methuen.
- ** _____. 2001. *Seeking Social Justice through Globalization: Escaping a Nationalist Perspective*. University Park, Pennsylvania (Amerika Serikat): Pennsylvania State University Press.
- **KLOPPENBURG JR., J.R. 2004. *First the Seed: The Political Economy of Plant Biotechnology*. Edisi kedua. Madison (Amerika Serikat): University of Wisconsin Press.
- KONING, N. 1994. *The Failure of Agrarian Capitalism: Agrarian Politics in the United Kingdom, Germany, the Netherlands and the USA, 1846–1919*. London (Inggris): Routledge.
- LENIN, V.I. 1964a [1899]. "The Development of Capitalism in Russia: The Process of the Formation of a Home Market for Large-Scale Industry." Dalam *Collected Works, Volume 3*, 21–607. Moskow (Uni Soviet): Progress Publishers.
- _____. 1964b [1916]. "Imperialism, the Highest Stage of Capitalism." Dalam *Collected Works, Volume 22*, 185–304. Moskow (Uni Soviet): Progress Publishers.
- LOW, D.A. 1996. *The Egalitarian Moment: Asia and Africa, 1950–1980*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- MAMDANI, M. 1987. "Extreme but Not Exceptional: Towards an Analysis of the Agrarian Question in Uganda." *Journal of Peasant Studies* 14 (2): 191–225.
- _____. 1996. *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism*. Cape Town (Afrika Selatan): David Philip.
- _____. 2009. *Saviors and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror*. Cape Town (Afrika Selatan): HSRC Press.
- MANN, S.A. dan J.M. DICKINSON. 1978. "Obstacles to the Development of a Capitalist Agriculture." *Journal of Peasant Studies* 5 (4): 466–481.

- MARTINEZ-ALIER, J. 2002. *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Cheltenham (Inggris): Edward Elgar.
- MARX, K. 1973. *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft)*. Diterjemahkan oleh MARTIN NICOLAUS. Harmondsworth (Inggris): Penguin.
- _____. 1976 [1867]. *Capital, Volume I*. Diterjemahkan oleh BEN FOWKES. Harmondsworth (Inggris): Penguin.
- *MAZOYER, M. dan L. ROUDART. 2006. *A History of World Agriculture from the Neolithic Age to the Current Crisis*. London (Inggris): Earthscan.
- MBILINYI, M. 1990 “‘Structural Adjustmet’, Agribusiness and Rural Women in Tanzania.” Dalam *The Food Question: Profits Versus People?*, disunting oleh H. BERNSTEIN, B. CROW, M. MACKINTOSH, dan C. MARTIN, 111–124. London (Inggris): Earthscan, dan New York (Amerika Serikat): Monthly Review Press.
- MCMICHAEL, P. 2006. “Reframing Development: Global Peasant Movements and the New Agrarian Question.” *Canadian Journal of Development Studies* 27 (4): 471–483.
- MENDES, C. 1992. “The Defence of Life.” *Journal of Peasant Studies* 20 (1): 160–176.
- MOORE J.W. 2003. “‘The Modern World-System’ as Enviromental History? Ecology and the Rise of Capitalism.” *Theory & Society* 32 (3): 307–377.
- _____. 2010a. “‘Amsterdam is Standing on Norway’ Part I: The Alchemy of Capital, Empire and Nature in the Diaspora of Silver, 1545–1648.” *Journal of Agrarian Change* 10 (1): 33–68.
- _____. 2010b. “‘Amsterdam is Standing on Norway’ Part II: The Global North Atlantic in the Ecological Revolution of the Long Seventeenth Century.” *Journal of Agrarian Change* 10 (2): 188–227.
- MYRDAL, G. 1968. *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*. Tiga jilid. New York (Amerika Serikat): Pantheon Books.
- PANITCH, L., C. LEYS, G. ALBO, dan D. COATES. 2000. “Preface.” *The Socialist Register* 2001 37: vii–xi.

- PATEL, R. 2007. *Stuffed & Starved: Markets, Power and the Hidden Battle for the World Food System*. London (Inggris): Portobello Books.
- PETERS, P.E. 1994. *Dividing the Commons: Politics, Policy, and Culture in Botswana*. Charlottesville (Amerika Serikat): University of Virginia Press.
- ** _____. 2004. "Inequality and Social Conflict over Land in Africa". *Journal of Agrarian Change* 4 (3): 269–314.
- POLANYI, K., 1957 [1944]. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston (Amerika Serikat): Beacon Press.
- POMERANZ, K. 2000. *The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy*. Princeton (Amerika Serikat): Princeton University Press.
- POST, C. 1995. "The Agrarian Origins of US Capitalism: The Transformation of the Northern Countryside before the Civil War." *Journal of Peasant Studies* 22 (3): 389–445.
- POTTIER, J. 2002. *Re-imagining Rwanda: Conflict, Survival and Disinformation in the Late Twentieth Century*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- PREOBRAZHENSKY, E. 1965 [1926]. *The New Economics*. Diterjemahkan oleh Brian Pearce. Oxford (Inggris): Clarendon Press.
- RICHARDS, P. 1986. *Coping with Hunger: Hazard and Experiment in an African Rice Farming System*. London (Inggris): Allen & Unwin.
- SAHLINS, M. 1972. *Stone Age Economics*. Chicago (Amerika Serikat): Aldine.
- SCHWARTZ, H.M. 2000. *States Versus Markets: The Emergence of a Global Economy*. Edisi kedua. Houndmills, Basingstoke (Inggris): Palgrave.
- SCOTT, J.C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.
- _____. 2005. "Afterword to 'Moral Economies, State Spaces, and Categorical Violence'." *American Anthropologist* 107 (3): 395–402.

- SEN, A. 1981. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford (Inggris): Oxford University Press.
- SENDER, J. dan S. SMITH. 1986. *The Development of Capitalism in Africa*. London (Inggris): Methuen.
- SHANIN, T. 1986. "Chayanov's Message: Illuminations, Miscomprehensions, and the Contemporary 'Development Theory'." Pengantar dalam *The Theory of Peasant Economy* karya A.V. Chayanov, 1–24. Edisi kedua. Madison (Amerika Serikat): University of Wisconsin Press.
- SHELLEY, T. 2007. *Exploited: Migrant Labour in the New World Economy*. London: Zed Books.
- SILVER, B.J. dan G. ARRIGHI. 2000. "Workers North and South." *The Socialist Register* 2001 37: 53–76.
- STOLCKE, V. dan M.M. HALL. 1983. "The Introduction of Free Labour on São Paulo Coffee Plantations." *Journal of Peasant Studies* 10 (2/3): 170–200.
- STOLER, A.L. 1985. *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979*. New Haven (Amerika Serikat): Yale University Press.
- STRIFFLER, S. 2004. "Class Formation in Latin America: One Family's Enduring Journey between Country and City." *International Labor and Working-Class History* 65: 11–25.
- THERBORN, G. 2007. "After Dialectics: Radical Social Theory in a Post-Communist World." *New Left Review* 43: 63–114.
- **VAN DER PLOEG, J.D. 2008. *The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization*. London (Inggris): Earthscan.
- VON FREYHOLD, M. 1979. *Ujamaa Villages in Tanzania: Analysis of a Social Experiment*. London (Inggris): Heinemann Educational Books.
- WALLERSTEIN, I. 1979. *The Capitalist World-Economy*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press, dan Paris (Prancis): Editions de la Maison des Sciences de l'Homme.
- WARREN, B. 1980. *Imperialism: Pioneer of Capitalism*. London (Inggris): Verso.

- *WEIS, T. 2007. *The Global Food Economy: The Battle for the Future of Farming*. London (Inggris): Zed Books.
- WITHCOMBE, E. 1980. "Whatever Happened to the Zamindars?" Dalam *Peasants in History: Essays in Honor of Daniel Thorner*, disunting oleh E.J. HOBSBAWM, W. KULA, A. MITRA, K.N. RAJ, dan I. SACHS. Kalkutta (India): Oxford University Press.
- WILLIAMS, G. 1976. "Talking the Path of Peasants." Dalam *The Political Economy of Contemporary Africa*, disunting oleh P.C.W. GUTKIND DAN I. WALLERSTEIN. Beverly Hills, California (Amerika Serikat): Sage Publications.
- *WOLF, E. 1969. *Peasants*. New Jersey (Amerika Serikat): Prentice Hall.
- ** _____. 1969. *Peasant Wars of the Twentieth Century*. New York (Amerika Serikat): Harper & Row.
- WOLFORD, W. 2003. "Producing Community: The MST and Land Reform Settlements in Brazil." *Journal of Agrarian Change* 3 (4): 500–520.
- WOOD, E.M. 2003. *Empire of Capital*. London (Inggris): Verso.
- WORLD BANK. 2007. *World Development Report 2008: Agriculture for Development*. Washington, D.C. (Amerika Serikat): World Bank.

INDEKS

A

Afrika 3, 18, 19, 21, 22, 53–58, 62, 65, 69,
71–80, 92, 93, 95, 97, 101, 102, 134,
135, 138, 145, 152, 158, 164
Barat 50
Sub-Sahara 2, 18, 20, 56, 68–71, 104,
134, 150–151, 163, 164
Utara 2, 29, 52, 86, 101, 150
Afrika Selatan 48, 56, 69, 73
agribisnis 63, 92, 93, 102, 109, 112, 115,
120, 154, 157, 162, 170
akumulasi 1, 12, 27, 30–32, 35–36, 38,
40, 42, 46, 50, 54, 57, 72, 78, 79,
110, 116, 119, 120, 132, 142, 145,
149, 153, 160
primitif 38, 40, 42, 44–45, 51, 76–79,
106, 120, 121, 132, 143
rezim (“rezim akumulasi”) 49
alam/alamiah 17–21, 24, 26–27, 91–96,
123–126
Aljazair 133, 136, 166
Amerika Latin 5, 11, 41, 48, 52, 53, 55,
59–63, 65–66, 71, 72, 74, 75, 78, 81,
101, 102, 118, 134, 137, 138, 145, 150
Amerika Selatan 44, 71, 94, 106
Amerika Serikat (Amerika) 18, 19, 20,
33, 41, 43, 52, 54, 56, 60, 73, 76, 77,
87, 93, 107, 130, 139
Amerika Tengah 29, 60, 62, 64, 71, 86
Amerika Utara 54, 59, 66, 106, 118, 119,
128, 130
Argentina 33, 58, 60, 62, 63, 91, 112
Asia 2, 29, 39, 42, 44, 53–58, 62, 64,
71–75, 78, 80, 86, 93–97, 101, 102,
138, 145, 150, 152

B

biaya
konsumsi 24, 27, 144, 149
penggantian 25–27, 29, 144

renten 27, 28, 31–32, 67, 144

seremonial 27, 29, 31

Bolivia 63, 136

Brasil 3, 6, 9–12, 33, 54, 58–60, 63, 64,
73, 91, 107, 112, 139, 167–168

C

Chili 33, 60, 62, 63, 107, 138

E

ekonomi

aktivitas 20, 29, 32, 109, 150

perkembangan/pembangunan/
kemajuan 72, 78–80, 105, 111, 119,
133, 134

ekonomi politik 1–15, 21, 30–32, 132, 141

eksploitasi 12, 27–30, 37, 38, 46–48,

50, 66, 69, 78–79, 121, 127–132,

141–142, 161, 164, 165

swaeksploitasi/mengeksploitasi diri
sendiri 130, 142

ekspor 10, 11, 33, 45, 54, 57, 62–63, 66,
68, 70–72, 79, 91–97, 100, 103,
105–106, 117–118

Ekuador 6, 8, 10, 11

Eropa 2, 3, 23, 29, 33, 39, 41, 48, 51–58,
60, 61, 63, 66, 70, 75, 77–79, 81,
88, 91–95, 97, 99, 100, 101, 106,
107, 112, 113, 115, 118, 119, 136, 148,
150, 169

F

feodalisme 39, 41, 44, 53, 60

G

gender 10–12, 25–27, 86, 144, 148, 162,
163–165

kekerasan 12

Gerakan Pekerja Tunakisma 64

Ghana 70, 135

globalisasi 58, 81, 105, 106, 109–122,
133, 141, 151, 166, 167

H

hacienda 11, 48, 60–63, 81

hak kepemilikan (*property rights*) 39,
64, 65, 68, 115, 136, 137, 143

hak pemanfaatan/hak garap (*usufruct
right*) 8, 10

hutan 7, 10, 46, 52, 66, 68, 70, 71, 93,
95, 164

I

imigrasi/imigran 58, 60, 63, 94, 158
imperialisme 56–58

ekologis 87

India 3, 4, 6–10, 18, 19, 21, 22, 55, 63,
64, 66–70, 72–74, 76, 81, 88, 97,
101, 104, 114, 117, 134, 137–139,
147, 148, 152, 153, 162, 165, 168, 169

Indonesia 71

industri pangan hasil pertanian 89,
100, 112, 114, 116, 124, 128, 130,
132, 154

industrialisasi 2, 3, 13, 38, 42, 45, 50,
52, 56, 79, 88, 99, 101, 105–108,
115, 117, 125, 126

Inggris 12, 15, 38–41, 43, 47, 49, 52–60,
64–67, 76, 77, 81, 88, 90, 95, 97,
101, 103, 107, 110, 121, 126, 139, 143

inkorporasi 65, 71, 72, 78, 92, 94, 130,
166

investasi 35, 36, 37, 40, 43, 45, 46, 50,
51, 56, 57, 65, 66, 77, 103, 107, 112,
117, 122, 123, 127, 128, 138, 149, 154

Iran 137, 138

J

Jepang 3, 42–45, 52, 56, 66, 81, 137, 139

K

Karibia 53, 54, 59, 71–73, 91, 121, 150
kelaparan 67, 97, 153

kelas

diferensiasi 5, 41, 43, 67, 144,
145–154, 170

kekerasan 12, 165

pertarungan 139, 162–165

sosiologi 122, 158, 159–162

kemiskinan 12, 21, 67, 107, 136, 150

Kenya 48, 69

keterbelakangan 76, 78–79

kolonialisme 51, 53–81, 83, 87, 88, 93,
101, 133, 134, 152

warisan 12, 62, 164

komersialisasi paksa 66, 70, 75, 143

komodifikasi 31, 40, 68, 111, 118, 133–
135, 142–145, 147, 152, 154, 161, 165

subsistensi 5, 47, 48, 67, 72, 75, 89,
95, 120, 134, 135, 143, 145

komoditas

produksi 5, 35, 38–41, 44, 46, 47, 48,
67–72, 74, 75, 94, 118, 128, 129, 135,
139, 142–146, 148, 152, 154–157,
163, 168

relasi 103, 117, 139, 143, 145, 152, 160

komunitas 4, 27, 40, 134, 168

Korea Selatan 42, 45

Kuba 60, 63, 133, 136, 137, 166

L

La Via Campesina 64, 167, 168

land reform 44, 45, 102, 135, 136–139, 167

Lenin 41, 43, 56–58, 145–146, 155–156,
159

Lesotho 69

lingkungan 11, 17, 20, 21, 105, 113, 115,
124, 126

M

Malawi 69

Malaysia 73, 133

Marx 12–15, 17, 21–25, 32, 35–37, 40, 41,
46–50, 74, 76–78, 80, 81, 88, 98,
119, 131, 143, 146, 152

masyarakat prapitalis 5, 31, 38, 39,
41, 50, 76, 77, 79–81

mata pencaharian/penghidupan 2, 4,
8, 10–12, 63, 149, 154, 156, 168

Meksiko 3, 6, 48, 53, 62, 63, 86, 133,
136, 166

Mesir 48, 86, 137, 138
modernisasi pertanian 101–104, 133,
138
Mozambik 69, 136

N

neoliberalisme 109–121, 133, 151, 155,
166, 167
Nikaragua 136

P

pajak 28, 29, 42, 44, 45, 52, 64–67, 70,
73, 77, 88, 89, 133, 166
paksaan ekstraekonomi 38, 73–75
pasar 3, 5, 10, 11, 35, 38, 47, 54, 56, 57,
61, 63, 66–72, 79, 80, 83, 84, 88,
89, 91, 97, 103, 104, 106, 109, 111,
113, 114, 117, 128, 132, 137, 139,
142–144, 148, 156, 159
pembangunan dipandu negara 102,
111, 117, 120
“pembangunan nasional” 88, 101, 117,
120, 135
penyakapan/penggarapan/penyewaan
(*tenancy*) 39, 40, 43–45, 48, 61,
66, 70
penjarahan/perampasan (*dispossession*) 40, 42, 44, 47, 50, 59, 60, 62,
68, 69, 75, 120, 121, 132, 133, 142
perbudakan 7, 29, 37, 43, 44, 48, 54, 55,
59, 60, 63, 73, 76, 77, 91, 139
perdagangan bebas 94–95, 96–98
perkebunan 43, 44, 48, 54, 56, 59–63,
66, 69, 71–73, 91, 136, 165, 168
industrial 71, 93–95
perlawanan 123, 133–141, 153, 162
agraria global 167, 169
sehari-hari 163
pertanian kapitalis 5, 6, 9, 38–44, 49,
52, 63, 69, 75, 80, 83, 89–91, 94,
98, 106, 107, 118, 123–140, 142,
145, 146, 149, 155, 162
pertanian korporat 15, 99, 112, 118,
120, 122
Peru 48, 53, 63, 136

Polanyi 140, 143
Portugis 53, 55, 58, 59, 77
pribumi 45, 53, 59–61, 64–69, 76, 77,
79, 96, 134
privatisasi (kepemilikan pribadi/
swasta) 8, 10, 30–31, 39, 102, 111,
112, 116, 135, 143
produksi berlebih 35, 98, 106, 110–113
produksi komoditas skala kecil (*petty
commodity production*) 5, 44, 72,
74, 128, 142–148, 152, 154–157, 168
Prusia 67–69

R

reproduksi 1, 4, 24–33, 36, 47, 89, 116,
120, 123, 130, 131, 141–156, 160
Revolusi Hijau 9, 101, 103, 105, 107,
147, 148
rezim pangan 120, 121
kedua 97–101, 111–113
pertama 91–96
rumah tangga 4, 10, 25, 27, 32, 75,
86–88, 100, 107, 129, 131, 144, 145,
149, 151–153, 157
Rusia/Uni Soviet 41, 42, 76, 81, 97, 111,
113, 119–121, 127, 133, 136, 166

S

sejarah 2, 10, 13–15, 25, 30, 32, 38, 45,
46, 49, 50, 52, 69, 74, 75, 77, 87,
90, 91, 119, 120, 126, 136
sektor pertanian 83, 84, 88, 89, 104,
107, 108, 128, 132, 154
sosial
diferensiasi 27, 48, 71, 133, 160, 164
gerakan/pertarungan 64, 122, 123,
133, 137
kondisi-kondisi 21, 24, 25, 38, 86
pemilahan sosial/pembagian kerja
5, 22, 23, 26, 27, 31–32, 83, 86–89,
95, 156, 159, 162, 164
produksi 31, 32, 126, 141, 142
relasi 1, 11, 24–32, 36, 63, 77–80, 84,
86, 141, 143, 158, 160

subsistensi (bertahan hidup/
kebutuhan hidup) 1, 4–6, 27, 36,
39, 40, 47, 48, 59–62, 66, 67, 69,
72, 75, 89, 95, 120, 134, 135, 141,
143–145, 153
surplus 6, 27–32, 61, 65, 68, 79, 97
nilai lebih 37, 50
pangan 99, 112
tenaga kerja 29, 32, 37

T
tambang 46, 52, 53, 56, 69, 72, 73, 76,
95
tanah/lahan
hasil (panen) 18, 19, 67, 132
pengambilalihan 60, 66, 68
penutupan akses/perampasan
(*enclosure*) 40, 42, 43, 60, 66, 121,
143
Tanzania 6, 9–12, 104, 144
teknologi 5, 12, 18, 20, 21, 24, 147–148
tenaga kerja 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 17–26,
28–30, 35–41, 44, 46, 48, 50, 51,
53, 54, 59–63, 65, 68–70, 79, 83,
86, 87, 89, 95, 126–131, 133, 135,
141–157, 159, 162, 165, 169
domestik 26–27
eksploitasi 46–48, 80
keluarga 5, 6, 126, 129, 131, 141, 146,
150
pembagian secara sosial 5, 22, 23, 26,
27, 31–32, 83, 86–89, 95, 156, 159
pembagian secara teknis 22
produktivitas 18–20, 27, 79, 90, 98,
107, 131
rezim 48, 61, 72–78, 159, 165
surplus 37
tunakisma 39, 40
upahan 6, 43, 48–50, 61, 62, 95, 126,
129, 130, 141, 143, 146, 148, 150,
153, 156, 165
Tiongkok 3, 63, 66, 67, 73, 81, 112, 114,
133, 136, 139, 150 166
transisi agraria 38–45, 76, 77
tuan tanah 28, 39, 43–45, 52, 61, 62–66,
68, 81, 152

U
Uganda 153
ukuran/luasan usaha tani 5, 9, 83, 98,
129, 147
Undang-Undang Gandum 95, 101, 121
urban/perkotaan 2, 28, 71, 91, 121, 126,
149, 151, 154, 155–156, 158–162,
169, 170
Uruguay 33, 60, 62, 63, 113, 197
usaha tani
keluarga 4–6, 44, 45, 118, 120, 122,
123, 126–132, 141, 142, 147, 153, 154,
158, 166, 170
marginal 4, 62, 74, 147, 148, 150, 153,
154, 156
menengah 118, 145–147, 150, 151, 153,
165, 166, 169
input 9, 11, 19, 20, 89, 101, 103, 104,
170
skala kecil 4, 5, 10, 11, 15, 31, 39, 41,
42, 44, 45, 47, 62, 64, 80, 98, 106,
114, 117, 118, 120, 122, 123, 127,
131–137, 139, 142–146, 148, 149,
151, 152, 156, 158, 159, 162, 166,
168, 170
utang 61–62, 67, 74, 117, 133, 146, 147,
151

V
Vietnam 102, 121, 133, 136, 166

W
World Bank 102, 116, 150

Z
Zambia 69
Zimbabwe 69

Kajian ekonomi politik agraria menyelidiki relasi sosial produksi dan reproduksi, properti dan kekuasaan dalam transformasi agraria, dan bagaimana semua dimensi ini mengalami perubahan. Diilhami oleh teori kapitalisme Karl Marx, penulis buku ini berpendapat bahwa dinamika kelas harus menjadi titik berangkat dari setiap analisis perubahan agraria.

Sebagai sebuah upaya untuk memperkenalkan kajian ekonomi politik agraria, buku ini mencakup penjelasan dan penggunaan berbagai konsep kunci, glosarium dari istilah-istilah analitis, dan pendekatan historis serta kerangka kerja untuk memeriksa perubahan agraria dalam konteks kapitalisme. Penulis tidak berasumsi bahwa pembaca sudah menguasai kajian ekonomi politik sebelum membaca buku ini, tetapi justru mendorong pembaca untuk mempelajarinya lebih lanjut.

Salah satu analisis kelas dalam sejarah agraria yang paling luas, orisinal, dan tajam.

James C. Scott, Yale University

Bernstein menunjukkan bahwa sebuah “buku kecil” bisa menjadi tour de force. Berbagai kajian sarjana dari beberapa dekade digunakan secara cermat dan disingkat secara jelas dalam buku berharga ini.

Barbara Harriss-White, University of Oxford

